



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024;
 - b. bahwa pengaturan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 000.8.2.6/7539/Bangda tanggal 27 Juni 2023 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Banten Tahun 2024;

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Banten untuk periode 4 (empat) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
 - f. BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - h. BAB VIII Penutup.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah Provinsi Banten di tahun ke-dua terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Banten, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Banten, dokumen ini juga merupakan sebagai instrumen dalam mengejawantahkan muatan-muatan target yang terkandung pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Dalam dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022, bahwasannya visi dan misi yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Provinsi Banten yaitu Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan 4 (empat) misi pembangunan meliputi:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Pasal 4

Perangkat Daerah wajib melaksanakan RKPD Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Dasar penyusunan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 7 Juli 2023

Pj.GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang

Pada tanggal 7 Juli 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH

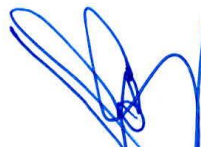
PROVINSI BANTEN,

ttd

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

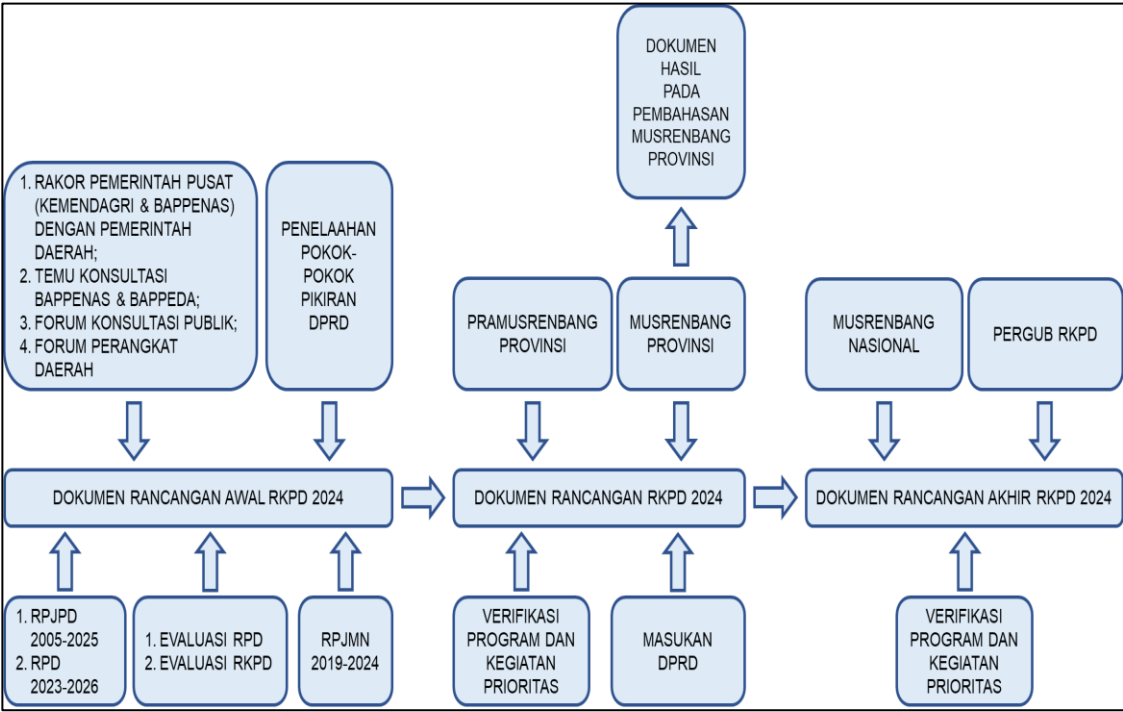
1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah Provinsi Banten di tahun ke-dua terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Banten, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Banten, dokumen ini juga merupakan sebagai instrumen dalam mengefektifkan muatan-muatan target yang terkandung pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Dalam dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022, bahwasannya visi dan misi yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Provinsi Banten yaitu Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan 4 (empat) misi pembangunan meliputi:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Arah kebijakan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 difokuskan pada upaya Pemantapan Daya Saing Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi sebagai Kerangka Tahap Modernisasi. Untuk dapat mencapai fokus pemantapan tersebut, maka penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 ini dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) sebagaimana Gambar 1.1.

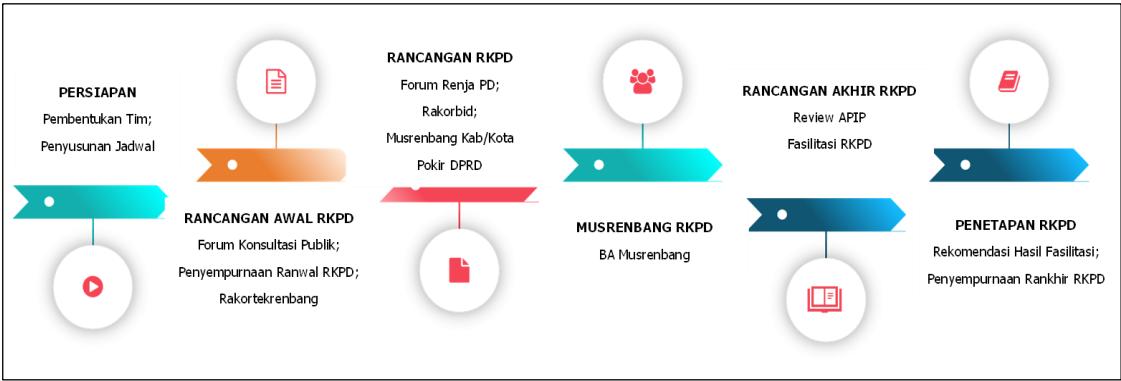


Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD 2024
Provinsi Banten

Lebih daripada itu, dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 ini telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagaimana Gambar 1.2 di bawah. Dalam tahapan tersebut merumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang merupakan analisis kesenjangan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil evaluasi RKPD, analisis arah kebijakan RPD, serta analisis arah kebijakan RPJMN. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut adalah:

1. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan;
2. Masih Rendahnya Pemanfaatan Potensi Komoditas Unggulan;

3. Tingginya Risiko Bencana Alam dan Perubahan Iklim, Serta Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
4. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Belum Optimal; dan
5. Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu.



Gambar 1.2

Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024

Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. Isu-isu strategis daerah Tahun 2024 meliputi:

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Kompetitif;
2. Sumber Daya Ekonomi Unggulan dan Potensial yang Berdaya Ungkit;
3. Mitigasi Bencana, Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan; dan
4. Reformasi Birokrasi dan Demokrasi yang Harmonis.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, dirumuskan fokus penyelenggaraan/prioritas daerah Provinsi Banten yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2024, meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah; dan
5. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu.

Perlu disampaikan juga bahwasannya Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024

ini telah memperhatikan terhadap beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Pada Tahun 2024, terdapat dua peristiwa besar yang berdampak kepada dinamika pembangunan yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Provinsi Banten, sebagai akibat lanjutan resesi ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 2023.

Melalui RKPD Tahun 2024 ini, Pemerintah Daerah Provinsi Banten berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui langkah-langkah inovasi yang memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian beberapa permasalahan di tahun 2024 yang terhimpun melalui beberapa penanganan tematik, meliputi:

- Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting;
- Penanganan Pengangguran Melalui *Link and Match* Pendidikan Vokasi;

- Peningkatan Pemerataan Investasi Melalui Pemanfaatan Jalan Tol Serang-Panimbang;
- Peningkatan Bangga Buatan Indonesia (BBI), Bangga Berwisata Di Indonesia (BBWI) dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN);
- Stabilitas Inflasi Melalui Penguatan Ketahanan Pangan; dan
- Akselerasi Reformasi Birokrasi Berdampak.

Secara umum, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada;
3. RKPD merupakan acuan Pemerintah Provinsi Banten dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara melalui penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan *money follow program*, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD;
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan; dan
5. RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 sebagai dokumen acuan penyusunan RKPD Tahun 2024 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan sekaligus menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD, secara umum, penyusunan RKPD

Provinsi Banten Tahun 2024 juga merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten

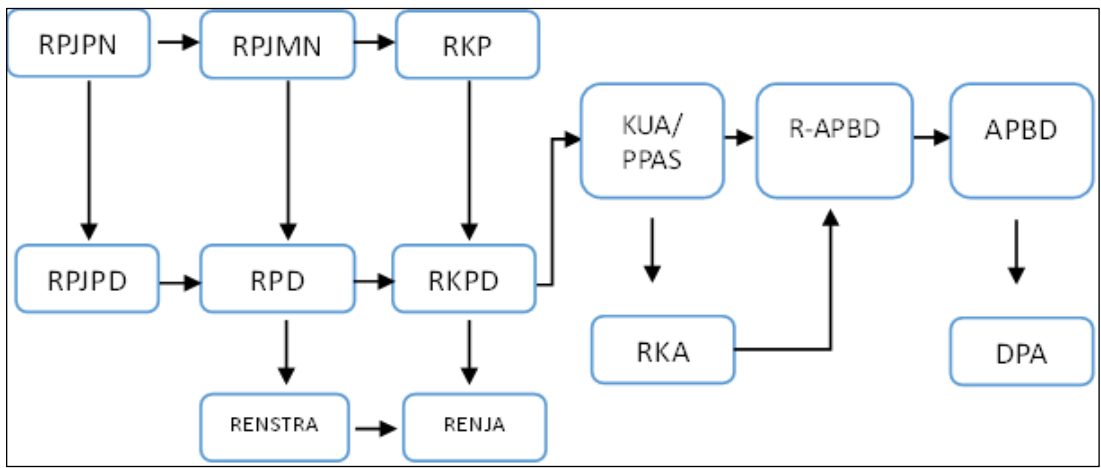
Nomor 26);

20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 59);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanganan Kemiskinan Di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan, disajikan dalam Gambar 1.3.



Gambar 1.3
Hubungan Antar Dokumen

Keterkaitan antar dokumen perencanaan seperti yang ditampilkan pada gambar di atas telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Selain kedudukannya yang strategis, RKPD juga merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif, karena disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN, SDG’s/TPB, RKP serta SPM, yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 disusun dengan maksud menentukan arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024. Adapun tujuannya adalah:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024; dan

3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan nasional dan antara provinsi dengan kabupaten/kota.

1.5 Sistematika RKPD Provinsi Banten Tahun 2024

Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 adalah bentuk perwujudan terhadap rencana pembangunan tahunan di Provinsi Banten yang disusun melalui beberapa pendekatan yang disusun sebagai berikut:

1. Buku I, Narasi RKPD Tahun 2024 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2022 dan realisasi RKPD sampai dengan tahun 2022; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah; serta Arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, sebagai dasar penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2024.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2024.

BAB VIII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024.

2. Buku II, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022, Bab III Pelaksanaan Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, Bab IV Analisis, Permasalahan Dan Solusi, Bab V Penutup.
3. Buku III, Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Kondisi Geografi dan Demografi

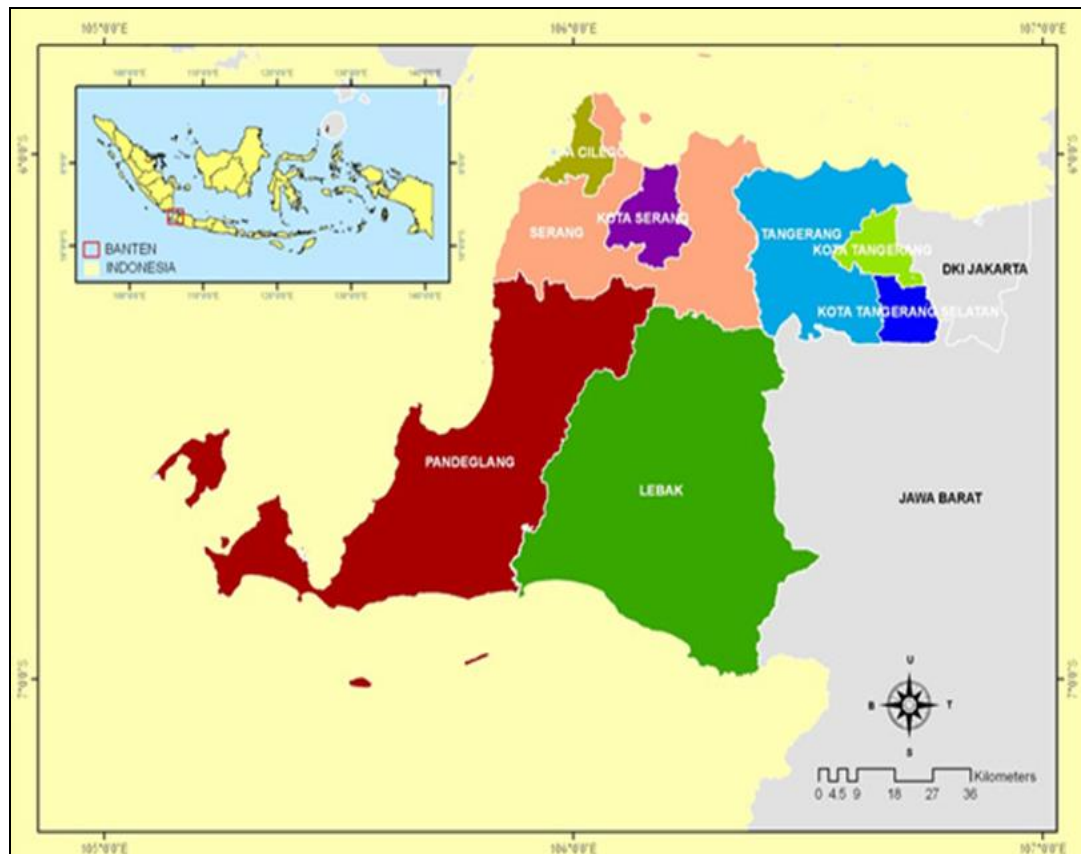
2.1.1.1 Kondisi Geografi

Provinsi Banten memiliki luas wilayah sebesar 8.651,20 km² yang tertulis pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Pada tahun 2019, terdapat pembaruan luasan wilayah administrasi berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Banten memiliki luas 9.662,92 km².

Provinsi Banten tercatat memiliki 2 (dua) Kota yaitu Tangerang dan Cilegon dan 4 (empat) kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang. Provinsi Banten kemudian mengalami pemekaran wilayah sehingga terbentuk dua Kota baru, yaitu Kota Serang dari Kabupaten Serang (UU. Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten) serta Kota Tangerang Selatan dari Kabupaten Tangerang (UU. Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten).

Dari sisi astronomis, wilayah Provinsi Banten berada pada batas 105°01'11"-106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'50"-07°01'01" Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Banten juga terletak di dekat Selat Sunda yang merupakan lintasan perdagangan nasional dan Internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga menjadikan posisi wilayah Provinsi Banten menjadi sangat strategis. Selain itu, Provinsi Banten terletak di ujung Barat Pulau Jawa (berbatasan langsung dengan wilayah Ibu Kota Negara, DKI Jakarta) sehingga menambah posisi geostrategis Provinsi Banten sebagai pintu gerbang jalur perdagangan Pulau Jawa dan Sumatera hingga bagian penting dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional. Provinsi Banten juga berpotensi sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial dengan sumber daya laut yang kaya. Adapun wilayah Provinsi Banten memiliki empat perbatasan yaitu:

- Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.



Gambar 2. 1
Peta Wilayah Provinsi Banten
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Dari sisi topografi, secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0-200 mdpl (meter di atas permukaan laut), dengan rincian letak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Disisi lain, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang dan daerah Lebak Tengah memiliki ketinggian berkisar 201-2.000 mdpl serta daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501-2.000 mdpl yang ditunjang oleh adanya puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Morfologi atau bentuk raut permukaan wilayah memiliki keterkaitan dengan kondisi topografi wilayah itu sendiri. Secara umum, morfologi wilayah Provinsi Banten dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama yaitu morfologi dataran rendah yang

pada umumnya dapat ditemukan di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran dapat didefinisikan sebagai wilayah dengan ketinggian kurang dari 50 mdpl sampai wilayah pantai yang memiliki ketinggian 0-1 mdpl.

Selanjutnya kelompok kedua yaitu morfologi perbukitan bergelombang rendah-sedang yang sebagian besar dapat ditemukan di daerah bagian tengah. Wilayah perbukitan dapat didefinisikan sebagai wilayah dengan ketinggian minimum 50 mdpl. Di Provinsi Banten bagian utara, tepatnya di Kota Cilegon, dapat ditemukan wilayah puncak Gunung Gede dengan ketinggian maksimum 553 mdpl, sedangkan daerah perbukitan di Kabupaten Serang dapat ditemukan di wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung. Wilayah perbukitan juga dapat ditemukan di Kabupaten Pandeglang serta Kabupaten Lebak, lebih tepatnya di wilayah timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi. Wilayah ini memiliki karakteristik litologi yang berbentuk satuan sedimen tua dan terintrusi oleh batuan beku dalam seperti batuan beku diorite, granit, granodiorit dan andesit. Pada daerah di sekitar terobosan batuan baku tersebut kerap terjadi sebuah proses remineralisasi yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti cebakan bijih timah dan tembaga. Kelompok terakhir merupakan morfologi perbukitan terjal yang dapat ditemukan di Kabupaten Lebak, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Serang.

Pada wilayah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang banyak dijumpai potensi sumber daya air karena sebagian besar wilayahnya meliputi kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Secara lebih rinci, Provinsi Banten memiliki enam pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu:

- DAS Ujung Kulon yang meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman Nasional Ujung Kulon dan sekitarnya);
- DAS Cibaliung-Cibareno yang meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak;
- DAS Ciujung-Cidurian yang meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang;

- DAS Rawa Dano yang meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
- DAS Teluk Lada yang meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang; dan
- DAS Cisadane-Ciliwung yang meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Untuk tata air permukaan, wilayah Provinsi Banten sangat bergantung pada sumber daya air khususnya sumber daya air bawah tanah. Sampai saat ini, terdapat 5 satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang telah diidentifikasi, dengan sifat lintas kabupaten/kota, yaitu CABT Labuan, CABT Rawa Dano dan CABT Malingping dan lintas Provinsi meliputi CABT Serang-Tangerang dan CABT Jakarta. Potensi dari masing-masing satuan cekungan air bawah tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Labuan

CABT Labuan Sebagian besar (± 93 persen) mencakup wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (± 7 persen) dengan luas sebesar $\pm 797 \text{ km}^2$. Adapun cekungan air bawah tanah memiliki perbatasan yaitu di bagian barat adalah Selat Sunda, bagian utara dan timur adalah batas pemisah air tanah dan di bagian selatan adalah batas tanpa aliran karena adanya perbedaan sifat fisik batuan. Jumlah imbuhan air bawah tanah bebas (air bawah tanah pada lapisan akuifer tak tertekan/akuifer dangkal) yang berasal dari air hujan terhitung sebesar ± 515 juta m^3 /tahun. Adapun pada tipe air bawah tanah yang terletak pada akuifer tertekan/akuifer dalam, terbentuk di daerah imbuhan yang terletak mulai elevasi di atas 75 mdpl hingga daerah puncak Gunung Condong, Gunung Pulosari dan Gunung Karang;

b. Satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Rawa Dano

CABT Rawa Dano meliputi wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, dengan total luas cekungan lebih kurang 375 km^2 . Adapun cekungan satuan air bawah tanah ini memiliki batas satuan di bagian utara, timur dan selatan yang berupa batas pemisah air bawah tanah yang berimpit dengan batas air permukaan yang melewati Gunung Pasir Pematang Cibatu (420 m), Gunung Ipis (550 m), Gunung Serengean (700 m), Gunung Pule (259 m), Gunung

Kupak (350 m), Gunung Karang (1.778 m), Gunung Asepun (1.174 m) dan Gunung Malang (605 m). Sedangkan perbatasan di bagian barat yaitu Selat Sunda.

Berdasarkan hasil perhitungan imbuhan air bawah tanah, ditemukan bahwa intensitas air hujan yang turun dan membentuk air bawah tanah di wilayah satuan cekungan Rawa Dano berjumlah ± 180 juta m^3/tahun , dimana diantaranya mengalir dari lereng Gunung Karang menuju Cagar Alam Rawa Dano sekitar ± 79 m^3/tahun . Di lain sisi, air bawah tanah yang berupa mata air pada unit akuifer vulkanik purna danau dapat dijumpai di sejumlah 115 lokasi dengan total debit mencapai ± 2.185 m^3/tahun . Sementara itu, pada unit akuifer vulkanik danau pada 89 lokasi, tercatat mencapai debit 367 m^3/tahun . Secara keseluruhan, total debit dari mata air yaitu sebesar ± 2.552 m^3/tahun ;

c. Satuan Sub Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Serang-Cilegon

Satuan sub cekungan ini merupakan bagian dari CABT Serang-Tangerang dimana dari sisi administratif termasuk dalam wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang, dengan cakupan luas wilayah berkisar 1.200 km^2 . Cekungan ini memiliki batas-batas satuan yaitu di bagian utara yaitu laut Jawa, bagian timur yaitu Kali Ciujung, bagian barat yaitu Selat Sunda, sedangkan bagian selatan merupakan batas tanpa aliran.

Berdasarkan hasil perhitungan neraca air, ditemukan bahwa jumlah imbuhan air bawah tanah di wilayah satuan cekungan ini sebesar ± 518 juta m^3/tahun , sedangkan jumlah aliran air bawah tanah pada tipe lapisan akuifer tertekan sekitar ± 13 m^3/tahun , dimana aliran ini berasal dari daerah imbuhan yang terletak di sebelah utara dan barat daya dengan elevasi mulai sekitar 50 mdpl;

d. Satuan Sub Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Tangerang.

Secara administratif, satuan sub cekungan ini mencakup wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan sebagian Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat), dengan total luas wilayah berkisar 1.850 km^2 . Adapun sub cekungan ini memiliki perbatasan yaitu di sebelah Utara adalah Laut Jawa, bagian timur adalah Kali Cisadane, bagian barat adalah Kali Ciujung, serta bagian Selatan yang merupakan kontak dengan

lapisan air akuifer. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa jumlah imbuhan air bawah tanah di seluruh sub CABT Tangerang berkisar ± 311 juta m^3 /tahun, sedangkan jumlah aliran air bawah tanah tertekan terhitung berkisar $\pm 0,9$ juta m^3 /tahun.

Dari sisi iklim, wilayah Provinsi Banten sangat dipengaruhi oleh Gelombang La Nina atau El Nino serta Angin Monsun (*Monsoon Trade*). Pada saat musim penghujan, (bulan November-Maret) cuaca di Provinsi Banten umumnya didominasi oleh angin Barat (berhembus dari Sumatera, Samudra Hindia sebelah selatan India) yang juga bergabung dengan angin dari Asia yaitu melewati Laut Cina Selatan. Sedangkan pada bulan Agustus, umumnya cuaca didominasi oleh angin Timur yang menyebabkan kekeringan yang keras (terlebih lagi apabila sedang berlangsung El Nino) di Provinsi Banten terutama di wilayah bagian pantai Utara. Adapun temperatur di daerah pantai dan perbukitan memiliki kisaran antara 22°C - 32°C , sedangkan suhu di daerah pegunungan dengan ketinggian antara 400-1.350 mdpl mencapai antara 18°C - 29°C .

Pada musim penghujan (bulan September-Mei), Provinsi Banten tercatat memiliki curah hujan tertinggi sebesar 2.712-3.670 mm yang mencakup 50 persen luas wilayah Kabupaten Pandeglang sebelah barat. Sedangkan pada bulan yang sama tercatat bahwa curah 335-453 mm mencakup 50 persen luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50 persen luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang.

Sedangkan pada musim kemarau (bulan April-Desember), curah hujan tertinggi tercatat sebesar 615-833 mm mencakup 50 persen luas wilayah Kabupaten Serang sebelah utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50 persen luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang. Adapun curah hujan terendah pada musim kemarau tercatat sebesar 360-486 mm pada bulan Juni-September dengan luas cakupan sebesar 50 persen luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah selatan dan 15 persen luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Tenggara.

Untuk kondisi kemiringan lahan di Provinsi Banten dikelompokkan menjadi tiga kondisi yang ekstrim yaitu:

- a. Dataran dengan tingkat kemiringan lahan antara 0-15 persen sebagian besar ditemukan di daerah Utara Provinsi Banten, dimana lahan ini menjadi sangat potensial untuk pengembangan seluruh jenis fungsi kegiatan. Dataran dengan tingkat kemiringan ini tidak memerlukan banyak perlakuan khusus pada saat proses pra konstruksi lahan yang akan dibangun. Lahan dengan kemiringan ini umumnya tersebar di sepanjang pesisir Utara Laut Jawa, yaitu sebagian wilayah Serang, sebagian Kabupaten Tangerang bagian utara serta wilayah selatan yaitu di sebagian pesisir Selatan dari Pandeglang hingga Kabupaten Lebak;
- b. Perbukitan dengan tingkat kemiringan < 15 persen dengan tekstur bergelombang rendah-sedang (landai-sedang) sebagian besar dapat ditemukan di bagian utara yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, serta bagian utara Kabupaten Pandeglang;
- c. Daerah perbukitan terjal (kemiringan < 25 persen) dapat ditemui di Kabupaten Lebak, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Serang;
- d. Perbedaan kondisi alami tersebut turut memiliki pengaruh terhadap adanya ketimpangan pembangunan yang semakin signifikan, dimana wilayah sebelah utara memiliki peluang berkembang relatif lebih besar dibandingkan dengan wilayah sebelah Selatan.

Untuk sumber daya tanah secara geografis wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi dua tipe tanah yaitu kelompok tipe tanah sisa atau residu dan kelompok tipe tanah hasil angkutan. Distribusi dari masing-masing tipe tanah ini secara umum dapat ditemukan di wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Masing-masing tipe tanah yang terdapat di wilayah tersebut antara lain yaitu : 1. Aluvial pantai dan sungai; 2. Latosol; 3. Podsolik merah kuning; 4. Regosol; 5. Andosol; 6. Brown forest; dan 7. Glei.

Untuk struktur geologi, Provinsi Banten terdiri dari formasi batuan dengan tebal keseluruhan diperkirakan melebihi 3.500 meter dimana tingkat ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200-800 meter. Formasi dengan satuan tertua yaitu formasi Bojongmanik

yang diperkirakan berusia Miosen akhir, dengan batuan yang terdiri dari perselingan antara batu pasir dan lempung pasir, batu gamping, batu pasir tufaan, konglomerat dan breksi andesit, yang dimana umurnya diduga Pliosen awal. Berikutnya ditemukan Formasi Cipacar yang terdiri dari tuff batu apung berselingan dengan lempung tufaan, konglomerat dan napal glaukonit, yang dimana umurnya diperkirakan Pliosen akhir. Di atas formasi ini yaitu Formasi Bojong yang terdiri dari napal pasir, lempung pasir, batu gamping kokina dan tuff.

Untuk wilayah Provinsi Banten bagian selatan terdiri atas batuan sedimen, batuan gunung api, batuan terobosan dan *alluvium* yang diperkirakan berumur mulai Miosen awal hingga Resen. Adapun satuan tertua daerah ini adalah Formasi Bayah yang berumur Eosen dan terdiri dari tiga anggota yaitu Konglomerat, Batu Lempung dan Batu Gamping. Selanjutnya adalah Formasi Cicaruruep, Formasi Cijengkol, Formasi Citarate, Formasi Cimampang, Formasi Sareweh, Formasi Badui, Formasi Cimancuri dan Formasi Cikotok.

Untuk batuan Gunung Api, dapat dikelompokkan dalam batuan gunung api tua dan muda yang berumur Pleistosen Tua hingga Holosen. Batuan terobosan yang dijumpai bersusunan andesit hingga basal. Tuff Cikasungka diperkirakan berumur Pleistosen, Lava Halimun dan batuan gunung api Kuartir. Pada peta lembar Leuwidamar tersaji singkapan batuan metamorf yang diperkirakan berumur Oligo Miosen dan terdiri dari Sekis, Genes dan Amfibolit yang tersingkap di bagian utara tubuh Granodiorit Cihara. Diorit Kuarsa diperkirakan berumur Miosen tengah hingga akhir, Dasit dan Andesit diperkirakan berumur Miosen akhir serta Basal berumur kuartir. Batuan endapan termuda yaitu aluvium serta endapan pantai yang dapat berupa kerikil, pasir, lempung, rombakan batu gamping, koral bercampur pecahan moluska atau kerang kerangan, gosong pantai dan gamping terumbu.

Pada tahun 2019, terdapat pembaruan luasan wilayah administrasi berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Banten memiliki luas 9.662,92 km² dengan wilayah administrasi Provinsi

Banten terdiri dari 4 (empat) wilayah kabupaten dan 4 (empat) kota dengan rincian luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Pandeglang (2.746,89 km²), Kabupaten Lebak (3.426,56 km²), Kabupaten Tangerang (1.011,86 km²), Kabupaten Serang (1.734,28 km²), Kota Tangerang (153,93 km²), Kota Cilegon (175,50 km²), Kota Serang (266,71 km²), serta Kota Tangerang Selatan (147,19 km²).

Rincian jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada Wilayah Administrasi di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (KM ²)	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
Kabupaten					
1	Pandeglang	2.746,89	35	326	13
2	Lebak	3.426,56	28	340	5
3	Tangerang	1.011,86	29	246	28
4	Serang	1.734,28	29	326	-
Kota					
5	Tangerang	153,93	13	-	104
6	Cilegon	175,50	8	-	43
7	Serang	266,71	6	-	66
8	Tangerang Selatan	147,19	7	-	54
PROVINSI BANTEN		9.662,92	155	1.238	313

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Provinsi Banten memiliki 8 (delapan) wilayah administrasi dengan rincian 4 (empat) pemerintah kabupaten dan 4 (empat) pemerintah kota, 155 (seratus lima puluh lima) kecamatan, 1.238 (satu ribu dua ratus tiga puluh delapan) desa dan 313 (tiga ratus tiga belas) kelurahan. Secara keseluruhan, luas Provinsi Banten adalah 9.662,92 km² (sembilan ribu enam ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua kilometer persegi). Pemerintah kabupaten terdiri dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Serang. Sedangkan pemerintah kota terdiri dari Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kecamatan, 326 (tiga ratus dua puluh enam) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan dengan total luas wilayah sebesar 2.746,89 km² (dua ribu tujuh ratus empat puluh enam koma delapan puluh sembilan kilometer persegi).

Pemerintah Kabupaten Lebak terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan, 340 (tiga ratus empat puluh) desa dan 5 (lima) kelurahan dengan luas wilayah 3.426,56 km² (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima puluh enam kilometer persegi) dan merupakan wilayah paling luas di Provinsi Banten.

Pemerintah Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 246 (dua ratus empat puluh enam) desa dan 28 (dua puluh delapan) kelurahan dengan luas wilayah 1.011,86 km² (satu ribu sebelas koma delapan puluh enam kilometer persegi).

Pemerintah Kabupaten Serang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 326 (tiga ratus dua puluh enam) desa, dan tidak memiliki kelurahan dengan luas wilayah 1.734,28 km² (satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma dua puluh delapan kilometer persegi).

Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, tanpa ada pemerintah desa, dan 104 (seratus empat) kelurahan dengan luas wilayah 153,93 km² (seratus lima puluh tiga koma sembilan puluh tiga kilometer persegi).

Pemerintah Kota Cilegon terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, tanpa ada pemerintah desa, dan 43 (empat puluh tiga) kelurahan dengan luas wilayah 175,50 km² (seratus tujuh puluh lima koma lima puluh kilometer persegi).

Pemerintah Kota Serang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 66 (enam puluh enam) kelurahan dan tidak memiliki desa, dengan luas wilayah 266,71 km² (dua ratus enam puluh enam koma tujuh puluh satu kilometer persegi).

Pemerintah Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, tanpa ada pemerintah desa, dan 54 (lima puluh empat) kelurahan dengan luas wilayah 147,19 km² (seratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh satu kilometer persegi).



Gambar 2. 2

Peta Risiko Multi Bahaya di Provinsi Banten

(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2022-2026)

Provinsi Banten merupakan salah satu daerah dengan kondisi wilayahnya rentan dan berpotensi terhadap bencana. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 kawasan rawan bencana tersebut meliputi rawan banjir, rawan tsunami, rawan gempa bumi, rawan kebakaran hutan dan lahan, rawan cuaca ekstrim, angin topan dan puting beliung, rawan tanah longsor, rawan kekeringan dan rawan gagal teknologi. Sedangkan potensi rawan bencana yang disebabkan non alam/sosial selain gagal teknologi adalah gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, konflik sosial dan teror yang frekuensinya masih relatif kecil.

Potensi bencana Provinsi Banten dikaji berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan belum terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi. Rangkuman kelas indeks bahaya keseluruhan bencana yang berpotensi di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Potensi Luas Bahaya Bencana di Provinsi Banten Tahun 2022

NO	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Banjir	267.980	Sedang
2	Banjir Bandang	36.622	Rendah
3	Covid-19	966.292	Rendah
4	Cuaca Ekstrim	854.445	Sedang
5	Epidemi dan Wabah Penyakit	966.292	Sedang
6	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	106.833	Tinggi
7	Gempa Bumi	966.292	Tinggi
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	407.736	Tinggi
9	Kegagalan Teknologi	30.387	Tinggi
10	Kekeringan	966.292	Tinggi
11	Letusan Gunung api Karang	9.120	Tinggi
12	Letusan Gunung api Pulosari	8.881	Tinggi
13	Likuifaksi	198.533	Tinggi
14	Multi Bahaya	966.292	Tinggi
15	Tanah Longsor	324.095	Tinggi
16	Tsunami	19.556	Tinggi

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menggambarkan potensi luas bencana di Provinsi Banten rata-rata berada pada kelas tinggi. Bencana Covid-19, epidemi dan wabah penyakit, gempa bumi, kekeringan dan multi bahaya merupakan wilayah bencana terluas yang mengintai di wilayah Banten. Dari 16 jenis bencana, yang termasuk kelas bencana tinggi tercatat ada 11 bencana. Potensi ancaman bencana dari pengkajian kelas indeks sampai pada tingkat kabupaten/kota dijabarkan untuk setiap bencana, seperti berikut ini:

a. Banjir

Banjir adalah peristiwa terendamnya daratan karena peningkatan volume air akibat hujan deras, luapan air sungai, atau pecahnya bendungan bahkan hal lainnya. Jika suatu wilayah daratan mengalami peristiwa terendam serta menimbulkan suatu hal yang mengancam bahkan mengganggu aktivitas masyarakat dalam periode waktu tertentu sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda atau perekonomian dan dampak psikologis, maka hal tersebut dapat disebut bencana banjir. Bencana banjir termasuk bencana yang sering terjadi di Indonesia dan beberapa wilayah bagiannya, termasuk Provinsi Banten. Bencana tersebut dapat berpotensi terjadi pada beberapa wilayah didukung oleh kondisi wilayah yang rentan.

Perhitungan potensi genangan bahaya banjir diawali dengan menentukan suatu area daratan yang rawan banjir berdasarkan parameter-parameter standar ukur yang ditetapkan, kemiringan lereng, jarak dari sungai, dan curah hujan. Lebih daripada itu perhitungan potensi genangan bahaya banjir juga dikembangkan melalui suatu pemodelan melibatkan analisis hidrologi untuk memperkirakan besaran debit aliran puncak dengan periode ulang yang ditetapkan, disimulasikan hidraulik untuk memperkirakan ketinggian permukaan air dan analisis medan untuk memperkirakan suatu area yang akan tergenang. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya banjir di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini, data tersebut menjadi data dasar dalam melakukan pengurangan risiko bencana banjir berdasarkan peta bahaya banjir yang ada untuk mengetahui seberapa besar potensi risiko yang perlu diminimalisir.

Tabel 2.3
Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	4.619	Sedang
2	Kota Serang	12.570	Sedang
3	Kota Tangerang	12.851	Sedang
4	Kota Tangerang Selatan	5.499	Sedang
5	Kabupaten Lebak	31.534	Sedang
6	Kabupaten Pandeglang	58.681	Sedang
7	Kabupaten Serang	74.898	Sedang
8	Kabupaten Tangerang	67.327	Sedang
PROVINSI BANTEN		267.980	SEDANG

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya banjir Provinsi Banten memiliki 267.980 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya banjir adalah tinggi dengan luasan paling besar adalah Kabupaten Pandeglang disusul Kabupaten Tangerang.

b. Kekeringan

Jika suatu wilayah mengalami ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhannya untuk keperluan kebutuhan hidup, pertanian dan kegiatan lainnya disebabkan oleh berkurangnya curah hujan di

bawah normal dalam rentang periode waktu tertentu yang terbilang cukup lama serta tidak tersedianya air tanah untuk mencukupi kehidupan masyarakat dan tanaman maka dapat dimungkinkan wilayah tersebut terdampak kekeringan.

Perhitungan potensi bahaya kekeringan dilihat berdasarkan pedoman umum pengkajian risiko bencana. Dalam pedoman tersebut dimuat parameter sebagai alat ukur untuk setiap bencana dan jenis kekeringan yang dikaji berupa kekeringan meteorologis yang merupakan suatu indikasi awal terjadinya suatu bencana kekeringan. Perhitungan yang digunakan mengacu kepada formula analisis indeks kekeringan yang dilakukan menggunakan *Standardized Precipitation Evapotranspiration Index* (SPEI), dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya kekeringan di Provinsi Banten seperti tabel berikut.

Tabel 2.4
Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	17.550	Tinggi
2	Kota Serang	26.671	Sedang
3	Kota Tangerang	15.393	Sedang
4	Kota Tangerang Selatan	14.719	Sedang
5	Kabupaten Lebak	342.656	Tinggi
6	Kabupaten Pandeglang	274.689	Tinggi
7	Kabupaten Serang	173.428	Tinggi
8	Kabupaten Tangerang	101.186	Sedang
PROVINSI BANTEN		966.292	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya kekeringan Provinsi Banten memiliki 966.292 Ha total potensi luas bahaya dengan luasan terluas bahaya kekeringan adalah Kabupaten Lebak. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya kekeringan adalah sedang.

c. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah, khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Cuaca ekstrim ini

memiliki banyak jenisnya, seperti hujan lebat, hujan es, angin kencang, badai taifun dan berbagai jenis lainnya, namun demikian data yang akan disampaikan disini berdasarkan cuaca ekstrim yang lebih dititikberatkan kepada jenis angin kencang.

Bencana cuaca ekstrim jenis angin kencang ini ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif yang beragam dan menjadi pemantik terjadinya angin kencang. Perhitungan cuaca ekstrim ini didasarkan pada distribusi klimatologi, tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi, kondisi atmosfer dan bahkan keterbukaan lahan yang tinggi. Biasanya wilayah dengan dataran landai yang diperparah dengan keterbukaan lahan yang tinggi dapat berpotensi terdampak angin kencang. Oleh karena itu, perhitungan potensi bahaya cuaca ekstrem dilihat berdasarkan parameter keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan.

Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter di atas, diperoleh potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	13.667	Sedang
2	Kota Serang	26.671	Sedang
3	Kota Tangerang	15.393	Sedang
4	Kota Tangerang Selatan	14.719	Sedang
5	Kabupaten Lebak	279.216	Sedang
6	Kabupaten Pandeglang	253.606	Sedang
7	Kabupaten Serang	149.987	Sedang
8	Kabupaten Tangerang	101.186	Sedang
PROVINSI BANTEN		854.445	SEDANG

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya cuaca ekstrim Provinsi Banten memiliki 854.445 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya cuaca ekstrim adalah sedang. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

d. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng yang bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Penjelasan ini dapat disederhanakan dengan lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah.

Dalam pengkajian indeks bahaya, wilayah yang berpotensi terdampak bencana tanah longsor dapat dilihat berdasarkan peta zona kerentanan gerakan tanah dari PVMBG disesuaikan dengan kemiringan lereng. Kondisi lereng yang curam berpotensi lebih tinggi terdampak longsor dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai, namun demikian zona gerakan tanah berpotensi terjadi di wilayah dengan kemiringan lereng tinggi di atas 15% yang termasuk ke dalam area bahaya. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	4.372	Tinggi
2	Kota Serang	2.133	Tinggi
3	Kabupaten Lebak	219.866	Tinggi
4	Kabupaten Pandeglang	59.538	Tinggi
5	Kabupaten Serang	38.186	Tinggi
PROVINSI BANTEN		324.095	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya tanah longsor Provinsi Banten memiliki 324.095 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya tanah longsor adalah tinggi dan wilayah paling besar potensinya adalah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh Kabupaten/Kota terdampak.

e. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim merupakan gelombang tinggi yang terjadi karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi menimbulkan bencana, walaupun Indonesia bukan termasuk kedalam daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis ini dapat memberikan pengaruh kuat terjadinya suatu angin kencang. Sementara itu abrasi atau dikenal juga sebagai erosi pantai adalah fenomena alam berupa proses terjadinya pengikisan pantai oleh gelombang laut dan arus laut yang tinggi dimana sifatnya dapat merusak keseimbangan garis pantai.

Perhitungan potensi bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi dilihat berdasarkan parameter tutupan vegetasi sekitar pantai, bentuk garis pantai serta tipologi pantainya dan tidak lupa parameter tinggi gelombang dan kecepatan arus yang dapat terjadi di pantai. Parameter-parameter tersebut digunakan bertujuan untuk melihat tingkat keterpaparan wilayah daratan pesisir terhadap bahaya. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	2.618	Tinggi
2	Kota Serang	6.578	Tinggi
3	Kabupaten Lebak	10.912	Tinggi
4	Kabupaten Pandeglang	33.908	Tinggi
5	Kabupaten Serang	27.638	Tinggi
6	Kabupaten Tangerang	25.178	Tinggi
PROVINSI BANTEN		106.833	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi Provinsi Banten memiliki 106.833 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah tinggi dimana Pandeglang yang memiliki wilayah terluas sebesar 33.908 Ha. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut

diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh Kabupaten/Kota terdampak.

f. Gempa Bumi

Bencana gempabumi merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor geologi, dimana peristiwa ini terjadi akibat pelepasan energi berupa guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, puing batuan maupun aktivitas gunung api.

Perhitungan potensi bahaya gempa bumi dilihat berdasarkan parameter dasar pengkajian risiko bencana, yaitu kelas topografi, intensitas guncangan di batuan dasar, intensitas guncangan di permukaan. Metode kajian untuk gempabumi yang dijelaskan ini menggunakan data guncangan di batuan dasar yang dikonversi menjadi data guncangan di permukaan, karena gempa bumi dengan magnitudo yang tinggi di lokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang lebih besar dibandingkan gempa dengan magnitudo yang rendah di lokasi yang dangkal. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	17.550	Tinggi
2	Kota Serang	26.671	Tinggi
3	Kota Tangerang	15.393	Tinggi
4	Kota Tangerang Selatan	14.719	Tinggi
5	Kabupaten Lebak	342.656	Tinggi
6	Kabupaten Pandeglang	274.689	Tinggi
7	Kabupaten Serang	173.428	Tinggi
8	Kabupaten Tangerang	101.186	Tinggi
PROVINSI BANTEN		966.292	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya gempa bumi Provinsi Banten memiliki 966.292 Ha total potensi luas bahaya dimana seluruh wilayah termasuk kategori tinggi dan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak yang memiliki luasan paling besar untuk terdampak gempa bumi. Potensi luas bahaya dan

kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

g. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kondisi daerah di wilayah Provinsi Banten berpotensi terjadi pada kawasan yang vegetasinya rawan untuk terbakar misalnya pada kawasan gambut, hal ini dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti kekeringan yang berkepanjangan pada musim kemarau bahkan kepada pembukaan lahan oleh manusia melalui pembakaran.

Perhitungan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dilihat berdasarkan parameter jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah. Pada data yang akan disajikan di bawah merupakan hasil pendekatan statistic yang memperhitungkan probabilitas kejadian kebakaran hutan dan lahan menggunakan metode *Weight of Evidence* (WoE). Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	3.540	Tinggi
2	Kota Serang	3.100	Rendah
3	Kota Tangerang Selatan	68	Rendah
4	Kabupaten Lebak	203.912	Tinggi
5	Kabupaten Pandeglang	152.270	Tinggi
6	Kabupaten Serang	44.674	Tinggi
7	Kabupaten Tangerang	172	Sedang
PROVINSI BANTEN		407.736	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Banten memiliki 407.736 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh Kabupaten/Kota bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

h. Banjir Bandang

Banjir bandang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan bencana banjir, namun demikian banjir bandang ini dilihat berdasarkan sudut pandang terjadinya suatu bencana banjir secara tiba-tiba akibat meluapnya debit air yang melebihi kapasitas aliran dari suatu sungai oleh intensitas hujan tinggi yang sering membawa runtuh bendungan alam atau material longsoran.

Dalam pengkajian potensi bahaya, parameter bahaya banjir bandang dikaji berdasarkan parameter sungai utama, topografi, dan potensi longsor di hulu sungai (longsoran yang memiliki kelas tinggi). Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya banjir bandang di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Serang	390	Rendah
2	Kota Tangerang	65	Rendah
3	Kota Tangerang Selatan	250	Rendah
4	Kabupaten Lebak	16.255	Rendah
5	Kabupaten Pandeglang	9.561	Rendah
6	Kabupaten Serang	9.800	Rendah
7	Kabupaten Tangerang	301	Rendah
PROVINSI BANTEN		36.622	RENDAH

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya banjir bandang Provinsi Banten memiliki 36.622 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya banjir bandang adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak.

i. Epidemi dan Wabah Penyakit

Epidemi dan Wabah Penyakit (EWP) merupakan suatu potensi ancaman bencana non-alam yang diakibatkan oleh kejadian suatu penyakit menular pada wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu yang dapat menimbulkan dampak risiko kematian dan gangguan aktivitas masyarakat. Beberapa jenis penyakit yang termasuk kedalam EWP yang dikaji pada data yang akan disampaikan di

bawah berupa penyakit malaria, demam berdarah, campak, difteri dan hepatitis.

Perhitungan potensi bahaya bencana epidemi dan wabah penyakit dilihat berdasarkan terjadinya kepadatan atau prevalensi dari bahaya EWP. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Potensi Luas Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit
di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	17.550	Sedang
2	Kota Serang	26.671	Sedang
3	Kota Tangerang	15.393	Sedang
4	Kota Tangerang Selatan	14.719	Sedang
5	Kabupaten Lebak	342.656	Sedang
6	Kabupaten Pandeglang	274.689	Sedang
7	Kabupaten Serang	173.428	Sedang
8	Kabupaten Tangerang	101.186	Sedang
PROVINSI BANTEN		966.292	SEDANG

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya epidemi dan wabah penyakit Provinsi Banten memiliki 966.292 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya epidemi dan wabah penyakit adalah rendah. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

j. Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi merupakan semua kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.

Perhitungan potensi bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter kapasitas industri dan jenis industri. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	1.534	Tinggi
2	Kota Serang	194	Tinggi
3	Kota Tangerang	1.273	Rendah
4	Kota Tangerang Selatan	211	Rendah
5	Kabupaten Lebak	72	Rendah
6	Kabupaten Pandeglang	10	Sedang
7	Kabupaten Serang	19.312	Tinggi
8	Kabupaten Tangerang	7.781	Tinggi
PROVINSI BANTEN		30.387	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya kegagalan teknologi Provinsi Banten memiliki 30.387 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya kegagalan teknologi adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

k. Tsunami

Tsunami merupakan fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 60 km dan magnitude lebih dari 7 SR. Tsunami juga dapat diakibatkan oleh longsor dasar laut, letusan gunung berapi dasar laut atau jatuhnya meteor ke laut.

Perhitungan potensi bahaya tsunami dilihat berdasarkan parameter mencangkup terhadap ketinggian maksimum tsunami, mempertimbangkan mekanisme sumber, lokasi, penjalaran gelombang, perambatan gelombang tsunami serta ketinggian genangan tsunami. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya tsunami di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	877	Tinggi
2	Kota Serang	235	Rendah
3	Lebak	3.002	Tinggi
4	Kabupaten Pandeglang	11.116	Tinggi
5	Kabupaten Serang	3.229	Tinggi
6	Kabupaten Tangerang	1.097	Rendah
PROVINSI BANTEN		19.556	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya tsunami Provinsi Banten memiliki 19.556 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya tsunami adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

1. COVID-19

Sejak akhir Tahun 2019, dunia dilanda Pandemic *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang dimulai dari wilayah Wuhan, Tiongkok. Hingga tahun ini, pandemi masih melanda berbagai wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Tollefson (2020) dalam tulisannya yang berjudul *‘why deforestation and extinctions make pandemics more likely’* pada jurnal nature menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara kerusakan lingkungan dan potensi wabah baru. Kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, dan perdagangan satwa langka dapat meningkatkan risiko berpindahnya patogen (bakteri, virus, dan sejenisnya) dari hewan ke manusia. Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah yang sangat dekat dengan lokasi ibu kota dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Bahkan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta secara *de facto* berada di Provinsi Banten. Oleh karenanya, Provinsi Banten memiliki risiko yang cukup tinggi dari potensi terpapar wabah yang terjadi di wilayah atau negara lain.

Penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh COVID-19 merupakan pandemi global dan telah dinyatakan oleh WHO, sehingga

merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala fokus kebijakan dan rekomendasi pencegahan harus diprioritaskan. Apalagi wabah penyakit COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara berdasarkan bukti ilmiah (Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020).

Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan penilaian risiko meliputi analisis bahaya, paparan/kerentanan dan kapasitas untuk melakukan karakteristik risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Hasil dari penilaian risiko ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan rekomendasi penanggulangan kasus COVID-19.

Perhitungan potensi bahaya COVID-19 dilihat berdasarkan parameter seperti batas administrasi, peta kerawanan kecamatan dan sebaran pada beberapa area (permukiman, transportasi, perkantoran, tempat ibadah, akomodasi, dll). Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya COVID-19 di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Potensi Luas Bahaya COVID-19 di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	17.550	Rendah
2	Kota Serang	26.671	Rendah
3	Kota Tangerang	15.393	Rendah
4	Kota Tangerang Selatan	14.719	Rendah
5	Kabupaten Lebak	342.656	Rendah
6	Kabupaten Pandeglang	274.689	Rendah
7	Kabupaten Serang	173.428	Rendah
8	Kabupaten Tangerang	101.186	Rendah
PROVINSI BANTEN		966.292	RENDAH

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya COVID-19 Provinsi Banten memiliki 966.292 Ha total potensi luas bahaya. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

m. Likuefaksi

Likuefaksi merupakan hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh akibat adanya perubahan tegangan pada tanah, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur atau penurunan atau pergerakan tanah secara tiba-tiba menyebabkan daya dukung pondasi menurun dan terjadi kerusakan infrastruktur yang lebih besar akibatnya dapat berupa longsor.

Perhitungan potensi bahaya likuefaksi ini merujuk pada data yang disesuaikan oleh Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Beberapa parameter yang dipertimbangkan berupa faktor kegempaan berupa penentuan periode ulang dan nilai percepatan tanah puncak serta faktor geologi mencakup kepada geomorfologi, jenis litologi (tanah/batuan) dan hidrologi. Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya likuefaksi dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh besaran potensi luas dan kelas bahaya likuefaksi di Provinsi Banten seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.15
Potensi Luas Bahaya Likuefaksi di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	2.532	Tinggi
2	Kota Serang	4.806	Tinggi
3	Kota Tangerang	8.095	Sedang
4	Kota Tangerang Selatan	4.032	Sedang
5	Kabupaten Lebak	16.021	Tinggi
6	Kabupaten Pandeglang	70.744	Tinggi
7	Kabupaten Serang	45.833	Tinggi
8	Kabupaten Tangerang	46.469	Tinggi
PROVINSI BANTEN		198.533	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya likuefaksi Provinsi Banten memiliki 198.533 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya likuefaksi adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

n. Letusan Gunung api

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar, gunung api yang tergolong aktif adalah yang masih dimungkinkan untuk dapat meletus. Bahaya gunung api dibedakan menjadi bahaya primer (langsung) dan bahaya sekunder (tidak langsung). Bahaya primer merupakan bahaya yang diakibatkan secara langsung oleh produk erupsi gunung api, yaitu: aliran lava, awan panas, jatuhnya piroklastik (lontaran batu pijar dan hujan abu), gas beracun, dan lahar erupsi. Sedangkan, bahaya sekunder merupakan bahaya yang diakibatkan secara tidak langsung oleh produk erupsi gunung api, yaitu: lahar dan longsoran gunung api.

Area sekitar keberadaan gunung berapi aktif merupakan wilayah rawan terhadap bencana letusan gunung api. Perhitungan potensi bahaya likuefaksi ini merujuk pada data yang mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh PVMBG menggunakan metode pembobotan zona Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api, masing-masing zona KRB (Zona I, II, III) terdiri dari aliran dan zona jatuh yang diberikan nilai bobot sesuai tingkat kerawanannya. Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya letusan gunung api dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh besaran potensi luas dan kelas bahaya letusan gunung api di Provinsi Banten meliputi: a) letusan gunung api Karang dan b) letusan gunung api Pulosari seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.16
Potensi Luas Bahaya Letusan Gunung api Karang
di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
1	Kabupaten Pandeglang	4.639	Tinggi
2	Kabupaten Serang	4.480	Tinggi
PROVINSI BANTEN		9.120	TINGGI

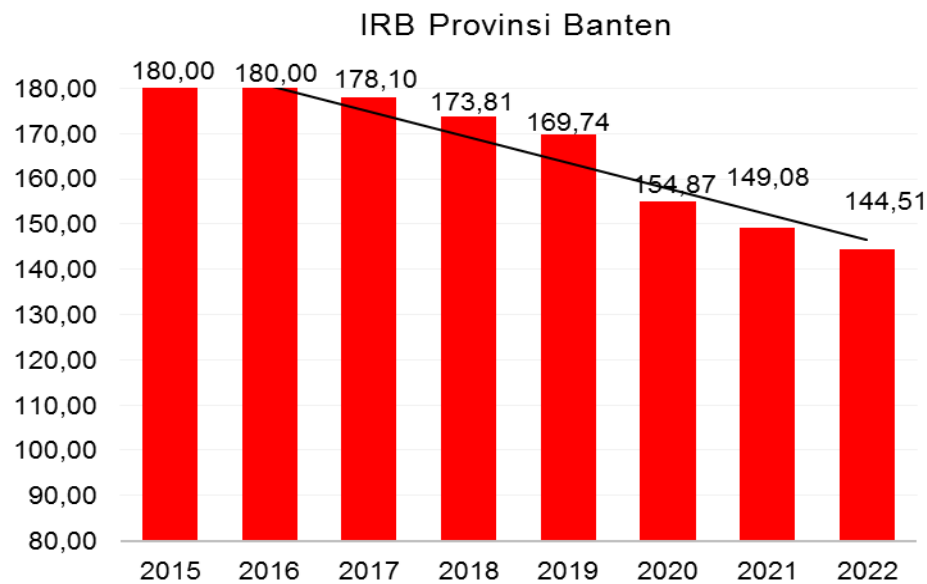
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel 2.17
Potensi Luas Bahaya Letusan Gunung api Pulosari
di Provinsi Banten

KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
	TOTAL LUAS (Ha)	KELAS
Kabupaten Pandeglang	8.881	Tinggi
PROVINSI BANTEN	8.881	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya letusan gunung api di Provinsi Banten memiliki luasan yang berbeda-beda tergantung dari gunung api yang ada. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya letusan gunung api di Provinsi Banten adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.



Gambar 2. 3
Indeks Risiko Bencana Provinsi Banten 2015-2022 (Indeks)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Indeks Risiko Bencana Provinsi Banten juga terlihat mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan nilai 178,10 indeks hingga 2022 menjadi 144,51 indeks turun sebesar 33,59 indeks. Hal ini menandakan bahwa kerentanan terhadap risiko kebencanaan di Provinsi Banten semakin berkurang dan literasi sosial kebencanaan terus mengalami peningkatan namun masih perlu perhatian karena masih pada nilai berisiko tinggi.

Adapun indeks risiko bencana pada masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang paling besar indeks risiko

bencana adalah wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang, serta wilayah paling rendah indeks risiko bencana adalah Kota Tangerang Selatan, tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 18
Data Indeks Risiko Bencana per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2015-2022 (Indeks)

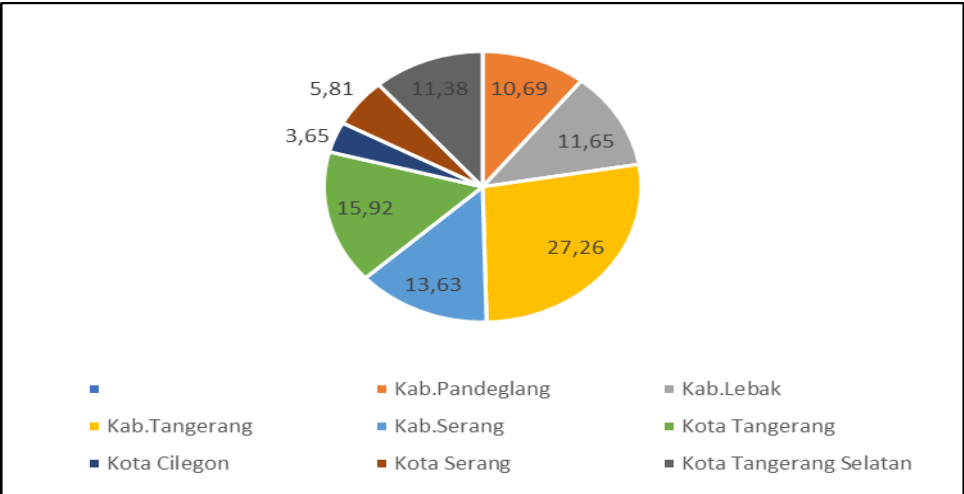
NO	IRB KAB/KOTA DI BANTEN	TAHUN							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Pandeglang	215,20	215,20	215,20	215,20	177,46	177,46	215,20	203,05
2	Kabupaten Lebak	215,20	215,20	215,20	215,20	182,04	182,04	215,20	199,57
3	Kabupaten Serang	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	176,14	203,20	156,20
4	Kabupaten Tangerang	200,80	185,63	185,63	170,15	146,93	146,93	200,80	154,18
5	Kota Serang	184,80	184,80	168,56	168,56	168,56	168,56	184,80	130,45
6	Kota Cilegon	182,40	182,40	164,32	147,21	128,15	121,23	182,40	116,80
7	Kota Tangerang	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	132,80	136,00	115,97
8	Kota Tangerang Selatan	102,40	102,40	102,40	102,40	96,61	87,44	102,40	79,86
PROVINSI BANTEN		180,00	180,00	178,10	173,81	169,74	154,87	149,08	144,51

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

2.1.1.2 Kondisi Demografi

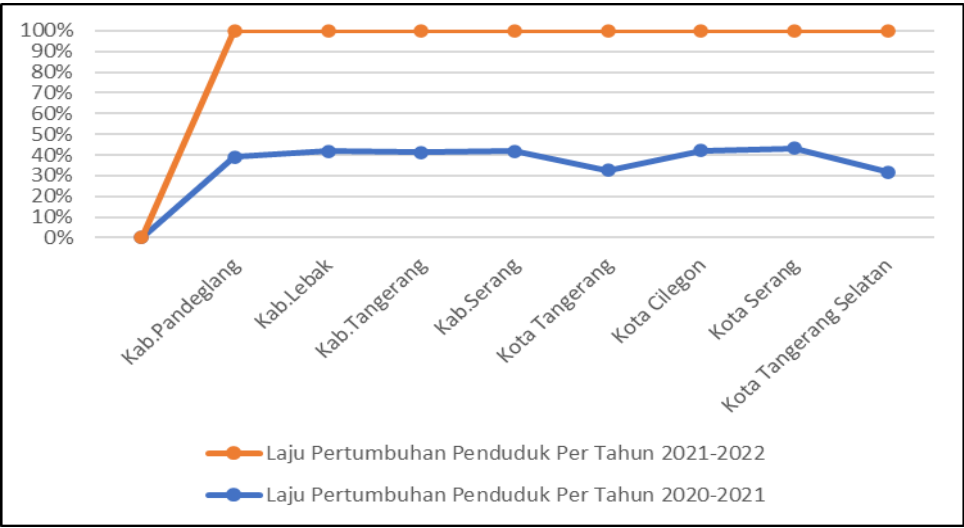
Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Provinsi Banten pada bulan September tahun 2020 adalah 11,9 juta jiwa. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 12,2 juta jiwa yang terdiri atas 6,24 juta jiwa penduduk laki-laki dan 6.01 juta jiwa penduduk perempuan sesuai hasil proyeksi interim 2020-2023 (pertengahan tahun/juni). Jumlah penduduk perempuan di Provinsi Banten adalah 49,06 persen dari jumlah penduduk Provinsi Banten. Dari informasi tersebut, diperoleh bahwa rasio jenis kelamin penduduk Banten sebesar 104. Dengan kata lain, terdapat 104 orang laki-laki per 100 orang perempuan di Provinsi Banten pada tahun 2022.

Kepadatan penduduk di Provinsi Banten tahun 2022 mencapai 1.310 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di delapan kabupaten/ kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Tangerang dengan kepadatan sebesar 10.825 jiwa/km2 dan terendah di Kabupaten Lebak sebesar 433 jiwa/ km2.



Gambar 2. 4
 Persentase Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2022 (Persen)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Menurut data Tahun 2022, Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk yang tersebar pada 8 (delapan) kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Tangerang, adapun rincian jumlah penduduk kabupaten/kota sebagai berikut: Jumlah penduduk Kabupaten Lebak berjumlah 1.433.853 penduduk (ribu), Kabupaten Pandeglang berjumlah 1.307 090 penduduk (ribu), Kabupaten Serang berjumlah 1.678.915 penduduk (ribu), Kabupaten Tangerang berjumlah 3.352.472 penduduk (ribu), Kota Tangerang berjumlah 1.930.556 penduduk (ribu), Kota Cilegon berjumlah 450.271 penduduk (ribu), Kota Serang berjumlah 720.362 penduduk (ribu) dan Kota Tangerang Selatan berjumlah 1 378 466 penduduk (ribu).



Gambar 2. 5
 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten
 Tahun 2020-2021 dan 2021-2022 (Persen)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Pada gambar di atas dapat terlihat laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2022 di Provinsi Banten adalah sebesar 1,66 persen. Jika merujuk pada data tahun 2022, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Banten adalah 50,94 persen dari jumlah penduduk Banten.

Penambahan jumlah penduduk ini akan ditandai dengan adanya bonus demografi tentu dapat menjadi kesempatan dan tantangan tersendiri sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Bonus demografi yang dimiliki dapat ditunjang dengan kenaikan cakupan pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat di Provinsi Banten (pendidikan dapat diakses secara merata dengan kualitas yang mumpuni) serta peningkatan kesempatan bekerja dengan membuka lowongan pekerjaan di Provinsi Banten.

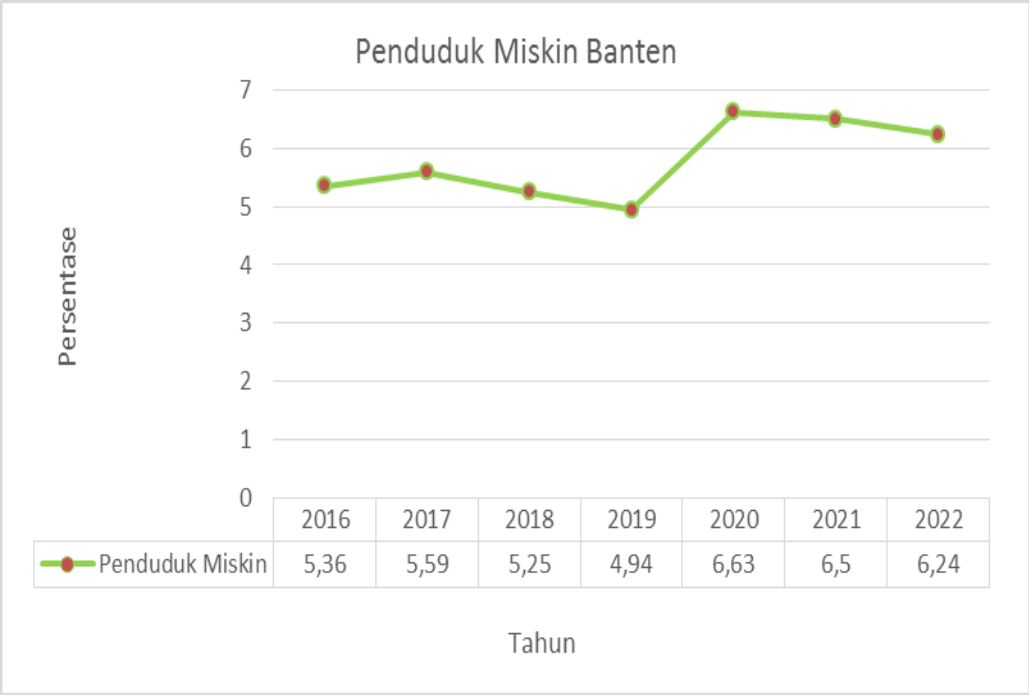
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita. Tingkat kemiskinan yang datanya diperoleh dari survei SUSENAS menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, indikator pendapatan perkapita yang diperoleh dari data PDRB wilayah menunjukkan besarnya rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah dalam waktu satu tahun. Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan juga ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah. Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan pendapatan antar penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini dan ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson.

2.1.2.1 Kondisi Kemiskinan

A. Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin pada September 2022 sebesar 6,24 persen meningkat dibandingkan kondisi Maret 2022 yang sebesar 6,16 persen (naik 0,08 persen poin) dan turun 0,26 persen poin terhadap September 2021 (6,50 persen).

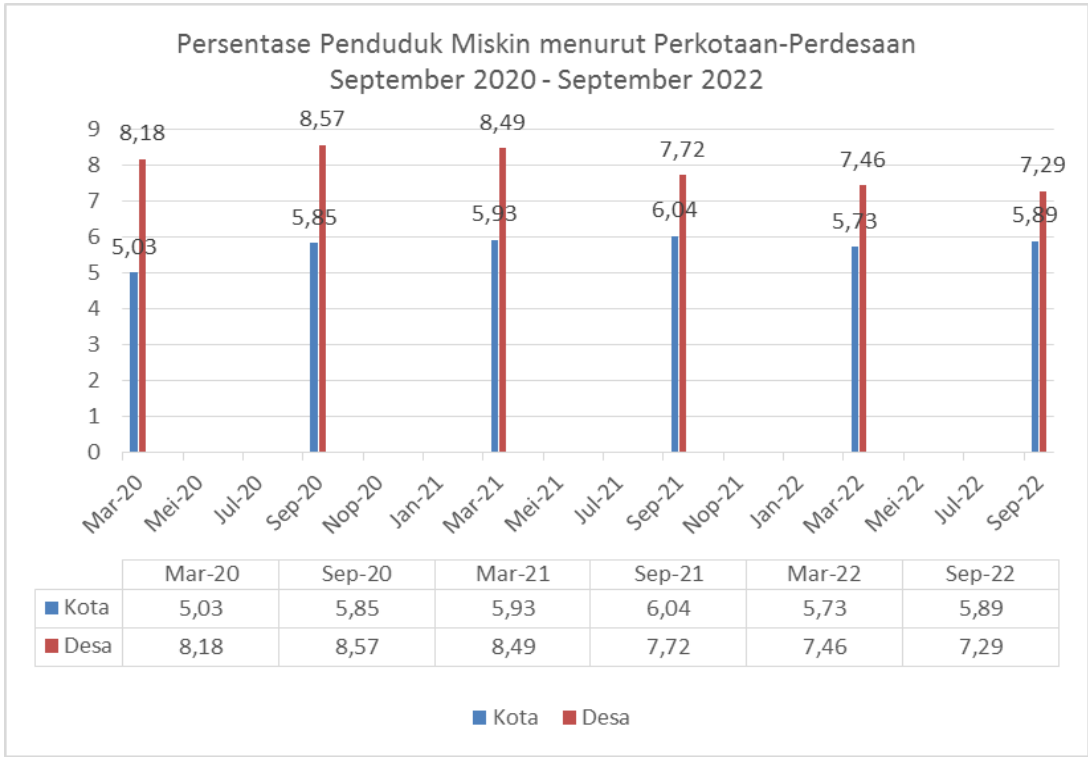


Gambar 2. 6
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Banten
Tahun 2016-2022 (Persen)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 829,66 ribu orang, naik 15,64 ribu orang terhadap Maret 2022 dan turun 22,62 ribu orang terhadap September 2021.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 5,73 persen, naik menjadi 5,89 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 7,46 persen, turun menjadi 7,29 persen pada September 2022.

Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 19,72 ribu orang (dari 566,49 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 586,21 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 4,09 ribu orang (dari 247,54 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 243,45 ribu orang pada September 2022).



Gambar 2. 7
Persentase Penduduk Miskin menurut Perkotaan-Perdesaan
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp598.748,-/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.368,- (72,38 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp165.380,- (27,62 persen).

Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 4,42 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.646.466,-/rumah tangga miskin/bulan

Kenaikan persentase kemiskinan di Provinsi Banten juga dirasakan oleh daerah lainnya di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan rata-rata persentase kemiskinan nasional, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,57 persen per September 2022. Angka ini menurun 0,03 poin dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 9,54 persen. Angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan persentase kemiskinan di Provinsi Banten 6,24 persen.

Tabel 2. 19
 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di
 Provinsi Banten Tahun 2020-2022

KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (Persen)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	120,44	131,43	114,65	9,92	10,72	9,32
Kab Lebak	120,83	134,75	117,22	9,24	10,29	8,91
Kab Tangerang	242,16	272,35	270,52	6,23	7,12	6,92
Kab Serang	74,80	83,09	75,44	4,94	5,49	4,96
Kota Tangerang	118,22	134,24	132,88	5,22	5,93	5,77
Kota Cilegon	16,31	18,89	16,46	3,69	4,24	3,64
Kota Serang	42,24	47,91	42,56	6,06	6,79	5,94
Kota Tangerang Selatan	40,99	44,57	144,29	2,29	2,57	2,50
Provinsi Banten	775,99	867,23	814,02	5,92	6,66	6,16

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Dalam nilai nominal, persentase kemiskinan di tahun 2022 yang sebesar 6,16 persen setara dengan 829,66 ribu penduduk yang termasuk ke dalam penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin terbanyak didapatkan di Kabupaten Tangerang sementara jumlah penduduk miskin terendah tercatat di Kota Cilegon. Namun apabila dilihat berdasarkan persentase kemiskinan yang sudah direlatifkan terhadap jumlah penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota, angka kemiskinan paling tinggi berlangsung di Kabupaten Pandeglang dan angka kemiskinan terendah berada di Kota Tangerang Selatan.

Pada 2022 terdapat arahan Presiden terkait masalah kemiskinan dengan dikeluarkannya Surat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dimana BPS mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai mereka yang hidup di bawah US\$ 1,9 per hari (World Bank). Adapun kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten sebesar 2,67% atau 348,45 ribu jiwa.

B. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan

gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2022 sampai dengan September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,025 pada Maret 2022 menjadi 0,790 pada September 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan juga turun dari 0,270 menjadi 0,157 pada periode yang sama.

Tabel 2. 20
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah
September 2021-September 2022

TAHUN	PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2021	1,137	1,358	1,197
Maret 2022	0,960	1,220	1,030
September 2022	0,710	1,030	0,790
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
September 2021	0,324	0,393	0,343
Maret 2022	0,250	0,320	0,270
September 2022	0,120	0,270	0,160

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,710, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,030. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,120, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,270.

C. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 2.17 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2021 sampai dengan Maret 2022.

Selama Maret 2022-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,98 persen, yaitu dari 570 ribu rupiah per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi 598 ribu rupiah per kapita per bulan pada September 2022.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada September 2022, komoditi makanan menyumbang sebesar 72,38 persen pada garis kemiskinan.

Tabel 2. 21
Perkembangan Garis Kemiskinan Maret 2022-September 2022

DAERAH/TAHUN	GARIS KEMISKINAN (RP/KAPITA/BULAN)		
	MAKANAN	BUKAN MAKANAN	TOTAL
Perkotaan			
Mar-21	390.893	158.218	549.111
Sep-21	405.526	161.474	567.000
Mar-22	421.343	166.426	587.768
Perubahan Mar'21-Mar'22(%)	7,79	5,19	7,04
Perubahan Sep'21-Mar'22(%)	3,90	3,07	3,66
Perdesaan			
Mar-21	364.081	121.444	485.525
Sep-21	369.466	127.748	497.213
Mar-22	387.733	133.579	521.311
Perubahan Mar'21-Mar'22(%)	6,50	9,99	7,37
Perubahan Sep'21-Mar'22(%)	4,94	4,56	4,85
Total			
Sep-21	395.258	152.225	547.483
Mar-22	412.182	158.185	570.368
Sep-22	433.368	165.380	598.748
Perubahan Sep'21-Sep'22(%)	9,64	8,64	9,36
Perubahan Mar'22-Sep'22(%)	5,14	4,55	4,98

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp598.748,-/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.368,- (72,38 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp165.380,- (27,62 persen).

Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 4,42 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin

secara rata-rata adalah sebesar Rp2.646.466,-/rumah tangga miskin/bulan.

Tabel 2. 22
Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Provinsi Banten,
2021 dan 2022

Karakteristik Rumah Tangga	2021		2022
	Maret	September	Maret
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang)	4,98	4,89	4,86
Persentase kepala rumah tangga wanita	10,85	14,61	12,68
Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun)	51,59	49,73	47,59
Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun)	5,88	5,63	6,56
Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%)			
a. Tidak tamat SD	25,54	30,97	21,48
b. SD	51,01	52,49	44,84
c. SMP	12,45	9,93	11,60
d. SMA	10,15	6,61	20,97
e. PT	0,85	-	1,11
Sumber penghasilan utama rumah tangga (%)			
a. Tidak Bekerja	15,93	15,85	13,91
b. Pertanian	42,18	37,00	33,68
c. Industri	7,82	8,11	12,83
d. Lainnya	34,08	39,04	39,58

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Banten antara lain :

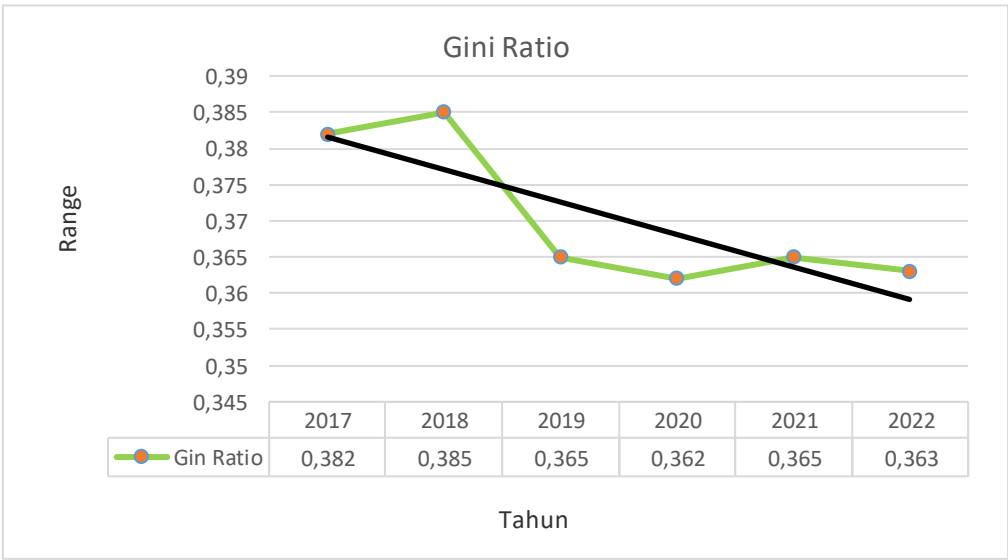
1. Kenaikan harga BBM pada Bulan September 2022;
2. Inflasi umum periode Maret 2022-September 2022 sebesar 3,08 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi umum periode September 2021-Maret 2022 sebesar 2,70 persen;
3. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2022 tumbuh sebesar 6,15 persen (y-on-y), meningkat dibandingkan triwulan I 2022 yang tumbuh sebesar 2,92 persen;
4. Nilai Tukar Petani (NTP) September 2022 sebesar 99,97 meningkat dibanding Maret 2022 sebesar 99,03;
5. Pada Agustus 2022, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,09 persen. Dimana di daerah perkotaan sebesar 8,13 persen, lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan sebesar 7,95 persen;

6. Upah nominal buruh tani pada September 2022 Rp. 67.910,- per hari naik sebesar 1,43 persen dibandingkan Upah nominal buruh tani pada Maret 2022 Rp. 66.952,- per hari.

D. Indeks Gini

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan di suatu wilayah yaitu *Gini Ratio* (Rasio Gini). Indikator ini digunakan untuk mengukur tolak ukur ketimpangan ekonomi di suatu wilayah menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan untuk melihat bagaimana distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu wilayah tertentu. Hasil perhitungan rasio gini berkisar antara nol dan satu. Semakin tinggi rasio gini atau semakin mendekati angka satu menggambarkan semakin parah ketimpangan di suatu wilayah pada waktu tertentu.

Secara umum Indeks Gini Provinsi Banten pada rentang waktu 2017-2022 berhasil melebihi angka yang ditargetkan dan cenderung turun setiap tahun. Hal ini menunjukkan terjadi pemerataan pendapatan penduduk di Provinsi Banten pada periode Tahun 2017-2022. Meskipun banyak indikator yang terimbas akibat Pada tahun 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,363. Angka ini turun 0,002 poin dibandingkan Indeks Gini 2021 sebesar 0,365.



Gambar 2. 8
 Indeks Gini Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Nilai)
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,99 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,67 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 22,53 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Tabel 2. 23
Distribusi Pengeluaran Penduduk Per Kapita dan Gini Ratio di
Banten September 2021 – Maret 2022

Daerah	Susenas	Kelompok Penduduk			Gini Ratio
		40 % Berpengeluaran rendah	40 % Berpengeluaran menengah	20 % Berpengeluaran tinggi	
Perkotaan	September 2021	18,46	37,26	44,27	0,365
	Maret 2022	18,67	36,59	44,73	0,367
Perdesaan	September 2021	23,64	37,58	38,78	0,278
	Maret 2022	22,53	38,98	38,49	0,287
Perkotaan dan Perdesaan	September 2021	18,89	36,69	44,42	0,363
	Maret 2022	18,99	36,56	44,45	0,363

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,367, naik dibanding Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,365 dan mengalami penurunan dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,369.

Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,287, naik dibanding Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,278 dan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,280.

Tingkat ketimpangan penduduk Banten termasuk Kategori Rendah (Persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 % terendah > 17 persen).

Tercatat bahwa pengeluaran perkapita perbulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada Maret 2022 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,10 poin dan 0,03 poin, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen berpengeluaran menengah menurun sebesar 0,13 poin persen.

E. Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan indikator makro ekonomi yang cukup dikenal untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan antar bagian wilayah atau daerah di suatu wilayah dan periode tertentu. Indeks ini dihitung menggunakan angka PDRB per kapita di masing-masing bagian wilayah yang dikaitkan dengan proporsi penduduknya terhadap jumlah penduduk di wilayah tersebut. Hasil perhitungan dari indeks bernilai antara nol sampai dengan satu. Semakin mendekati nilai satu indeks menggambarkan bahwa distribusi pendapatan antar bagian wilayah semakin timpang. Sebaliknya, nilai indeks nol dapat menjadi indikasi bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar bagian wilayah cukup rendah.

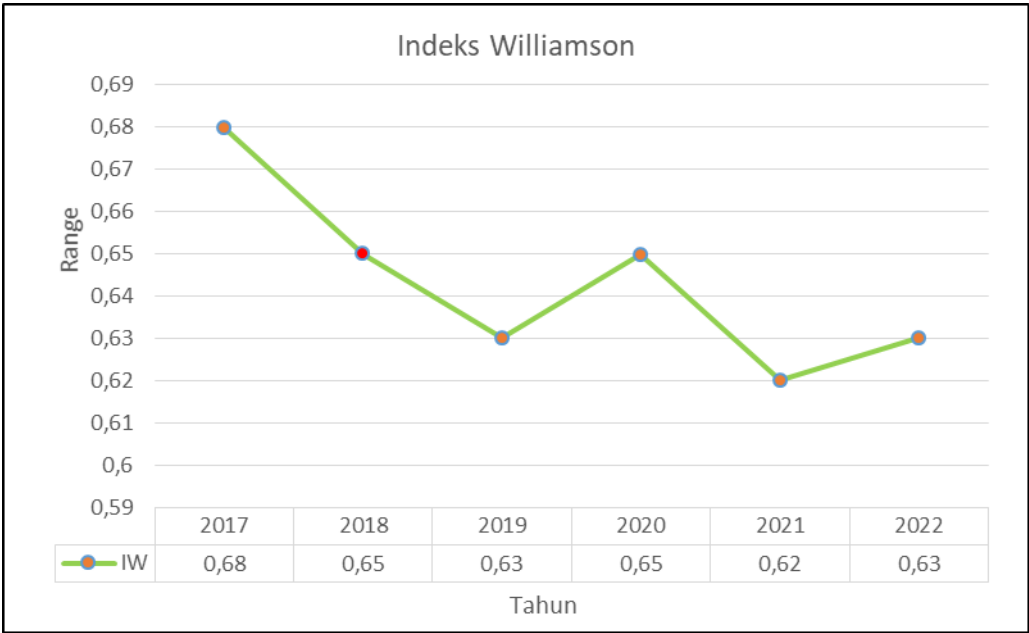
Tabel 2. 24
Analisis Indeks Williamson Provinsi Banten Tahun 2021

KABUPATEN/ KOTA PDRB	PDRB PER KAPITA/ TAHUN	PENDUDUK	PROPORSI PENDUDUK	[(PDRB PER KAPITA-RATA- RATA PDRB PER KAPITA)^2]* PROPORSI PENDUDUK
Kabupaten Pandeglang	24.501,08	1.291.808	11%	316.506.954
Kabupaten Lebak	23.342,14	1.407.607	12%	359.727.215
Kabupaten Tangerang	47.776,14	3.294.296	27%	264.297.490
Kabupaten Serang	52.404,76	1.646.974	14%	95.768.488
Kota Tangerang	94.382,54	1.923.916	16%	38.109.842
Kota Cilegon	268.164,72	441.429	4%	1.308.476.571
Kota Serang	50.979,70	702.478	6%	45.357.971
Kota Tangerang Selatan	69.741,93	1.374.662	11%	9.565.880
Rata- Rata/Jumlah	78.911,63	12.083.170	100%	49.374
INDEKS WILLIAMSON				0,63

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Dalam analisis Indeks Williamson di Provinsi Banten, distribusi pendapatan atau ketimpangan yang diperhitungkan adalah pada tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan PDRB per kapita seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Banten, didapatkan rata-rata PDRB per kapita tahun 2022 sebesar Rp78,91 juta per tahun. Nilai ini digunakan sebagai pembanding PDRB di masing-masing Kabupaten/Kota untuk dihitung proporsinya dengan penduduk agar

dapat menghasilkan Indeks Williamson Provinsi Banten. Nilai indeks untuk Provinsi Banten dihitung sebesar 0,63 di Tahun 2022. Nilai ini menunjukkan adanya indikasi ketimpangan yang cukup tinggi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2022. Meski demikian, Indeks Williamson Provinsi Banten terus menurun dari tahun 2016 yang mencapai 0,72. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan dari distribusi pendapatan di Provinsi Banten dari tahun ke tahun sebagai hasil dari upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam mengurangi kesenjangan antar daerah.



Gambar 2. 9
Indeks Williamson Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Nilai)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

2.1.2.2 Kondisi Perekonomian

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Banten pada tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 747,25 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp 60,99 juta atau US\$ 4,107,67.

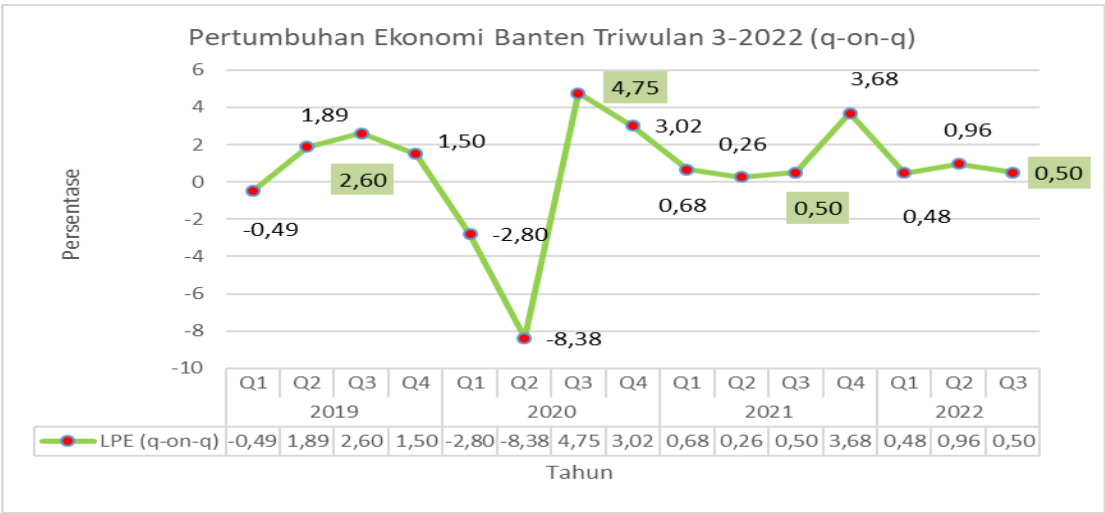
Ekonomi Banten pada tahun 2022 tumbuh 5,03 persen dibandingkan tahun 2021. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mencapai 26,68 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,87 persen



Gambar 2. 10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten Tahun 2012-2022 (Persen)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

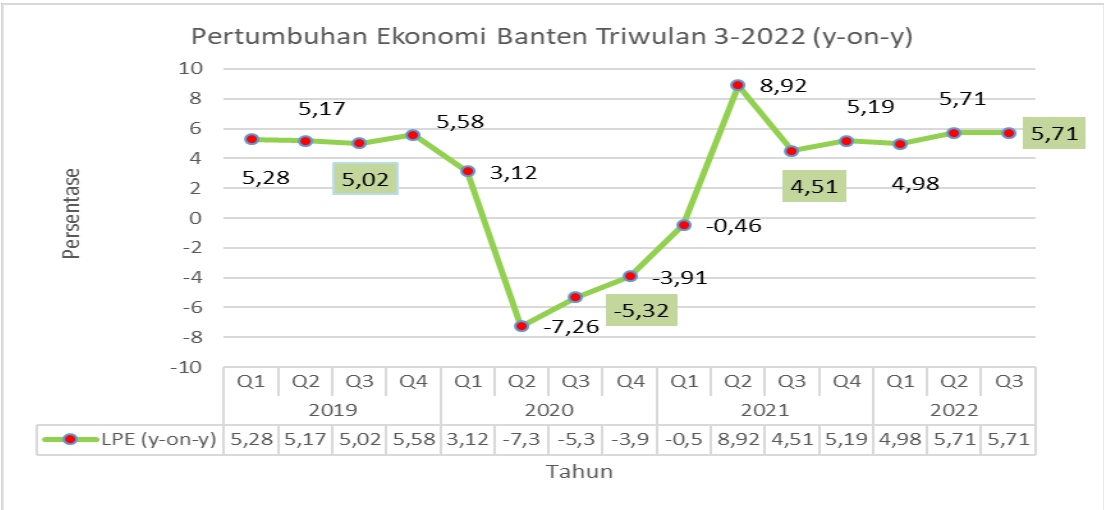
Ekonomi Banten triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 tumbuh 4,03 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 23,05 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,79 persen.

Ekonomi Banten triwulan IV-2022 terhadap triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,91 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencapai 13,00 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Komponen Total Net Ekspor sebesar 21,89 persen.



Gambar 2. 11
Pertumbuhan Ekonomi Banten kuartal-on-kuartal
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Ekonomi Banten triwulan III-2022 terhadap triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,71 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 43,31 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Komponen Total Net Ekspor sebesar 13,70 persen.



Gambar 2. 12
 Pertumbuhan Ekonomi Banten year-on-year
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Sampai dengan Triwulan III-2022, ekonomi Banten mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 29,69 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 28,61 persen.

Struktur ekonomi provinsi se-Pulau Jawa pada Triwulan IV-2022 masih didominasi oleh DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap PDRB se-Pulau Jawa sebesar 29,64 persen. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat dengan kontribusi mencapai 24,99 persen dan 22,40 persen. Sementara Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 7,00 persen.

B. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

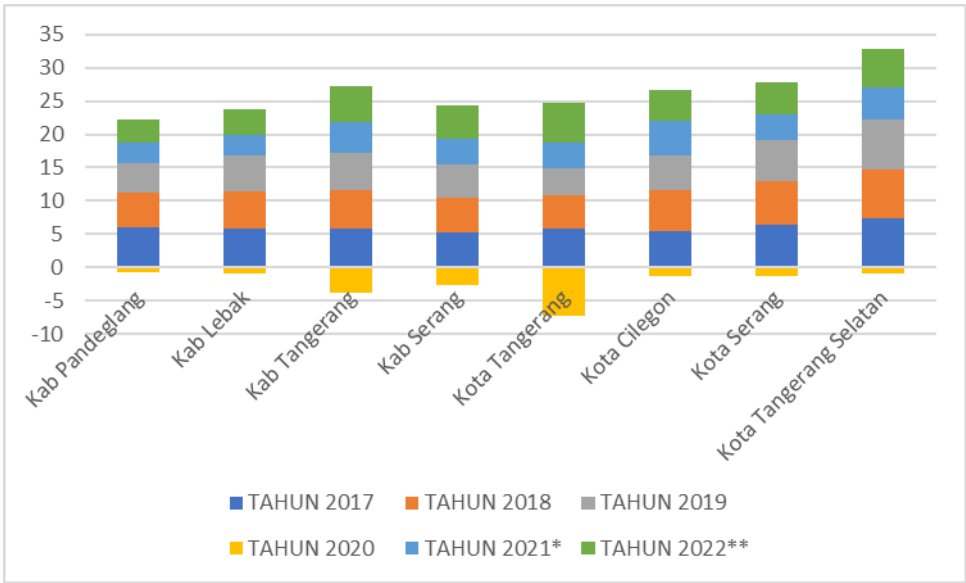
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran penting yang dapat menggambarkan kondisi suatu perekonomian. Nilai pertumbuhan ekonomi yang didapatkan dari perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan

(ADHK) di satu waktu dibandingkan dengan waktu sebelumnya dapat memberikan gambaran kemajuan pembangunan yang telah berlangsung disuatu wilayah. Dilihat berdasarkan data dari tahun 2017 hingga tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten menunjukkan tren cenderung tidak banyak berubah sebelum sedikit menurun di Tahun 2019 dan turun signifikan pada tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, Provinsi Banten berkontraksi hingga 3,38 persen tahun 2020 dengan perlambatan ekonomi paling dalam berlangsung di Kota Tangerang yang mencapai 6,92 persen.

Tabel 2. 25
PDRB Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2022 (Persen)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
Kab Pandeglang	6,00	5,30	4,42	-0,67	3,10	3,42
Kab Lebak	5,76	5,63	5,44	-0,91	3,18	3,86
Kab Tangerang	5,82	5,80	5,56	-3,76	4,70	5,47
Kab Serang	5,22	5,29	5,01	-2,73	3,74	5,04
Kota Tangerang	5,88	4,95	4,02	-7,36	3,90	5,98
Kota Cilegon	5,50	6,11	5,29	-1,23	5,24	4,50
Kota Serang	6,43	6,59	6,20	-1,29	3,88	4,71
Kota Tangerang Selatan	7,30	7,49	7,39	-1,01	4,81	5,82

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022



Gambar 2. 13
PDRB Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Provinsi Banten
Tahun 2017-2022 (Persen)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Beberapa Kabupaten dan Kota tercatat masih mengalami tren fluktuatif, apabila dibandingkan antara Kabupaten/Kota Provinsi Banten, rata-rata pertumbuhan ekonomi paling tinggi

sepanjang tahun 2017-2022 berlangsung di Kota Tangerang Selatan sebesar 5,58 persen. Sementara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi terendah berlangsung di Kabupaten Pandeglang sebesar 3,42 persen.

Aktivitas perekonomian Provinsi Banten dapat tercerminkan di dalam komponen PDRB. Analisis PDRB sendiri dapat dilakukan pada dua versi, yaitu atas harga berlaku atau ADHB (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan atau ADHK (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Kedua versi dapat mencerminkan kondisi perekonomian dengan kegunaan spesifik masing-masing. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat komposisi perekonomian berdasarkan jenis kegiatan yang mendukungnya. Berdasarkan lapangan usahanya, sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor konstruksi merupakan ketiga sektor terbesar yang berkontribusi terhadap perekonomian Provinsi Banten. Proporsi kegiatan dari ketiga sektor ini mencapai sekitar 55 persen dari total PDRB Provinsi Banten. Sepanjang tahun 2017-2022, struktur perekonomian cenderung tidak mengalami banyak perubahan.

Tabel 2. 26
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA PDRB	PDRB ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.266	35.574	37.022	39.029	40.238	44.051
Pertambangan dan Penggalian	4.146	4.272	4.377	4.275	4.633	4.142
Industri Pengolahan	179.931	191.863	203.360	195.499	209.609	227.676
Pengadaan Listrik dan Gas	11.984	12.770	12.073	10.511	12.153	13.016
Pengadaan Air	449	482	511	553	585	613
Konstruksi	58.182	65.453	73.327	71.587	82.115	91.203
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	69.275	76.661	84.325	83.513	85.904	93.547

LAPANGAN USAHA PDRB	PDRB ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
Transportasi dan Pergudangan	61.258	67.325	71.245	40.455	41.639	71.165
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.477	14.633	15.849	15.158	15.902	17.447
Informasi dan Komunikasi	20.485	21.696	23.278	25.201	26.575	28.218
Jasa Keuangan	17.064	18.930	19.714	20.300	22.332	25.307
Real Estate	42.104	46.579	52.186	54.278	56.593	60.289
Jasa Perusahaan	6.082	6.674	7.493	7.325	7.329	7.915
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.459	12.301	13.657	14.210	14.458	15.227
Jasa Pendidikan	18.649	21.130	23.716	24.503	24.395	24.581
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.655	7.444	8.369	9.183	10.299	10.688
Jasa lainnya	9.131	10.018	11.150	10.862	11.163	12.163
Jumlah PDRB	563.598	613.804	661.652	626.437	626.437	747.250

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Sementara PDRB ADHK utamanya dapat digunakan untuk melihat laju perkembangan dari masing-masing kegiatan di dalam perekonomian dari waktu ke waktu melalui nilai pertumbuhannya.

Tabel 2. 27
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA PDRB	PDRB ADHK MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.056	23.881	24.408	25.275	25.417	26.486
Pertambangan dan Penggalian	2.851	2.871	2.882	2.641	2.657	2.208
Industri Pengolahan	144.219	149.425	154.761	147.538	155.028	160.616
Pengadaan Listrik dan Gas	4.180	4.480	4.318	3.832	4.319	4.640
Pengadaan Air	397	416	438	471	494	513
Konstruksi	39.314	42.363	46.048	44.727	49.562	51.955

LAPANGAN USAHA PDRB	PDRB ADHK MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	54.652	58.614	62.297	60.482	61.595	6.595
Transportasi dan Pergudangan	27.289	29.069	29.264	20.869	22.055	22.055
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.925	10.664	11.446	10.863	11.333	11.333
Informasi dan Komunikasi	23.174	24.98	27.244	29.736	31.371	31.371
Jasa Keuangan	12.038	12.874	13.134	13.492	14.249	14.249
Real Estate	34.539	37.261	40.521	41.392	42.635	42.635
Jasa Perusahaan	4.182	4.459	4.841	4.627	4.565	4.565
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.140	7.518	8.109	8.057	7.990	7.990
Jasa Pendidikan	12.197	13.104	14.112	14.299	14.154	14.154
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.913	5.249	5.698	6.126	6.735	6.735
Jasa lainnya	6.073	6.536	7.102	6.717	6.812	6.812
Jumlah PDRB	410.137	433.783	456.62	441.296	460.739	460.739

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Apabila dibandingkan antara lapangan usaha yang terdapat di Provinsi Banten, sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2016-2021. Sektor ini juga merupakan salah satu yang tetap tumbuh positif di tengah kehadiran Pandemi COVID-19 bersama dengan sektor-sektor tidak terdampak negatif lainnya, seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pengadaan air, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Selain dilihat berdasarkan lapangan usaha, perekonomian PDRB juga dapat menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi Provinsi Banten dari sisi pengeluaran. Berdasarkan PDRB ADHB menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar perekonomian dengan proporsi mencapai sebesar 55 persen dari total PDRB di tahun 2021. Proporsi ini telah meningkat.

Tabel 2. 28
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran
Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Miliar Rupiah)

PENGELUARAN	PDRB ADHB MENURUT PENGELUARAN TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	294.424	321.788	348.161	345.861	360.302	399.346
Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	2.541	2.803	3.064	2.923	3.016	3.193
Pengeluaran konsumsi pemerintah	24.616	27.576	29.745	27.388	29.157	30.624
Pembentukan modal tetap bruto	173.238	192.970	215.058	219.704	235.748	256.965
Perubahan Inventori	65,74	101,16	85,60	13,86	2,99	20,19
Net Ekspor Barang dan Jasa	68.712	68.566	65.207	30.005	37.663	57.102
Jumlah PDRB	563.597	613.804	661.321	625.895	665.888	747.250

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Dari tahun ke tahun, nilai dari komponen pengeluaran PDRB mengalami tren kenaikan sebelum berkontraksi tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19. Namun tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif menjadi 747,250 angka ini jauh lebih baik jika dibandingkan di 2021.

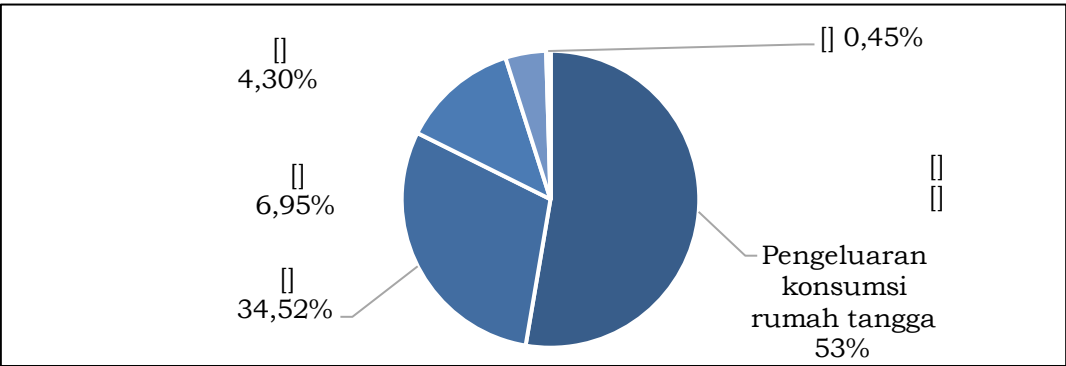
Tabel 2. 29
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Provinsi
Banten Tahun 2017-2022 (Miliar Rupiah)

PENGELUARAN	PDRB ADHK MENURUT PENGELUARAN TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	235.491	247.892	260.151	254.841	260.957	260.957
Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	2.012	2.148	2.309	2.118	2.081	2.081
Pengeluaran konsumsi pemerintah	17.075	18.504	19.624	17.759	17.935	17.935
Pembentukan modal tetap bruto	126.304	135.049	143.682	142.617	148.446	148.446
Perubahan Inventori	96,43	105,31	79,73	13,36	2,40	15,67
Net Ekspor Barang dan Jasa	29.158	30.084	30.896	23.498	31.319	31.319
Jumlah	410.136	433.783	456.620	441.139	460.739	460.739

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Salah satu komponen pengeluaran yang paling menurun adalah perubahan inventori. Namun sektor lainnya mengalami

peningkatan pada total ekspor setelah sebelumnya menurun tahun 2022 kembali berada pada tren positif tercatat 460.739 milyar rupiah, hal ini sejalan dengan tren peningkatan kembali ekspor dan impor nasional menuju pemulihan Pandemi COVID-19.



Gambar 2. 14
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Banten Tahun 2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

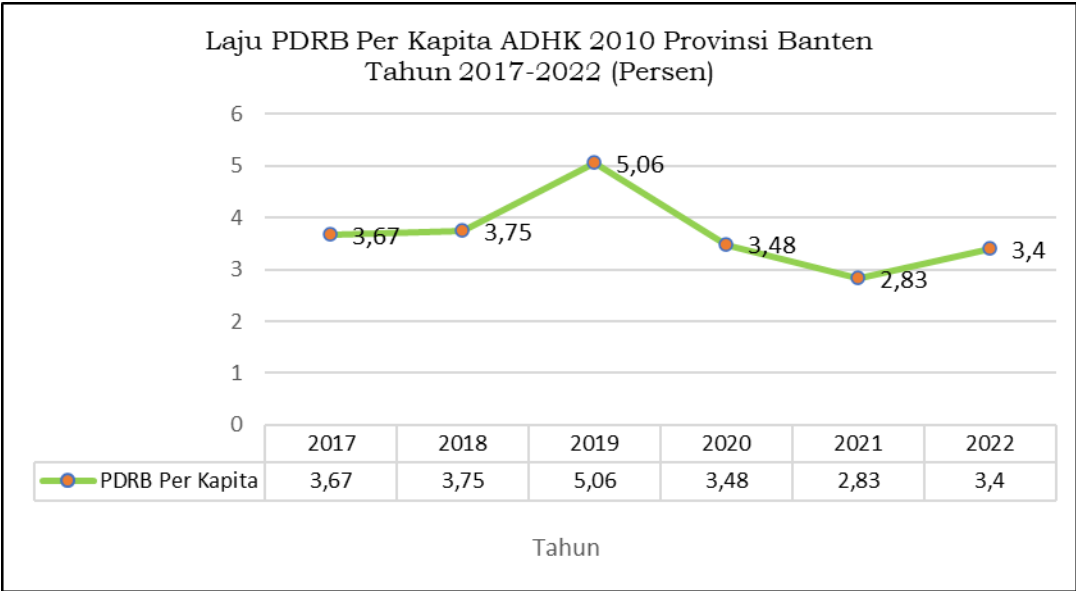
C. PDRB per kapita

Indikator makro ekonomi lainnya yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita dapat menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah.

Tabel 2. 30
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2018-2022 (Persen)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Kab Pandeglang	4,97	3,59	-4,64	1,58	1,93
Kab Lebak	5,00	5,11	-6,78	1,27	1,98
Kab Tangerang	2,71	5,67	-9,77	2,82	3,61
Kab Serang	4,73	4,75	-9,43	1,78	3,09
Kota Tangerang	2,77	3,31	7,69	2,87	4,96
Kota Cilegon	4,58	4,07	-0,52	3,22	2,53
Kota Serang	4,83	4,72	-1,52	1,57	2,42
Kota Tangerang Selatan	4,23	8,60	-22,76	3,80	4,84
Banten	3,75	5,06	3,48	2,83	3,40

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022



Gambar 2. 15
 Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Provinsi Banten
 Tahun 2017-2022 (Persen)
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Adapun nilai dari PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk satu tahun di suatu wilayah. Laju pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Banten mengalami kenaikan pada tahun 2019, lalu tahun 2020 mengalami penurunan kembali dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat Provinsi Banten.

Tabel 2. 31
 PDRB ADHB dan ADHK Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di
 Provinsi Banten Tahun 2022 (Ribu Rupiah)

KABUPATEN/KOTA PDRB	PDRB PER KAPITA	
	ADHB 2022*	ADHK 2022*
Kabupaten Pandeglang	32.025	20.803
Kabupaten Lebak	33.469	22.099
Kabupaten Tangerang	160.168	103.221
Kabupaten Serang	87.983	57.607
Kota Tangerang	182.211	112.780
Kota Cilegon	120.747	80.636
Kota Serang	36.724	24.495
Kota Tangerang Selatan	96.137	66.022
Provinsi Banten		

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Dilihat berdasarkan PDRB per kapita di masing-masing Kabupaten/Kota, nilai PDRB per kapita tahun 2022 paling tinggi tercatat pada Kota Tangerang. Sementara PDRB per kapita paling rendah tercatat di Kabupaten Pandeglang. Besaran PDRB per kapita

ini sangat bergantung pada jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota, dimana Kabupaten/Kota dengan penduduk banyak cenderung memiliki rata-rata pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata di Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang relatif lebih banyak.

D. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi Provinsi Banten dipengaruhi pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Pada Oktober 2022 terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 5,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,70. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Serang sebesar 7,54 persen dengan IHK sebesar 117,02. Berikutnya di Cilegon sebesar 6,34 persen dengan IHK sebesar 115,26. Inflasi terendah terjadi di Tangerang sebesar 5,17 persen dengan IHK sebesar 111,51.

Tabel 2. 32
Inflasi Tahun ke Tahun Provinsi Banten (persen),
2018-2022 (Persen)

BULAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	3,47	3,55	2,85	1,37	1,91
Februari	3,23	3,30	3,03 ^r	1,38	1,99
Maret	3,55	2,97	2,99	1,39	3,00
April	3,80	3,14	2,99	1,31	3,82
Mei	3,35	3,54	2,66	1,49	3,77
Juni	3,00	3,72	2,50	1,15	4,62
Juli	3,47	3,53	2,01	1,24	4,88
Agustus	3,68	3,76	1,52	1,46	4,58
September	3,42	3,64	1,63	1,40	5,86
Oktober	3,44	3,77	1,57	1,38	5,64
November	3,49	3,73	1,43	1,43	5,34
Desember	3,42	3,30	1,45	1,91	7,22

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi sebesar 18,95 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga

sebesar 7,53 persen; kelompok kesehatan sebesar 7,10 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,02 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,80 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,55 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,29 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,77 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,75 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,66 persen. Sementara itu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,22 persen.

Tingkat Inflasi tahun month to month (mtm) Oktober 2022 sebesar -0,12 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) Oktober 2022 sebesar 4,72 persen.

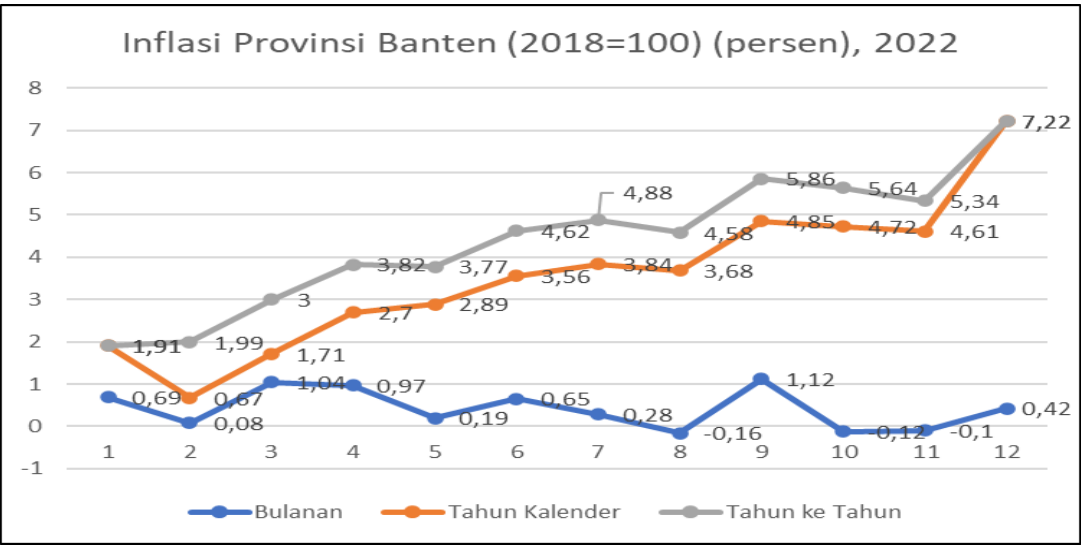
Tabel 2. 33
IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan 3 Kota Provinsi Banten Tahun 2020-Oktober 2022 Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

KOMODITAS	TAHUN 2021			TAHUN 2022				
	IHK Oktober 2021 (%)	Andil Inflasi 2021 (%)	Tingkat Inflasi 2021 (%)	IHK Oktober 2022 (%)	Tingkat Inflasi Oktober 2022 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi Oktober 2022 (%)
Umum	106,68	0,69	1,91	112,70	-0,12	4,72	5,64	-0,12
Makanan, minuman dan tembakau	107,80	0,53	3,65	115,37	-0,93	4,28	7,02	-0,25
Pakaian dan alas kaki	107,73	0,00	1,21	107,73	-0,19	0,53	0,66	-0,01
Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga	106,05	0,01	1,01	108,47	0,02	2,20	2,29	0,01
Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	117,18	0,01	2,43	119,56	0,22	7,25	7,53	0,01
Kesehatan	105,03	0,05	2,41	112,50	-0,14	5,13	7,10	0,00
Transportasi	104,11	0,03	1,46	123,84	0,41	18,52	18,95	0,05
Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	91,98	0,00	-0,06	91,78	0,00	-0,18	-0,22	0,00
Rekreasi, olahraga, dan budaya	107,48	0,00	0,71	108,29	-0,11	0,74	0,75	0,00
Pendidikan	107,20	0,00	0,15	108,02	0,00	0,75	0,77	0,00
Penyediaan makanan dan minuman/restoran	106,96	0,02	1,57	106,69	0,59	2,28	2,55	0,06
Perawatan pribadi dan jasa lainnya	117,90	0,02	2,29	117,90	0,40	4,13	4,80	0,02

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Oktober 2022 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Banten di 3 kota, pada Oktober 2022 terjadi inflasi yoy sebesar 5,64 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,68 pada Oktober 2021 menjadi 112,70 pada Oktober 2022. Tingkat inflasi mtm sebesar -0,12 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 4,72 persen.

dan tingkat inflasi ytd sebesar 4,72 persen.



Gambar 2. 16
Inflasi Provinsi Banten (2018=100) (persen), 2022 (Persen)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

E. Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk melihat sektor-sektor unggulan di Provinsi Banten, analisis dapat dilakukan menggunakan perhitungan LQ. LQ merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat keunggulan dari masing-masing sektor ekonomi di suatu wilayah menggunakan data aktivitas ekonomi per sektor berdasarkan PDRB ADHK menurut lapangan usaha. Rasio PDRB masing-masing sektor terhadap PDRB keseluruhan dibandingkan dengan rasio yang sama pada tingkat nasional untuk mendapatkan analisis tingkat spesifikasi dari setiap sektor terhadap perekonomian secara keseluruhan. Hasil perhitungan LQ dapat mengelompokkan sektor unggulan dan sektor non-unggulan di suatu wilayah pada periode tertentu. Nilai LQ yang lebih dari 1(satu) menunjukkan bahwa sektor yang dianalisis memiliki keunggulan sementara sektor dengan nilai

LQ kurang dari 1 (satu) tidak memiliki keunggulan di wilayah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai LQ suatu sektor maka semakin unggul sektor tersebut di suatu wilayah dan periode tertentu.

Lebih lanjut, sektor unggulan yang dimaksud dari perhitungan LQ dapat diartikan bahwa sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri serta dapat juga memenuhi kebutuhan daerah di luarnya atau dengan kata lain hasil produksi sektor tersebut dapat diekspor antar daerah. Di sisi lain, hasil output dari sektor tidak unggulan hanya dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Tabel 2. 34
Perhitungan *Location Quotient (LQ)* Provinsi Banten terhadap Nasional Tahun 2017-2022

LAPANGAN USAHA PDB	LQ TAHUN						RERATA
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,44	0,44	0,43	0,45	0,44	0,45	0,44
Pertambangan dan Penggalian	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,06	0,09
Industri Pengolahan	1,66	1,64	1,63	1,62	1,64	1,62	1,65
Pengadaan Listrik dan Gas	0,99	1,01	0,93	0,86	0,91	0,92	0,96
Pengadaan Air	1,20	1,19	1,17	1,21	1,20	1,22	1,19
Konstruksi	0,96	0,97	1,00	1,01	1,08	1,12	0,98
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,01	1,02	1,04	1,06	1,02	1,01	1,03
Transportasi dan Pergudangan	1,62	1,60	1,51	1,29	1,31	1,39	1,53
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,80	0,81	0,82	0,88	0,88	0,85	0,82
Informasi dan Komunikasi	1,11	1,12	1,11	1,11	1,09	1,07	1,12
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,73	0,74	0,71	0,72	0,74	0,76	0,73
Real Estate	2,88	2,99	3,07	3,10	3,09	3,18	2,96
Jasa Perusahaan	0,59	0,57	0,56	0,57	0,56	0,53	0,58
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,53	0,52	0,53	0,54	0,53	0,53	0,53
Jasa Pendidikan	0,97	0,98	0,99	0,99	0,97	0,96	0,97
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,08	1,07	1,05	1,03	1,03	1,07
Jasa lainnya	0,86	0,85	0,83	0,83	0,82	0,79	0,85

Sumber: Data Olahan Bappeda, 2022

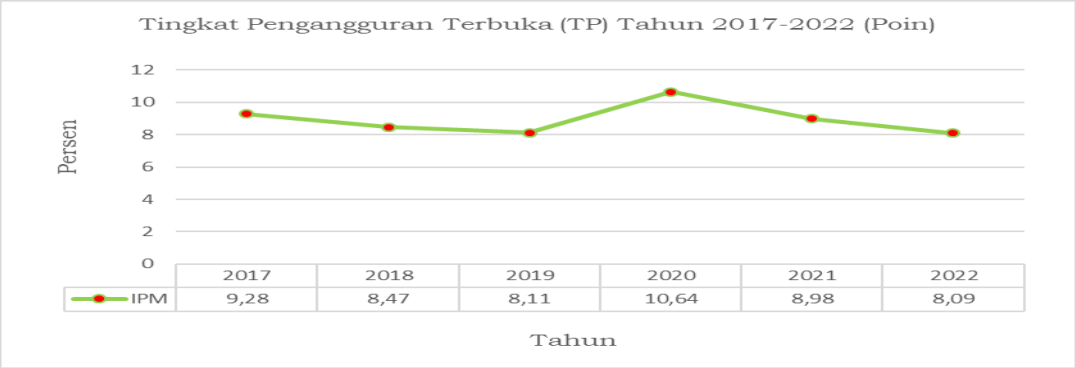
Menggunakan analisis LQ di Provinsi Banten, secara rata-rata sektor-sektor yang dapat dikatakan unggul diantaranya adalah sektor real estate, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor perdagangan besar dan eceran. Sementara sektor-sektor lainnya memiliki nilai LQ rata-rata di bawah satu yang dapat diartikan bahwa sektor-sektor lainnya non-unggul yang hanya dapat memenuhi kebutuhan di daerahnya. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, nilai LQ masing-masing sektor tidak mengalami banyak perubahan dan memiliki tren yang beragam. Untuk sektor dengan rerata LQ yang masih kurang dari satu atau belum unggul seperti sektor konstruksi memiliki tren yang terus meningkat tiap tahunnya. Nilai LQ sektor konstruksi yang lebih dari satu yang berarti mulai masuk sebagai sektor unggulan Provinsi Banten antara lain : industri pengolahan, pengadaan air, konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, real estate dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Melalui analisis LQ, Pemerintah Provinsi Banten dapat mengetahui kebijakan yang tepat untuk setiap sektor. Sektor-sektor unggulan dapat dipertahankan perkembangannya agar dapat digunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten secara keseluruhan. Sementara sektor-sektor yang belum unggul masih memiliki ruang untuk ditingkatkan sebagai upaya memperluas perkembangan ekonomi Banten relatif terhadap perekonomian nasional.

2.1.2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia

A. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka ini dapat menggambarkan banyaknya pengangguran di suatu wilayah. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Sebaliknya, TPT yang rendah menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang terserap di pasar tenaga kerja.



Gambar 2. 17
Tingkat Pengangguran Terbuka (TP) Tahun 2017-2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

TPT Provinsi Banten mengalami tren yang cukup fluktuatif sepanjang tahun 2016-2022. Nilainya meningkat di tahun 2017 sebelum secara konsisten menurun hingga tahun 2019. Namun, meningkat tajam tahun 2020 akibat adanya pandemi. TPT Provinsi Banten tahun 2021 tercatat sebesar 8,98 persen dan menurun pada tahun 2022 menjadi 8,09 persen.

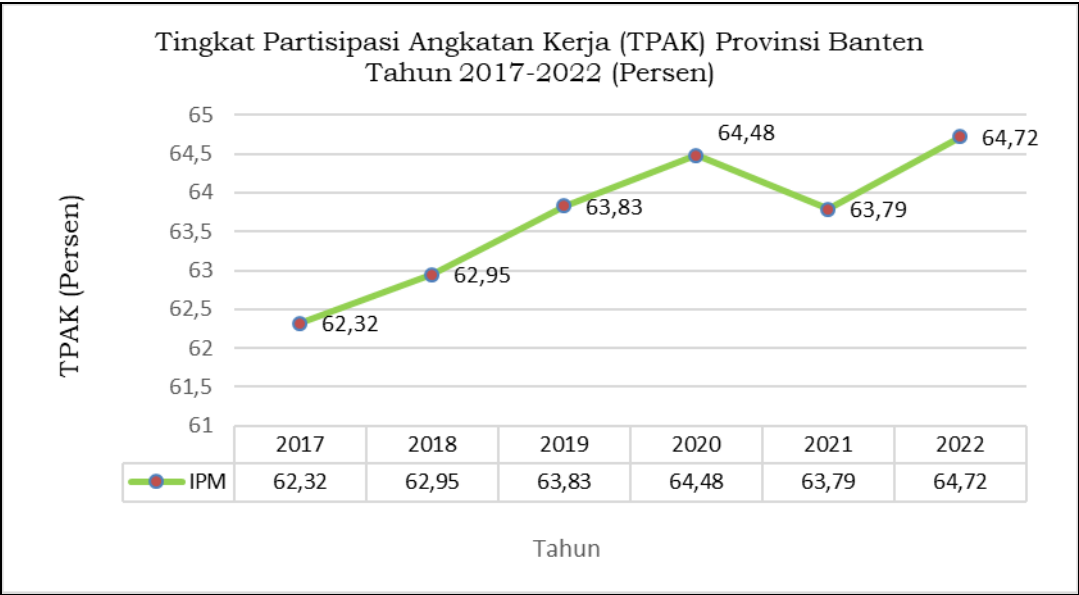
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 8,09 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar delapan orang penganggur. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,89 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

Tabel 2. 35
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Banten
Tahun 2017-2022 (Persen)

KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN (PERSEN)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	8.30	8.19	8.67	9.15	7.70	
Kab Lebak	8.88	7.57	7.96	9.63	7.86	
Kab Tangerang	10.57	9.63	8.92	13.06	9.06	
Kab Serang	13.00	12.63	10.58	12.22	10.58	
Kota Tangerang	7.16	7.39	7.14	8.63	9.07	
Kota Cilegon	11.88	9.21	9.64	12.69	10.13	
Kota Serang	8.43	8.10	8.07	9.26	9.41	
Kota Tangerang Selatan	6.83	4.67	4.78	8.48	8.60	
PROVINSI BANTEN	9.28	8.47	8.11	10.64	8.98	8.09

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang memiliki angka TPT lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi secara keseluruhan adalah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Sementara kabupaten dan kota sisanya memiliki angka TPT di bawah rata-rata. TPT di Kabupaten Serang paling tinggi tahun 2021 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di daerah ini masih sangat terbatas.



Gambar 2. 18
 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Banten
 Tahun 2017-2022 (Persen)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022)

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Banten. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 9,99 juta orang, naik sebanyak 172,73 ribu orang jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 6,46 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 3,52 juta orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 5,94 juta orang penduduk yang bekerja dan 523 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 202,98 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 242,27 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 39,30 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 64,72 persen, naik 0,93 persen poin dibanding Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2022, TPAK laki-laki sebesar 81,69 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 47,17 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,53 persen poin dan 0,33 persen poin.

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berperan penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia. IPM merupakan indikator yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Untuk mencakup kondisi kualitas hidup manusia atau penduduk, IPM dibangun melalui tiga dimensi atau kelompok utama, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Berdasarkan metodologi statistik yang dilakukan oleh BPS, pengukuran IPM aspek kesehatan mengacu pada angka harapan hidup. Sementara untuk melihat capaian pengembangan pengetahuan, digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun aspek hidup layak diukur menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang umumnya dilihat dari rata-rata besaran pengeluaran per kapita yang dinilai dapat mewakili capaian pembangunan hidup layak.

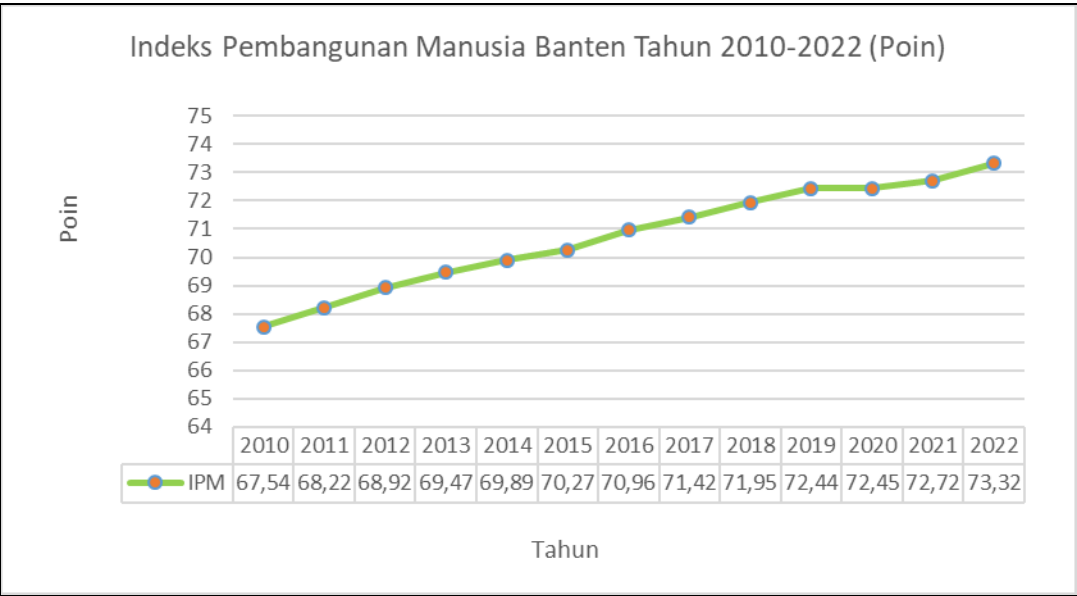
Dalam rentang waktu tahun 2017 s.d 2022 indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten terus melampaui besaran yang ditargetkan dan tergolong kepada level “Tinggi”. Hal ini menunjukkan kualitas penduduk Provinsi Banten dari sisi Pendidikan dan kesehatan terus mengalami peningkatan.

Pembangunan manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2022, IPM Banten telah mencapai 73,32 atau meningkat 0,60 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 72,72 poin.

Pembangunan manusia Banten pada tahun 2022 mengalami percepatan ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,83 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2021 sebesar 0,37 persen.

Pada tahun 2022, status pembangunan manusia di Banten berada pada level atau kategori “Tinggi”. Status tersebut masih sama dengan tahun 2022.



Gambar 2. 19
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten Tahun 2010-2022 (Poin)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Meningkatnya IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan yang terendah pada komponen Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun nilai atau capaian UHH sebesar 70,39 tahun, HLS (13,05 tahun), RLS (9,13 tahun), dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (12,2 juta rupiah).

Meningkatnya IPM Banten terjadi pada seluruh wilayah kabupaten/kota, dengan IPM tertinggi tetap diduduki oleh Kota Tangerang Selatan (81,95) dan terendah Kabupaten Lebak (64,71).

Secara rinci, perkembangan IPM Banten berdasarkan komponen pembentuknya dari tahun 2017-2022, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 36
Komponen Pembentuk IPM di Provinsi Banten Tahun 2017-2022

KOMPONEN IPM	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup (UHH, tahun)	69,49	69,64	69,84	69,96	70,02	70,39
Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	12,78	12,85	12,88	12,89	13,02	13,05
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	8,53	8,62	8,74	8,89	8,93	9,13
Pengeluaran per Kapita (PKP, Ribuan Rupiah)	11.659	11.994	12.267	11.986	12.033	12.216
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	71,42	71,95	72,44	72,45	72,72	73,32
Pertumbuhan (Persen)	-	0,74	0,68	0,01	0,37	0,83

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Tabel 2. 37
Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota
Banten Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (UHH, Tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP, Ribu Rupiah)	Capaian IPM	Pertumbuhan (Persen)
Kab Pandeglang	65.20	13.72	7.13	8.827	65.84	1.03
Kab Lebak	67.74	12.09	6.59	8.854	64.71	1.06
Kab Tangerang	70.28	12.85	8.92	12.427	72.97	0.94
Kab Serang	65.18	12.78	7.78	10.916	67.75	1.39
Kota Tangerang	71.91	13.88	10.84	14.909	78.90	0.51
Kota Cilegon	67.02	13.20	10.34	13.185	73.95	0.82
Kota Serang	68.54	12.81	8.90	13.709	72.98	0.75
Kota Tangerang Selatan	72.78	14.67	11.84	15.997	81.95	0.43
PROVINSI BANTEN	70.39	13.05	9.13	12.216	73.32	0.83

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 65,18 tahun (Kabupaten Serang) hingga 72,78 tahun (Kota Tangerang Selatan). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah antara 12,09 tahun (Kabupaten Lebak) hingga 14,67 tahun (Kota Tangerang Selatan), serta Rata-rata Lama Sekolah antara 6,59 tahun (Kabupaten Lebak) hingga 11,84 tahun (Kota Tangerang Selatan). Adapun, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan berada pada kisaran 8,8 juta rupiah per tahun (Kabupaten Pandeglang) hingga 16,0 juta rupiah per tahun (Kota Tangerang Selatan). Selain dari sisi pencapaian, variasi juga terlihat dari kecepatan atau pertumbuhan IPM nya. Tercatat,

Kabupaten Serang tumbuh 1,39 persen, sehingga menjadi daerah yang pembangunan manusianya mengalami kemajuan paling pesat. Kemajuannya itu didorong oleh cepatnya perbaikan pada dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Sementara yang paling lambat adalah Kota Tangerang Selatan, yang lebih banyak dipengaruhi oleh relatif lambatnya perbaikan pada dimensi pengetahuan.

Pencapaian pembangunan manusia Banten selama setahun terakhir ini masih lebih baik dibandingkan DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Riau. Kondisi yang demikian ditandai oleh pertumbuhan angka IPM nya yang menempati urutan kelima di antara Provinsi berperingkat 10 besar IPM. Hanya saja, kecepatannya itu ternyata masih di bawah rata-rata Nasional yang mencapai 0,86 persen (Tabel 3).

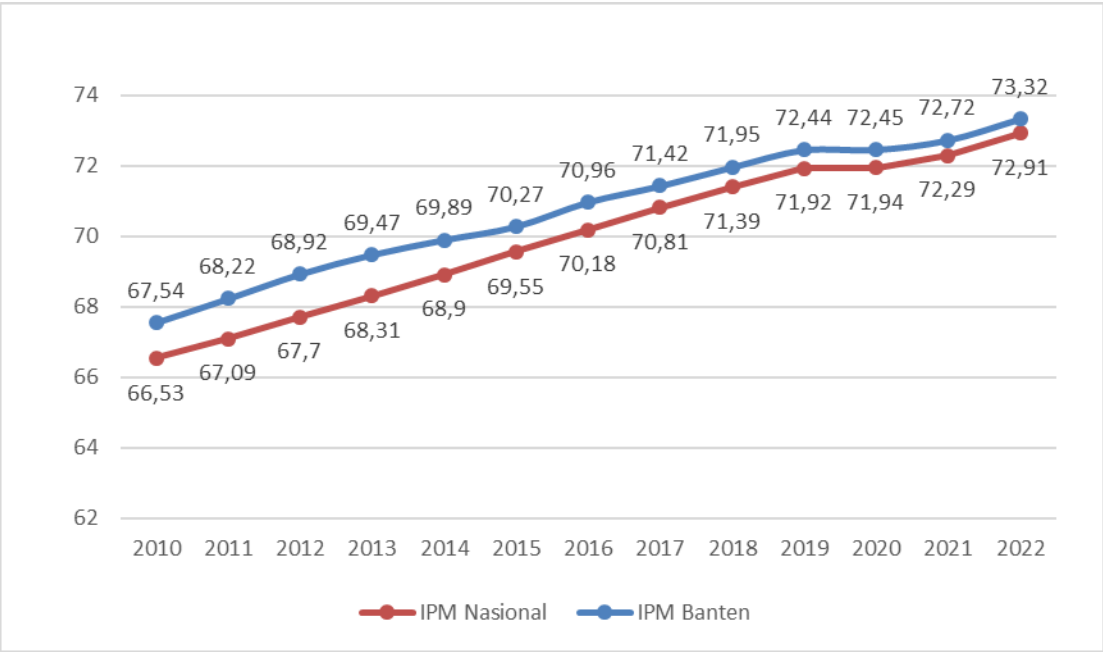
Tabel 2. 38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Peringkat 10 Besar
Nasional Menurut Komponen Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (UHH, Tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP, Ribu Rupiah)	Nilai IPM	Pertumbuhan (Persen)
1. DKI Jakarta	73.32	13.08	11.31	18.927	81.65	0.67
2. DI Yogyakarta	75.08	15.65	9.75	14.482	80.64	0.52
3. Kalimantan Timur	74.62	13.84	9.92	12.641	77.44	0.73
4. Kepulauan Riau	70.50	12.99	10.37	14.469	76.46	0.88
5. Bali	72.60	13.48	9.39	13.942	76.44	0.99
6. Sulawesi Utara	72.08	12.95	9.68	11.179	73.81	0.70
7. Riau	71.95	13.29	9.22	11.158	73.52	0.80
8. Banten	70.39	13.05	9.13	12.216	73.32	0.83
9. Sumatera Barat	69.90	14.10	9.18	11.130	73.26	0.84
10. Jawa Barat	73.52	12.62	8.78	11.277	73.12	0.92
NASIONAL	71.85	13,10	8.69	11.479	72.91	0.86

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Jika besaran angka dan peringkat IPM Banten tidak ingin dilampaui oleh Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Barat, harus dilakukan perbaikan pada beberapa dimensi/komponen pembentuk. Pertama, capaian pada dimensi umur panjang dan hidup sehat harus diperbaiki kembali. Hal ini karena capaiannya bukan saja jauh di

bawah Jawa Barat, bahkan masih lebih rendah dari rata-rata Nasional. Kedua, capaian pada dimensi pengetahuan, khususnya pada komponen Harapan Lama Sekolah, harus terus ditingkatkan. Hal ini karena dalam jangka panjang, capaiannya tersebut dapat mempengaruhi capaian komponen Rata-rata Lama Sekolah. Capaian Harapan Lama Sekolah Banten sendiri berada di bawah Sumatera Barat dan lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional.



Gambar 2. 20
 Perbandingan IPM Provinsi Banten dan Nasional
 Tahun 2010-2022 (Poin)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk menganalisis daya saing daerah meliputi.

2.1.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kebutuhan kalori masyarakat dapat dijadikan acuan Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita menurut Kelompok Barang Pangan/Non Pangan yang dapat menjadi gambaran tingkat kemampuan ekonomi suatu daerah.

Tabel 2. 39
Rata-Rata Konsumsi Kelompok Makanan Tahun 2018-2022
(Kalori per Kapita Sehari)

KELOMPOK MAKANAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Padi-padian	850,90	828,63	839,87	824,95	872,06
Umbi-umbian	28,88	32,15	36,09	37,77	42,61
Ikan	53,03	53,64	53,78	55,07	62,09
Daging	76,48	78,74	80,09	92,81	104,69
Telur dan Susu	78,48	71,23	71,23	78,61	71,92
Sayur-sayuran	34,41	37,80	37,75	38,35	40,96
Kacang-kacangan	58,58	55,84	56,85	59,57	58,64
Buah-Buahan	52,58	44,78	41,65	39,83	48,15
Minyak dan Lemak	265,54	277,35	282,48	312,40	293,75
Bahan Minuman	73,99	77,51	78,00	77,54	82,97
Bumbu-bumbuan	13,84	12,79	14,40	12,91	16,55
Konsumsi Lainnya	73,21	65,05	63,01	69,14	71,58
Makanan dan Minuman Jadi	601,85	613,15	591,81	522,53	504,52
JUMLAH	2.261,77	2.248,65	2.250,36	2.221,47	2.270,48

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Pada tabel di atas, dapat kita lihat bahwa sumber kalori utama yang dikonsumsi oleh masyarakat Provinsi Banten masih terlalu bergantung pada kelompok makanan “Padi-Padian” sehingga komposisi pangan yang beragam pun belum dapat dicapai. Hal tersebut juga mengakibatkan tingkat ketersediaan pangan daerah, menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas daerah, disamping juga distribusi.

2.1.3.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana komponen Ib hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Dengan dikeluarkannya konsumsi dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

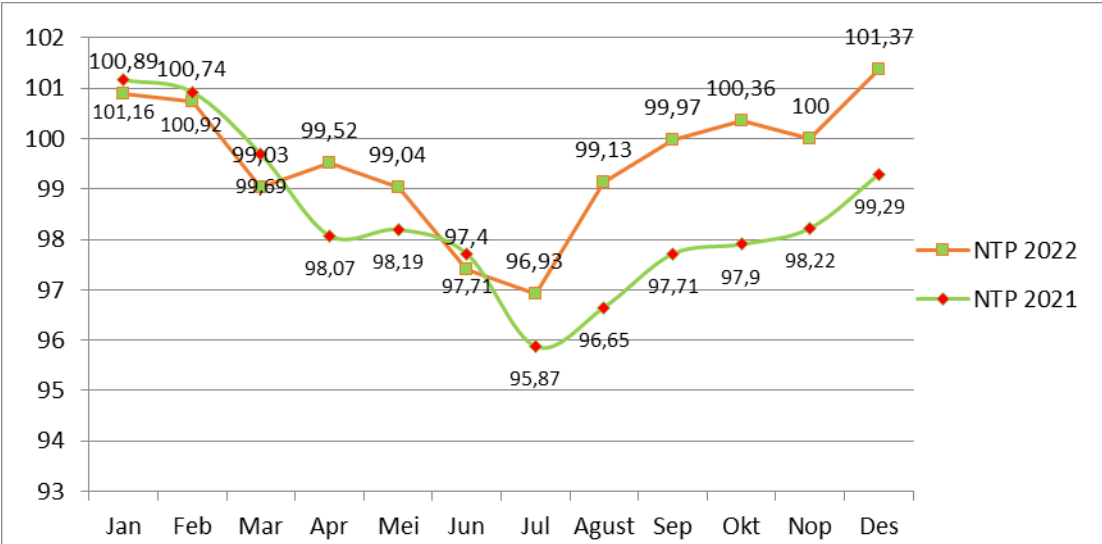
Tabel 2. 40
Nilai Tukar Petani Tahun 2017-2022

BULAN	NILAI TUKAR PETANI (NTP)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	98,97	101,66	100,28	105,14	101,16	100,89
Februari	97,92	101,47	100,64	105,49	100,92	100,74
Maret	98,19	101,00	100,14	106,01	99,69	99,03
April	98,94	99,68	99,93	106,01	98,07	99,52
Mei	98,86	98,66	99,93	103,61	98,19	99,04
Juni	100,19	98,73	98,80	101,45	97,71	97,40
Juli	99,60	96,65	99,27	99,69	95,87	96,93
Agustus	99,83	98,28	100,55	100,32	96,65	99,13
September	100,69	99,26	102,11	101,20	97,71	99,97
Oktober	101,01	99,83	102,79	101,97	97,90	100,36
November	101,29	100,79	102,54	100,82	98,22	100,00
Desember	101,54	100,52	103,10	100,82	99,29	101,37
Rata-rata (y to y)	99,75	99,71	100,84	102,71	98,45	99,53

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di empat kabupaten di Provinsi Banten pada Oktober 2022, NTP secara umum mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen dibandingkan NTP September 2022. Kenaikan NTP yang terjadi pada Oktober 2022 ini dikarenakan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 0,30 persen dan turunnya indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,09 persen.

Pada Oktober 2022 ini, kenaikan indeks NTP terjadi pada 1 subsektor, yaitu: Subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,29 persen.



Gambar 2. 21
Nilai Tukar Petani (NTP) Bulanan Provinsi Banten Tahun 2021-2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Pada Oktober 2022 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Banten sebesar 100,61, apabila dibandingkan dengan bulan lalu mengalami penurunan sebesar 0,20 persen. Hal ini terjadi karena kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,30 persen. Jika dilihat per subsektor, penurunan NTUP terjadi pada empat subsektor, yaitu pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 2,36 persen, sub sektor Hortikultura sebesar 2,17 persen, subsektor Peternakan sebesar 0,97 persen dan subsektor Perikanan sebesar 0,82 persen.

Tabel 2. 41
Perkembangan Nilai Tukar Usaha Petani (NTP) Bulanan Menurut Sub Sektor di Provinsi Banten Januari-Oktober 2022

Bulan	Perkembangan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Bulanan Menurut Subsektor di Provinsi Banten					
	Tanaman Pangan	Tanaman Holtikultura	Tanaman Perkebunan Rakyat	Peternakan	Perikanan	NTP Gabungan
Januari	101,04	97,74	119,41	96,07	104,23	101,35
Februari	101,65	98,21	118,18	94,22	104,83	100,89
Maret	97,47	99,31	121,12	93,85	103,44	99,43
April	98,25	99,56	125,02	96,82	106,09	100,23
Mei	98,06	100,34	123,10	95,45	105,62	99,93
Juni	96,99	101,12	119,51	96,86	106,00	99,25
Juli	96,43	103,21	111,94	96,83	106,14	98,66
Agustus	99,64	100,21	111,53	95,89	105,74	100,26
September	100,90	100,47	107,56	95,96	103,16	100,81
Oktober	101,47	98,29	105,03	95,02	102,32	100,61
November						
Desember						

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Pada Bulan Oktober 2022, dari 34 Provinsi di Indonesia sebanyak 28 Provinsi yang NTP-nya berada di atas angka 100. NTP tertinggi dicapai oleh Provinsi Riau dengan nilai indeks sebesar 143,86 yang diikuti oleh Provinsi Kalimantan Barat sebesar 136,85. Sedangkan Nilai Tukar Petani terendah terjadi di Provinsi NTT sebesar 95,83. NTP Nasional sebesar 107,27 yang mengalami peningkatan sebesar 0,42 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 106,82.

2.1.3.3 Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Secara definisi, Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah kegiatan pengusahaan panas bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan non-listrik yang di dalamnya meliputi kegiatan wisata, agribisnis, industri dan kegiatan lainnya yang menggunakan panas bumi secara langsung.

Tabel 2. 42
WKP, Lokasi Potensi, Potensi (MW) dan Luas WKP

NO	WKP	LOKASI POTENSI	POTENSI (MW)	LUAS WKP
1	Kaldera Danau Banten	1. Rawa Dano : 85 MW 2. Gunung Karang : 86 MW 3. Gunung Pulosari : 87	115 (possible)	104.200 Ha
2	Gunung Endut	Gunung Endut : 88 MW	80 (Cadangan Terduga)	25.870 Ha

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

- Kaldera Danau Banten: Surat Keputusan Kementerian ESDM Nomor 0026/K/30/MEM/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- Gunung Endut: Surat Keputusan Kementerian ESDM Nomor 1154/K/30/MEM/2011 tanggal 21 April 2011.

Tabel 2. 43
Non WKP, Lokasi Potensi, Potensi (MW) dan Luas WKP

NON WKP	LOKASI POTENSI	POTENSI (MW)	LUAS NON WKP
Pamancalan	Pamancalan : 225 MW	225 (Cadangan Terduga)	N/A

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Pada Tahun 2021, terdapat 2 (dua) WKP Panas Bumi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan akan diinventarisir 4 (empat) wilayah sumber panas bumi di Banten yang diperkirakan memiliki potensi pemanfaatan langsung (manifestasi) yang jumlahnya belum diketahui (N/A) dan belum ada pengembangan atau rencana pemanfaatannya sampai dengan kondisi 2021, yaitu:

1. Wilayah Rawa Dano;
2. Wilayah Gunung Karang;
3. Wilayah Gunung Pulosari; dan
4. Wilayah Gunung Endut.

2.1.3.4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Kualitas Lingkungan Hidup

Penguatan aspek perencanaan dalam upaya menurunkan emisi dan intensitas emisi GRK telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan menjadikan Pembangunan Rendah Karbon menjadi salah satu program prioritas di dalam salah satu agenda Prioritas Nasional 6 (PN 6) “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim” di dalam RPJMN 2020-2024. Dalam mewujudkan visi pembangunan rendah karbon, ditetapkan 5 strategi utama, yaitu:

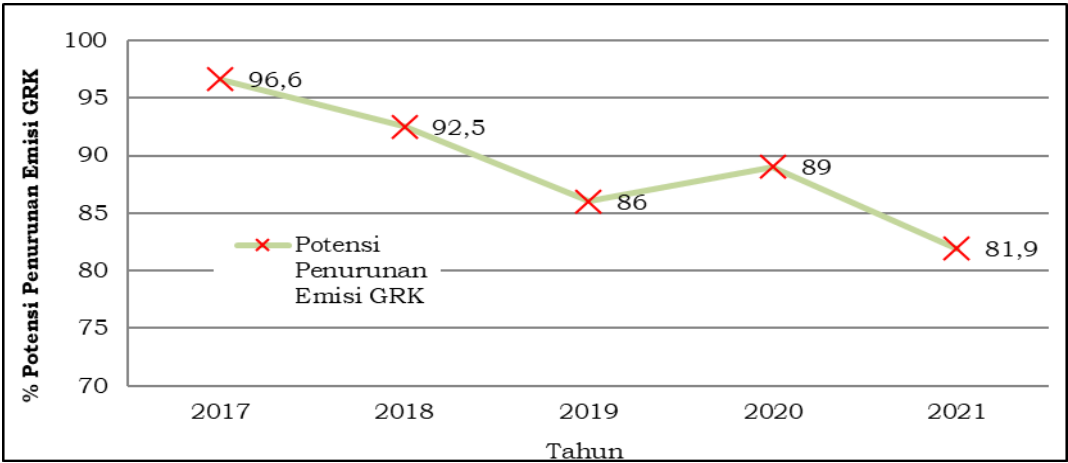
1. Pembangunan energi berkelanjutan;
2. Pemulihan lahan berkelanjutan;
3. Penanganan limbah;
4. Pengembangan industri hijau; dan
5. Inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan.

Implementasi kegiatan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Provinsi Banten telah dilaksanakan sejak Tahun 2010, dimulai dengan penyusunan dan implementasi RAD-GRK dan dilanjutkan dengan PRK. Kegiatan PRK di Provinsi Banten dikoordinasikan oleh Bappeda dan implementasi dilaksanakan oleh OPD teknis terkait di bidang kehutanan dan lahan gambut, energi, transportasi, pertanian, dan pengelolaan limbah.

Tabel 2. 44
Capaian Penurunan dan Intensitas Emisi GRK Tahun 2017-2021
(Juta ton CO₂e)

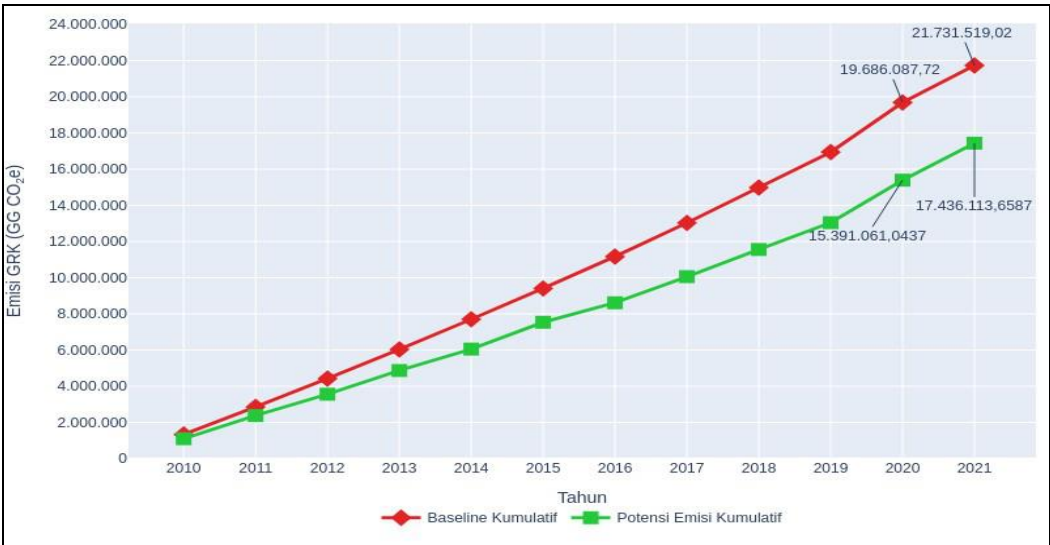
URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta ton CO ₂ e)	660.682,1 juta ton CO ₂ e atau 96,6 %	1.557.812,6 juta ton CO ₂ e atau 92,5 %	3.121.692,9 juta ton CO ₂ e atau 86 %	2.648.382,7 juta ton CO ₂ e atau 89 %	4.734.614 juta ton CO ₂ e atau 81,9 %

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022



Gambar 2. 22
Potensi Penurunan Emisi GRK Tahun 2017-2021 (Persen)
(Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022)

Pada tabel di atas terlihat Potensi Penurunan Emisi Rumah Kaca di Provinsi Banten cenderung fluktuatif. Secara total kumulatif sampai dengan Februari 2021, telah tercatat terdapat 1.166 kegiatan aksi PRK dalam sistem AKSARA dengan potensi capaian sebagai berikut.



Gambar 2. 23
Nilai Baseline dan Potensi Emisi Tahunan Kumulatif Tahun 2010-2021
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Potensi Penurunan Emisi GRK 4,734,614.0 juta ton CO₂e atau 81,9 persen dibandingkan dengan *baseline* tahun 2021. Pada tabel di bawah ini, terlihat bahwa terjadi kenaikan Emisi GRK dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2. 45
Realisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2018-2020 (Persen)

URAIAN	2018		2019		2020	
	T	R	T	R	T	R
Emisi Gas Rumah Kaca (Persen)	44,17	49,02	44,67	56,86	50,87	62,94

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Penurunan dan Intensitas Emisi GRK sektoral :

1) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut
Total kegiatan Tahun 2021 yang dalam sistem AKSARA adalah sebesar 0 (nol) kegiatan, dengan total keseluruhan sampai dengan Februari 2021, sebanyak 1.011.

Kegiatan yang paling banyak melakukan kegiatan penanaman (rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, pembagian bibit, dan sebagainya), pembangunan dan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm, Hutan Desa, Hutan Kota, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat), serta kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan (baik dari kebakaran hutan, perambahan, maupun illegal logging).

2) Bidang Pertanian
Total kegiatan tahun 2021 yang dalam sistem AKSARA adalah sebesar 0 (nol) kegiatan, dengan total keseluruhan sampai dengan Februari 2021, sebanyak 107. Kegiatan yang paling banyak dilaporkan pada bidang pertanian adalah kegiatan Pengelolaan Tanaman Terpadu.

3) Bidang Energi
Total kegiatan tahun 2021 yang dalam sistem AKSARA adalah sebesar 0 (nol) kegiatan, dengan total keseluruhan sampai dengan Februari 2021, sebanyak 26. Kegiatan mitigasi yang mendominasi pelaporan pada bidang energi adalah kegiatan pembangunan energi terbarukan *off grid* dalam bentuk pembangunan PLTS dan PLTMH. Selain itu, kegiatan mitigasi berupa substitusi bahan bakar fosil juga banyak dilaporkan. Kegiatan pendukung yang

banyak dilaporkan adalah program sosialisasi ataupun penyusunan *feasibility study* suatu pembangunan infrastruktur energi terbarukan.

4) Bidang Transportasi

Total kegiatan tahun 2021 yang dalam sistem AKSARA adalah sebesar 0 (nol) kegiatan, dengan total keseluruhan sampai dengan Februari 2021, sebanyak 8 (delapan). Aksi mitigasi yang mendominasi pelaporan antara lain aksi mitigasi hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), reformasi sistem transit (BRT), dan *Smart Driving (Eco Driving)*.

5) Bidang Pengelolaan Limbah

Total kegiatan tahun 2021 yang dalam sistem AKSARA adalah sebesar 0 (nol) kegiatan, dengan total keseluruhan sampai dengan Februari 2021, sebanyak 14. Kegiatan yang banyak dilakukan oleh Provinsi meliputi:

- a. Sub bidang persampahan domestik: pemanfaatan gas metan di TPA, proses komposting di TPST/TPS 3R, dan proses *reuse* dan *recycle* sampah kertas/kardus/karton di Bank Sampah;
- b. Sub-bidang air limbah: operasionalisasi IPAL atau septic tank komunal, baik itu secara *aerobic* dan *anaerobic*.

2.1.3.5 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi antara lain:

- a. Komponen Pengungkit:
 - 1) Pemenuhan;
 - 2) Hasil antara area perubahan; dan
 - 3) Reform.
- b. Komponen Hasil:
 - 1) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
 - 2) Kualitas Pelayanan Publik;
 - 3) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN; dan

4) Kinerja Organisasi.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan. Semula, tahun 2018 Indeks Reformasi Birokrasi tercatat 55,08 (kategori C), lalu 2019 tercatat 60,12 (kategori B), di tahun 2020 indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten adalah 61,12 (Kategori B) dan 63,11 (Kategori B) di tahun 2021, walaupun menunjukan kenaikan namun tingkat perkembangannya masih belum optimal, hanya naik 1,99 poin dari 2020 ke 2021.

Tabel 2. 46
Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2022 (Nilai)

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	2020	2021	2022
A	Komponen Pengungkit				
1	Pemenuhan	20	17,29	17,58	17,47
2	Hasil antara area perubahan	10	5,67	6,58	6,72
3	Reform	30	8,47	9,52	10,26
	<i>Total Komponen Penilaian</i>	60	31,43	41,38	34,45
B	Komponen Hasil				
1	Akuntabilitas kinerja dan Keuangan	10	7,59	7,61	7,70
2	Kualitas pelayanan publik	10	8,53	8,47	9,14
3	Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	10	8,93	6,42	8,34
4	Kinerja organisasi	10	4,64	6,93	6,48
	<i>Total Komponen Hasil</i>	40	29,69	29,43	31,66
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100	61,12	63,11	66,11

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Reformasi Birokrasi terdiri dari dua komponen yaitu pengungkit dan komponen hasil, sehingga diperoleh Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 sebesar 66,11 (kategori B). Hasil evaluasi tersebut menunjukkan Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan, hasil antara dan reform, namun belum diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.

2.1.3.6 Rasio Ketergantungan

Pada tahun 2021, Penduduk Banten angkatan kerja sebanyak 63,79 persen, dan hanya 36,21 persen penduduk bukan angkatan kerja. Dari data tersebut diperoleh angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Banten sebesar 56,76 persen.

Tabel 2. 47
Tingkat Ketergantungan/Rasio Ketergantungan Provinsi Banten
Tahun 2018-2021 (persen)

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 tahun (Jiwa)	8.706.909	8.879.282	8.331.538	6.260.654
2	Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun dan Usia >64 Tahun (Jiwa)	3.982.827	4.048.034	3.573.024	3.553.680
3	Angka Ketergantungan Penduduk	45,74	45,59	42,89	56,76

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan wajib dasar yang mana dalam pelaksanaannya wajib diselenggarakan oleh daerah. Lebih lanjut yang menjadi bagian dalam Layanan Urusan Wajib Dasar pilihan ini meliputi:

A. Bidang Urusan Pendidikan

Pendidikan memegang peranan yang penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat amanat agar Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2028 tentang Standar Teknis Pelayanan minimal Pendidikan

Bab II Pasal 5 ayat (1) Jenis Pelayanan Daerah pada SPM Pendidikan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan Pendidikan kesetaraan. Ayat (2) Jenis Pelayanan Daerah pada SPM Pendidikan daerah Provinsi terdiri atas pendidikan menengah, Pendidikan khusus.

Pemerintah Provinsi melakukan intervensi kepada Kabupaten/Kota melalui Bantuan keuangan guna memenuhi capaian Penerapan SPM bidang Pendidikan jenis pelayanan dasar Pendidikan Menengah Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs).

Dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga memiliki beberapa kewajiban diantaranya:

- Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan gratis bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2018 sudah mengimplementasikan program pendidikan gratis melalui skema biaya operasional sekolah (BOS dan BOSDA) dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran untuk SMA/SMK/SKh Negeri dan Swasta;
- Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, serta wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Tabel 2. 48
Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	109,5	107,93	107,24	106,91	106,91
2	SMP/MTs	91,71	91,61	92,76	94.88	94.88
3	SMA/SMK/MA	71,7	72,92	73,35	75,66	75,66

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni merepresentasikan dimensi partisipasi pendidikan pada tingkat SD/MI sampai SMA/MA. Selama periode 2018 hingga 2022, Banten telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Kasar tingkat SMA/SMK/MA sebesar 75,66, dan Angka partisipasi murni SMA/MA sebesar 59,54 poin.

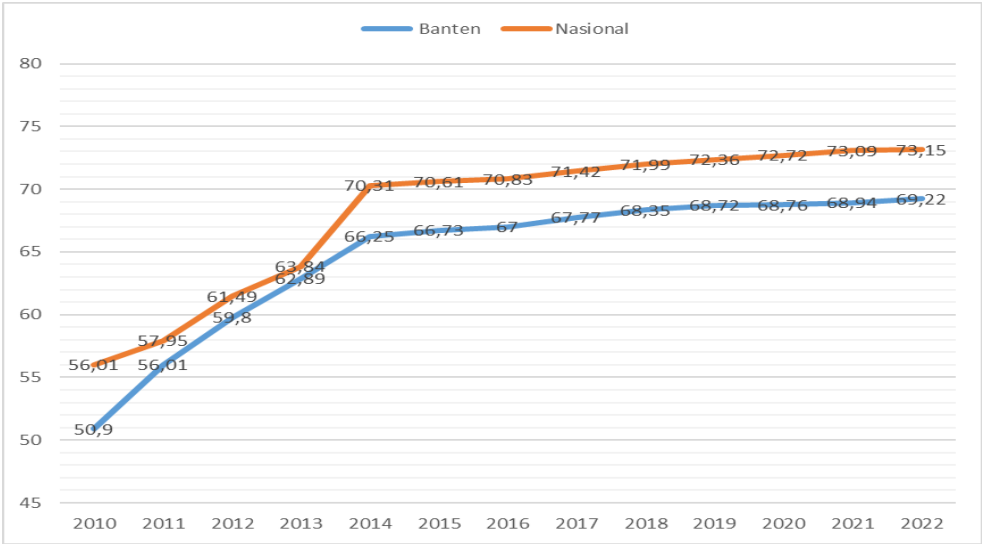
Tabel 2. 49
Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	97,56	97,97	97,98	97,95	98,15	97,93
2	SMP/MTs	80,59	80,91	81,93	82,73	84,28	84,67
3	SMA/SMK/MA	57,88	58,72	58,8	59,06	59,69	59,54

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan tabel dan gambar di bawah, terlihat bahwa realisasi APS di Provinsi Banten sering berada di bawah rata-rata realisasi nasional. Bahkan mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 terlihat bahwa nilai APS Provinsi Banten konsisten di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS, realisasi APS Provinsi Banten sebesar 68,94 pada tahun 2021 menduduki peringkat kelima terendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan nilai APS tahun 2021, Provinsi Banten hanya lebih baik dibandingkan Provinsi Papua, Kaliman Tengah, Jawa Barat dan Bangka Belitung.

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Banten	50,9	56,01	59,8	62,89	66,25	66,73	67	67,77	68,35	68,72	68,76	68,94	69,22
Nasional	56,01	57,95	61,49	63,84	70,31	70,61	70,83	71,42	71,99	72,36	72,72	73,09	73,15



Gambar 2. 24
Perbandingan APS Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2003-2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Kualitas SDM yang baik dapat diwujudkan salah satunya melalui pembangunan pendidikan. Pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata menjadi target pelaksanaan pembangunan pendidikan di Banten dan sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's). Beberapa upaya dilakukan untuk mendukung pencapaian pembangunan pendidikan.

Laporan SPM bidang pendidikan tahun 2021 merupakan laporan yang menggambarkan indikator-indikator keberhasilan SPM pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Banten serta Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yang hasilnya dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan SPM dalam Sektor Pendidikan selama Tahun Anggaran 2021.

Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan meliputi pendidikan menengan dan pendidikan khusus, berikut capaian SPM untuk bidang pendidikan.

Tabel 2. 50
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pendidikan Menengah Atas Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	138.205	138.205	100	129.081	129.081	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	Pendidikan Khusus Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	1.198	1.198	100	1.282	1.282	100

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, telah berupaya maksimal menerapkan standar mutu pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 dan berdasarkan data capaian dapat tercapai dengan relatif baik, tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi diantaranya yaitu terkait mutu pendidikan yang harus lebih ditingkatkan agar mutu dan relevansi pendidikan di Provinsi Banten dapat bersaing dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.

Berdasarkan data capaian SPM, terdapat 2 (dua) standar yang perlu diperhatikan yaitu standar sarana dan prasarana serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang data capaiannya masih di bawah beberapa indikator standar yang lain.

B. Bidang Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini dapat kita lihat dari capaian indikator pada Urusan Kesehatan. Pemerintah Provinsi Banten terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan cakupan akses kesehatan bagi masyarakat Banten. Capaian pada indikator menunjukkan capaian urusan kesehatan menunjukkan ketercapaian target kinerja yang tinggi terutama pada penurunan jumlah kematian ibu yang tercatat dari 242 kematian ibu menurun menjadi 198, dan penurunan kematian bayi juga mengalami penurunan dari 1.670 menjadi 1.157 kematian bayi.

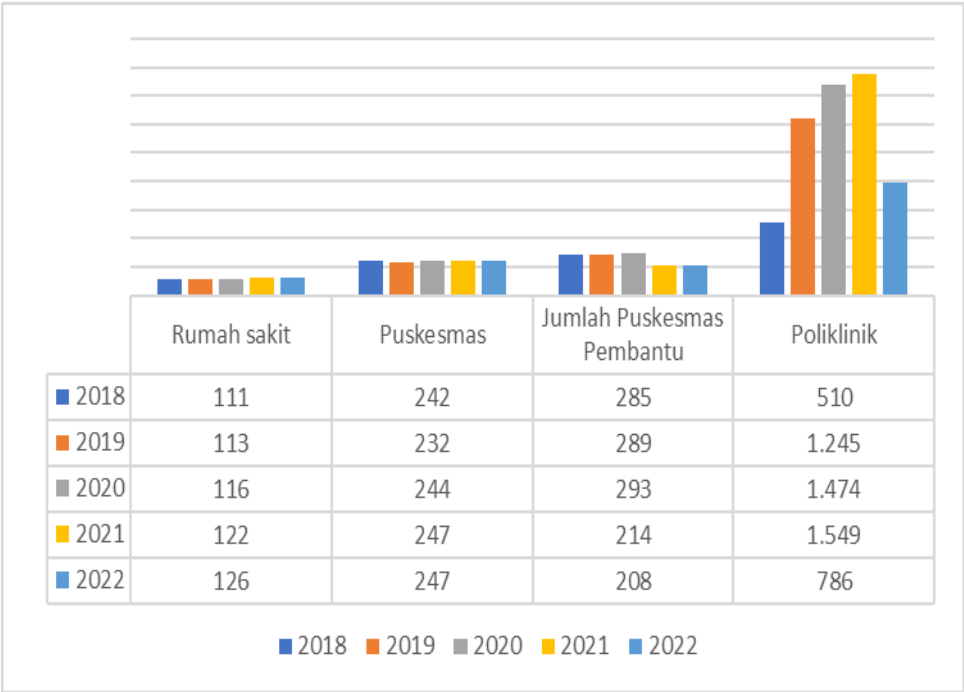
Capaian indikator urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten tergambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 51
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	2018		2019		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Penurunan Jumlah Kematian Ibu (orang)	247	257	242	222	237	242	232	198	227	193
2	Penurunan Jumlah Kematian Bayi (orang)	1149	1158	1144	1299	1139	1670	1134	1157	1.129	1.107
3	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan (%)	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Banten	60	121,67	65	112,75	70	100,66	75	101,87	80	80,82
5	BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Malingping	60	122,15	65	127,75	65	108,4	70	101,26	75	75,06

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

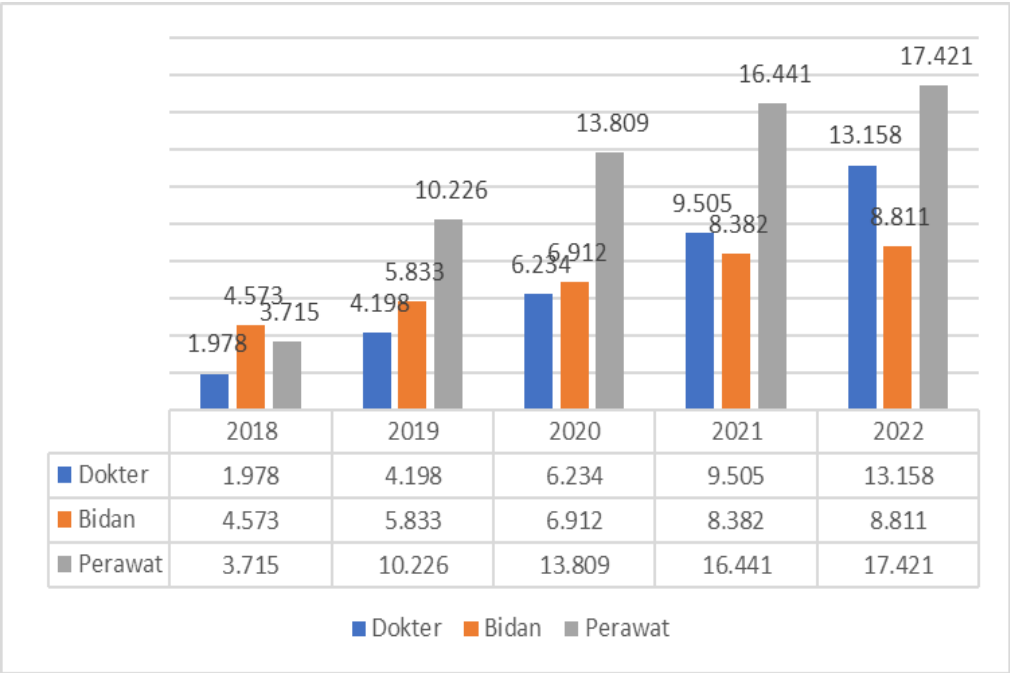
Selanjutnya pada fasilitas sarana kesehatan tercatat data terakhir yaitu rumah sakit sebanyak 126 unit, poliklinik 786 unit, puskesmas 247 unit, puskesmas pembantu 208 unit dan di tahun mendatang diharapkan ketersediaan infrastruktur kesehatan semakin meningkat.



Gambar 2. 25
Fasilitas Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2018-2022 (Unit)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Tenaga Kesehatan di Provinsi Banten semakin menunjukkan jumlah yang meningkat apalagi dengan terbangunnya jumlah Rumah

Sakit, peningkatan terbanyak adalah tenaga kesehatan perawat yang menunjukkan penambahan setiap tahunnya.



Gambar 2. 26
 Tenaga Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2018-2022 (Jiwa)
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021)

Selanjutnya, berkaitan dengan stunting, berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesi (SSGI) tahun 2022, telah terjadi penurunan prevalensi stunting secara nasional dari 24,40 persen pada tahun 2021 (SSGBI 2021) menjadi 21,6 persen tahun 2022 (SSGI 2022) atau turun sekitar 2,8 persen. Prevelensi *Stunting* di Provinsi Banten berada di bawah nasional yakni 20 persen atau turun 4,5 persen dari tahun 2021 sebesar 24,5 persen. Hanya Kota Serang yang menunjukan kenaikan Prevalensi Stunting yaitu naik sebesar 0,8 persen, 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mengalami penurunan yaitu Kabupaten Pandeglang turun sebesar 8,4 persen Kabupaten Lebak turun sebesar 1,1 persen, Kabupaten Tangerang turun sebesar 2,2 persen Kabupaten Serang turun sebesar 0,8 persen dan Kota Tangerang turun sebesar 3,5 persen, Kota Cilegon turun sebesar 1,5 persen, Kota Tangerang Selatan turun sebesar 10,9 persen. Adapun kabupaten/kota lainnya berhasil menurunkan angka *stunting* dimana penurunan terbanyak adalah Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2. 52
Prevalensi *Stunting* Tahun 2018-2022 (Persen)

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2021	2022
1	Kabupaten Pandeglang	39,47	33,00	37,80	29,4
2	Kabupaten Lebak	40,19	33,10	27,30	26,2
3	Kabupaten Tangerang	23,23	16,80	23,30	21,1
4	Kabupaten Serang	32,04	38,60	27,20	26,4
5	Kota Tangerang	19,07	16,40	15,30	11,8
6	Kota Cilegon	23,32	28,20	20,60	19,1
7	Kota Serang	24,62	28,20	23,40	23,8
8	Kota Tangerang Selatan	19,85	14,40	19,90	9
PROVINSI BANTEN		26,58	23,40	24,50	20
INDONESIA		30,80	27,67	24,40	21,6

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Anak bebas gizi buruk merupakan komitmen bersama yang tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s), dimana pentingnya mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi serta pertanian yang berkelanjutan. Balita dengan gizi buruk mempunyai dampak jangka pendek dan panjang berupa gangguan tumbuh kembang termasuk kognitif/ *stunting*, kesakitan, risiko penyakit degeneratif di kemudian hari.

1. Realisasi 29 Indikator Sesuai Perpres 72 Tahun 2021

Tabel 2. 53
Realisasi 29 Indikator

No	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian (persen)	Realisasi Rata-rata Kab/Kota (persen)	Keterangan
1.	Remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Target : 58 Tahun : 2024	59,21	
2.	Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Target : 90 Tahun : 2024	12,13	
3.	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	Target : 90 Tahun : 2024	28,07	
4.	Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Target : 90 Tahun : 2024	42,63	
5	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan	Target : 90 Tahun : 2024	29,38	

No	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian (persen)	Realisasi Rata-rata Kab/Kota (persen)	Keterangan
	edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah			
6.	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	Target : 90 Tahun : 2024	19,46	
7.	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	Target : 90 Tahun : 2024	23,64	
8.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	Target : 90 Tahun : 2024	19	
9.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	Target : 90 Tahun : 2024	49,09	
10.	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Target : 90 Tahun : 2024	85,71	
11.	Ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Target : 80 Tahun : 2024	90	
12.	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	Target : 7,4 Tahun : 2024	16,06	
13.	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	Target : 15,5 Tahun : 2024	7,73	
14.	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	Target : 80 Tahun : 2024	63,61	
15.	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Target : 80 Tahun : 2024	81,59	
16.	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Target : 90 Tahun : 2024	78,32	
17.	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Target : 90 Tahun : 2024	79,05	

No	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian (persen)	Realisasi Rata-rata Kab/Kota (persen)	Keterangan
18.	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Target : 90 Tahun : 2024	80,48	
19.	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Target : 90 Tahun : 2024	74,25	
20.	Keluarga yang Stop BABS	Target : 90 Tahun : 2024	75,55	
21.	Keluarga yang melaksanakan PHBS	Target : 70 Tahun : 2024	56,84	
22.	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Target : 90 Tahun : 2024	40,51	
23.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan	Target : 70 Tahun : 2024	55,25	
24.	Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Target : 90 Tahun : 2024	45,34	
25.	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Target : 50 Tahun : 2024	25	
26.	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Target : 100 Tahun : 2024	68,06	
27.	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Target : 90 Tahun : 2024	70,03	
28.	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	Target : 90 Tahun : 2024	19,24	
29.	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	Target : 90 Tahun : 2024	9,64	

Sumber data: hasil input pada web Bangda.Kemendagri

2. Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Bagi Kabupaten/Kota
 Penilaian Dilaksanakan Pada Tanggal 15 Juni 2022 di Bappeda
 Provinsi Banten Dengan Hasil Sebagai Berikut:

Tabel 2. 54
 Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Bagi Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL SKOR	PERINGKAT	SK TIM PENILAI
1.	KOTA TANGERANG	80	I	KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 002.6/KEP.235-HUK/2022
2.	KABUPATEN TANGERANG	77	II	
3.	KABUPATEN SERANG	76	III	
4.	KOTA TANGERANG SELATAN	75	IV	
5.	KABUPATEN LEBAK	63	V	
6.	KABUPATEN PANDEGLANG	56	VI	
7.	KOTA SERANG	43	VII	

3. Data Cakupan Inervensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi

Tabel 2. 55
 Data Cakupan Inervensi

No	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Realisasi
1	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Target : 100 % Tahun : 2022	100%
2	Jumlah Provinsi dan kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan	Target : 100% prov dan kab/kota Tahun : 2022	100%

No	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Realisasi
Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)			
3	Persentase Pemerintah Daerah Provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	Target : 100 % Provinsi Tahun : 2023	100%
4	Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	Target : 100% kab/kota Tahun : 2023	100%
5	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah Provinsi	2 Kali tiap tahun	1 kali
6	Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting	Target : 100% kab/kota Tahun : 2024	37,5% (Kab.Lebak, Kab.Pandeglang, Kab.Serang)
7	Persentase Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting	Target : 90% prov dan kab/kota Tahun : 2024	87,5% (7 kab.Kota)
8	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Target : 100% kab/kota Tahun : 2024	Kewenangan Kab/Kota

Jenis pelayanan dasar SPM bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu:

- a. Pelayanan dasar bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat dan/atau berpotensi bencana Provinsi; dan
- b. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa.

Tabel 2. 56
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021-2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A	Presentase Pelayanan Kesehatan Terdampak Krisis Kesehatan akibat dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi	115.464	115.464	100%	164.283	164.283	100%
B	Presentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak dan Beresiko Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prsentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	61.613	61.613	100%	179	179	100%

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan antara lain:

- Kurangnya sosialisasi, masih belum jelasnya konsep pelayanan dasar;
- Penetapan target SPM yang terlalu tinggi;
- Tidak adanya sistem insentif dan disinsentif; dan
- Keterbatasan anggaran daerah dan minimnya kualitas SDM.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan peninjauan kembali konsep layanan dasar, peningkatan sosialisasi, peninjauan target capaian SPM, serta pemberlakuan *reward* dan *punishment*, pengalokasian anggaran harus menjadi skala prioritas serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan bidang urusan pekerjaan umum di Provinsi Banten menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa indikator, seperti Tingkat Kemantapan Jalan, Kondisi Baik Jaringan Irigasi, Cakupan Pelayanan Air Minum dan lain-lain. Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar, yang perlu diperhatikan adalah layanan irigasi yang dipergunakan untuk pengairan sawah juga mengalami kenaikan luas layanan dari sebelumnya 16.051,13 Ha saat ini 16.411,00 Ha namun dalam 30 tahun terakhir masih belum ada penambahan luasan irigasi. Untuk penyediaan air baku juga mengalami penurunan, jika kita lihat sebelumnya bisa 100 persen namun saat ini hanya 85 persen, untuk lebih rinci digambarkan pada table di bawah ini.

Tabel 2. 57
Target dan Capaian RPJMD, RKPD Indikator Kinerja Urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	2018		2019	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)		91,4		98,15
2	Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)		-		-
3	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi (%)		20,84		26,89
4	Luasan Layanan Irigasi (Ha)	-	15.312,06	-	15.826.06
5	Persentase Penyediaan Prasarana Air Baku (%)	-	-	-	-
6	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)		88,5		88,7
7	Persentase Tersusunnya Perda rencana Tata Ruang 8 kawasan strategis Provinsi (%)		-		-
8	Persentase kesesuaian pembinaan Pemanfaatan ruang		-		-

NO	INDIKATOR	2020		2021	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	100	94,44	100	98
2	Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	93,5	91,1	100	93,6
3	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi (%)	32,65	27,2	37,09	27,28
4	Luasan Layanan Irigasi (Ha)	18.110,58	16.051,13	19.387	16.411
5	Persentase Penyediaan Prasarana Air Baku (%)	100	100	100	85,49
6	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	87,5	96,43	90	90
7	Persentase Tersusunnya Perda rencana Tata Ruang 8 kawasan strategis Provinsi (%)		20		20
8	Persentase kesesuaian pembinaan Pemanfaatan ruang		100		90

NO	INDIKATOR	2022	
		TARGET	CAPAIAN
1	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	100	99,04
2	Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	100	94,25
3	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi (%)	42,42	67,56
4	Luasan Layanan Irigasi (Ha)	20,888,19	80,44
5	Persentase Penyediaan Prasarana Air Baku (%)	100	85,46
6	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	92,5	104,76
7	Persentase Tersusunnya Perda rencana Tata Ruang 8 kawasan strategis Provinsi (%)		90
8	Persentase kesesuaian pembinaan Pemanfaatan ruang		96,9

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Urusan Penataan Ruang di Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030. Proses Rencana Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Banten yang mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil saat ini masih dalam tahap paripurna dan belum disahkan, sehingga masih menunggu dokumen untuk segera disahkan.

Pada tahun 2022, dari 762,03 km Jalan Provinsi di Provinsi Banten, sepanjang 629,36 km dalam kondisi baik (82,59 persen), kemudian 125,78 km dalam kondisi sedang (16,51 persen), dalam kondisi rusak sebesar (0,90%). Jalan provinsi terpanjang berada di Kabupaten Pandegelang yaitu sepanjang 184,98 km.

Tabel 2. 58
 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan
 Tahun 2014-2022 (Km)

KONDISI JALAN	PANJANG JALAN PROVINSI MENURUT KONDISI JALAN								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Baik	384,79	384,79	432,13	432,13	549,41	598,44	598,44	614,41	627,40
Sedang	194,32	194,32	170,69	170,69	147,13	120,99	120,99	132,42	127,27
Rusak	60,31	60,31	75,58	75,58	43,19	15,83	15,83	6,14	3,65
Rusak Berat	213,47	213,47	83,62	83,62	22,30	26,77	26,77	9,06	3,71
JUMLAH	852,89	852,89	762,03	762,03	762,03	762,03	762,03	762,03	762,03

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Realisasi yang dapat dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2021-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 59
 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Tahun 2021-2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		TARGET	JUMLAH ABSOLUT	CAPAIAN (%)	TARGET	JUMLAH ABSOLUT	CAPAIAN (%)
1	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	100%	400 l/dtk	100,00	100%	10 l/dtk	10,00
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	100%	2000 jiwa	100%	0 %	0 jiwa	0 %

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

- Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota dialokasikan untuk wilayah layanan pembangunan WTP Sindang Heula (800 lt/detik) yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon;
- Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas Kabupaten/Kota, melalui pembangunan IPAL komunal.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan kawasan pemukiman di Provinsi Banten menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari capaian indikator luasan kawasan kumuh yang diperbaiki dan penanganan rumah layak huni yang diperbaiki. Dimana terjadi peningkatan kawasan kumuh yang ditangani, meningkat signifikan dari 292,04 Ha menjadi 391,60 Ha. kemudian persentase rumah layak huni yang realisasinya kembali naik dari 70,71 persen menjadi 85,88 persen.

Tabel 2. 60
Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luasan Kawasan Kumuh yang Ditangani (Ha)	58,22	101,16	71,4	292,04	391,60
2	Persentase Rumah Layak Huni (%)	97,01	93,13	86,34	70,71	85,88
3	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (%)	36	39	75	88	66,67
4	Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah (%)	0	0	5	10	0

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Sementara itu sumber air minum bersih dan sanitasi layak menjadi salah satu fasilitas perumahan yang berperan penting dalam kehidupan sehari- hari. Namun keberadaan keduanya ternyata masih menjadi masalah karena belum 100 persen terakses sumber air minum layak. Tercatat, dari tahun 2017 sampai tahun 2022 terjadi kenaikan persentase rumah tangga dengan air minum layak dan sanitasi layak setiap tahunnya. Secara rata-rata pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak baru mencapai 66,11 persen dan terus meningkat setiap tahunnya, dan pada akhir tahun 2022 sudah mencapai 92,71 persen.

Tabel 2. 61
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Persen)

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pandeglang	39,50	41,93	45,96	75,83	82,01	77,27
2	Kab. Lebak	35,58	44,09	37,97	73,49	73,72	73,27
3	Kab. Tangerang	73,20	80,95	80,26	98,48	97,97	98,55
4	Kab. Serang	59,20	65,73	68,34	89,95	92,33	91,91
5	Kota Tangerang	78,93	88,64	89,60	98,37	98,00	95,58
6	Kota Cilegon	80,85	83,23	88,85	94,98	98,72	99,08
7	Kota Serang	70,92	71,97	80,96	99,10	98,38	97,61
8	Kota Tangerang Selatan	77,46	81,85	78,33	99,08	99,22	98,64
PROVINSI BANTEN		66,11	72,83	73,17	92,87	93,51	92,71

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Untuk sumber air minum yang tersedia sebagian besar diperoleh dari air dalam kemasan lalu pompa, dimana setiap tahun pemanfaatan air dalam kemasan makin meningkat namun di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,15 persen dan penggunaan pompa mengalami kenaikan sebesar 0,08 persen. Terlihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2. 62
 Persentase Sumber Air Minum di Provinsi Banten Tahun 2018-2022
 (Persen)

NO	JENIS SUMBER AIR MINUM	2018	2019	2020	2021	2022
1	Leding	3,46	3,11	2,93	2,08	2,00
2	Pompa	26,09	26,87	30,16	26,57	26,65
3	Air dalam Kemasan	52,81	53,03	52,43	56,14	54,99
4	Sumur terlindung	8,20	7,65	6,15	6,38	6,71
5	Sumur Tak terlindung	3,59	3,31	2,66	1,77	2,64
6	Mata Air Terlindung	2,69	2,36	2,53	3,92	3,94
7	Mata Air Tidak Terlindung	2,49	2,81	2,11	2,17	2,19
8	Air Permukaan	0,40	0,70	0,57	0,57	0,57
9	Air Hujan	0,09	0,16	0,22	0,22	0,22
10	Lainnya	0,18	0,00	0,24	0,17	0,06
JUMLAH		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Kebutuhan rumah bagi penduduk dari waktu ke waktu bertambah sesuai dengan peningkatan jumlah KK, karena rumah merupakan kebutuhan pokok penduduk disamping kebutuhan pangan dan sandang. Derajat kesehatan penghuni rumah dapat ditentukan dari tingkat kualitas rumah. Rumah yang sehat dan baik maka akan dapat memberikan rasa nyaman bagi penghuninya dan sekaligus membentuk rumah tangga yang sehat dan sejahtera. Untuk mewujudkan rumah layak huni harus dipenuhi dengan beberapa syarat. Syarat tersebut antara lain seperti luas lantai, jenis atap rumah, dinding dan atap yang digunakan, serta kelengkapan lainnya seperti sumber penerangan, sumber air minum dan fasilitas air minum, serta fasilitas sanitasi.

Tabel 2. 63
Jumlah Rumah Layak Huni Berdasarkan Kondisi di Banten
Tahun 2018-2022 (Unit)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun (Satuan : Unit)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Pandeglang	-	-	140,5	989.328	-
2	Kabupaten Lebak	293.902,00	293.902,00	296.776,00	1.078.946	297.807
3	Kabupaten Tangerang	1.922,00	-	835.328,00	2.958.251	-
4	Kabupaten Serang	-	-	147.090,00	1.468.840	-
5	Kota Tangerang	-	-	-	1.618.244	450
6	Kota Cilegon	91.046,00	91.046,00	91.046,00	392.195	-
7	Kota Serang	110.592,00	-	167.731,00	615.853	146.830
8	Kota Tangerang Selatan	328.037,00	327.902,00	328.114,00	1.161.039	-
Banten		825.499	712.850	1.866.225,50	10.282.696	445.087

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Jumlah rumah layak huni di Banten tahun 2021 meningkat dengan pesat dari 2020 sebesar 550,99 persen, dengan jumlah rumah layak huni terbanyak berada di Kabupaten Tangerang. Sedangkan di Tahun 2022 data yang tersedia hanya Kota Serang, kota Tangerang dan Kabupaten Lebak.

Tabel 2. 64
Jumlah Rumah Layak Tidak Huni Berdasarkan Kondisi di Banten
Tahun 2018-2022 (Unit)

NO	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Pandeglang	7.226,00	60.434,00	16.776,00	298.985	-
2	Kabupaten Lebak	47.701,00	45.927,00	42.888,00	328.910	43.796
3	Kabupaten Tangerang	19.387,00	11.469,00	19.992,00	335.281	-
4	Kabupaten Serang	3.336,00	-	3.336,00	178.949	2.580

NO	Kabupaten/ Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
5	Kota Tangerang	2.177,00	-	2.177,00	293.669	-
6	Kota Cilegon	524	524	545	49.565	-
7	Kota Serang	9.511,00	-	2.862,00	88.764	21.100
8	Kota Tangerang Selatan	2.736,00	17.248,00	2.869,00	204.648	-
	Provinsi Banten	92.598,00	135.602,00	91.445,00	1.778.771,00	67.476

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Jumlah rumah layak tidak huni di Banten tahun 2022 menurun drastis dari Tahun 2021.

Tabel 2. 65

Jumlah Tempat Pengolahan Sampah (TPS)

2018-2021 (unit)

Tahun

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pandeglang	2	2	2	2
Kabupaten Lebak	38	38	38	38
Kabupaten Tangerang	35	35	35	35
Kabupaten Serang	172	172	178	172
Kota Tangerang	-	-	35	339
Kota Cilegon	204	204	204	204
Kota Serang	158	158	158	158
Kota Tangerang Selatan	51	51	51	51
PROVINSI BANTEN	660	660	701	999

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Jumlah Tempat Pengolahan Sampah (TPS) di Banten cenderung fluktuatif, mengalami penurunan jumlah pada tahun 2020, lalu meningkat kembali pada tahun 2021.

Tabel 2. 66
Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Tahun 2018-2021 (unit)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pandeglang	-	-	-	-
Kabupaten Lebak	2,00	2,00	-	-
Kabupaten Tangerang	30,00	30,00	30,00	-
Kabupaten Serang	-	-	3,00	-
Kota Tangerang	-	-	-	-
Kota Cilegon	7,00	7,00	7,00	-
Kota Serang	12,00	12,00	12,00	-
Kota Tangerang Selatan	1,00	1,00	1,00	16
PROVINSI BANTEN	52	52	51	16

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Banten pada tahun 2021 hanya ada di Kota Tangerang Selatan sejumlah 16 unit, sedangkan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sejumlah 13 unit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi korban bencana;
2. Fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Realisasi yang dapat dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2020-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 67
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2020-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	483	68.41%	100 %	66	25.78%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak	100 %	0	0,00	100 %	0	0,00

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah melaksanakan program pengembangan perumahan, kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi, dengan sub kegiatan yang mendukung SPM ini adalah:

- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana, dengan target 116 unit;
- Pembangunan rumah bagi korban bencana, dengan target 140 unit.

Namun target tidak tercapai dikarenakan:

- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak mencapai target, dikarenakan keterbatasan SDM dalam pemasangan struktur teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA);
- Pembangunan rumah bagi korban tidak dapat dilaksanakan, karena adanya kendala dalam proses perjanjian kerjasama pelaksanaan;
- Penanganan rumah bagi korban bencana terkendala kesiapan lahan relokasi oleh Kabupaten/Kota;

- Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi pada Tahun 2021 tidak terlaksana karena terkendala *refocussing*. Selanjutnya tahun 2022 akan dilaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi relokasi korban program Pemerintah Daerah Provinsi.

E. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari indikator, rasio penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan realisasi 100 persen.

Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Dari tahun 2015 hingga tahun 2020, terjadi penurunan kasus tindak pidana sebanyak 7.741 kasus, namun penyelesaian tindak pidana di Provinsi Banten juga mengalami penurunan. Setiap tahunnya, jumlah tindak pidana lebih tinggi dibandingkan dengan penyelesaian tindak pidana. Hal ini menjadi cerminan untuk meningkatkan penegakkan hukum di Provinsi Banten.

Tabel 2. 68

Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Banten

Tahun 2017-2022 (Kasus)

NO	ITEM	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tindak Pidana	2.413	2.442	2.581	2.631	3.719	3.575
2	Penyelesaian Tindak Pidana	1.621	1.511	1.601	1.904	3.463	3.161

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

SPM Urusan Ketenteraan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub Urusan, yaitu:

- Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- Sub Urusan Kebakaran; dan
- Sub Urusan Bencana Daerah.

Sementara itu untuk jenis pelayanan dasar bagi Pemerintah Provinsi yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum daerah Provinsi, berikut hasil capaian terhadap SPM Trantibumlinmas.

Tabel 2. 69
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	1	1	100	4	4	100
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	15	15	100	15	12	80
3	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	-	-	-	0	0	0

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

F. Bidang Urusan Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah Penanganan PMKS, Provinsi Banten sejak Tahun 2018 terus meningkat. Walaupun terdapat penurunan pada tahun 2021, karena Pandemi COVID-19 Tahun 2020 jumlah PMKS meningkat, dengan anggaran yang ada cakupan penanganannya hanya 2,68 persen, tapi di Tahun 2022 meningkat kembali mencapai 6,98 persen.

Tabel 2. 70
Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018-2022

INDIKATOR	PENANGANAN PMKS				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penanganan Jumlah PMKS (%)	4,8	6,46	6,41	2,68	6,98

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Jenis pelayanan dasar bidang sosial meliputi: (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam

panti, (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi. Terkait 5 (lima) hal tersebut berikut capaian SPM bidang sosial.

Tabel 2. 71
Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021-2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	30	30	100	40	40	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti	20	20	100	25	25	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti	60	60	100	60	60	100
4	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	40	25	62,50	85	85	100
5	Perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana Provinsi	1.300	1630	125,38	2534	2534	100

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

1. Permasalahan yang dihadapi antara lain:
 - Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi; dan
 - Pemerintah Provinsi Banten baru memiliki 2 (dua) UPTD yang melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yaitu UPTD Perlindungan Sosial dan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial.
2. Tindak lanjut antara lain:
 - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah, panti sosial milik masyarakat yang menangani PMKS terlantar;
 - Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif

panti sosial milik masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan permasalahan sosial; dan

- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

2.1.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar menjadi bagian dalam urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan namun tidak termasuk pelayanan dasar di masyarakat. Lebih lanjut yang menjadi bagian dalam Layanan Urusan Wajib Non Dasar pilihan ini meliputi 18 bidang urusan:

A. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Pada urusan tenaga kerja merupakan hal yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, indikator yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Selama periode tahun 2018-2022 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini hasilnya sangat fluktuatif, terlihat dari capaian Tahun 2022 yang menurun dibandingkan dari tahun 2020, digambarkan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 72
Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022 (Nilai)

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022*
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	60,27	64,09	52,84	57,07	57,07

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022 (<https://satudata.kemnaker.go.id/publikasi>)

Selain itu terlihat bahwa penduduk bekerja menurut Pendidikan yang paling besar adalah penduduk berpendidikan SD, dimana ini mengalami fluktuasi, tahun 2020 tercatat 1.863.695 orang atau 30,49 persen dan di tahun 2021 sebesar 1.850.000 atau tercatat 32,40 persen, rincian seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 73
Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tahun 2018-2021 (Jiwa)

NO	KABUPATEN/KOTA	BEKERJA			
		2018	2019	2020	2021
1	SD Ke Bawah	1.897.372	1.845.005	1.863.695	1.850.000
2	SMP	925.425	1.016.856	1.008.633	999.000
3	SMA/SMK	1.735.174	1.916.651	1.930.268	1.270.000
4	Universitas	774.525	784.334	744.576	789.000
TOTAL		5.332.496	5.562.846	4.877.172	4.908.000

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

B. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat digambarkan dalam Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten pada tahun 2019 adalah 91,67, angka ini meningkat menjadi 91,83 pada tahun 2021.

Tabel 2. 74
Capaian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019-2021 (Nilai)

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BANTEN		
		2019	2020	2021
1	Kab Pandeglang	86.68	86.71	86.83
2	Kab Lebak	79.63	79.81	79.87
3	Kab Tangerang	90.97	90.98	91.08
4	Kab Serang	92.40	92.14	91.98
5	Kota Tangerang	94.89	95.06	94.72
6	Kota Cilegon	87.16	87.22	87.25
7	Kota Serang	91.96	92.28	92.47
8	Kota Tangerang Selatan	93.56	93.58	93.80
PROVINSI BANTEN		91.67	91.74	91.83

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Banten pada tahun 2020 adalah 68,76 naik menjadi 69,09 tahun 2021 dan turun kembali pada tahun 2022 menjadi 68,55. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa upaya pembangunan Gender di Provinsi Banten telah meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender, akan tetapi peningkatan kualitas ini belum diimbangi dengan pemberdayaan peran gender dalam aktivitas ekonomi dan politik.

Tabel 2. 75
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2019-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BANTEN			
		2019	2020	2021	2022
1	Kab Pandeglang	61.58	63.52	63.16	64,07
2	Kab Lebak	60.36	58.68	58.24	57,16
3	Kab Tangerang	61.54	61.53	62.17	63,35
4	Kab Serang	58.87	59.48	59.93	58,79
5	Kota Tangerang	65.19	65.03	64.86	64,09
6	Kota Cilegon	52.86	52.32	52.81	51,3
7	Kota Serang	62.10	61.26	61.66	62,39
8	Kota Tangerang Selatan	74.00	73.85	73.08	72,67
PROVINSI BANTEN		68.83	68.76	69.09	68,55

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Selain itu pada tahun 2021, Provinsi Banten mendapatkan penghargaan PROVILA yaitu Provinsi pelopor Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal ini dikarenakan Provinsi Banten seluruh Kabupaten/Kota nya telah memperoleh peringkat dan penghargaan KLA. Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur Kabupaten/Kota menjadi layak anak yang pengelompokannya mengacu pada 5 klaster Konvensi Hak Anak. Menurut peringkatnya dari yang tertinggi hingga terendah, KLA dikelompokkan sebagai berikut: 1) Utama; 2) Nindya; 3) Madya; 4) Pratama.

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG’s). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender.

C. Bidang Urusan Pangan

Capaian indikator kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu Indeks Ketahanan Pangan Daerah yang dijabarkan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 76
Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018-2022 (Nilai)

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Indeks Ketahanan Pangan	83,29	81,93	73,48	82,69	73,78

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Secara umum, Indeks Ketahanan Pangan Banten mengalami penurunan nilai di tahun 2022 yaitu sebesar 73,78.

Jika berpedoman pada batas standar kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita per hari, yaitu 2.150 kkal dan 57 gram protein, maka rata-rata konsumsi kalori penduduk Banten pada 2022 sudah mencapai standar kecukupan yakni sebesar 2.270,48 kkal. Sedangkan rata-rata konsumsi protein sudah di atas standar kecukupan yakni sebesar 69,31 gram protein seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 77
Rata-Rata Kelompok Makanan Atas Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Tahun 2020-2022

NO	Kelompok Makanan	Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan Dan Klasifikasi Daerah Di Provinsi Banten (Kkal)			Rata-Rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan Dan Klasifikasi Daerah Di Provinsi Banten (Gram)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Padi-padian	839,87	885,34	872,06	19,76	20,83	20,53
2	Umbi-umbian	36,09	42,16	42,61	0,37	0,42	0,46
3	Ikan	53,78	55,80	62,09	9,68	9,91	11,27
4	Daging	80,09	85,26	104,69	5,12	5,41	6,38
5	Telur dan susu	71,23	70,18	71,92	4,11	3,90	3,97
6	Sayur-sayuran	37,75	39,92	40,96	2,05	2,13	2,21
7	Kacang-kacangan	56,85	58,13	58,64	5,52	5,67	5,70
8	Buah-buahan	41,65	40,00	48,15	0,48	0,41	0,50
9	Minyak dan Lemak	282,48	307,54	293,75	0,09	0,08	0,07
10	Bahan Minuman	78,00	82,62	82,97	0,78	0,77	0,85
11	Bumbu-bumbuan	14,40	14,31	16,55	0,56	0,57	0,66
12	Konsumsi lainnya	63,01	65,21	71,58	1,33	1,37	1,48
13	Makanan dan Minuman Jadi	591,81	512,60	504,52	17,54	15,22	15,24
Jumlah		2.250,36	2.259,08	2.270,48	67,39	66,69	69,31

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

D. Bidang Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah penetapan lokasi dimana pada tahun 2022 terdapat 16 penetapan lokasi yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan.

Tabel 2. 78
Lokasi-Lokasi Penetapan Lokasi Tahun 2021

KETERANGAN	LOKASI
Surat Keputusan Penetapan Lokasi	1. Jalan Palima-Pasar Baros (Lingkar Baros)
	2. Pelebaran Jalan Simpang Gondrong (Ruas Hasyim Ashari) Kota Tangerang
	3. Pembangunan Ruas Jalan Sempu – Dukuh Kawung (Cipocok – Sp. Boru)
Perpanjangan Penetapan Lokasi	4. Penambahan Lajur Ke-4 Jalan Tol Tangerang - Merak Tahap II dan Tahap III
	5. Tambahan Ruas Jalan Tol Serang – Panimbang
	6. Pembangunan Sistem Saluran Pembawa Air Baku Karian - Serpong (KSCS)
	7. Pembangunan Bendungan Karian
	8. Pembangunan Tanggul Sungai Ciujung
	9. Pembangunan Jalan Tol Cinere-Serpong
	10. Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran (CBK)
	11. Pembangunan Jalan Tol Kunciran Serpong
	12. Pembangunan Jalan Ruas Cikeusal-Boru
	13. Serpong- Balaraja
Tukar menukar tanah kas Desa	14. Serang-Panimbang
	15. Pembebasan Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi III pada Desa Cililitan, Desa Bungurcopong, Desa Kadupandak Kecamatan Picung, dan Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang
	16. Pembebasan Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi I pada Desa Cikeusal Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang,

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

E. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten masih terjaga kelestariannya, termasuk di kawasan lindung, seperti kawasan strategis Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan Gunung AKARSARI (Gunung Asepun, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari). Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang

terdapat di dalam wilayah pesisir, dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu.

Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di perairan pesisir sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat penebangan hutan dan praktik pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir.

Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, namun masih terdapat berbagai aktivitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) yang sangat merusak lingkungan. Berkembangnya kawasan industri di wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktivitas industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada sungai-sungai sebagai akibat aktivitas industri dan pemukiman, seperti Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten juga perlu ditanggulangi.

Kegiatan pengolahan pertanian dan kehutanan (up land) yang buruk tidak saja merusak ekosistem sungai (melalui banjir dan erosi), tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif pada perairan pesisir dan pantai. Sementara itu, kerusakan lingkungan yang berasal dari wilayah pesisir, pantai, dan laut bisa berupa degradasi fisik habitat pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun), abrasi pantai, hilangnya daerah konservasi/kawasan lindung, eksploitasi sumber daya alam yang berlebih (*over exploitation*) dan bencana alam.

Tabel 2. 79
 Capaian Berbagai Indeks Urusan Lingkungan Hidup
 Tahun 2018-2022 (Indeks)

NO	INDEKS	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	49,02	56,86	62,94	62,73	63,52
2	Indeks Kualitas Air (Indeks)	52,33	52,07	54,83	54,47	55,90
3	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	72,36	72,36	73,35	73,74	73,89
4	Indeks Tutupan Hutan (Indeks)	45,46	45,9	45,46	45,99	48,04

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa, terjadi peningkatan kualitas udara di Provinsi Banten. hal tersebut disebabkan antara lain adanya peningkatan Indeks Kualitas air pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 55,90 dibanding tahun 2021 sebesar 51,11 dan peningkatan Indeks Kualitas lahan sebesar 39,06 dibanding tahun 2021 sebesar 29, 25 serta dipengaruhi juga oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) selain IKA, IKU dan IKTL dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sejak tahun 2020. Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kualitas air dimana aspek tersebut nilainya paling kecil dibanding lainnya, artinya pencemaran air sungai dan air laut perlu penanganan lebih prioritas. Hal ini ditunjukkan dengan angka jumlah pencemaran dan limbah di bawah ini.

Tabel 2. 80
 Jumlah Lokasi Pencemaran dan Banyaknya Perusahaan Memiliki
 Pengolahan Limbah dari Tahun 2018-2022

NO	ITEM	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Lokasi Pencemaran Air	Lokasi	9	8	8	8	8
2	Jumlah Lokasi Pencemaran Air	Lokasi	21	21	22	22	22
3	Memiliki Pengolahan Limbah	Perusahaan	0	250	250	250	250
4	Tidak Memiliki Pengolahan Limbah	Perusahaan	0	0	0	0	0

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel 2. 81
Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
			2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pengurangan timbunan sampah di daerah (JUTA TON)	Ton	514,276	656,023	731,61	6.875.429
2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	85,98	89	84,60	77,99
3	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Kasus	0	0	0	0
4	Jumlah KLHS dan Kajian Daya Dukung Daya Tampung	Dokume n	0	0	0	1
5	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang Lingkungan Hidup	Usaha	0	0	120	120
6	Jumlah penanganan timbunan sampah di daerah (Juta ton)	Ton	2.336.076	2.236.441	2.255.797	6.364.252,60

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

F. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah persentase Capaian Tertib Administrasi Kependudukan yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 82
Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan capaian Tertib Administrasi Kependudukan/Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	%	100	100	100	100	100

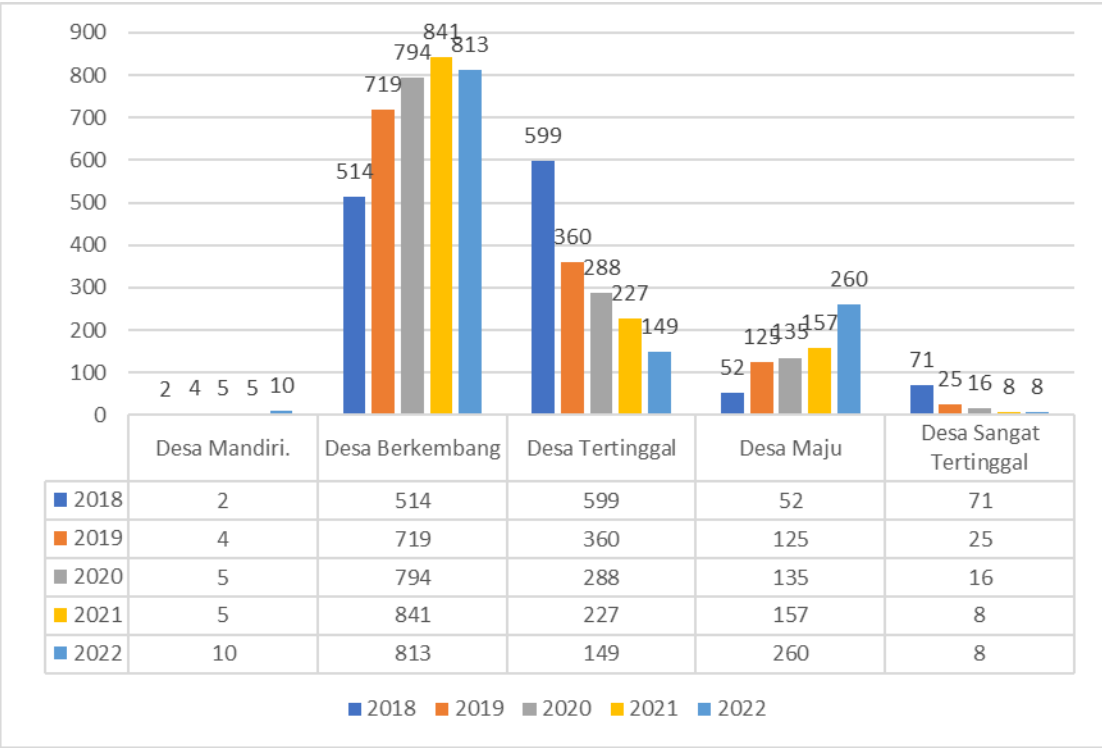
Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Capaian ini sejalan dengan cakupan pelayanan fasilitasi dalam penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP-elektronik, akte

kelahiran di Kabupaten/Kota yang sudah terlayani 100 persen oleh pemerintah Provinsi.

G. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengukur tingkat kemajuan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai tahun 2014 melakukan Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam penelitian ini data awal yang digunakan adalah data IDM mulai tahun 2018 yang merupakan hasil pendataan mandiri oleh Kementerian PPDT. Jumlah desa sangat tertinggal atau desa tertinggal di Provinsi Banten setiap tahunnya mengalami penurunan.



Gambar 2. 27
Perkembangan Status Desa Di Provinsi Banten Tahun 2018-2021 (Desa)
(Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022)

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah desa sangat tertinggal di Provinsi Banten pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 8 desa dibandingkan kondisi tahun 2021 tetap tidak mengalami penurunan. Selain itu terjadi penurunan desa tertinggal dari semula berjumlah 227 desa (tahun 2021) menjadi 149 desa (tahun 2022). Meski demikian, terjadi penambahan jumlah desa maju dari 157 di Tahun 2021 menjadi 260 Desa di tahun 2022. Hal lainnya adalah bertambahnya jumlah kategori desa Mandiri. Data tahun 2020 dan 2021 jumlah desa mandiri di Provinsi berjumlah tetap yakni lima desa, namun di Tahun 2022 naik sebanyak sepuluh desa Penyebaran

desa mandiri tersebar di empat kabupaten dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 83
Capaian Desa Mandiri Tahun 2018-2022

KABUPATEN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lebak	Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga				
Pandeglang	Desa Labuan Kecamatan Labuan	Desa Labuan Kecamatan Labuan	Desa Labuan Kecamatan Labuan	Desa Labuan Kecamatan Labuan	Desa Labuan Kecamatan Labuan
Serang		Desa Anyar Kecamatan Anyar, Desa Tambak Kecamatan Kibin	Desa Anyar Kecamatan Anyar, Desa Tambak Kecamatan Kibin, Desa Kragilan Kecamatan Kragilan	Desa Anyar Kecamatan Anyar, Desa Tambak Kecamatan Kibin, Desa Sindang Sari Kecamatan Pabuaran	Desa Anyar Kecamatan Anyar, Desa Tambak Kecamatan Kibin, Desa Sindang Heula Kecamatan Pabuaran
Tangerang			Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua	Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua	Desa Bitung Jaya Sangereng Kecamatan Cikupa, Desa Cibadak Kecamatan Cikupa, Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan, Desa Kmp Melayu Brt kecamatan Teluknaga
Jumlah	Dua Desa	Tiga Desa	Lima Desa	Lima Desa	Sepuluh Desa

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan desa mandiri di wilayah Provinsi Banten sangatlah lambat. Selain masih banyaknya Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal, capaian nilai IDM Provinsi Banten Tahun 2021 sebesar 0,6445 menempatkan Provinsi

ini pada peringkat 23 dari 33 Provinsi yang dilakukan penilaian. Hal ini menunjukkan capaian IDM Provinsi Banten berada di bawah rata-rata nasional dan terendah diantara Provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali.

Tabel 2. 84
Capaian IDM Provinsi Banten Tahun 2020-2022 (Nilai)

NAMA PROVINSI	2020		2021		SELISIH	2022		SELISIH
	NILAI	RINGK	NILAI	RINGKAT		NILAI	RINGKAT	
Bali	0,7879	1	0,8037	1	0,0158	0,8269	1	0,0232
Yogyakarta	0,7684	2	0,7837	2	0,0153	0,8128	2	0,0291
Jatim	0,7026	3	0,7217	3	0,0191	0,7517	4	0,03
Jabar	0,6967	5	0,7202	4	0,0235	0,7529	3	0,0327
Jateng	0,682	8	0,693	10	0,011	0,7118	11	0,0188
Banten	0,6361	22	0,6445	23	0,0084	0,6626	23	0,0181

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Gambaran peringkat nilai IDM Provinsi Banten secara nasional sebagaimana tersaji dalam tabel di atas seiring dengan rendahnya peningkatan nilai IDM Tahun 2022 di bandingkan nilai IDM Tahun 2021. Perubahan nilai IDM Provinsi Banten hanya mencapai 0,0181 jauh lebih rendah dibandingkan perubahan capaian IDM Provinsi lainnya di Pulau Jawa-Bali. Kondisi ini tentu saja sangat perlu segera diantisipasi agar gap antara capaian IDM Provinsi Banten dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa-Bali tidak semakin membesar.

H. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Banten pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan dengan menghitung indikator Angka Kelahiran Total (TFR) dimana terjadi kenaikan sebesar 0,2 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk urusan ini terjadi perubahan indikator yang sebelumnya laju pertumbuhan penduduk menjadi Angka Kelahiran Total (TFR) dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2. 85
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	-	-	2,21	2,23	2,43
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,14	0,35	1,10	1,76	1,66

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

I. Bidang Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan memperhatikan berbagai sarana dan transportasi baik transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa sarana dan prasarana transportasi tersebut pengelolaannya disesuaikan dengan kewenangannya, berikut capaian urusan perhubungan 2018-2022.

Tabel 2. 86
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara (%)	-	-	22,54	98.33	89,29
2	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas (%)	100	100	-	-	-

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Jumlah kendaraan di Provinsi Banten terus bertambah sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 namun sepeda motor mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali berkurang pada tahun 2021 dan 2022. Begitu juga jumlah Bus berkurang di Tahun 2022 menjadi 7.640 dari 7.734 di Tahun 2021. Sedangkan Truk sempat menurun di Tahun 2020 namun kembali bertambah di Tahun 2021 dan 2022 sebanyak 182.125, Salah satu penyebab utamanya adanya terjadinya Pandemi COVID-19 yang selain berpengaruh terhadap kesehatan juga berpengaruh terhadap perekonomian.

Tabel 2. 87
Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten
Tahun 2018-2022 (Unit)

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Mobil Penumpang	732.366	830.678	789.232	801.276	833.962
2	Bus	2.197	3.104	2.451	7.734	7.640
3	Truk	169.075	187.060	177.563	178.630	182.125
4	Sepeda Motor	4.111.154	4.495.518	4.145.180	4.051.244	4.032.285

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Secara keseluruhan infrastruktur terminal tipe A (amanah UU. 23 / 2014 dikelola oleh pemerintah pusat) di Provinsi Banten (Terminal Pakupatan, Terminal Merak, Terminal Labuan, Terminal Lebak) untuk mendukung operasional terminal telah memenuhi

syarat selain dari masih adanya terminal dalam pembenahan infrastruktur seperti Terminal Terpadu Merak (Kota Cilegon). Untuk Terminal Tipe-B (amanah UU. 23 / 2014 dikelola oleh pemerintah Provinsi), menjadi tantangan tersendiri Dinas Perhubungan Provinsi Banten untuk membangunnya. Karena terminal tipe B yang ada di kabupaten / kota tidak diserahkan ke pemerintah Provinsi. Terminal tipe – C (amanah UU. 23 / 2014 dikelola oleh pemerintah kabupaten / kota) diperlukan koordinasi lebih baik untuk penetapan lokasi di kabupaten/ kota antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten / kota.

Tabel 2. 88

Klasifikasi Terminal di Provinsi Banten Tahun 2021

LOKASI	NAMA TERMINAL	KLASIFIKASI
Kab. Pandeglang	Terminal Labuan	Tipe A
	Terminal Anten	Tipe C
	Terminal Lampe Labuan	Tipe C
Kab. Lebak	Terminal Kadu Agung	Tipe A
	Terminal Malingping	Tipe C
	Terminal Sunan Kalijaga	Tipe C
	Terminal Bayah	Tipe C
Kab. Tangerang	Terminal Binuangeun	Tipe C
	Terminal Kp. Melayu	Tipe C
	Terminal Balaraja	Tipe C
Kab. Serang	Terminal Anyer	Tipe C
Kota Tangerang	Terminal Poris Plawad	Tipe A
	Terminal Cimone	Tipe C
	Terminal Ciledug	Tipe C
	Terminal Cibodasari	Tipe C
Kota Cilegon	Terminal Pasar Baru	Tipe C
	Terminal Merak	Tipe A
	Terminal Seruni	Tipe C
Kota Serang	Terminal Pakupatan	Tipe A
	Terminal Cipocok	Tipe C
	Terminal Kepandean	Tipe C
Kota Tangsel	Terminal Pondok Cabe	Tipe C
	Terminal Bumi Serpong Damai	Tipe C

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan hasil survey lapangan diperoleh adanya potensi pergerakan penumpang yang tidak sesuai dengan fungsi terminal, seperti terminal tipe B yang seharusnya hanya melayani pergerakan penumpang sampai antar kota dalam Provinsi (AKDP) tetapi karena

tingginya potensi pergerakan penumpang antar Provinsi maka terminal tipe B tersebut harus melayani trayek AKAP yang seharusnya dilayani terminal tipe A. Selain itu adanya terminal yang kurang aktif serta ada terminal yang beralih fungsi menyebabkan beberapa terminal tidak berfungsi optimal. Untuk itu perlu dilakukan pengoptimalan fungsi terminal agar pergerakan penumpang dapat terlayani dengan baik, nyaman dan aman

Eksisting Terminal Tipe-A di Provinsi Banten: Terminal Pakupatan (Kota Serang), Terminal Terpadu Merak (Kota Cilegon), Terminal Labuan (Kab. Pandeglang), Terminal Lebak (Kab. Lebak). Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pengelolaan terminal Tipe-A diambil alih oleh kementerian perhubungan melalui Badan Pengelolaan Transportasi Daerah Wil. VIII-Banten mulai tahun 2016.

Tabel 2. 89
 Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Provinsi
 Tahun 2018-2021

NO	PERLENGKAPAN JALAN	SATUAN	TAHUN			
			2018	2019	2020	2021
1	Marka Jalan	M	95,833	70,250	-	46,200
2	Guard Rail	M	1.120	1.430	136	-
3	RPPJ	Unit	-	9	10	6
4	RPPJ Gantry	Unit	-	9	10	6
5	<i>Traffic Light</i>	Unit	-	-	-	-
6	Rambu Standar	Unit	732	385	233	384
7	Rambu Standar Tiang F	Unit	-	-	-	-
8	Paku Jalan	Buah	398	778	480	
9	<i>Warning Light</i>	Unit	8	8	-	-
10	<i>Traffic Cone</i>	Unit	398	-	300	-
11	<i>Canstin/Road Barrier</i>	Buah	57	315	-	-
12	<i>Delinator</i>	Buah	300	315	100	-
13	<i>Water Block</i>	Buah	-	-	-	-
14	Cermin Tikungan	Unit	-	26	-	-
15	LPJU	Unit	514	305	332	250

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi Banten seperti marka, rambu-rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan masih adanya aksi pencurian dan perusakan. Hal

ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecelakaan pada ruas jalan selain faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan.

Tabel 2. 90
Kecelakaan pada Ruas Jalan di Banten
Tahun 2017-2022 (Kejadian)

NO	Uraian	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kecelakaan	1.713	1.447	1.484	1.264	2 402	3.045
2	Korban	4.278	3.575	3.386	2.107	3.549	4.211
3	Meninggal Dunia	794	754	695	633	854	888
4	Luka Berat	338	174	146	118	621	644
5	Luka Ringan	3.146	2.647	2.545	1.356	2.074	2.679

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

J. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Pemerintah juga akan mempersiapkan aplikasi yang bersifat umum, agar bisa melayani masyarakat di ruang digital melalui satu sistem. Beberapa aplikasi yang dimaksud antara lain, *e-planning*, *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-payment*, hingga *e-money* selain itu, penting untuk memperhatikan evaluasi SPBE. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya;
2. Kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya; dan
3. Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan data dari Kementerian PANRB, Banten menduduki predikat sedang pada Tahun 2022.

Tabel 2. 91
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2018-2022 (Nilai)

TAHUN	NILAI SPBE	PREDIKAT
2018	2,01	Cukup
2019	1,83	Cukup
2020	1,83	Cukup
2021	3,15	Baik
2022	3,3	Sedang

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

K. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Struktur ekonomi Provinsi Banten ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 2. 92
Kinerja Koperasi di Provinsi Banten Menurut Indikator Produksi
Tahun 2020–2022

Indikator	Satuan Unit	2020	2021	2022
1. Koperasi	unit	7.805	8.055	8.389
a. Aktif	unit	3.969	4.222	4.462
b. Non Aktif	unit	3.833	3.833	3.927
2. Anggota	Orang	602.058	16.515	833.653
3. Manajer	Orang	287	14	393
4. Karyawan	Orang	78.907	63	6.797
5. Jumlah Asset	juta rupiah	1.739.246,18	160.760,78	4.556.835,39
6. Modal	juta rupiah	2.476.399,05	160.760,78	4.556.835,39
a. Modal Sendiri	juta rupiah	1.467.480,52	104.982,91	2.146.492,85
b. Modal Luar	juta rupiah	1.008.918,53	55.777,87	241.034,25
7. Volume Usaha	juta rupiah	2.403.999,08	84.609,53	2.917.233,69
8. Jumlah SHU	juta rupiah	144.214,12	12.927,86	203.255,60

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Penguatan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar.

Tabel 2. 93
Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2018-2022 (Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi (%)	6	6	6	6	6
2	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil (%)	1	1	1	1	1

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Data koperasi aktif dan tidak aktif menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Pandeglang yang jumlah koperasi aktifnya lebih banyak dari koperasi tidak aktif, sisanya di Kabupaten/Kota lainnya jumlah koperasi tidak aktif lebih banyak. Ini perlu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Banten.

Tabel 2. 94
Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota dan Status Aktivitas di
Provinsi Banten Tahun 2020-2022 (Unit)

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		AKTIF	TIDAK	TOTAL	AKTIF	TIDAK	TOTAL	AKTIF	TIDAK	TOTAL
			Aktif			Aktif			Aktif	
1	Kab. Pandeglang	505	99	604	522	99	621	533	100	633
2	Kab. Lebak	530	322	852	538	321	859	553	321	874
3	Kab. Tangerang	588	1.003	1.591	556	1 021	1 577	566	1 021	1 587
4	Kab. Serang	620	818	1.438	646	818	1 464	672	817	1 489
5	Kota Cilegon	290	873	1163	289	676	965	296	672	968
6	Kota Serang	301	257	558	285	297	582	258	370	628
7	Kota Tangerang	131	237	368	131	234	365	130	235	365
8	Kota Tangsel	388	301	689	360	300	660	379	300	679
	Binaan Provinsi Banten	329	62	391	412	61	473	490	66	556
	Binaan Nasional	367	21	388	486	24	510	585	25	610
	Jumlah/Total	4 049	3 993	8 042	4 225	3 851	8 076	4 462	3 927	8 389

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dirasakan belum optimal. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan, masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil, berikut capaian indikator pada urusan koperasi dan usaha menengah kecil.

Tabel 2. 95
 Jumlah Usaha Menengah dan Kecil di Provinsi Banten
 Tahun 2022 (UMK)

NO	KABUPATEN/KOTA	Usaha Menengah dan Kecil
1	Kabupaten Pandeglang	189.719
2	Kabupaten Lebak	24.261
3	Kabupaten Serang	55
4	Kabupaten Tangerang	18
5	Kota Cilegon	28.180
6	Kota Serang	21.009
7	Kota Tangerang	4.533
8	Kota Tangerang Selatan	86.177
Provinsi Banten		353.952

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

L. Bidang Urusan Penanaman Modal

Iklim investasi di Provinsi Banten menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Banten yang strategis menempatkan Banten menjadi tujuan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Berikut capaian kinerja urusan penanaman modal tahun 2018 sampai 2022. Masih terjadi fluktuasi dalam realisasi investasi di Provinsi Banten, dimana di tahun 2021 jumlah nilai investasi menurun dibandingkan tahun 2020 tapi di tahun 2022 80,22 T meningkat 148% dari target 53,9 T.

Tabel 2. 96
 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
 2018-2022 (Triliyun) Tahun

INDIKATOR	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN) (Triliyun)	56,52	48,73	62,01	57,96	80,22

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di bawah menunjukkan realisasi PMA dan PMDN pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada Tahun 2022. Total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Banten Tahun 2022 mencapai Rp. 48,94 triliun dengan 4.364 proyek.

Tabel 2. 97
 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota di
 Provinsi Banten Tahun 2022

NO	KAB/KOTA	PROYEK	REALISASI INVESTASI (RP. JUTA)	REALISASI INVESTASI (US\$. RIBU)	TKI	TKA
1	Kota Cilegon	416	32 032 388,98	2 232 222,00	1 500	157
2	Kabupaten Tangerang	1.677	5 787 128,14	403 284,20	9 026	179
3	Kabupaten Serang	456	4 814 630,40	335 514,30	3 521	75
4	Kota Tangerang	1.035	4 423 696,97	308 271,60	3 399	85
5	Kota Serang	35	256 016,90	17 840,90	211	2
6	Kabupaten Lebak	76	757 932,62	52 817,60	450	7
7	Kota Tangerang Selatan	647	850 485,63	59 267,30	2 388	56
8	Kabupaten Pandeglang	22	21 011,20	1 464,20	22	-
Banten		4 364	48 943 290,83	3 410 682,10	20 517	561

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Banten mencapai Rp. 31 triliyun dengan 11.622 proyek.

Tabel 2. 98
 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut
 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022

NO	KAB/KOTA	PROYEK	REALISASI INVESTASI (RP. JUTA)	REALISASI INVESTASI (US\$. RIBU)	TKI	TKA
1	Kabupaten Tangerang	4 009	13 162 827,20	917 267,53	18 632	18
2	Kota Tangerang	2 732	8 627 112,70	601 190,61	6 448	4
3	Kota Cilegon	980	922 297,50	64 271,45	749	2
4	Kabupaten Serang	858	1 900 984,60	132 472,39	3 739	6
5	Kota Tangerang Selatan	2 152	2 680 851,90	186 818,37	2 381	24
6	Kabupaten Lebak	269	3 407 797,20	237 476,40	733	-
7	Kabupaten Pandeglang	270	524 209,90	36 530,19	706	-
8	Kota Serang	352	57 793,90	4 027,44	361	-
Banten		11 622	31 283 874,90	2 180 054,37	33 749	54

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel 2. 99
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022

SEKTOR EKONOMI	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	
		JUTA RP	RIBU US\$
1. Pertanian			
1) Perikanan	67	62 270,70	4 339,41
2) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	106	483 017,90	33 659,69
2. Pertambangan dan Penggalian	43	233 317,50	16 259,01
3. Industri Pengolahan			
1) Makanan	437	2 671 802,70	186 187,81
2) Tekstil	116	14 695,70	1 024,09
3) Kulit, Barang dari kulit dan sepatu	50	106 368,70	7 412,43
4) Kayu	28	24 724,90	1 722,98
5) Kertas, barang dari kertas dan percetakan	137	627 654,30	43 738,86
6) Kimia dasar, barang kimia dan farmasi	398	869 675,40	60 604,36
7) Alat angkutan dan transportasi lainnya	73	309 269,90	21 551,86
8) Karet, barang dari karet dan plastik	262	1 218 565,40	84 917,24
9) Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	272	867 407,30	60 446,31
10) Mineral non logam	79	1 149 246,40	80 086,64
11) Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	230	909 343,40	63 368,70
12) Lainnya	163	335 464,50	23 377,23
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	93	374 464,30	26 094,99
5. Konstruksi	952	1 571 335,00	109 500,37
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran			
1) Perdagangan dan reparas	4 531	1 470 344,30	102 462,69
2) Hotel dan restoran	1 296	409 453,20	28 533,23
7. Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	389	3 492 938,00	243 409,53
8. Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran/	681	9 594 122,10	668 578,01
9. Jasa lainnya	1 215	4 447 176,40	309 906,69
Banten	11 622	31 283 874,90	2 180 054,37

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

M. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat Nasional maupun Internasional. Selain itu melalui pembangunan kepemudaan, upaya membangun sumberdaya manusia dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa juga dapat ditempuh melalui pembangunan keolahragaan. Gambaran Indikator kinerja pada urusan Kepemudaan dan Olahraga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 100
Indikator Kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2018-2022 (Indeks)

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Kepemudaan (Indeks)	9,73	20,17	30,27	49,17	49
2	Indeks Pembangunan Olahraga (Indeks)	9,38	20,83	30	40	29,7

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Melalui olahraga, setiap individu dapat mengalami kesetaraan, kebebasan, disiplin, kekuatan mental, kesabaran, daya juang, serta sportivitas. Gambaran pembangunan olahraga di Provinsi Banten disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 101
Data Jumlah Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten
Tahun 2018-2021

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pemuda	Orang	3.264.000	3.242.140	3.301.320	2.320.466
Cabang Olahraga yang Medapatkan Pelayanan	Unit	30	30	24	0
Cabang Olahraga	Unit	43	43	43	37
Cabang Olahraga Berprestasi	Unit	10	10	10	27
Cabang Olahraga yang Diikuti	Unit	19	15	3	37
Atlet Berprestasi Di UPTD	Orang	28	13	1	-
Atlet yang Dibina Di UPTD	Orang	79	89	99	109
Atlet yang Ikut Kejuaraan	Orang	96	96	96	261

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Rendahnya partisipasi olahraga dan tujuan melakukan olahraga prestasi mengindikasikan bahwa atlit, klub, penggemar olahraga dan masyarakat Provinsi Banten memerlukan fasilitas yang representatif dan terpadu, yang mampu mewadahi aktivitas seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisik untuk menjaga kesehatan, maupun untuk rekreasi. Lebih daripada itu, ketersediaan fasilitas olahraga yang representatif dalam lokasi yang terpadu dan memenuhi standar nasional maupun internasional, memungkinkan Provinsi Banten untuk menjadi host multi event ke olahragaan, yang akan mendorong perkembangan industri olahraga di Provinsi Banten.

N. Bidang Urusan Statistik

Urusan statistik sektoral pada Provinsi Banten dilaksanakan bersama-sama dengan instansi vertikal lain seperti BPS, Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia. Pergub ini dibuat agar mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini ketercapaian pengisian data sektoral masih harus terus didorong seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 102
Ketersediaan Data Statistik Sektoral Tahun 2020-2022 (Persen)

NO	JENIS DATA SEKTORAL	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat (%)	75	50	80
2	Aspek Daya Saing Daerah (%)	75	50	80
3	Aspek Pelayanan Umum (%)	75	50	80
RERATA (%)		75	50	80

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

O. Bidang Urusan Persandian

Penyelenggaraan Urusan persandian tersebut di Provinsi Banten diserahkan pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, Persandian. Dalam pelaksanaan operasionalnya persandian pada Pemerintah Provinsi Banten sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di instansi lingkup pemerintah, ini karena banyak keterbatasan terutama dalam hal infrastruktur teknologi informasi maupun sumber daya manusia ASN di Provinsi Banten belum ada yang secara khusus menangani hal ini. Indikator kinerja untuk urusan persandian sendiri adalah Persentase Sarana dan Prasarana Persandian yang capaiannya 100 persen tahun 2021 dan 100 persen tahun 2022.

P. Bidang Urusan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Provinsi Banten ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Untuk mengukur pembangunan kebudayaan,

pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penilaian berupa Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai instrumen penilaian capaian kinerja pembangunan kebudayaan baik ditingkat nasional maupun daerah. Pengukuran Indeks Kebudayaan mulai dilakukan tahun 2018 berdasarkan pada 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 dimensi yaitu.

1. Dimensi Ekonomi Budaya;
2. Dimensi Pendidikan;
3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya;
4. Dimensi Warisan Budaya;
5. Dimensi Ekspresi Budaya;
6. Dimensi Budaya Literasi; dan
7. Dimensi Kesenjangan Gender.

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Berdasarkan data pada tabel di bawah terlihat bahwa capaian IPK Provinsi Banten tahun 2021 sebesar 47,47 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 48.95. Meskipun demikian upaya percepatan peningkatan nilai IPK sangat diperlukan mengingat jika dibandingkan dengan rata-rata nasional capaian IPK Provinsi berada dibawah Nasional (51,9). Hasil pengukuran Indeks Pembangunan kebudayaan Provinsi tahun 2018 sampai 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 103
Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi
Tahun 2018-2021 (Nilai)

NO	DIMENSI	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Ekonomi Budaya	11,10	11,71	1,01	12,24
2	Pendidikan	68,38	71,65	69,79	65,78
3	Ketahanan Sosial Budaya	64,35	64,92	65,26	53,73
4	Warisan Budaya	44,07	45,02	40,6	47,34
5	Ekspresi Budaya	29	29,53	29,19	22,05
6	Budaya Literasi	54,93	60,27	61,3	56,58
7	Kesenjangan Gender	52,44	54,25	52,84	52,97
8	IPK	49,69	51,43	48.95	47.47

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah Cagar budaya di Provinsi Banten mengalami penurunan yang signifikan. Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Perkembangan kondisi beban kerja serta adanya Kepmendagri 050 Tahun 2021 yang berimplikasi kepada pelaksanaan dua program menuntut adanya penyesuaian desain organisasi UPTD ini. Dalam Kepmendagri 050 Tahun 2021 program Pengelolaan Museum terpisah dari program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Untuk kepentingan cascading dalam penetapan indikator kinerja hal ini menjadi suatu kendala. Berdasarkan hal tersebut perlu diinisiasi reorganisasi bentuk kelembagaan pengelolaan museum dan taman budaya.

Tabel 2. 104
Jenis Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2019 - 2020 (Unit)

NO	JENIS KEBUDAYAAN	TAHUN	
		2019	2020
1	Cagar Budaya	1441	60
2	Desa Adat	8	99
3	Museum	7	7
4	Komunitas	0	20

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Q. Bidang Urusan Perpustakaan

Pada bidang urusan perpustakaan pemerintah Provinsi Banten terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi dan akses literasi. Pemerintah Provinsi Banten berhasil menempati urutan ke-9 (sembilan) se-Indonesia dalam Indeks Kegemaran Membaca (IKM) berdasarkan hasil penelitian Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun 2020, dengan perolehan angka 58,77. Indeks Kegemaran Membaca Nasional ada di angka 55,74, artinya Provinsi Banten berhasil memiliki Indeks Kegemaran Membaca di atas rata-rata Nasional, untuk Indeks Pembangunan Literasi (IPL), Pemerintah Provinsi Banten berada di urutan 5 (lima) terbawah nasional dengan angka 8,90. Hal yang mempengaruhi rendahnya IPL tersebut yakni ketercukupan tenaga perpustakaan, perpustakaan berstandar nasional dan koleksi buku perpustakaan.

Tabel 2. 105
Data dan Informasi Perpustakaan Daerah Provinsi Banten
Tahun 2018-2022

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR			TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Menuju (Perpus)	Perpustakaan SPM	yang Perpustakaan	80	125	152	212	217
2	Target (Perpus)	yang	Direncanakan	146	146	192	192	225
3	Capaian Perpustakaan (%)	Pelayanan Provinsi	Banten	75	80	83	83	85
4	Standar Nasional Perpustakaan Provinsi (%)			100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

R. Bidang Urusan Kearsipan

Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan nilai 74,89 dengan predikat (sangat baik) hasil pengawasan/audit Kearsipan Nasional yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2020. Ke depan peningkatan kearsipan perlu dilaksanakan seluruh perangkat daerah. Adapun beberapa aspek yang menjadi penilaian pengawasan kearsipan dari ANRI meliputi kepatuhan terhadap regulasi kearsipan, sistem pengelolaan arsip sesuai standar yang berlaku, ketersediaan SDM, sarana dan prasarana kearsipan, program kerja dan anggaran kearsipan daerah. Berikut merupakan indikator kinerja urusan kearsipan yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2. 106
Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase OPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai ketentuan kearsipan (%)	80	85	90	100	100
2	Jumlah Arsip yang Terdigitalisasi (Unit)	12.284	22.415	22.415	26.546	70.856
3	Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Pada Depo Arsip (Unit)	26.370	26.370	26.370	26.370	43.768

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

2.1.4.3 Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan pilihan menjadi bagian dalam urusan pemerintahan konkuren yang mana dalam pelaksanaannya wajib diselenggarakan oleh daerah namun dengan mempertimbangkan terhadap potensi yang dimiliki daerah tersebut. Lebih lanjut dalam aturan yang sama, diperjelas pada pasal 12 bahwa yang menjadi bagian dalam urusan pilihan ini meliputi:

A. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Sumberdaya kelautan dan perikanan, Provinsi Banten tersebar di lima Kabupaten/Kota dengan 61 buah pulau-pulau kecil yaitu di Kota Cilegon sebanyak 5 pulau, Kabupaten Pandeglang sebanyak 33 pulau, Kabupaten Serang sebanyak 17 pulau, Kabupaten Tangerang sebanyak 1 pulau, dan Kabupaten Lebak sebanyak 5 pulau. Di samping itu Banten memiliki garis pantai 499,62 km, terbagi atas garis pantai yang menghadap Samudra Indonesia 138,62 km, menghadap Laut Jawa 127,10 km dan menghadap Selat Sunda 233,90 km. Kondisi geografis semacam ini menyimpan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar termasuk didalamnya perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi, pariwisata bahari dan pantai, pertambangan dan energi, perhubungan laut, industri kapal, bangunan laut dan pantai, pulau-pulau kecil dan kegiatan pendayagunaan benda-benda berharga (*the sunken treasures*).

Pola ruang di Provinsi Banten telah mengatur kawasan peruntukan perikanan yang diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan ikan lebih kurang seluas 1.620,02 Ha juga telah dikonsepskan dibentuknya kawasan minapolitan yang berada di wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang (Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRW Provinsi Banten). Tabel di bawah adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan

kelautan dan perikanan Tahun 2018-2021 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Tabel 2. 107
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2018-2022 (Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	2,93	2,63	-	-	-
2	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan (%)	-	-	4,13	2,5	5,93

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap di Provinsi Banten sebesar 70,43 ribu ton dengan nilai produksi sebesar 2,51 triliun rupiah. Produksi perikanan tangkap terdiri dari 68,191 ribu ton ikan tangkap laut dan 1,24 ribu ton ikan perairan umum daratan. Produksi perikanan tangkap terbesar dicapai oleh Kabupaten Pandeglang (27,66 ribu ton). Untuk produksi perikanan di perairan umum daratan pada tahun 2022 mencapai 1,24 ribu ton dengan nilai produksi 27,76 miliar rupiah. Produksi perikanan di perairan umum daratan terbesar yaitu di Kota Tangerang Selatan (672 ton).

Jika berbicara terhadap produksi perikanan laut di Provinsi Banten, pada tahun 2020 produksi perikanan laut mencapai 6.194.568 kg dengan nilai produksi sebesar 95 miliar rupiah. Produksi tertinggi terdapat di Kota Serang dengan jumlah sebesar 2.602.781 kg dan mempunyai persentase terhadap produksi di Provinsi Banten sebesar 42,02 persen. Sedangkan, Kabupaten Serang merupakan Kabupaten yang memiliki produksi ikan terendah yaitu sebesar 268.895 kg dengan persentase terhadap produksi di Provinsi Banten sebesar 4,34 persen. Pada tahun 2020, produksi perikanan laut yang dijual di setiap TPI di Provinsi Banten rata-rata sebesar 166.221 kg per Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setiap triwulannya.

Rata-rata penjualan ikan terbesar terjadi pada triwulan IV yaitu mencapai 198.322 kg. Dilihat berdasarkan tingkat penjualan per TPI menurut Kabupaten/Kota, rata-rata penjualan tertinggi terjadi di Kota Serang yaitu sebesar 686.247 kg per triwulan per TPI,

diikuti Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak dengan rata-rata penjualan sebesar 72.520 kg dan 44.116 kg ikan per triwulan per TPI. Adapun rata-rata penjualan terendah terdapat di Kabupaten Serang dengan rata-rata penjualan sebesar 6.722 kg per triwulan per TPI.

Di bidang Perikanan Budidaya, terdapat peluang untuk dikembangkan usaha perikanan budidaya air tawar, perairan pedalaman, air payau serta budidaya laut, yang keseluruhannya mencapai luas 27.562 Ha.

Provinsi Banten memiliki perairan umum yang cukup potensial dikembangkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, yaitu sekitar 4.928 Ha, yang terdiri dari cek dam/waduk 621 Ha, situ 320 Ha, rawa 3.416 Ha dan bekas galian pasir 572 Ha.

Pengembangan perluasan areal lahan usaha budidaya air payau masih terbuka terutama di pesisir Pantai Barat dan Pantai Selatan Banten, dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem jalur hijau hutan mangrove mengingat karakteristik lahannya yang khas. Secara umum, prospek pengembangan ke depan masih terbuka luas, mengingat sampai saat ini, pemanfaatan secara keseluruhan baru mencapai sekitar 66,80 persen.

Untuk kondisi perikanan tangkap sepanjang Pantai Utara merupakan konsentrasi dan pemukiman nelayan, bila dibandingkan Pantai Barat dan Pantai Selatan. Tercatat jumlah nelayan di Banten pada tahun 2015 mencapai 30.791 orang yang mendiami 61 Desa di Pesisir Utara, 48 Desa di pesisir Barat dan 20 Desa di Pesisir Selatan. Jumlah armada perikanan tangkap tercatat pada tahun 2015 sebanyak 7.185 buah, didominasi oleh jenis armada kapal motor yang jumlahnya mencapai 6.200 unit.

Tabel 2. 108
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut yang Dijual di TPI menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	PRODUKSI (KG)	PERSENTASE TERHADAP BANTEN (%)	NILAI PRODUKSI (RIBU RUPIAH)	PERSENTASE TERHADAP BANTEN (%)
1	Kab Pandeglang	27.665.965	39,84	458.48.873.971	44,34
2	Kab Lebak	6.740.003	10,01	77.589.955.409	7,50
3	Kab Tangerang	21.088.031	30,01	224.320.334.391	21,69
4	Kab Serang	7.782.031	11,28	123.132.562.361	11,91

NO	KAB/KOTA	PRODUKSI (KG)	PERSENTASE TERHADAP BANTEN (%)	NILAI PRODUKSI (RIBU RUPIAH)	PERSENTASE TERHADAP BANTEN (%)
5	Kota Serang	5.821.478	8,38	58.955.318.904	5,70
PROVINSI BANTEN		69.097.508	100,00	942.494.806.420	100,00

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap di Provinsi Banten sebesar 70,43 ribu ton dengan nilai produksi sebesar 2,51 triliun rupiah. Produksi perikanan tangkap terdiri dari 68,191 ribu ton ikan tangkap laut dan 1,24 ribu ton ikan perairan umum daratan. Produksi perikanan tangkap terbesar dicapai oleh Kabupaten Pandeglang (27,66 ribu ton). Untuk produksi perikanan di perairan umum daratan pada tahun 2022 mencapai 1,24 ribu ton dengan nilai produksi 27,76 miliar rupiah. Produksi perikanan di perairan umum daratan terbesar yaitu di Kota Tangerang Selatan (672 ton). Selanjutnya mengenai data produksi perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 109
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Sub Sektor di Provinsi Banten Tahun 2019-2021 (Ton)

NO	KAB/KOTA	PERIKANAN LAUT			PERAIRAN UMUM			JUMLAH		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab Pandeglang	130.324	27.496,41	27.665	-	-	-	130.324	27.496,42	27.665
2	Kab Lebak	11.285	9.922,12	6.740	259	260,58	209,91	11.545	10.182,71	6.949
3	Kab Tangerang	20.383	20.784,34	21.088	208	87,93	88,34	20.591	20.872,27	21.176,37
4	Kab Serang	7.542	6.705,98	7.782	1.258	114,33	53,77	8.800	6.820,30	7.835,8
5	Kota Tangerang	-	-	-	1.530	1.533,83	215,58	1.530	1.533,83	215,58
6	Kota Cilegon	5.320	224,51	238,50	1.233	-	-	6.553	224,51	238,5
7	Kota Seraang	5.200	3.120,39	5.821,47	-	-	-	5.200	3.120,39	5.821,4
8	Kota Tangerang Selatan	-	-		1.560	461,82	671,464	1.560	461,82	671,46
PROVINSI BANTEN		180.054	68.253,76	69.097,51	6.048	2.458,49	1.239.075	186.102	70.712,25	70.575,08

Sumber : SIPD Provinsi Banten Tahun 2017-2022

B. Bidang Urusan Pariwisata

Salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa bagi Provinsi Banten adalah sektor Pariwisata. Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam objek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta

ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Kegiatan pariwisata di Provinsi Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah. Seperti contohnya Kawasan Pariwisata Pantai Barat dan KEK Tanjung Lesung, Pantai Utara dan Pantai Selatan, Kawasan Pariwisata Budaya Banten Lama dan Permukiman Baduy, Kawasan Pariwisata Wisata Alam Ujung Kulon, Geopark, dan lain-lain.

Perkembangan pariwisata di Provinsi Banten ini memiliki kontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah sehingga berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan tersebut sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel bahwa adanya peningkatan nilai PDRB yang lebih tinggi daripada tahun 2020, hal ini dimungkinkan karena sektor pariwisata di Provinsi Banten berangsur-angsur telah beradaptasi di masa Pandemi COVID-19, sebagaimana diketahui bahwa pada sektor pariwisata telah digaungkan penerapan protokol kesehatan dengan istilah CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability*) yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tabel 2. 110
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2022 (Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	2,88	2,89	-	-	-
2	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata (%)	-	-	2,91	2,94	4,34

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

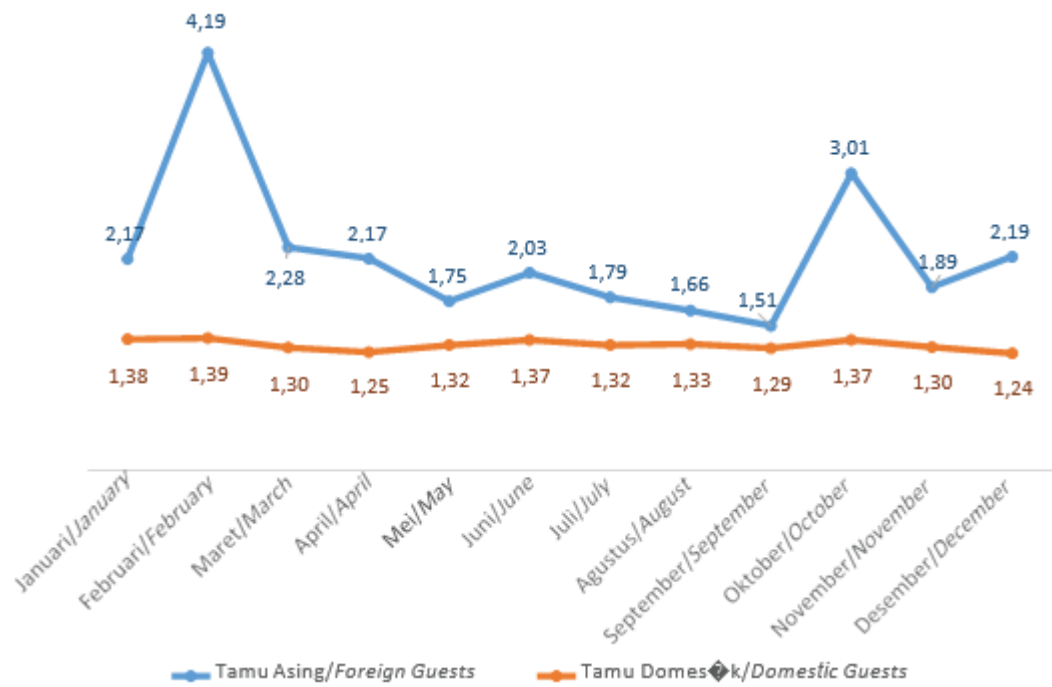
Pada tahun 2022 terdapat 156 hotel berbintang di Provinsi Banten yang menyediakan 114.145 kamar dan 20.489 tempat tidur. Sementara itu, jumlah hotel nonberbintang dan akomodasi lainnya di Provinsi Banten tahun 2022 adalah 362 tempat yang menyediakan 7.418 kamar dan 10.196 tempat tidur. Hotel tersebut digunakan oleh tamu asing maupun tamu domestik dengan rata-rata lama menginap selama 1,96 hari untuk tamu asing dan 1,32 hari untuk tamu domestik. Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel selama tahun 2022 adalah 51,30 persen untuk hotel berbintang dan 15,85 persen untuk hotel nonbintang.

Tabel 2. 111
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Banten
Tahun 2016-2022 (Jiwa)

TAHUN	WISATAWAN	
	MANCANEGARA	DOMESTIK
2016	176.928	18.418.984
2017	405.198	22.487.256
2018	327.003	17.982.140
2019	311.131	19.353.727
2020	37 946	22 384 023
2021	185 759	10 457 707
2022	305 739	60 511 652

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pariwisata, sepanjang tahun 2021 terdapat 60,8 juta wisatawan yang mengunjungi lokasi wisata di Provinsi Banten, yang terdiri dari 60,51 juta wisatawan domestik dan 0,30 juta wisatawan mancanegara.



Gambar 2. 28
Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik Menurut Bulan
di Provinsi Banten (Hari) Tahun 2022 (Persen)
(Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022)

Sebagaimana yang telah disampaikan di awal bahwa secara geografis Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi yang

berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam objek.

Tabel 2. 112
Jumlah Objek Wisata Tirta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2021 (Unit)

NO	KABUPATEN/KOTA	WISATA TIRTA					JUMLAH
		SITU/ DANAU	AIR PANAS	AIR TERJUN	ARUNG JERAM	KOLAM RENANG	
1	Kab Pandeglang	6	6	37	1	14	64
2	Kab Lebak	3	4	69	5	5	86
3	Kab Tangerang	5	-	-	-	10	15
4	Kab Serang	2	2	2	1	5	12
5	Kota Tangerang	3	-	-	-	4	7
6	Kota Cilegon	2	-	-	-	3	5
7	Kota Serang	1	-	-	-	3	4
8	Kota Tangerang Selatan	24	-	-	-	8	32
PROVINSI BANTEN		46	12	108	7	52	225

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa dominasi destinasi tertinggi wisatawasan khususnya kelompok wisata tirta banyak disinggahi pada objek air terjun yang terletak di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Sejalan dengan hal tersebut pada ojek pantai menjadi tempat favorit dibandingkan obyek wisata lainnya sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 113
Jumlah Objek Wisata Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Wisata di Provinsi Banten Tahun 2021 (Unit)

NO	KAB/KOTA	WISATAWAN MARINA PANTAI	WISATA SEJARAH	SUAKA ALAM	OBJEK WISATA LAINNYA	JUMLAH
1	Kab Pandeglang	84	3	1	58	146
2	Kab Lebak	34	-	-	-	34
3	Kab Tangerang	3	5	2	3	13
4	Kab Serang	21	4	12	11	48
5	Kota Tangerang	-	16	-	27	43
6	Kota Cilegon	-	-	-	-	0
7	Kota Serang	1	60	1	16	78
8	Kota Tangerang Selatan	-	4	-	27	31
PROVINSI BANTEN		143	92	16	142	403

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Sementara pada tabel di bawah ini menunjukkan jumlah restoran terbanyak terdapat di Kabupaten Tangerang, secara keseluruhan jumlah restoran di Provinsi Banten pada tahun 2021 berjumlah 2.033.

Tabel 2. 114
Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten Tahun 2018-2022 (Unit)

NO	KAB/KOTA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab Pandeglang	118	124	116	116	116
2	Kab Lebak	56	57	56	39	70
3	Kab Tangerang	810	878	907	960	1020
4	Kab Serang	18	18	16	19	19
5	Kota Tangerang	406	418	426	462	760
6	Kota Cilegon	53	53	53	53	832
7	Kota Serang	51	51	46	59	45
8	Kota Tangerang Selatan	314	477	477	692	1949
PROVINSI BANTEN		1.826	2.076	2.097	2.400	4.811

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

C. Bidang Urusan Pertanian

Provinsi Banten merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang tersebar pada 8 Kabupaten/Kota. Sektor pertanian di Provinsi Banten ini berkontribusi terhadap sumber pangan, penyerapan tenaga kerja bahkan pendorong bergeraknya sektor ekonomi lainnya. Sebagaimana pada Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRW Provinsi Banten terdapat kawasan peruntukan pertanian sebesar 196.000,10 Ha yang terbagi menjadi lebih kurang sebesar 124.263,54 Ha kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering dengan luas lebih kurang sebesar 71.736,56 Ha. Sementara itu seluas 196.012,28 Ha sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terbagi menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan di daerah. Luasan kawasan tersebut dalam rangka mendukung Kawasan Sistem Pertanian Terpadu.

Tabel di bawah adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan pertanian Tahun 2018-2022 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Kinerja pertanian ini mengalami penurunan pertumbuhan karena beberapa sektor produksi tahun 2022 yang naik signifikan seperti konstruksi dan perindustrian, sehingga di tahun 2020 pertumbuhan sektor pertanian yang sudah tercatat 3,55% namun di tahun 2021 mengalami pelambatan menjadi 0,56%, namun di Tahun 2022 kembali tumbuh menjadi 5,6%.

Tabel 2. 115
Indikator Kinerja Urusan PertanianTahun 2018-2022 (Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Sektor Pertanian (%)	3,58	2,21	-	-	-
2	Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal (%)	-	-	3,55	0,56	5,6

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Komoditas utama tanaman pangan yang dikembangkan terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, dengan tingkat produksi Tahun 2016-2021 sebagaimana pada tabel di bawah in.

Tabel 2. 116
Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Banten Tahun 2016-2021 (Ton)

JENIS TANAMAN PANGAN	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Padi	2.300.595	2.369.731,00	1.643.046	1.470.503,35	1.643.469	
Padi Sawah	-	-	-	-	-	-
Padi Ladang	-	-	-	-	-	-
Palawija	-	-	-	208789	193012	138606
Jagung	19.882	63.518,00	331.865,38	119.206	111.903	58661.55
Kedelai	4.020	2.126,00	18.093,56	1.202	895	569.80
Kacang Tanah	8.419	5.726,67	4.174	3.942	4.544	4054.00
Kacang Hijau	432	220,7	281,18	736	348	346.05
Ubi Kayu	90.629	75.486,00	82.641,95	70.915	60.038	58835.33
Ubi Jalar	24.255	20.724,00	16.470,53	12.788	15.284	16139.76

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Bila dilihat dari distribusi luas panen padi di Banten, maka luas panen terbesar di Kabupaten Serang dengan luas panen sebesar 82,39 ribu Ha diikuti Kabupaten Lebak sebesar 81,41 ribu Ha, dan Kabupaten Pandeglang sebesar 82,11 ribu Ha. Luas panen terendah di Kota Tangerang Selatan sebesar 1 Ha. Sekitar 94,96 persen luas panen padi di Provinsi Banten dihasilkan oleh 4 (empat) Kabupaten sentra komoditas padi yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang. Produksi Padi

di Banten dari Januari hingga Desember 2020 sebesar 1,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Produksi tertinggi terjadi pada bulan April yaitu sebesar 429,75 ribu ton, sementara produksi terendah pada bulan Desember yaitu sebesar 15,83 ribu ton. Produksi padi di Provinsi Banten Tahun 2020 jika dikonversikan menjadi beras dengan angka konversi GKG ke beras Tahun 2020 setara dengan 937,82 ribu ton beras.

Tabel 2. 117
 Penggunaan Irigasi Tanaman Pangan Tahun 2018-2020 (Hektar)

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		IRIGASI	NON IRIGASI	JUMLAH	IRIGASI	NON IRIGASI	JUMLAH	IRIGASI	NON IRIGASI	JUMLAH
1	Kab. Pandeglang	22.746	32.022	54.768	22.746	32.022	54.768	20.491	32.149	52.640
2	Kab. Lebak	22.747	25.006	47.753	22.747	25.006	47.753	23.095	24.651	47.746
3	Kab. Tangerang	23.744	12.487	36.231	23.744	12.487	36.231	23.745	12.350	36.095
4	Kab. Serang	23 887	23 687	47 574	23 887	23 687	47 574	26.154	21.419	47.573
5	Kota Tangerang	316	147	463	316	147	463	237	115	351
6	Kota Cilegon	-	1.503	1.503	-	1.503	1.503	.-.	1.445	1.445
7	Kota Serang	4.787	3.152	7.939	4.787	3.152	7.939	4.787	3.152	7.939
8	Kota Tangerang Selatan	-	54	54	-	54	54	.-.	21	21
PROVINSI BANTEN		98.228	98.058	196.285	98.227	98.058	196.285	98.508	95.302	193.810

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Penambahan luas tanam dan panen harus diusahakan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, seperti perbaikan jaringan irigasi tersier, pembuatan embung dan pompanisasi secara merata di semua sentra produksi. Sebagaimana data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa sistem pengairan berupa irigasi dari tahun ke tahun menjadi paling diandalkan, walaupun perbedaan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Lebih lanjut penggunaan lahan tanaman pangan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 selalu mengalami peningkatan jumlah, dengan dominasi tertinggi penggunaan tegal/kebun sebesar 155.922 Ha di tahun 2020 sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 118
Penggunaan Lahan Tanaman Pangan Tahun 2018-2020 (Hektar)

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TEGAL/ KEBUN	LADANG/ HUMA	SEMENTARA TIDAK DI USAHAKAN	TEGAL/ KEBUN	LADANG/ HUMA	SEMENTARA TIDAK DI USAHAKAN	TEGAL/ KEBUN	LADANG/ HUMA	SEMENTARA TIDAK DI USAHAKAN
1	Kab. Pandeglang	63.331	31.408	4.990	63.331	31.408	4.990	85.502	42.631	23.675
2	Kab. Lebak	19.062	28.131	2.772	19.062	28.131	2.772	31.753	28.266	42.390
3	Kab. Tangerang	9.241	-	1.202	9.241	-	1.202	9.498	-	1.366
4	Kab. Serang	19.266	7.296	631	19.266	7.296	631	19.335	5.901	2.291
5	Kota Tangerang	546	36	246	546	36	246	514	-	229
6	Kota Cilegon	2.715	1.871	1.133	2.715	1.871	1.133	2.678	1.859	1.883
7	Kota Serang	7.279	1.723	-	7.279	1.723	-	6.054	2.805	-
8	Kota Tangerang Selatan	478	375	23	478	375	23	588	137	340
JUMLAH		121.918	70.839	10.997	121.918	70.840	10.997	155.922	81.599	72.174

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Berikut Status Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021.

Tabel 2. 119
Status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021 (Hektar)

NO	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Ha)	Perda LP2B Provinsi Banten	BPS	Perda RTRW Hasil Revisi	Keterangan	
			2014	2020	2020		
			Luas Pertanian (Ha)	Luas Pertanian (Ha)	Luas Pertanian (Ha)	Perda LP2B	Perda RTRW
1	Kab. Pandeglang	277.000	53.951	22.746	Diatur Perda tersendiri	Perda No. 2 Tahun 2014	
2	Kab. Lebak	330.507,20	4.017	22.747	Belum ada data	Perda No. 2 Tahun 2014	Perda No. 3 Tahun 2016
3	Kab. Tangerang	103.454	29.295	23.744	12.628	Perda Nomor 9 Tahun 2020	
4	Kab. Serang	147.214	41.098	23.887	28.084,29	Perda Nomor 5 Tahun 2020	
5	Kota Tangerang	17.835	93	316	-	Perda Nomor 6 Tahun 2019	
6	Kota Cilegon	16.259	1.736	-	Diatur Perda tersendiri	Perda Nomor 1 Tahun 2020	
7	Kota Serang	26.618	3.022	4.787	3.022	Perda Nomor 8 Tahun 2020	
8	Kota Tangerang Selatan	16.485,47	29.295	-	-	Perda Nomor 9 Tahun 2019	
Provinsi Banten		935.372,67	128.604	93.440	40.712,29		

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Jika mencermati pada tabel di bawah terlihat bahwa produksi jagung mengalami penurunan dari 111.903 ton di tahun 2020 menjadi 58.662 ton pada tahun 2021, hal ini berbanding lurus dengan luas panen yang mengalami penurunan lebih kurang sebesar 53 persen dari 16.676 Ha di tahun 2020 menjadi 8.891,90 Ha pada tahun 2021. Dari 2 (dua) tahun berturut-turut Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak mengungguli Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi Banten lainnya.

Tabel 2. 120
 Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2020-2021

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2020				TAHUN 2021			
		PADI		JAGUNG		PADI		JAGUNG	
		LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)
1	Kab. Pandeglang	82.104,95	444.025,80	9.581	60.626	85.803,82	437.039,60	5.829,70	37.182
2	Kab. Lebak	81.413,36	402.870,63	5.763	42.560	75.274,36	381.865,96	1.310,90	9.792
3	Kab. Tangerang	63.037,16	328.825,23	72	471	65.604,63	344.358,35	61,8	415
4	Kab. Serang	82.397,42	391.973,23	1.227	8.027	79.139,26	388.165,31	1647	11.025
5	Kota Tangerang	822,73	4.747,24	-	-	594,57	3.501,39	-	-
6	Kota Cilegon	1.895,05	9.714,09	14	97	1.699,83	9.187,08	18	126
7	Kota Serang	13.662,57	73.013,87	15	93	11.441,96	65.530,58	21,5	100
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	4	28	-	-	3	21
PROVINSI BANTEN		325.333,24	1.655.170,09	16.676	111.903	319.558,43	1.629.648,27	8.891,90	58.662

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Hal demikian pun terjadi untuk produksi padi di wilayah Provinsi Banten. Sementara itu untuk jenis tanaman lainnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel bahwa produksi terhadap komoditas padi dan ubi jalar mengalami peningkatan di tahun 2020 dibandingkan komoditas lainnya seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi kayu. Pada tahun 2022, padi masih menjadi tanaman pangan dengan produksi tertinggi sebesar 1.766.812 ton, diikuti dengan ubi kayu dan jagung berturut-turut sebesar 68.927 ton dan 35.885 ton.

Tabel 2. 121
Statistik Tanaman Pangan Provinsi Banten Tahun 2019-2022

JENIS TANAMAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
PADI				
Luas Panen (Ha)	303.732	325.333	318 248	338 454
Produksi (Ton)	1.470.503	1.655.170	1 603 247	1 776 812
Produktivitas (Kw/Ha)	48,41	50,88	50,38	52,50
JAGUNG				
Luas Panen (Ha)	22.346	16.676	8 891	5 275
Produksi (Ton)	119.206	113.045	58 661	35 885
KEDELAI				
Luas Panen (Ha)	1803	578	358	358
Produksi (Ton)	1202	911	569	569
KACANG TANAH				
Luas Panen (Ha)	3.399	3.757	3 349	2 973
Produksi (Ton)	3.941	4.528	4 054	3 414
KACANG HIJAU				
Luas Panen (Ha)	958	289	304	150
Produksi (Ton)	736	401	346	226
UBI KAYU				
Luas Panen (Ha)	3.165	2.172	2649	2434
Produksi (Ton)	70.916	59.543	58 835	68 927
UBI JALAR				
Luas Panen (Ha)	915	967	965	850
Produksi (Ton)	12.788	15.945	16 139	12 098

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Sedangkan komoditas tanaman hortikultura yang dikembangkan di Provinsi Banten meliputi tanaman Buah Golden Melon dari Kota Cilegon dan Serang, Jambu Citra dari Anyer Kabupaten Serang, tanaman Buah Naga di Baros Kabupaten Serang, Bunga Anggrek di Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang. Untuk produksi sayur-sayuran, buah-buahan dan jenis biofarmaka di Provinsi Banten menunjukkan peningkatan produksi dengan komoditas andalannya jamur, berbagai jenis cabai, berbagai ragam komoditas rimpang (jahe, kunyit, laos dan kencur) serta buah-buahan (rambutan, nangka, dll) sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 122
 Produktivitas Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sayuran di Provinsi Banten Tahun 2021-2022 (Hektar)

NO	KAB/ KOTA	TAHUN 2021					TAHUN 2022				
		Bawang	Cabai	Kentang	Kubis	Terung	Bawang	Cabai	Kentang	Kubis	Terung
1	Kab. Pandeglang	1 242	10 107	-		25 874	2 369	6 646	-		34 639
2	Kab. Lebak	94	1 166	40	510	7 084	53	529	52	226	7 674
3	Kab. Tangerang	69	130	-		5 577	113	1 033	-		1 148
4	Kab. Serang	9 888	7 797	-		9 961	10 551	4 755	-	4	8 188
5	Kota Tangerang	-	-	-		-	-	-	-		-
6	Kota Cilegon	312	1 552	-		2 770	98	756	-		1 629
7	Kota Serang	258	386	-		2 266	538	806	-		1 217
8	Kota Tangerang Selatan	33	-	-		333	2	-	-		80
	PROVINSI BANTEN	11 896	21 137	40	230	53 866	13 724	14 525	52	230	54 576

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Perbedaan potensi dan masalah komoditas pertanian unggulan di setiap wilayah mengakibatkan terbentuknya pola aliran komoditas (*commodity flows*) yang memperlihatkan adanya hubungan keterkaitan antar wilayah. Dalam hal ini hubungan koleksi dan distribusi komoditas pertanian unggulan, di suatu wilayah ada yang menjadi daerah pemasaran dan sekaligus juga sebagai daerah produksi, ataupun salah satu diantaranya.

Tabel 2. 123
 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Banten Tahun 2019-2021

NO	JENIS TANAMAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021*	
		LUAS PANEN (HA)	PROUKSI (KUINTAL)	LUAS PANEN (HA)	PROUKSI (KUINTAL)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (KUINTAL)
1	Bawang Daun	78	4.138	43	2.744	49	2.584
2	Bawang Merah	238	15.446	229	14.041	357	11.896
3	Bawang Putih	-	-	-	-	4	6
4	Bayam	1.496	80.183	1.586	90.354	1.677	89.722
5	Blewah	-	-	1	20	-	-
6	Buncis	23	999	20	633	12	551
7	Cabai Besar	851	71.035	717	69.469	745	63.856
8	Cabai Rawit	544	50.194	528	58.610	456	39.931
9	Jamur	24.683	163.258	63.818	235.686	14.581	17.589
10	Kacang Merah	-	-	-	-	-	-
11	Kacang Panjang	1.188	119.475	1.386	160.558	1.142	143.659
12	Kangkung	1.729	107.011	1.976	132.435	1.918	123.883
13	Kembang Kol	1	10	3	44	5	870
14	Kentang	2	130	-	-	1	40
15	Ketimun	1.343	137.122	1.482	193.246	1.292	178.576
16	Kubis	3	206	2	25	6	510
17	Labu Siem	21	908	15	2.250	14	329
18	Lobak	-	-	-	-	-	-

NO	JENIS TANAMAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021*	
		LUAS PANEN (HA)	PROUKSI (KUINTAL)	LUAS PANEN (HA)	PROUKSI (KUINTAL)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (KUINTAL)
19	Melon	47	3.683	76	5.162	24	1.692
20	Paprika	-	-	-	-	-	-
21	Petsai/Sawi	980	74.028	1.030	70.539	986	67.858
22	Semangka	91	13.595	172	34.376	124	8.374
23	Stroberi	-	-	-	-	1	64
24	Terung	535	50.422	592	70.211	484	53.866
25	Tomat	153	8.298	220	18.935	178	11.901
26	Wortel	37	3.001	17	1.242	16	2.156

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Hubungan keterkaitan aliran komoditas pertanian unggulan antar daerah/wilayah di Provinsi Banten, terjadi baik antar daerah internal maupun dengan daerah luar (*external region*). Interaksi antar wilayah ini terjadi karena adanya saling melengkapi kebutuhan. Pada satu daerah ada yang kelebihan produksi (*surplus*) suatu komoditas, sedangkan daerah lainnya kekurangan (*minus*) produksi komoditas tersebut.

Tabel 2. 124
Produksi Tanaman Buah buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Banten Tahun 2019-2022

NO	JENIS TANAMAN	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	Alpukat	20.468	20.192	14.444	24 026
2	Anggur	-	7	80	85
3	Apel	1	-	-	-
4	Belimbing	15.627	17.590	14.493	13 395
5	Duku	18.564	32.592	20.233	45 962
6	Durian	464.360	324.882	294.561	596 154
7	Jambu Air	28.062	72.785	48.573	75 076
8	Jambu Biji	40.675	66.893	51.637	57 649
9	Jengkol	63.565	122.021	86.051	7 238
10	Jeruk Besar	1.186	3.789	688	669
11	Jeruk Siam	.	.	.	7 238
12	Mangga	5.995	7.116	9.747	433 462
13	Manggis	102.692	127.935	49.339	47 614
14	Melinjo	271	696	-	500 476
15	Nangka	545.292	495.665	476.802	66 293
16	Nenas	48.524	62.898	59.296	3 444
17	Pepaya	5.055	3.691	3.883	153 246
18	Petai	137.454	207.982	198.398	134 705
19	Pisang	107.406	119.965	106.575	2 931 786
20	Rambutan	2.573.421	2.902.658	2.846.834	385 451
21	Salak	172.180	223.209	313.960	19 854
22	Sawo	4.000	9.237	13.717	28 720
23	Sirsak	16.943	39.101	22.954	32 232
24	Sukun	31.368	48.232	39.477	81 446

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu dilakukan suatu identifikasi pola ruang aliran komoditas pertanian unggulan di Provinsi Banten. Hal ini cepat atau lambat akan berdampak bagi kelangsungan perkembangan Provinsi Banten.

Tabel 2. 125
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Biofarmaka menurut Jenis Tanaman di Provinsi Banten Tahun 2019-2021

NO	JENIS TANAMAN	2019		2020		2021*	
		LUAS PANEN (M ²)	PRODUKSI (KG)	LUAS PANEN (M ²)	PRODUKSI (KG)	LUAS PANEN (M ²)	PRODUKSI (KG)
1	Dlingo	900	670	2.350	1.320	-	-
2	Jahe	401.218	847.959	613.898	1.176.816	1.112.030	1.926.635
3	Kapulaga	66.832	59.115	116.613	94.912	82.732	76.704
4	Keji Beling	8.272	22.262	8.602	9.439	-	-
5	Kencur	332.640	538.215	739.931	1.004.477	1.081.566	1.748.971
6	Kunyit	428.478	1.004.713	324.448	1.185.735	303.993	667.836
7	Laos	436.717	1.708.473	692.600	2.092.990	928.490	2.635.336
8	Lempuyang	8.219	9.281	32.772	133.957	28.349	37.451
9	Lidah Buaya	1.928	4.359	4.744	5.685	2.229	1.556
10	MahKota Dewa	5.058	124.577	2.687	63.169	2.205	64.578
11	Mengkudu	100.520	141.251	22.611	50.524	47.941	51 692
12	Sambiloto	1.275	4.585	20.960	9.040	1.833	3.549
13	Temuireng	5.201	5.724	3.117	6.033	6.597	7.329
14	Temu kunci	10.218	5.980	22.688	86.247	18.795	60.235
15	Temulawak	2.131	3.975	36.261	52.058	22.846	24 867

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Salah satu parameter penting pada subsektor peternakan adalah parameter pemotongan ternak. Dengan parameter pemotongan ternak yang dikaitkan dengan jumlah ternak pada RPH/TPH, dapat diketahui berapa besar produksi daging hasil pemotongan di suatu wilayah. Jumlah unit pemotongan ternak atau RPH/TPH pada Tahun 2021 ada sebanyak 21 unit yang tersebar di Provinsi Banten.

Tabel 2. 126
Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Banten Tahun 2021-2022 (Kg)

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		SAPI	KAMBING	DOMBA	SAPI	KAMBING	DOMBA
1	Kab. Pandeglang	276.725	29.229	15.857	21 569,46	10 581,91	37 822,12
2	Kab. Lebak	1.048.697	317.338	449.285	259 226,69	284 769,10	371 677,00
3	Kab. Tangerang	2.015.602	596.500	922.900	1 663 722,87	640 139,94	943 740,76
4	Kab. Serang	1.065.890	358.890	922.900	778 350,34	381 915,09	719 576,74
5	Kota Tangerang	8.634.868	589.795	79.286	7 985 085,26	908 743,89	348 285,68
6	Kota Cilegon	743.688	25.053	-	948 654,52	77 318,33	33 811,70
7	Kota Serang	2.334.182	98.124	61.667	1 479 712,16	62 775,66	170 803,62
8	Kota Tangerang Selatan	4.442.499	13.576	33.778	4 106 365,48	244 445,70	29 331,44
PROVINSI BANTEN		20 562 151,00	2.028.505	2.485.673	17 242 686,78	2 610 689,62	2 655 049,06

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Produksi daging ternak seperti sapi, kambing dan domba di Provinsi Banten masih menjadi 3 jenis hewan yang primadona bagi masyarakat. Terdata bahwa pada tahun 2021 adanya penurunan produksi daging ternak sapi yaitu dari produksi sebesar 20 562 151,00 kg di tahun 2021 menjadi 17 242 686,78 kg pada tahun 2022. Sementara itu untuk tahun 2022 disusul oleh produksi daging jenis domba dan kambing, dengan besaran secara berturut-turut yaitu 2 655 049,06 kg dan 2.485.673 kg, jenis daging tersebut mengalami peningkatan produksi dari tahun 2021 ke tahun 2022, untuk lebih jelasnya dapat melihat pada tabel di atas.

Tabel 2. 127
Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Banten Tahun 2021-2022 (Kg)

KAB/KOTA	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
	AYAM KAMPUNG	AYAM PETELUR	AYAM PEDAGING	ITIK	AYAM KAMPUNG	AYAM PETELUR	AYAM PEDAGING	ITIK
Kab. Pandeglang	1 029 399,14	136 836,25	-	11 165,00	1 186 349,40	142 765,20	-	13 864,00
Kab. Lebak	1 718 956,86	78 895,99	-	86 501,83	1 773 723,81	81 053,19	-	88 033,64
Kab. Tangerang	1 455 736,00	2 707 103,00	-	203 033,00	852 624,36	2 400 846,49	-	102 815,98
Kab. Serang	122 859,00	117 969,00	-	2 117 663,00	155 750,01	162 607,34	-	2 223 546,40
Kota Tangerang	393 039,00	49 166,00	-	95 073,00	400 899,48	50 920,39	-	97 479,04
Kota Cilegon	164 790,12	-	-	4 747,05	110 784,06	-	-	2 416,80
Kota Serang	65 690,24	-	-	85 045,40	75 705,66	-	-	78 616,02
Kota Tangerang Selatan	150 762,96	96 510,46	-	283 057,52	68 609,07	92 439,09	-	151 686,40
PROV BANTEN	5 101 233,32	3 186 480,70	-	2 886 285,80	4 624 445,85	2 930 631,70	-	2 758 458,28

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Lebih lanjut di tabel di atas menginformasikan terhadap produksi daging dan telur yang dihasilkan dari hewan ternak jenis unggas Tahun 2021-2022 di Provinsi Banten. menggambarkan produksi daging unggas di Provinsi Banten pada tahun 2022 jenis ayam kampung mencatatkan produksi daging yang lebih besar daripada jenis ternak lainnya .Besaran produksi ayam kampung di tahun 2022 yaitu dari 5 101 233,32 kg (tahun 2021) menjadi 4 624 445,85 kg (tahun 2022). Sementara itu untuk komoditas telur di tahun 2022 ayam kampung menghasilkan sebesar 26 319 195,00 kg, untuk lebih jelasnya dapat melihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 128
 Produksi Telur Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
 Provinsi Banten Tahun 2021-2022 (Kg)

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		AYAM KAMPUNG	AYAM TELUR	ITIK	AYAM KAMPUNG	AYAM TELUR	ITIK
1	Kab. Pandeglang	8 446 727,00	-	259 924,00	8 500 000,00	-	263 662,91
2	Kab. Lebak	3 681 800,00	-	401 666,00	3 681 800,00	-	406 652,81
3	Kab. Tangerang	4 087 163,00	-	3 187 276,00	4 522 978,00	-	3 232 667,64
4	Kab. Serang	7 106 060,00	-	6 408 641,09	7 106 060,00	-	6 504 770,71
5	Kota Tangerang	721 158,00	-	170 594,88	721 158,00	-	172 869,36
6	Kota Cilegon	5 192,00	-	90 084,00	5 192,00	-	91 293,22
7	Kota Serang	1 697 569,00	-	515 143,20	1 697 569,00	-	520 995,66
8	Kota Tangerang Selatan	84 438,00	-	15 574,51	84 438,00	-	15 808,13
PROVINSI BANTEN		25 830 107,00		11 048 903,68	26 319 195,00		11 208 720,44

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

D. Bidang Urusan Kehutanan

Berbicara urusan kehutanan di Provinsi Banten, sebagaimana dalam Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRW Provinsi Banten terdapat kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Pada pola ruang di Provinsi Banten terdapat kawasan hutan lindung yang memiliki luas lebih kurang sebesar 10.387,29 Ha yang tersebar berada di wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon. Juga terdapat kawasan Taman Hutan Raya Banten dengan luas lebih kurang sebesar 1.595,90 Ha yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang (Gunung Aseupan) dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita di wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang dengan luas lebih kurang sebesar 1.505,65 Ha.

Tabel 2. 129
 Capaian Terkait Kehutanan Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	1417,33	1431,23	1841	5.165,89	5.155,15
2	Pengembangan Perhutanan Sosial	Ha	0	0	0	11783,85	11783,85
3	Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Unit	1	1	1	1	1

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Lebih daripada itu pada pola ruang di Provinsi Banten dalam aturan yang sama juga terdapat kawasan dengan peruntukan hutan produksi lebih kurang 84.217,45 Ha yang terbagi menjadi 39.008,40 Ha hutan produksi terbatas dan 45.209,04 Ha sebagai hutan produksi tetap.

Tabel 2. 130
Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2018-2022 (Persen)

INDIKATOR	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Cakupan Tutupan Hutan (%)	32,41	39,53	45,46	45,99	48,04

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Tabel di atas adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan kehutanan Tahun 2018-2022 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Hal positif ditunjukkan dengan rasio cakupan tutupan hutan yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2. 131
Indikator Pelayanan Umum Bidang Urusan Kehutanan
Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		
			2018	2019	2020
1	Luas Sempadan Pantai	Ha	3.202,73	3.202,73	3.202,73
2	Luas Sempadan Sungai	Ha	27.195,73	27.195,73	27.195,73
3	Luas Kawasan SekitarDanau/ Waduk	Ha	493,31	493,31	493,31
4	Luas Kawasan Suaka Alam	Ha	5.095,05	5.095,05	5.095,05
5	Luas Kawasan Pantai Berhutan Bakau	Ha	2.992,32	2.992,32	2.992,32
6	Luas Taman Nasional	Ha	137.708,46	137.708,46	137.708,46
7	Luas Taman Hutan Raya	Ha	1.595,90	1.595,90	1.595,90
8	Luas Taman Wisata Alam	Ha	1.248,15	1.248,15	1.248,15
9	Luas Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan	Ha	6.069,78	6.069,78	6.069,78
10	Luas Kawasan Hutan Suaka Alam	Ha	3.542,70	3.542,70	3.542,70
11	Luas Kawasan Hutan Pelestarian Alam	Ha	140.552,51	140.552,51	140.552,51
12	Luas Hutan Lindung	Ha	10.396,78	10.396,78	10.396,78
13	Luas Hutan Produksi	Ha	25.639,88	25.639,88	25.639,88
14	Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Ha	58.647,67	58.647,67	58.647,67
15	Luas Hutan Ulayat/Adat	Ha	5.587,00	5.587,00	5.587,00
16	Perusahaan yang Memiliki HPH	Perusahaan /Ha	1	1	1
17	Kawasan Hutan yang dikelola Rakyat	Kel/Ha	0	0	841/195.274,87

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		
			2018	2019	2020
18	Kayu Dicuri	m3/Rp/Kas us	0	3,60 / 7.200.000 / 2	0
19	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	0	100,30	0
20	Luas Kawasan Reklamasi Hutan	Ha	0	0	0
21	Luas Kawasan Reboisasi Hutan	Ha	234,76	100,35	329,50
22	Kebakaran Hutan	Ha/Org/Rp	0	100,30	0
23	Produksi Dan Nilai Hasil Hutan Kayu	Rp/m3	21.542,562	31.580,987	10.315,147
24	Produksi Dan Nilai Hasil Hutan Non Kayu	Rp/Batang /Kg/Ton	14.079.738.7 41	0	0

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Produksi hasil hutan yang berupa kayu di Provinsi Banten pada tahun 2021 berupa kayu bulat sebanyak 16,10 ribu m3 yang terdiri dari kayu jati dan kayu rimba. Produksi kayu jati pada tahun 2021 lebih kurang sebesar 6,36 ribu m³, dengan nilai produksi 11,09 miliar rupiah, sedangkan di tahun yang sama produksi kayu rimba sebesar 9,75 ribu m³ dengan nilai 2,13 miliar rupiah sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 132
Produksi Kayu Jati dan Kayu Rimba Tahun 2016-2022

TAHUN	KAYU JATI		KAYU RIMBA	
	PRODUKSI (m ³)	NILAI PRODUKSI (RP)	PRODUKSI (m ³)	NILAI PRODUKSI (RP)
2016	2.192,24	4.671,00	3.131,88	1.855,00
2017	11.694,52	27.886,79	5.865,35	1.951,57
2018	14.178,38	22.963,48	7.364,19	2.272,87
2019	17.033,71	26.438,44	13.711,34	3.772,52
2020	14.543,84	19.066,40	5.370,50	1.129,78
2021	6.357,37	11.098,87	9.751,19	2.128,87
2022	3 203,96	5 805,38	9 427,00	8 179,66

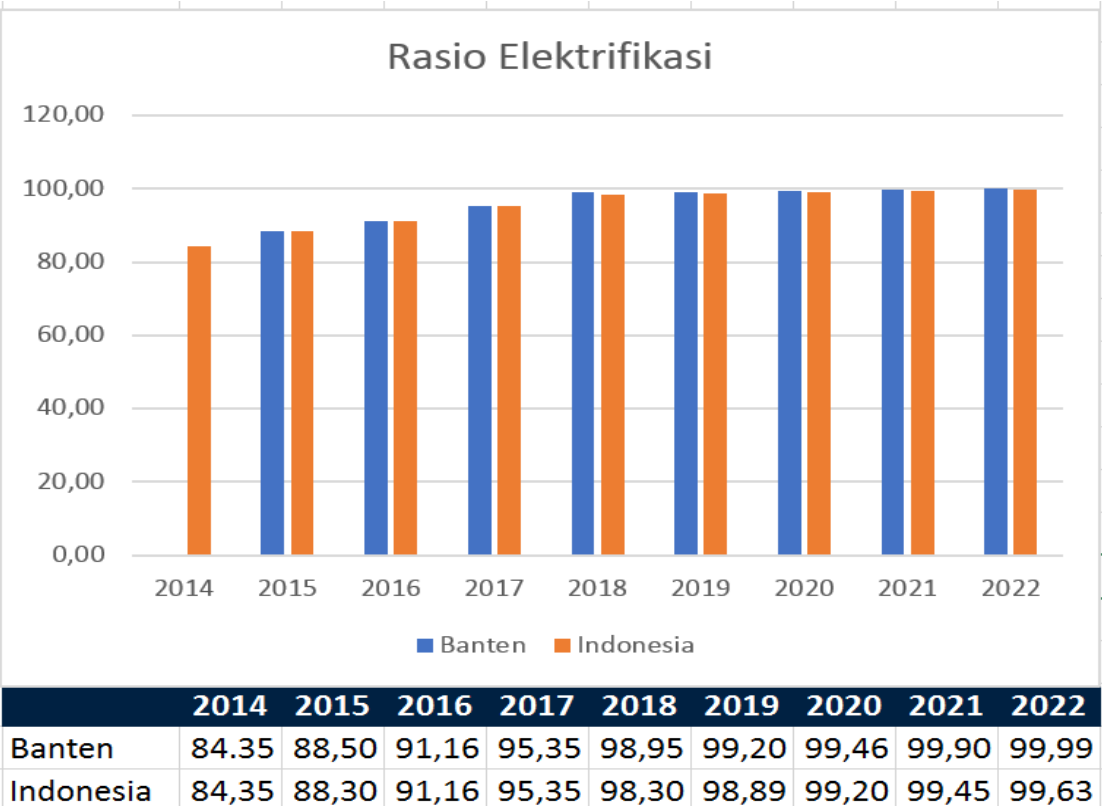
Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

E. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga. Sektor listrik menjadi salah satu sektor yang strategis bukan saja untuk wilayah Provinsi Banten tapi juga untuk wilayah Jawa-Bali. Dari sisi supply, di Provinsi Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PLTU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT. Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Provinsi Banten

dilakukan oleh PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Gambar di bawah menunjukkan realisasi rasio elektifikasi antara Provinsi Banten dengan Nasional, diketahui bahwa di Tahun 2022 Provinsi Banten telah mencatatkan realisasi rasio elektrifikasi lebih kurang sebesar 99,9 9persen. Sementara itu berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menginformasikan bahwa realiasasi rasio elektrifikasi nasional di tahun 2022 sebesar 99,63 persen. Meskipun capaian rasio eletrifikasi Provinsi Banten Realisasi capaian Rasio Elektrifikasi tahun 2022 adalah 99,99% berdasarkan data basis PLN dari Dirjen Ketenagalistrikan Tahun 2022. Berdasarkan data rumah tangga berlistrik untuk pengukuran RE tersebut, terdapat 498 rumah tangga yang berstatus belum berlistrik dan berlokasi hanya di wilayah Kabupaten Lebak, Keberadaan data mutakhir baseline Rasio Elektrifikasi tahun 2022 tersebut membuat data-data hasil pengukuran di tahun 2018-2022 tidak digunakan lagi sebagai acuan.



Gambar 2. 29
Perkembangan Perbandingan Realisasi Rasio Elektrifikasi di Provinsi Banten dengan Nasional Tahun 2014-2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Lebih lanjut di tahun 2022 sebagaimana data yang disajikan pada tabel di bawah sekitar 99, 56 persen rumah tangga di Provinsi Banten memiliki sumber penerangan utama berasal dari listrik PLN, 0,24 persen rumah tangga memiliki sumber penerangan utama dari listrik non-PLN, dan 0,20 persen lainnya bukan merupakan pengguna listrik. Dari sumber yang sama, tercatat bahwa 84,98 persen rumah tangga di Provinsi Banten telah menempati tempat tinggal milik sendiri, dan sisanya masih belum memiliki tempat tinggal milik sendiri. Kedepannya Pemerintah Provinsi Banten akan terus berupaya serta berakselerasi mengembangkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup besar, seperti energi biomasa, energi mikro hidro, energi gelombang, energi angin, dan energi surya, yang kesemuanya apabila dikembangkan sebagai energi primer untuk membangkitkan tenaga listrik juga dapat mendatangkan devisa serta hilir dari cita-cita tersebut membantu Pemerintah Pusat dalam Program Diversifikasi Energi.

Tabel 2. 133
Sumber Utama Penerangan Rumah Tangga
Tahun 2021-2022 (Persen)

NO	KABUPATEN/ KOTA	2021			2022		
		LISTRIK	BUKAN LISTRIK	JUMLAH	LISTRIK	BUKAN LISTRIK	JUMLAH
1	Kab. Pandeglang	100	0	100	99,83	0,17	100
2	Kab. Lebak	99,55	0,45	100	9,36	1,64	100
3	Kab. Tangerang	100	0	100	100	0	100
4	Kab. Serang	100	0	100	99,88	0,12	100
5	Kota Tangerang	100	0	100	100	0	100
6	Kota Cilegon	100	0	100	100	0	100
7	Kota Serang	100	0	100	100	0	100
8	Kota Tangerang Selatan	100	0	100	100	0	100
PROVINSI BANTEN		99,82	99,55	0,45	99,80	0,20	100

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Tabel di bawah adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan energi dan sumber daya mineral tahun 2018-2022 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Pada tahun 2022 indikator Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB mengalami penurunan realisasi sebesar 0,07 persen dari 0,68 persen (tahun 2020) menjadi 0,55 persen, hal ini dimungkinkan

terjadi akibat ketidakpastian hukum terkait kewenangan Provinsi di sub sektor mineral dan batubara pasca terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang menghapus semua kewenangan Provinsi dalam pengelolaan mineral dan batubara, hal tersebut berdampak kepada tidak dapat dilaksanakannya pelaksanaan program dan kegiatan terkait mineral dan batubara di tahun 2022.

Tabel 2. 134
Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2018-2022 (Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral (%)	12,50	18,43	-	-	-
2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	-	-	0,68	0,61	0,55

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Jumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Banten pada tahun 2023 adalah sebanyak 155 perusahaan, dimana yang terbanyak adalah perusahaan pertambangan andesit (64 perusahaan), pasir kuarsa (21 perusahaan), dan pasir darat (20 perusahaan). Jumlah perusahaan ini menurun 16,22 persen dari tahun 2021. Jika dilihat berdasarkan wilayah penambangannya, pada tahun 2022, jenis bahan tambang emas memiliki area tambang terluas yaitu mencapai 7,76 ribu hektar, diikuti oleh area tambang batu gamping seluas 6,31 ribu hektar, dan area tambang pasir laut seluas 5,83 ribu hektar.

Tabel 2. 135
Luas Wilayah Pertambangan Menurut Jenis Bahan Tambang di
Provinsi Banten Tahun 2020-2022 (Hektar)

NO	JENIS BAHAN TAMBANG	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Batu Bara	5 616,00	5,00	5,00
2	Emas	436,44	7 764,60	7 764,60
3	Perak	3 545,88		
4	Andesit	2 530,03	3 953,33	3 953,33
5	Zeolit	101,2	0,6	0,65
6	Galena	518	518	518
7	Pasir Darat	399,24	5 798,20	253

NO	JENIS BAHAN TAMBANG	TAHUN		
		2018	2019	2020
8	Pasir Kuarsa	1 066,16	1 031,16	1 126,00
9	Pasir Kali	-	-	-
10	Bentonit	66,8	60,3	72
11	Tanah Liat	237,9	273,9	238
12	Tanah Urug	5,90	5,00	46,00
13	Batu Gamping	6 994,20	6 229,40	6 307,00
14	Tras	428	394	389
15	Pasir Besi	10,00	10,00	10,00
16	Pasir Laut	26 886,99	10 487,23	5 853,00
17	Makadam	-	-	-
18	Feldspar	5	-	-
19	Breksi Tufaan	-	-	-
20	Seng/Zn	-	-	-
21	Mangan	-	-	-
22	22. Dolomit	272	272	272

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas pada tahun 2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energinya. Di Banten, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada ketidaksiapan adaptasi sistem institusi (produsen dan distributor) dan teknologi (mencakup stasiun pengisian, tabung dan kompor gas, kendaraan pengangkut) di dalam mengantisipasi perubahan dan ketidakpastian yang dimunculkannya. Pada tingkat masyarakat dan dunia usaha, pilihan adaptasi terhadap bahan bakar pengganti di dalam merespon kebijakan konversi bahan bakar minyak juga ditentukan oleh potensi ketersediaan energi alternatif di tingkat lokal. Jenis- jenis energi alternatif akan menjadi pilihan manakala memiliki tingkat biaya ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar gas. Sumber energi alternatif dan penyediaannya perlu dihadirkan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan kapasitas adaptasi ekonomi dan budaya yang dimilikinya.

Tabel 2. 136
 Realisasi Penjualan Gas Kota Triwulanan Pada
 Tahun 2015-2022 (Meter Kubik)

TAHUN	TRIWULAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
2015	410.337.224	386.537.692	403.030.991	419.104.492	1.619.010.401
2016	394.256.619	385.010.685	339.414.335	347.059.780	1.465.741.419
2017	332.449.891	349.581.054	351.726.889	358.445.347	1.329.203.181
2018	386.633.999	397.717.618	466.648.379	490.462.732	1.741.462.728
2019	384.822.277	353.683.006	408.897.530	388.269.863	1.535.672.677
2020	400.751.805	374.815.046	400.653.703	373.870.877	1.550.091.430
2021	400 751 804	374 815 047	400 653 702	373 870 877	1 550 091 430
2022	410 173 884	391 637 423	414 058 544	393 331 408	1 609 201 259

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

F. Bidang Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor potensial besar untuk dikembangkan di kemudian hari dan tentunya dapat menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi bagi wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Tabel di bawah menunjukkan realisasi indikator kinerja urusan perdagangan tahun 2018-2022 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Tabel 2. 137
 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022 (Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	LPE Sektor Perdagangan (%)	10,90	11,27	-2,86	1,84	3,95
2	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Strategis (%)	4,00	2,47	-	-	-
3	Tingkat Inflasi Bahan Pokok (%)	-	-	-2,86	2,43	3,29

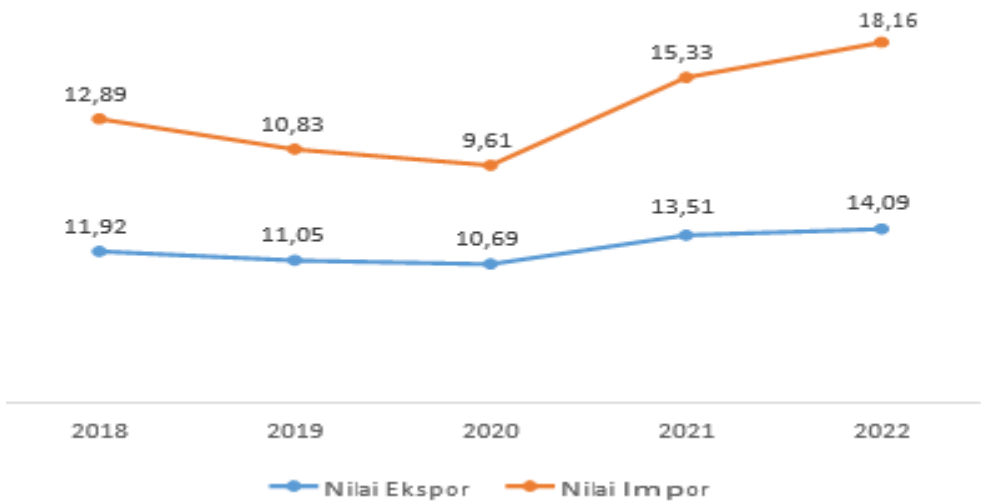
Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Nilai ekspor Provinsi Banten Tahun 2022 sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah yaitu lebih kurang sebesar US\$ 14,09 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar US\$ 13,51 miliar. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada ekspor Provinsi Banten, yaitu sebesar US\$13,79 miliar (97,81%), sementara sisanya berasal dari sektor migas US\$158,55 juta (1,12%), sektor pertanian US\$148,97 juta (1,05%), serta sektor pertambangan dan lainnya US\$0,85 juta (0,01%).

Tabel 2. 138
Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Banten
Tahun 2018-2022 (US\$)

TAHUN	NILAI EKSPOR	NILAI IMPOR	EKSPOR NETO
2018	11 920,74	12 893,94	- 973,20
2019	11 045,60	10 828,51	217,09
2020	10 687,43	9 608,77	1 078,66
2021	13 511,51	15 326,30	- 1 814,79
2022	14 094,69	18 159,51	18 160,51

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022



Gambar 2. 30
Nilai Ekspor (FOB) dan Nilai Impor (CIF) Provinsi Banten Tahun 2018-2022
(miliar US\$)
(Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022)

Nilai impor Provinsi Banten tahun 2022 sebesar US\$18,16 miliar, naik 18,49 persen dibandingkan nilai impor tahun sebelumnya yang sebesar US\$15,33 miliar. Sebagian besar impor tersebut berupa bahan baku dan bahan penolong sebesar US\$17,45 miliar (96,09%), sedangkan sisanya berupa barang modal US\$357,09 juta (1,97%) dan barang konsumsi US\$351,99 juta (1,94%).

Nilai ekspor Provinsi Banten tahun 2022 sebesar US\$14,09 miliar, meningkat 4,32 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar US\$13,51 miliar. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada ekspor Provinsi Banten, yaitu sebesar US\$13,79 miliar (97,81%), sementara sisanya berasal dari sektor migas US\$158,55 juta (1,12%), sektor pertanian US\$148,97 juta (1,05%), serta sektor pertambangan dan lainnya US\$0,85 juta (0,01%).

Volume ekspor barang asal Provinsi Banten tahun 2022 mencapai 10,97 juta ton. Jika dilihat menurut pelabuhan, volume ekspor yang terbesar tahun 2022 di Provinsi Banten adalah melalui Pelabuhan Tanjung Priok yaitu sebanyak 4,01 juta ton dengan nilai 11,41 miliar US\$ atau lebih dari 81 persen dari total ekspor Banten.

Tabel 2. 139
 Nilai Ekspor Provinsi Banten Menurut Jenis Produk
 Tahun 2018-2022 (US\$)

NO	JENIS PRODUK	NILAI EKSPOR				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Migas	56,38	8,61	2,73	15,45	158,55
2	Pertanian	22,55	33,35	71,21	74,36	148,97
3	Industri Pengolahan	11.841,25	11.003,04	10.602,49	13.420,15	13 786,32
4	Pertambangan dan lainnya	0,57	0,59	11	1,54	0,85

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Lebih lanjut untuk perkembangan impor di Provinsi Banten Nilai impor Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar US\$18,16 Milyar naik 18,49 persen dibandingkan nilai impor tahun sebelumnya yang sebesar US\$15,33 miliar. Sebagian besar impor tersebut berupa bahan baku dan bahan penolong sebesar US\$17,45 miliar (96,09%), sedangkan sisanya berupa barang modal US\$357,09 juta (1,97%) dan barang konsumsi US\$351,99 juta (1,94%).

Tabel 2. 140
 Nilai Impor Provinsi Banten Menurut Jenis Produk Barang
 Tahun 2018-2022 (juta US\$)

NO	JENIS PRODUK	NILAI IMPOR				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Barang Konsumsi	311,19	208,18	186,8	286,56	351,99
2	Bahan Baku dan Bahan Penolong	11.870,45	10.334,75	9.173,30	14.926,49	17 450,43
3	Barang Modal	712,3	285,6	248,5	113,23	357,09
JUMLAH TOTAL		12.893,64	10.828,51	9.608,77	15.326,97	18 159,51

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

G. Bidang Urusan Perindustrian

Sektor urusan perindustrian merupakan bagian penting yang memiliki peran strategis dalam pertumbuhan perekonomian bagi wilayah Provinsi Banten, yaitu berada pada kawasan di wilayah utara Provinsi Banten. Sebagaimana yang tertuang dalam pola ruang Perda

Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan RTRW, lebih kurang sebesar 54.459,93 Ha diperuntukan sebagai kawasan industri yang tersebar 8 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.

Tabel 2. 141

Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022 (Persen)

INDIKATOR	TAHUN				
	2018*	2019*	2020**	2021**	2022
LPE Sektor Perindustrian (%)	6,63	6,02	-4,67	4,93	3,60

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Tabel di atas adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan perdagangan tahun 2018-2022 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Terinformasikan bahwa LPE Sektor Perindustrian mengalami penurunan di tahun 2019 hingga Tahun 2020 pun demikian hal ini berbanding lurus dengan LPE Sektor Perdagangan yang juga mengalami penurunan di tahun 2020. Penurunan ini dimungkinkan akibat masih berlanjutnya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas sektor perindustrian dan dunia usaha lainnya yang berdampak kepada terganggunya pencapaian indikator makro Provinsi Banten. Namun demikian di tahun 2022 mulai adanya pertumbuhan positif pada sektor perindustrian yang berimplikasi kepada meningkatnya presentase LPE Sektor Peindustrian.

Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Banten pada tahun 2021 sebanyak 3.429 perusahaan, jumlah terbanyak berlokasi di Kabupaten Tangerang, yaitu sebanyak 1.860 perusahaan (46,22 persen), kemudian di Kota Tangerang sebanyak 824 perusahaan (32,15 persen), dan Kabupaten Serang sebanyak 381 perusahaan (10,56 persen), Kota Tangerang Selatan 196 perusahaan (4,95 persen), Kota Cilegon sebanyak 127 perusahaan (3,52 persen). Sedangkan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang masing-masing hanya terdapat 6 perusahaan, 28 perusahaan dan 7 perusahaan.

Tabel 2. 142
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	PERUSAHAAN (Unit)	TENAGA KERJA (Jiwa)	NILAI PRODUKSI (RIBU RUPIAH)
1	Kab Pandeglang	6	201	376.377.911
2	Kab Lebak	28	6.236	7.321.353.453
3	Kab Tangerang	1.860	339.615	246.285.358.501
4	Kab Serang	381	295.310	112.628.890.875
5	Kota Tangerang	824	176.598	166.019.743.150
6	Kota Cilegon	127	31.380	134.939.619.394
7	Kota Serang	7	273	786.280.915
8	Kota Tangerang Selatan	196	44.153	30.152.414.467
	PROVINSI BANTEN	3.429	893.766	698.510.038.666

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

H. Bidang Urusan Transmigrasi

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan transmigrasi merupakan salah satu pada urusan pemerintahan pilihan yang dapat dilaksanakan sesuai potensi daerah. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, menyatakan bahwa transmigrasi adalah perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan pemerintah, singkatnya adalah perpindahan penduduk dari wilayah padat kepada wilayah yang masih jarang sehingga diperolehnya pemerataan penduduk. Namun demikian sebagai informasi bahwa Provinsi Banten adalah daerah yang bukan termasuk kepada tujuan transmigrasi.

2.1.4.4 Urusan Penunjang Pemerintahan

Urusan Penunjang Pemeritahan menjadi bagian dalam urusan pemerintahan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi:

A. Bidang Urusan Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dimana untuk Bappeda selama beberapa tahun terakhir menyusun dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah yaitu: a) Dokumen Rencana Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025; b) Dokumen Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022; c) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022.

Bappeda juga setiap tahunnya menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan pengesahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Setiap tahunnya Bappeda konsisten mengikuti Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas dan juga sekaligus menjadi indikator kinerja Bappeda.

Tabel 2. 143
Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (%)	54.17	58.33	83.33	70,83	75
2	Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja (Nilai)	B	B	B	B	BB

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Pada tahun 2020 Provinsi Banten berhasil masuk dalam 10 besar nominasi dari Bappenas untuk Penghargaan Pembangunan

Daerah (PPD) dan mendapatkan Dana Insentif Daerah. Untuk selanjutnya terjadi penurunan kesesuaian kriteria yang disebabkan kualitas dokumen perencanaan yang masih perlu banyak perbaikan.

B. Bidang Urusan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu parameter dari kualitas pengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga maupun di level pemerintah daerah. Pada Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Banten telah meraih opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini dapat dianalisa sebagai salah satu upaya yang signifikan Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2. 144
Indikator Kinerja Urusan Keuangan pada BPKAD
Tahun 2017-2022

URAIAN	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	Wajar Dengan	Wajar Tanpa	Wajar Tanpa	Wajar Tanpa	Wajar Tanpa	Wajar Tanpa
	Pengecualian (WDP)	Pengecualian (WTP)	Pengecualian (WTP)	Pengecualian (WTP)	Pengecualian (WTP)	Pengecualian (WTP)

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Pemerintah Provinsi Banten sejak Tahun 2017 telah menggunakan sistem aplikasi terpadu antara e-planning, e-budgeting dan e-monev. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sasaran pada Badan Pendapatan Daerah adalah meningkatnya pendapatan daerah yang optimal dengan Indikator kinerja rasio PAD terhadap pendapatan daerah, yang pada tabel di bawah menunjukan bahwa di tahun 2020 sempat mengalami penurunan akibat Covid19 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan rasio PAD sudah di angka 60,31 persen dan di tahun 2022

di angka 73,21 persen rasio tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 64,44 persen.

Tabel 2. 145
Indiaktor Kinerja Urusan Keuangan pada Bapenda
Tahun 2018-2022 (Persen)

INDIKATOR	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	61,68	65,06	57,16	60,31	73,21

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

C. Bidang Urusan Kepegawaian

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai menjadi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota dipindahkan ke Provinsi. Dengan demikian berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, ASN tenaga pendidik dan kependidikan SMA/SMK dan sederajat dari Kabupaten/Kota pindah status ke Provinsi sejumlah 5.909 Orang. Pemerintah Provinsi Banten mempunyai jumlah ASN yang cukup memadai, yaitu 9.588. Hal ini merupakan potensi human capital yang strategis dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

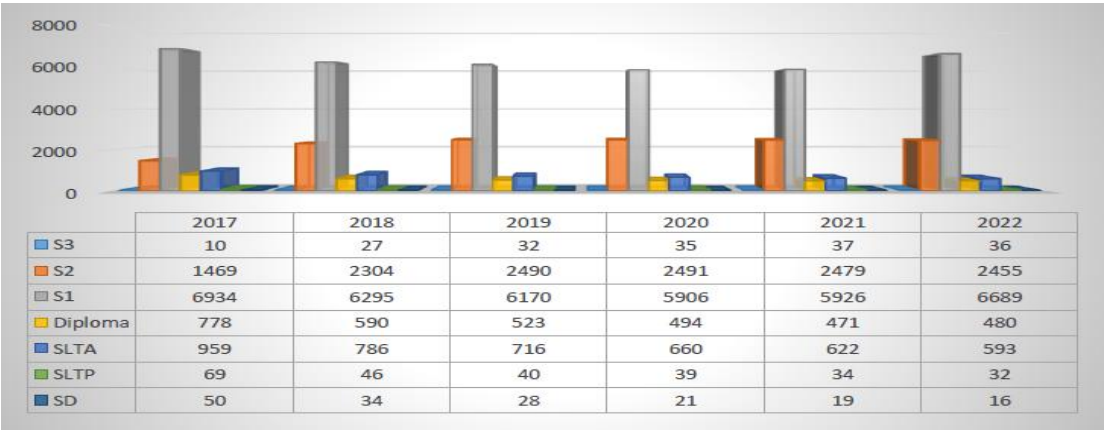
Tabel 2. 146
Jumlah PNS menurut Tingkat Kepangkatan Tahun 2018-2022

NO	GOLONGAN/JABATAN	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Golongan IV	Jiwa	2.563	2.632	2.670	2.846	3.060
2	Golongan III	Jiwa	6.652	6.558	6.208	5.990	6.653
3	Golongan II	Jiwa	794	735	697	685	553
4	Golongan I	Jiwa	73	74	71	67	35

NO	GOLONGAN/JABATAN	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
5	Fungsional Umum	Jiwa	3.077	2.839	2.805	2.496	2.431
6	Fungsional Tertentu	Jiwa	7.005	6.335	6.070	6.163	6.994
7	Struktural	Jiwa	883	825	771	929	876
8	Eselon II	Jiwa	1	1	1	0	37
9	Eselon III	Jiwa	41	41	37	41	206
10	Eselon IV	Jiwa	221	200	198	232	632
JUMLAH			21.310	20.240	19.528	19.449	21.478

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan tabel di atas Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Banten terbesar pada fungsional tertentu, hal ini diperlukan strategi yang tepat sehingga potensi tersebut dapat optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten.



Gambar 2. 31
ASN Provinsi Banten Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2017-2022 (Jiwa)
(Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022)

Lebih lanjut tabel dibawah, Tingkat pendidikan ASN Banten jumlahnya besar pada tingkat S1 dan S2, hal ini merupakan potensi yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan ASN yang sesuai dengan bidangnya. Pemerintah Provinsi belum menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN atau *Human Capital Development Plan* (HCDP), yang mana hal tersebut diperlukan untuk mengoptimalisasikan kualitas kompetensi ASN Provinsi Banten sehingga dapat mendukung secara signifikan dalam mewujudkan *good governance*.

Tabel 2. 147
Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	SD	Jiwa	34	28	21	19	16
2	SLTP	Jiwa	46	40	39	34	32
3	SLTA/SMK	Jiwa	786	716	660	622	593
4	D1	Jiwa	19	13	12	11	9
5	D3	Jiwa	481	434	409	389	392
6	S1/D4	Jiwa	6349	6229	5965	5985	6758
7	S2	Jiwa	2304	2490	2491	2479	2455
8	S3	Jiwa	27	32	35	37	36
Jumlah		Jiwa	10.046	9.982	9.632	9.576	10.301

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Pengukuran profesionalitas ASN diukur dari Indeks Profesionalitas ASN yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), tercatat nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 30,77 kategori rendah dimana komponen terendah adalah kinerja, seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2. 148
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Banten Tahun 2021

INDIKATOR	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI TOTAL
Nilai Indeks Profesionalitas ASN	15,29	9,23	1,28	4,98	30,77 (Rendah)

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Dari capaian indikator kinerja kepegawaian, masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu peta jalan pengembangan ASN yang belum tersusun. Hal ini digunakan dalam merencanakan penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya, memetakan pola pengembangan kapasitas ASN dan merencanakan promosi ASN secara tersistem.

Tabel 2. 149
Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ASN Yang Profesional (orang)	950	3000	6400	7816	*)
2	Jumlah ASN Yang Dibutuhkan Berdasarkan Anjab ABK (orang)	289	21368	28190	28866	28468

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Jumlah ASN Yang Tidak Melanggar Disiplin Dan Kode Etik (orang)	10055	9843	9593	9570	10241
4	Jumlah ASN Provinsi Banten (orang)	10082	9999	9646	9588	10.301
5	Jumlah ASN Yang Update Database (orang)	10082	9999	9500	9588	9435
6	Jumlah Nilai Capaian SKP Tahunan Dengan Kategori Baik (%)	90,64	90,00	95,38	92,75	93,19
7	Jumlah Capaian Tingkat Pendidikan ASN (%)	79,82	92,16	87,41	88,05	89,12
8	Jumlah ASN Yang Sudah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	44	75	4242	8662	771
9	Jumlah ASN Yang Wajib Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	10082	9999	9646	9588	10301

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

D. Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten telah menyelenggarakan diklat struktural dan diklat prajabatan bagi ASN Provinsi Banten sesuai dengan analisis kebutuhan diklat. Dengan diterapkannya Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, BPSDM Provinsi Banten dalam menyelenggarakan diklat harus berdasarkan pada analisis peningkatan kompetensi ASN sesuai dengan kelas jabatannya.

Tabel 2. 150
Rekapitulasi Diklat Provinsi Banten pada Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Tahun 2018-2022 (Jiwa)

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA DIKLAT				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Diklat Kepemimpinan II/Pimpinan Tinggi Pratama	0	52	0	0	0
2	Diklat Kepemimpinan III/Administrator	81	0	0	70	80
3	Diklat Kepemimpinan IV/Pengawas I	313	0	156	80	80
4	Diklat Prajabatan Gol III	837	1410	0	1397	2013
5	Diklat Prajabatan Gol II	0	294	0	0	
6	Diklat Teknis Penatausahaan	0	0	0	0	0
7	Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja	0	0	0	0	0

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA DIKLAT				
		2018	2019	2020	2021	2022
8	Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	0
9	Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	0
10	Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	40	155	109	200	741
11	Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif	110	142	34	150	291
12	Diklat Pengembangan Kompetensi Fungsional	104	60	0	180	533
13	Diklat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	2936	3775	2020		
14	Diklat Pengembangan Kompetensi Manajemen	102	139	35	222	316
15	Diklat Pengembangan Kompetensi Pemerintah	130	536	34	317	184

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Pada tabel di bawah menunjukan bahwa ASN Provinsi Banten yang sudah mengikuti pengembangan kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi atau STTPL mengalami kenaikan dari sebelumnya 2616 orang di tahun 2021 pada 2022 meningkat menjadi 4238. Namun dari total jumlah 10301 ASN angka ini masih belum mencapai setengah dari jumlah ASN Provinsi Banten.

Tabel 2. 151
Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Dan Atau STTPL Tahun 2017-2022 (Jiwa)

NO	URAIAN	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah peserta pengembangan kompetensi yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL	2.026	1.717	2.788	1.095	2.616	4238
2	Jumlah ASN Provinsi Banten	10.082	10.082	10.001	9.644	9588	10301

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Berikut ini tabel capaian indikator BPSDM dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun masih perlu fokus untuk mengejar kenaikan maksimal pada Indeks Profesionalitas ASN komponen kompetensi.

Tabel 2. 152
Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2018-2022 (Persen)

INDIKATOR			TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kompetensi ASN	Peningkatan	Indeks	17,3	27,88	11,35	24,69	43,15

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

E. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Indikator Kinerja fungsi Penelitian dan Pengembangan menunjukkan pengembangan. Bidang penelitian dan Pengembangan di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengampu indikator sasaran daerah Indeks Daya Saing Daerah yang menunjukkan peningkatan dalam hasilnya seperti tabel berikut:.

Tabel 2. 153
Cakupan Penelitan dan Pengembangan

URAIAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Cakupan Penelitan dan Pengembangan	100	100	100	100

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diikuti mulai tahun 2019, 2020 sampai dengan 2022 yang dinilai oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah menunjukkan kenaikan baik nilai maupun leveling. Hal ini akan terus dipertahankan dan dinaikan baik dari segi nilai maupun peringkat nasional.

Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wahana untuk meningkatnya inovasi daerah, dimana Indeks Inovasi daerah ini dihitung oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak tahun 2019.

Tabel 2. 154
Indeks daya Saing Daerah di Provinsi Banten Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Peringkat IDSD	17	5	5	5
Nilai IDSD	4.0032	3.4263	3.4610	3.62
Level	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Tercatat pada tahun 2022 nilai indeks daya Saing Daerah mencapai peringkat kelima dengan nilai 3.62 (level tinggi) capaian tersebut diatas capaian nasional dengan nilai 3,26.

Tabel 2. 155
Peringkat dan Nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Banten
Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Peringkat Inovasi Daerah	6	5	8
Nilai Indeks Inovasi	14.230	8.191	6.052
Jumlah Inovasi yang diajukan	70	173	182
Level	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

F. Bidang Urusan Pengelolaan Penghubung

Indikator kinerja Badan Penghubung diantaranya adalah Capaian Pelayanan Publik Badan Penghubung dalam rangka mengukur kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Penghubung daerah yang pada Tahun 2017 sampai 2022 mencapai realisasi sebesar 100 persen.

2.1.4.5 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Bidang Urusan Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap kualitas SAKIP Provinsi Banten menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Berikut ini data terkait capaian SAKIP Provinsi Banten yang saat ini masih tercatat B atau 65,88.

Tabel 2. 156
Capaian SAKIP Provinsi Banten 2018 – 2022

KOMPONEN SAKIP	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Perencanaan Kinerja	18,56	19,97	20,19	20,29	22,80
Pengukuran Kinerja	14,09	15,4	15,92	16,07	19,05
Pelaporan Kinerja	9,54	9,76	9,87	9,88	10,05
Evaluasi Kinerja	6,33	6,48	7,18	7,34	15,30
Capaian Kinerja	11,69	13,95	12,72	12,87	-
Total	60,2	65,56	65,88	66,45	67,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten memperoleh nilai 67,20 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Banten masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Capaian SAKIP dari Tahun 2018-2022 walaupun menunjukkan perbaikan, namun hal ini belum mencapai target RPJMD Provinsi Banten. Dalam dokumen Perubahan RPJMD Banten Tahun 2017-2022 target SAKIP pada tahun 2020 adalah BB.

Hal lainnya terkait Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dari aspek manajemen pemerintahan, dalam hal ini Provinsi Banten terus mengalami perbaikan. Pada Tahun 2016 capaiannya adalah 2,83 dengan status tinggi dan pada peringkat 16. Adapun pada tahun 2017 capaiannya adalah 2,86 dengan status tinggi dan berada pada peringkat 13. Sedangkan pada tahun 2018 mendapatkan nilai 3,05 dengan status sangat tinggi.

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memainkan peranan yang penting bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD disamping pajak dan retribusi, sehingga pengelolaan BUMD membutuhkan penanganan yang serius dan profesional berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi: *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*.

Secara regulasi, keberadaan BUMD diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara teknis diatur

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang kehadirannya didasarkan melalui analisa kebutuhan daerah dan analisa kelayakan usaha

Saat ini Pemerintah Provinsi Banten memiliki 3 (tiga) BUMD, yaitu: PT. Banten Global Development, PT Jamkrida Banten, dan PT Agribisnis Banten Mandiri.

a. PT. Banten Global Development

Perusahaan Daerah Banten Global Development didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

Tujuan pembentukan PT. Banten Global Development adalah untuk:

1. Pengembangan usaha baru yang diawali dengan pembentukan anak perusahaan dalam bentuk *sub holding*;
2. Menjalin kerjasama dengan mitra penyandang dana yang mempunyai keahlian tertentu untuk pengembangan usaha; dan
3. Mendapat penugasan khusus.

b. Penjaminan Kredit Daerah Banten (PT Jamkrida Banten)

PT. Jamkrida Banten merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Banten yang bergerak dalam bidang usaha penjaminan. PT Jamkrida Banten hadir sebagai implementasi atas regulasi dan apresiasi Pemerintah untuk para pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Merespon regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah mengeluarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas

Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Ke dalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten untuk mendukung pembangunan ekonomi di bidang Koperasi dan UMKM. Pembentukan Jamkrida Banten dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan usaha sehingga Koperasi dan UMKM dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Adapun tujuan pembentukan Jamkrida Banten adalah:

1. Memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;
2. Memberdayakan Koperasi dan UMKM;
3. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjaga stabilitas perekonomian melalui terciptanya peluang usaha yang tangguh dan berdaya saing; dan
5. Meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPD, Bank Umum dan BPR.

Komposisi saham PT. Jamkrida Banten adalah 51 persen (Lima puluh satu persen) Pemerintah Provinsi Banten dan pemegang saham lainnya paling tinggi 49 persen. Yang dimaksud pemegang lainnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.

Sejak Oktober 2014-2015 Jamkrida Banten hanya memberikan penjaminan terhadap lembaga keuangan Bank dan Non Bank yang konvensional, namun dengan memperhatikan perkembangan dan kesempatan pasar yang ada, pada Tahun 2016 memutuskan untuk membuka Unit Usaha Syariah.

c. PT. Agribisnis Banten Mandiri

PT. Agribisnis Banten Mandiri (perseroada), berkedudukan di Kota Serang Banten, dengan akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Agribisnis Banten Mandiri No. 13 tanggal 20 November 2020, dibuat dihadapan Arjamalis Roswar, S.H., SpN., MH yang telah mendapatkan pengesahan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0063115.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 27 November 2020 dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 297 Tahun 2019 tentang Penetapan PT. Agribisnis (Perseroda).

1) Kegiatan usaha utama bidang agribisnis pangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pasar, hulu maupun hilir agribisnis dengan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Melakukan usaha pertanian meliputi kegiatan usaha industri penggilingan beras, kemitraan bersama petani komoditi pangan serta pengolahan dan perdagangan hasil perkebunan;
- Melakukan usaha bidang pertanian (tanaman pangan, tanaman industri, tanaman hortikultura, perikanan dan peternakan) serta kehutanan meliputi kegiatan antara lain pembukaan/penyiapan lahan, pembibitan, pengolahan dan perdagangan hasil pertanian dan kehutanan;
- Melakukan usaha dalam bidang-bidang lainnya dan kemitraan yang terkait dengan agribisnis, agroindustri, pusat distribusi (Pasar Induk) dan menghadirkan tataniaga baru dibidang agribisnis;
- Melakukan usaha peternakan sapi perah, sapi potong, domba, kambing, unggas dalam sebuah kawasan usaha ternak dan peternakan rakyat, industri pengolahan susu dan rumah potong unggas; dan
- Mengembangkan e-Commerce, start-up agribisnis, komoditi pangan, pergudangan dan kebutuhan retail pangan.

2) Kegiatan usaha penunjang yang mendukung usaha perseroan:

- Melakukan kegiatan pengiriman, distribusi dan transportasi sehubungan dengan pembelian hasil pertanian, perkebunan, pelabuhan ternak dan penjualan hasil pertanian dan perkebunan;
- Melakukan kegiatan pembelian dan penjualan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, membangun kawasan usaha tani dan ternak yang terpadu;

- Melakukan kerjasama bersama petani dan peternak plasma dalam membangun kebun dan kandang plasma (kemitraan) yang menunjang kegiatan kebun dan kandang utama;
 - Menyediakan jasa kepada pihak lain dengan memanfaatkan aset yang dimiliki Perseroan;
 - Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir di atas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- 3) Kegiatan usaha yang dijalankan: Modern Rice Milling Unit, Industri Pengolahan Susu, Rumah Potong Unggas, Perdagangan telur ber-NKV, Pusat Distribusi Pangan, pergudangan dan rantai pasok dingin.

Selain tiga BUMD tersebut yang langsung dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten, melalui PT.BGD Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki Bank Daerah yaitu PT.Bank Banten, Tbk. Keberadaan Bank Banten didasarkan pada Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang RPJMD 2012-2017 Misi ke 5 item 29 yaitu peningkatan rasio kemandirian ekonomi masyarakat melalui pembentukan Bank Banten yang ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham PT.Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten disingkat Bank Banten sebesar RP 950 Miliar.

Pada perjalanannya, Bank Banten mengalami pasang surut kondisi keuangan dimana pada tanggal 22 April 2020 pernah mengalami penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus, namun setelah dilakukan penyertaan modal, Status Bank Banten dipulihkan oleh OJK sebagai Bank Sehat sejak tanggal 6 Mei 2021. Terakhir komposisi kepemilikan saham Bank Banten setelah Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI, sebesar 78,21 persen dimiliki oleh PT.BGD dan sebesar 21,79 persen dimiliki oleh publik. Saat ini sedang dipersiapkan rencana perubahan status kepemilikan saham di Bank Banten dari PT.Banten Global Development ke Pemerintah Provinsi Banten selambatnya pada tahun 2023 atau setelah Penawaran Umum Terbatas (PUT) VIII terlaksana, sehingga status Bank Banten menjadi BUMD Pemerintah Provinsi Banten.

Selain PT BGD, PT Jamkrida, PT ABM, dan PT Bank Banten, Pemerintah Provinsi Banten juga memiliki saham pada beberapa lembaga seperti Bank BJB, PT LKM, dan BPR. Penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2007 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 157
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun 2007-2023

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Jumlah Penyertaan Modal Daerah
1	2003	PT. BANK JABAR BANTEN	Perda No.3 Tahun 2007	600.000.000.000
2	2004	BPR/LPK	Perda No.3 Tahun 2007	10.200.000.000
3	2011	BPR/LPK	Perda No.4 Tahun 2009	30.000.000.000
4	2012	PT.BGD	Perda No.1 Tahun 2012	39.600.000.000
5	2013	PT.PPKD/Jamkrida	Perda No.4 Tahun 2013	51.000.000.000
6	2013	PT.BGD	Perda No.5 Tahun 2013	950.000.000.000
7	2020	PT. AGROBISNIS BANTEN MANDIRI	Perda No.4 Tahun 2020	300.000.000.000
JUMLAH				1.980.800.000.000

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pengembangan kawasan strategis di Provinsi Banten dan juga potensi ekonomi daerah yang begitu pesat, sudah seharusnya diantisipasi melalui pembentukan badan usaha milik daerah baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diselaraskan pada potensi dan karakteristik daerah meliputi bidang infrastruktur, transportasi, air minum, pariwisata, keuangan, pertambangan dan bidang aneka usaha.

2. Kerjasama Daerah

Pembangunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pembiayaan bagi pemerintah disebabkan pembangunan membutuhkan porsi anggaran yang besar, untuk itu skema pembiayaan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga target pembangunan pemerintah dapat tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Tabel 2. 158
Daftar Kerjasama Antar Daerah

NO	JUDUL DOKUMEN PERJANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DI KERJASAMAKAN
1	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Perwakilan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten	Satuan Tugas Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten
2	Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kejaksaan Tinggi Banten	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
3	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
4	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
5	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Sosial Provinsi Banten dengan Balai Pemasarakatan Klas II Serang	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan/Klien Pemasarakatan

NO	JUDUL DOKUMEN PERJANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN
6	Nota Kespakatan Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Sinergi Pemebangunan dan Pengoperasian Jaringan Peralatan dan Sisitem Pemantauan Udara Ambien Otomatis
7	Kerjasama antara Kantor Wilayah DJB Banten dan Provinsi Banten	Optimalisasi Pemungutan Pajak dan pajak Daerah Di Provinsi Banten
8	Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kepolisian Daerah Provinsi Banten	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana DiDaerah Hukum Polda Banten
9	Nota Kesepakatan Antara Universitas islam Negeri Sultan Maulana Hasunddin Banten	Tri dharma Perguruan Tinggi dan Sumberdaya Manusia
10	Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Banten	Kemitraan dalam Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pembinaan serta Pengkajian di Bidang Hukum
11	Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Banten	Penyelenggaraan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan
12	Perjanjia Kerjasama Antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Dinas Koperasi dan UKM	Pendidikan, Pemagangan, Penelitian dan Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat
13	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten Pemerintah Kota Serang Dan Pemerintah Kabupaten Serang	Pengelolaan Dan Revitalisasi Kawasan Banten Lama
14	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Dinas Ligkungan Hidup Provinsi Banten	Pemanfaatan TPAS Cilowong Kota Serang untuk Pembuangan Sampah yang berasal dari Kawasan Wisata Banten Lama Provinsi Banten

NO	JUDUL DOKUMEN PERJANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN
15	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Andon Penangkapan Ikan
16	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten Dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang	Optimalisasi Pelayanan Pemerintah
17	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten Dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang	Layanan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan Bagi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Tangerang Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Secara regulasi, kerjasama daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, yang secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan pihak Ketiga; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Sampai saat ini ada lebih kurang ada 9 (sembilan) tema kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam tabel di atas.

Tabel 2. 159
 Perusahaan Yang Memberikan Bantuan CSR di Provinsi Banten
 Tahun 2021

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS BARANG	NILAI BANTUAN (Rp)	KET
1	Bank BJB	Beras 50 Ton	575,000,000	Penyerahan ke 70 Ponpes dan Yayasan se Provinsi Banten
2	Bank BJB	2.000 Paket Sembako untuk Karang Taruna	239,000,000	Karang Taruna Kab. Lebak dan Pandeglang Korban Bencana Banjir
3	PT. Chandra Asri	Pembangunan Jembatan	300,000,000	Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak (kerjasama dengan Yayasan Relawan Kampung)
4	PT. Chandra Asri	Pembangunan PAUD Cahaya Bintang	363,330,000	Bekerjasama dengan Yayasan happy Hearts Indonesia
5	PT. Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Banten	Bea Siswa untuk 32 Mahasiswa (@ 12.000.000 x 32)	384,000,000	Penyerahan di Rumdin Gubernur Banten untuk 16 Mahasiswwa Untirta dan 16 Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanudin
6	Bank BJB	25.000 sembako	3,151,250,000	Penyerahan sembako diberikan kepada 8 Kab/Kota
7	PT. Angkasa Pura II	Ambulance Isuzu D-Max 4x4 (Spek Ambulance AP II Terlampir)	1,192,111,000	Dinkes Provinsi Banten (penyerahan secara simbolis di Rumdin)
8	PT. Angkasa Pura II	56 Kaki Palsu	154,000,000	Penyerahan 56 Kaki Palsu Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten (penyerahan secara simbolis di Rumdin)
9	PT. Chandra Asri	Pembangunan Jembatan	300,000,000	Kp. Ciparahu Girang, Desa Tangkilsari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang (kerjasama dengan Yayasan Relawan Kampung)
10	PT. Chandra Asri	120 Ton Oksigen	750,000,000	Penyerahan bantuan oksigen diberikan kepada 8 Kab/Kota
11	PT. Angkasa Pura II	1000 Paket Tambahan Nutrisi	200,000,000	Kegiatan berbagi Paket Vitamin dan Nutrisi kepada masyarakat yang terpapar Covid-19 (yang menjalankan isolasi mandiri)
12	PT. Krakatau Steel	1. 8.600 Sembako 2. Beasiswa untuk 10 Orang 3. 25.086 Tabung Oksigen 4. Pinjaman dana bergulir untuk 145 UKM	4,914,300,000	Penyerahan sembako diberikan kepada Masyarakat di wilayah Kota Cilegon
13	PT. Angkasa Pura II	1. 100 paket nutrisi dan vitamin 2. 25 paket alat masak, pacul dan Golok 3. 84 set pakaian adat 4. 1 unit genset (2800 watt) 5. 5 unit senter	50,000,000	Penyerahan bantuan dilkukan oleh Tim Relawan berkolaborasi dengan Relawan Banten Berakhlak. Bantuan diberikan oleh PT. Angkasa Pura dan Wika
J U M L A H			12,572,991,000	

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Untuk skema pembiayaan pembangunan Non-APBD, Pemerintah Provinsi Banten memformulasikan bagaimana konsep pembangunan yang direncanakan tidak serta merta mengandalkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, terdapat juga pendanaan yang bersumber dari kerjasama dengan pihak ketiga, baik itu melalui Program Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSKBL/CSR) Perusahaan ataupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dukungan kerjasama dengan pihak ketiga terasa efektif manfaatnya khususnya saat Banten mengalami musibah bencana alam maupun pada saat penanggulangan COVID-19 pada Tahun 2021 melalui Forum CSR yang dasar pembentukannya yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan Kemitraan Bina Lingkungan/ *Corporate Social Responsibility* (TJSKBL/CSR). Pada tahun 2021 telah tersalurkan bantuan senilai Rp12.572.991.000.- dengan rincian terlampir pada tabel di atas.

Kedepan, pengoptimalan kerjasama daerah akan dirasakan bertambah penting, seiring dengan semakin kompleksnya dinamika pembangunan dan kebutuhan pendanaan pembangunan yang bersumber tidak hanya dari APBD dan APBN tapi juga yang bersumber dari pihak ketiga. Saat ini yang belum terlaksana diantaranya adalah kerjasama dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri dan kerjasama dengan lembaga di luar negeri yang masih bersifat sporadis.

B. Sekretariat DPRD

Sasaran DPRD adalah terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya dengan indikator kinerja Evaluasi kinerja capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD dimana target realisasinya sudah mencapai 100 persen.

2.1.4.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal, khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan internal untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen resiko (*risk management*),

pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Tabel 2. 160

Indikator Kinerja Urusan Pengawasan 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Nilai SPIP Maturitas	3	3	3	3	3
2	Nilai Kapabilitas APIP	2	3	3	4	3

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Berdasarkan Tabel di atas Kinerja pengawasan Provinsi Banten dari tahun ke tahun meningkat kualitasnya. Hal ini perlu menjadi komitmen antar pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja pengawasannya dalam rangka mewujudkan *clean government* dan *good governance* di Pemerintah Provinsi Banten.

2.1.4.7 Unsur Pemerintahan Umum

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dan Angka Kriminalitas. Capaian IDI Banten dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami fluktuasi, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten Tahun 2021 mencapai angka 75,93 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yang capaiannya sebesar 75,82. Meskipun mengalami peningkatan, namun tingkat demokrasi di Banten masih termasuk dalam kategori “sedang”.

Tabel 2. 161

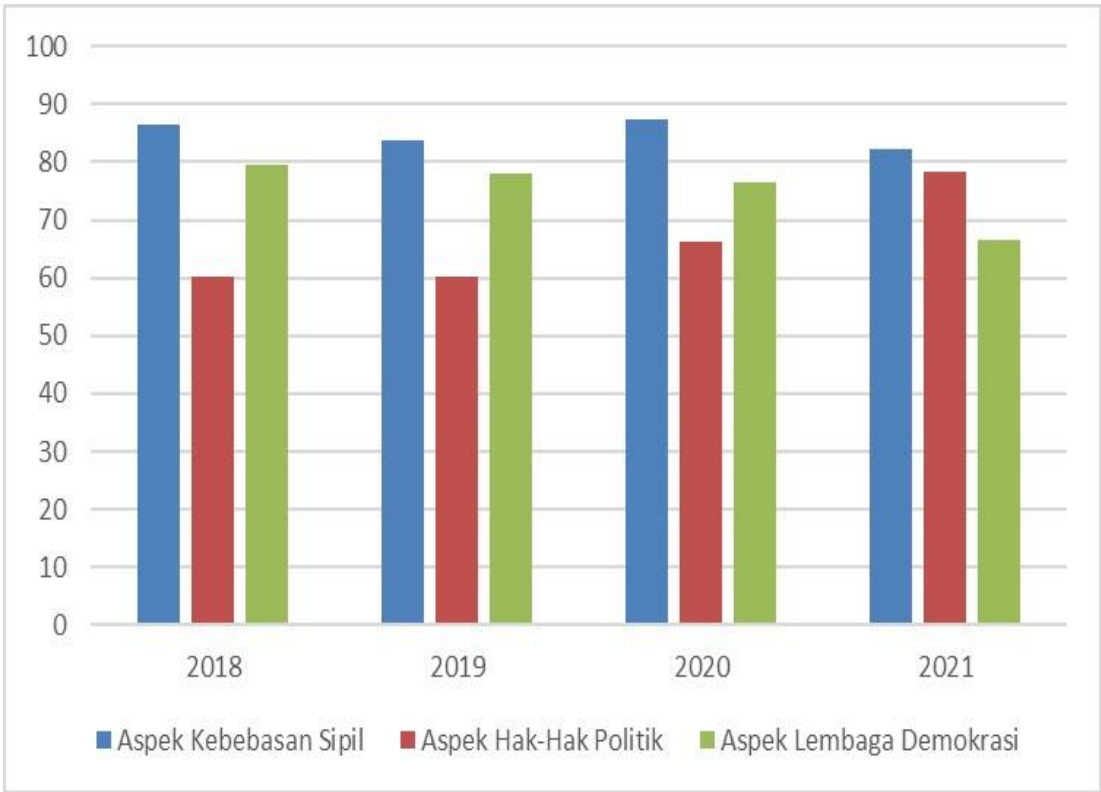
Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2018-2021

INDIKATOR	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten	73,78	72,6	75,82	75,93

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Selain itu dilihat dari aspek terkecil adalah aspek hak-hak politik dimana capaiannya 66,18 namun dibandingkan tahun sebelumnya terdapat kenaikan 6 poin.

Sedangkan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan Metode Baru Provinsi Banten Tahun 2021 pada aspek Aspek Kebebasan capaiannya 82,26 Aspek Kesenjangan capaiannya 78,48 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi capaiannya 66,65.



Gambar 2. 32

IDI Provinsi Banten Menurut Aspek 2018-2021

(Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022)

Penurunan angka kriminalitas yang melihat bahwa salah satu keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dimana terjadi penurunan yang signifikan angka kriminalitas di Tahun 2022 dimana angka penurunanya hampir 67,43 persen, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 162 Jumlah Kriminalitas Provinsi Banten Tahun 2019-2022			
URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Angka Kriminalitas	4.111	2.944	1.009

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2022

2.2.1 Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Pemprov Banten Tahun 2022

Sesuai dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 terdapat 5 sasaran daerah dengan 23 indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemprov Banten. Pada tahun 2022, capaian indikator tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 163 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemprov Banten								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Target RKPD 2022	Target RPJMD 2022	Realisasi 2022	% Capaian RKPD 2022	% Capaian RPJMD 2022
A	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat							
1	Capaian Kepuasan Masyarakat	Indeks Nilai	3,45	4,0	3,5	3,45	86,25	98,57
2	Capaian Reformasi Birokrasi	Indeks Nilai	B	A	A	B	75,00	75,00
3	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	BB	A	A	BB	80,00	80,00
B	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah							
4	Capaian kinerja infrastruktur daerah	Persen	98,33	100	100	98,33	98,33	98,33
5	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	Persen	86,80	90	90	86,8	96,44	96,44
C	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing							
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	72,75	72,60-73,60	73,68	73,32	98,85	98,74
7	Indeks Gini Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	/ Nilai	0,363	0,365	0,360	0,363	99,45	100,83

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Target RKPD 2022	Target RPJMD 2022	Realisasi 2022	% Capaian RKPD 2022	% Capaian RPJMD 2022
8	Kemiskinan	persen	6,5	4,99-5,4	5,00	6,16	85,93	76,80
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,98	9,7-9,20	7,84	8,09	112,07	96,81
10	Harapan lama sekolah	tahun	13,02	15	15	13,05	87,00	87,00
11	Rata rata lama sekolah	tahun	8,93	9,3	9,3	9,13	98,17	98,17
12	Pengeluaran Perkapita	Rupiah	12000000	12.200.000	12.200.000	12000000	98,36	98,36
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	63,79	100	100	64,72	64,72	64,72
14	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	91,74	93	92,73	91,83	98,97	99,03
D	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan							
15	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,02	71	70,96	70,39	99,20	99,20
16	Angka Kematian Ibu (Per 100,000 kelahiran hidup)	Nilai	100,39	285	285	100,39	35,22	35,22
17	Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Nilai	4,8	26	26	4,8	18,46	18,46
E	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal							
18	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,44	5,0-5,6	6,10	4,44	79,29	72,79
19	Tingkat Inflasi	Persen	1,91	3,4-4,0	3,7	1,12	172,00	169,73
20	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persen	8	6	6,4	8	125,00	125,00
21	Indeks Keuangan Inklusif	Nilai	-**	3	3	-**	NA	NA
22	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Peringkat	5	5	5	5	100,00	100,00
23	Emisi Rumah Kaca	Persen	81,9	100	100	81,9	81,90	81,90

Terhadap capaian IKU Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, dari 23 (dua puluh tiga) IKU terdapat 18 (delapan) indikator yang mencapai dan/atau melampaui target, selanjutnya 13 (tiga belas) indikator yang belum mencapai target, 1(satu) indikator

yang tidak dapat dihitung karena perbedaan antara target yaitu daya beli, dan terakhir 1 (satu) indikator tidak ada rilis dalam 3 tahun terakhir yaitu Nilai indeks keuangan inklusif.

Pencapaian indikator pada Sasaran pertama : *Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat*, ditunjukkan dengan ketercapaian Nilai IKM, Nilai Reformasi Birokrasi, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada Sakip Perangkat daerah menunjukkan nilai B yang dinilai oleh inspektorat dan capaian SAKIP Daerah ini masih menunjukkan nilai 66,46 atau B di tahun 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan upaya Perangkat daerah untuk terus peningkatan nilai SAKIP yang dievaluasi secara internal oleh kemenpan RB. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Banten sebesar 63,11 kategori B (baik) pada tahun 2021, menunjukkan tingkat capaian Reformasi Birokrasi yang mengalami kemajuan dibanding awal tahun 2018 yang saat itu masih pada kategori C, kedua komponen indikator ini memang diperlukan kerja keras oleh seluruh ASN karena Pemerintah Provinsi Banten menargetkan A (sangat baik) pada tahun 2022. Adapun permasalahannya adalah pada area reform terutama area manajemen SDM dan Pengawasan masih belum mencapai nilai maksimal dan daerah hasil pada nilai Indeks Pelayanan Publik, SAKIP dan Persepsi korupsi yang masih belum mencapai nilai optimal dari target kinerja yang ditetapkan, sehingga hasil penilaian Reformasi Birokrasi belum tercapai secara signifikan.

Pencapaian indikator pada Sasaran Kedua: *Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah* ditunjukkan oleh ketercapaian kinerja infrastruktur daerah dan Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur. Capaian kinerja infrastruktur daerah ini merupakan Realisasi kinerja infrastruktur pada tahun 2021 dibandingkan target tahunannya dimana realisasinya mencapai 90%. Kedua, Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur. Capaian kinerja infrastruktur daerah realisasinya mencapai 100%.

Pencapaian indikator pada Sasaran ketiga : *Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing*, ditunjukkan oleh ketercapaian 9 (sembilan) indikator kinerja daerah yaitu indeks Pembangunan Manusia, indeks gini, Kemiskinan, Tingkat pengangguran Terbuka, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Daya Beli dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Capaian IPM tercatat sebesar 72,72 yang menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Kedua, Indeks gini yang mencapai 0,363 di tahun 2021 ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya yaitu 0,365. Ketiga Angka Kemiskinan tercatat sebesar 6,5 menunjukkan tren kenaikan sebesar 0,6% dibanding tahun sebelumnya, kenaikan ini diakibatkan dari dampak pandemic covid yang sudah terjadi 2 tahun terakhir, sebenarnya angka kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan tren menurun, di tahun 2019 angka kemiskinan tercatat 5,09 hingga di tahun 2021 melonjak di angka 6,5. Keempat, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka pada September 2021 sebesar 8,98 menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,64, kondisi ini dimaknai selain karena TPT di Provinsi Banten menunjukkan masalah daerah yang paling krusial namun dampak covid 19 ikut mempengaruhi signifikan terkait naiknya angka pengangguran. Kelima, harapan lama sekolah (HLS) tercatat mencapai 13,02 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 14,05 tahun pada tahun 2021. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu di masa mendatang terus menunjukkan peningkatan. Keenam, capaian RLS tercatat mencapai 8,93 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 9,1 tahun pada tahun 2021. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa jumlah tahun dalam menjalani pendidikan formal terus meningkat dari tahun ke tahun, namun masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2021. Ketujuh, capaian IPG tercatat sebesar 91,67 poin pada tahun 2020. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa komitmen untuk melaksanakan strategi pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) terus

menunjukkan perkembangan yang positif. Kedelapan, daya beli menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat masih cukup tinggi sebesar. Kesembilan, capaian TPAK tercatat sebesar 63,79 dimana menunjukkan partisipasi Angkatan kerja dibandingkan dengan Jumlah penduduk pada usia kerja.

Pencapaian indikator pada Misi Keempat ditopang oleh 3 (tiga) indikator yaitu berupa Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu (Per 100,000 kelahiran hidup), Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup). Kesatu capaian Angka Harapan Hidup tercatat 70,02 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 70,06. Angka harapan hidup menggambarkan usia hidup rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir. Kedua, Angka Kematian Ibu (Per 100,000 kelahiran hidup), tercatat 82,04 menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil atau melahirkan dalam kurun waktu 42 hari sejak melahirkan, jika dibandingkan dengan target RPJMD 290 maka sudah sangat melampaui target. Ketiga, Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup) mencapai angka 4,8 dibandingkan target sebesar 28. Kondisi ini dimaknai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya 2,66 menunjukkan tren meningkat yang berarti semakin banyaknya kematian bayi pada tahun 2021.

Pencapaian indikator pada Misi Kelima ditunjukkan oleh (6 enam) indikator yaitu LPE, Inflasi, Laju pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan, Indeks Keuangan Inklusif, Peringkat Daya Saing Provinsi, Emisi Rumah Kaca. Kesatu capai Laju Pertumbuhan Ekonomi tercatat sebesar 4,44 di tahun 2021 dibanding target RPJMD sebesar 5,95 capaian ini masih belum melampaui target yang diharapkan. Kedua Laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan tercatat 8,06, sektor unggulan Provinsi Banten terdiri dari LPE sektor Industri pengolahan, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya tercatat -3,38 maka telah terjadi perbaikan signifikan dalam pertumbuhan LPE sektor unggulan di Provinsi Banten. Ketiga, Indeks keuangan Inklusif tercatat 84,29 pada tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa

keuangan (OJK) dan tidak ada rilis lanjutan setelahnya. Keempat, Peringkat daya saing tercatat berada di peringkat 5 besar, dengan tahun sebelumnya di peringkat 6 besar, melihat hal tersebut menunjukkan semakin baiknya peringkat daya saing Provinsi Banten dimana tiap tahun telah mencapai target sesuai yang diharapkan. Keenam, emisi rumah kaca merupakan target yang ada setelah RPJMD Perubahan tercatat, Emisi Rumah kaca tahun 2021 tercatat sebesar 81,9.

2.2.2 Capaian Kinerja Program Pemda (Prioritas Unggulan)

Dalam upaya mempercepat capaian indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 telah menetapkan prioritas unggulan, sebagai berikut:

- a. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
 1. Penerapan E-Planning, E-monev, dan E-Budgeting;
 2. Reformasi Birokrasi;
 3. Penerapan Manajemen Kinerja (Peningkatan Predikat LAKIP dari CC ke BB);
 4. Reformasi Tata Kelola Keuangan (Peningkatan predikat dari Disclaimer/WDP ke WTP);
 5. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik;
 6. Perbaikan Angka Indeks Persepsi Korupsi;
 7. Perbaikan Hubungan Kerja Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
- b. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur
 1. Pembangunan ruas jalan Provinsi yang rusak;
 2. Pembangunan Jalan Kolektor Baru untuk membuka jalur isolasi dan membuka interkoneksi antar wilayah;
 3. Pembangunan dan perbaikan jembatan pada seluruh jalan Provinsi;
 4. Pembangunan Jembatan Penyeberangan untuk mempermudah akses penduduk terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi;
 5. Normalisasi Sungai dari seluruh sungai yang ada di Banten;

6. Normalisasi Situ untuk pengembalian fungsi Situ;
 7. Pembangunan Terminal Tipe B dan Pengembangan Sistem Transportasi Massal Skala Provinsi;
 8. Pembangunan Infrastruktur yang menunjang Sistem Transportasi Laut dan Aktivitas Ekonomi Sektor Maritim;
 9. Revitalisasi Kawasan Banten Lama dalam rangka Pengembangan Sektor Pariwisata dan Pelestarian Cagar Budaya serta kearifan lokal;
 10. Penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan, Perdesaan/Perkotaan;
 11. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Skala Provinsi untuk mempertahankan daya dukung lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
 12. Evaluasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 13. Pembangunan dan Revitalisasi Infrastruktur Pertanian (Bendungan dan Irigasi).
- c. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas
1. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru (USB) untuk jenjang SMA dan SMK untuk meningkatkan APK;
 2. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 1 SMA, SMK;
 3. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 2 Guru SMA, SMK;
 4. Peningkatan Kesejahteraan Guru melalui pemberian insentif bagi Guru SMA dan SMK;
 5. Peningkatan Prestasi Siswa Berbakat bagi siswa SMA dan Sekolah Berkebutuhan Khusus;
 6. Peningkatan Fungsi Sekolah dalam Menanamkan nilai-nilai Agama serta membentuk karakter yang Berakhlakul Karimah.
- d. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas

1. Pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional;
 2. Penyediaan Dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khususnya untuk wilayah Terpencil dengan Pemberian Insentif bagi Dokter Umum/Gigi dan Petugas Kesehatan Masyarakat;
 3. Peningkatan Kapasitas Regulasi di bidang Pelayanan Kesehatan;
 4. Peningkatan Penyediaan Air Bersih kepada masyarakat melalui Pembangunan Sumber Air Baku di 8 Kabupaten/Kota.
- e. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
1. Penciptaan Iklim Investasi melalui Perbaikan Perizinan, Infrastruktur, Regulasi Tenaga Kerja, Fasilitasi Sumber Energi dan Menciptakan Keamanan dan Ketertiban untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah;
 2. Pengendalian Inflasi Daerah;
 3. Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Khususnya Petani dan Nelayan;
 4. Pengembangan Kawasan Ekonomi yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;
 5. Peningkatan Tata Kelola APBD untuk Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dalam rangka Mendukung Pembangunan Daerah serta Fungsi APBD dalam Hal Distribusi dan Alokasi;

Adapun capaian pelaksanaan Prioritas Unggulan sampai dengan tahun 2022 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 164
Capaian Prioritas Unggulan s.d Tahun 2022

No	Agenda Pembangunan/ Prioritas Unggulan	Keterangan
I.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	
1.	Penerapan E-Planning, E-monev, dan E-Budgeting;	Pemerintah Provinsi Banten sejak Tahun 2017 telah melakukan penerapan sistem aplikasi terpadu antara e-planning, e-budgeting dan e-monev melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL). Pada tahun 2021, Pemerintah (Kemendagri) menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara nasional.
2.	Reformasi Birokrasi;	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Banten sebesar 61 kategori B (baik) pada tahun 2020, menunjukkan tingkat capaian Reformasi Birokrasi yang mengalami kemajuan dibanding awal tahun 2018 yang saat itu masih pada kategori C. Area yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah Manajemen SDM dan Pengawasan serta Pelayanan Publik
3.	Penerapan Manajemen Kinerja (Peningkatan Predikat LAKIP dari CC ke BB);	
4.	Reformasi Tata Kelola Keuangan (Peningkatan predikat dari Disclaimer/WDP ke WTP);	Pemerintah Provinsi Banten telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam tahun berturut-turut sejak tahun 2017.

No	Agenda Pembangunan/ Prioritas Unggulan	Keterangan
5.	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik;	
6.	Perbaikan Angka Indeks Persepsi Korupsi;	
7.	Perbaikan Hubungan Kerja Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.	
II.	Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur	
1.	Pembangunan ruas jalan Provinsi yang rusak;	
2.	Pembangunan Jalan Kolektor Baru untuk membuka jalur isolasi dan membuka interkoneksi antar wilayah;	
3.	Pembangunan dan perbaikan jembatan pada seluruh jalan Provinsi;	
4.	Pembangunan Jembatan Penyeberangan untuk mempermudah akses penduduk terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi;	
5.	Normalisasi Sungai dari seluruh sungai yang	

No	Agenda Pembangunan/ Prioritas Unggulan	Keterangan
	ada di Banten;	
6.	Normalisasi Situ untuk pengembalian fungsi Situ;	
7.	Pembangunan Terminal Tipe B dan Pengembangan Sistem Transportasi Massal Skala Provinsi;	
8.	Pembangunan Infrastruktur yang menunjang Sistem Transportasi Laut dan Aktivitas Ekonomi Sektor Maritim;	
9.	Revitalisasi Kawasan Banten Lama dalam rangka Pengembangan Sektor Pariwisata dan Pelestarian Cagar Budaya serta kearifan lokal;	
10.	Penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan, Perdesaan/ Perkotaan;	
11.	Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Skala Provinsi untuk mempertahankan daya dukung lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;	

No	Agenda Pembangunan/ Prioritas Unggulan	Keterangan
12.	Evaluasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Provinsi;	
13.	Pembangunan dan Revitalisasi Infrastruktur Pertanian (Bendungan dan Irigasi).	
C.	Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas	
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru (USB) untuk jenjang SMA dan SMK untuk meningkatkan APK;	Jenjang SMA Ditargetkan Pembangunan USB pada Tahun 2017-2022 sebanyak 27 Unit dan sampai tahun 2021 terbangun sebanyak 5 unit dan direncanakan terbangun pada tahun 2022 sebanyak 10 unit sehingga menyisakan hutang realisasi sebanyak 12 unit. Untuk RKB ditargetkan untuk dibangun sebanyak 758 ruang sampai tahun 2021 telah terbangun sebanyak 412 ruang dan direncanakan terbangun pada tahun 2022 sebanyak 30 unit sehingga menyisakan hutang realisasi sebanyak 316 ruang.

No	Agenda Pembangunan/ Prioritas Unggulan	Keterangan

TARGET DAN REALISASI SARANA DAN PRASARANA SMA							
T.A. 2018 ~ 2022							
Tahun	Unit Sekolah Baru		Hutang Realisasi	Ruang Kelas Baru		Hutang Realisasi	Ket.
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
2018	2	2	0	155	220	(65)	
2019	0	0	0	10	10	0	
2020	18	0	18	200	182	18	
2021	3	3	0	213	0	213	
2022	4	10	(6)	180	30	150	
Jumlah	27	15	12	758	442	316	

Jenjang SMK

Ditargetkan Pembangunan USB pada Tahun 2017-2022 sebanyak 28 Unit dan sampai tahun 2021 terbangun sebanyak 11 unit dan tidak direncanakan pembangunan pada tahun 2022 sehingga menyisakan hutang realisasi sebanyak 17 unit.

Untuk RKB ditargetkan untuk dibangun sebanyak 772 ruang sampai tahun 2021 telah terbangun sebanyak 217 ruang dan tidak direncanakan pembangunan pada tahun 2022 sehingga menyisakan hutang realisasi sebanyak 555 ruang.

No	Agenda Pembangunan/ Prioritas Unggulan	Keterangan								
		TARGET DAN REALISASI SARANA DAN PRASARANA SMK								
		TAHUN ANGGARAN 2018-2022								
		TAHUN	UNIT SEKOLAH BARU (USB)			RUANG KELAS BARU (RKB)				
			TARGET	REALISASI		HUTANG REALISASI	TARGET	REALISASI		HUTANG REALISASI
		APBD		DAK	APBD			DAK		
		2018	6	6	0	0	173	183	0	-10
		2019	0	0	0	0	34		34	0
		2020	14	0	0	14	180	0	0	180
		2021	4	5	0	-1	210	0	0	210
		2022	4	0	0	4	175	0	0	175
TOTAL	28	11		17	772	217		555		
2	Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 1 SMA, SMK;									
3	Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 2 Guru SMA, SMK;									
4	Peningkatan Kesejahteraan Guru melalui pemberian insentif bagi Guru SMA dan SMK;									
5	Peningkatan Prestasi Siswa Berbakat bagi siswa SMA dan Sekolah Berkebutuhan Khusus;									
6	Peningkatan Fungsi Sekolah dalam Menanamkan nilai-nilai Agama serta membentuk karakter yang Berakhlaqul									

No	Agenda Pembangunan/ Prioritas Unggulan	Keterangan
	Karimah	
D.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas	
1	Pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional;	
2	Penyediaan Dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khususnya untuk wilayah Terpencil dengan Pemberian Insentif bagi Dokter Umum/Gigi dan Petugas Kesehatan Masyarakat;	
3	Peningkatan Kapasitas Regulasi di bidang Pelayanan Kesehatan;	
4	Peningkatan Penyediaan Air Bersih kepada masyarakat melalui Pembangunan Sumber Air Baku di 8 Kabupaten/Kota.	
E	Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	
1	Penciptaan Iklim Investasi melalui Perbaikan	

No	Agenda Pembangunan/ Prioritas Unggulan	Keterangan
	Perizinan, Infrastruktur, Regulasi Tenaga Kerja, Fasilitas Sumber Energi dan Menciptakan Keamanan dan Ketertiban untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah;	
2	Pengendalian Inflasi Daerah;	
3	Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Khususnya Petani dan Nelayan;	
4	Pengembangan Kawasan Ekonomi yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;	
5	Peningkatan Tata Kelola APBD untuk Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dalam rangka Mendukung Pembangunan Daerah serta Fungsi APBD dalam Hal Distribusi dan Alokasi;	

2.2.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022

Belanja Daerah pada APBD TA 2022 sebesar Rp 11.972.895.803.452 dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.282.399.714.969 atau mencapai 94,23 persen. Adapun rekapitulasi penyerapan anggaran berdasarkan urusan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022. Penganggaran Urusan Pemerintahan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, secara komposisi, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp 6,37 Triliun atau sebesar 53 % dari belanja daerah;
2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp 504,31 Miliar atau 4,21 % dari belanja daerah
3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebesar Rp 325,55 Miliar atau 2,72 % dari belanja daerah;
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sebesar Rp 802,12 Miliar atau 6,70 % dari belanja daerah;
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp 3,81 Triliun atau 31,90 % dari belanja daerah;
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebesar Rp 74,53 Miliar atau 0,62 % dari belanja daerah; dan
7. Unsur Pemerintahan Umum sebesar Rp 69,37 Miliar atau 0,58 % dari belanja daerah.

Berdasarkan komposisi anggaran tersebut, dapat dilihat bahwa proporsi anggaran secara signifikan pada urutan pertama difokuskan untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya proporsi urutan kedua dialokasikan untuk unsur penunjang urusan pemerintah, alokasi yang sebesar Rp 3,81 triliun tersebut dialokasikan untuk pelayanan umum dan dana transfer dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengelolaan keuangan daerah provinsi banten. Khusus dana transfer terdiri atas dana bagi hasil provinsi ke kabupaten/kota sebesar Rp 3,07 Triliun, belanja bantuan keuangan sebesar Rp 129,57 Miliar, dan Belanja Tidak

terduga sebesar Rp90,31 Miliar yang merupakan alokasi dalam rangka penanggulangan kebencanaan.

Kondisi yang dapat disampaikan dalam evaluasi komposisi anggaran yaitu dimana anggaran urusan pemerintahan pilihan baru terpenuhi sebesar 2,72 % dari belanja daerah, belanja urusan pilihan digunakan dalam rangka mendanai program kegiatan dalam rangka meningkatkan daya saing sesuai dengan karakteristik yang dimiliki daerah,sebagai berikut:

Tabel 2. 165
Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Urusan Tahun 2022

NO	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	6.377.087.939.408	5.942.868.292.508	93,19
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	504.315.319.550	481.236.811.006	95,42
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	325.557.788.520	302.452.004.506	92,90
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	802.123.149.900	708.024.332.526	88,27
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	3.819.903.077.074	3.712.294.556.986	97,18
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	74.534.948.000	69.000.030.853	92,57
7	Unsur Pemerintahan Umum	69.373.581.000	66.523.686.584	95,89
JUMLAH		11.972.895.803.452	11.282.399.714.969	94,23

Sumber: BPKAD, 2022

Adapun dari sisi indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah, terdapat 78 indikator kinerja pada tahun 2022. Capaian indikator-indikator tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 166
Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI*	%
1	Angka Murni(APM) Menengah.	Partisipasi Sekolah	Persen	63,44	62,89	99,13	63,44	62,89	99,13
2	Angka (APK) Sekolah Menengah.	Partisipasi Kasar	Persen	78,22	84,33	107	78,22	84,33	107
3	Cakupan Standar Minimal Menengah Pendidikan Satuan (%)	Pemenuhan Pelayanan Pendidikan dan Khusus.	Persen	100	93,4	93,4	100	93,4	93,4

NO	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI*	%
4	Penurunan	Jumlah	Orang	232	194	119	232	194	119
	Kematian Ibu (orang)								
5	Penurunan	Jumlah	Orang	1.134	1.157	98	1.134	1.157	98
	Kematian Bayi (orang)								
6	Persentase	penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100
	yang memiliki Jaminan Kesehatan								
7	BOR (Bed Occupancy Ratio)	RSUD Banten	Persen	75	76,4	101,87	75	76,4	101,87
8	BOR (Bed Occupancy Ratio)	RSUD Malingping	Persen	70	70,88	101,26	70	70,88	101,26
9	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap. Satuan (%)	Provinsi	Persen	100	98	98	100	98	98
10	Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap. Satuan (%)		Persen	95,9	93,6	97,6	95,9	93,6	97,6
11	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi. Satuan (%)		Persen	37,09	27,28	73,5	37,09	27,28	73,5
12	Luasan layanan irigasi. Satuan (Ha)		Hektar	19.387,46	16.441,00	84,8	19.387,46	16.441,00	84,8
13	Persentase penyediaan prasarana air baku (%)		Persen	100	85,46	85,46	100	85,46	85,46
14	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (hektar)		Hektar	333,3	292,04	87,62	333,3	292,04	87,62
15	Persentase Rumah Layak Huni		Persen	87,5	70,71	80,81	87,5	70,71	80,81
16	cakupan penyediaan pengelolaan sampah		Persen	20	10	50	20	10	50
17	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi		Persen	88	88	100	88	88	100
18	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah		Persen	80	80	100	80	80	100
19	Indeks Resiko Bencana		Nilai	115	149,08	70,37%	115	149,08	74
20	Presentase penanganan jumlah PMKS		Persen	2,68	2,68	100	2,68	2,68	100
21	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan		Nilai	5,72	5,28	92,38	5,72	5,28	92,38
22	Persentase pekerja Penuh Waktu		Persen	45	41,9	93,11	45	41,9	93,11
23	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Nilai	71,94	72,75	101,13	71,94	72,75	101,13
24	Pemenuhan Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan	Persen	77,27	100	129,42	77,27	100	129,42
25	Indeks Ketahanan		Nilai	84,5	73,48*	86,95	84,5	73,48*	86,95

NO	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI*	%
	Pangan Daerah								
26	Indeks Lingkungan Hidup	Kualitas	Nilai	51,83	62,73	121	51,83	62,73	121
27	Capaian Administrasi Kependudukan/Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Tertib	Persen	100	100	100	100	100	100
28	Capaian Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan	Lembaga	Persen	33,33	33,33	100	33,33	33,33	100
29	Angka Kelahiran Total (TFR)	Total	Nilai	2,23	2,23	100	2,23	2,23	100
30	Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara		Persen	100	98,33	98,33	100	98,33	98,33
31	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi		Persen	20	0,86041667	99,95	20	0,86041667	99,95
32	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		Nilai	3,9	3,15	80,76	3,9	3,15	80,76
33	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi		Persen	6	6	100	6	6	100
34	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil		Persen	1	1	100	1	1	100
35	Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)		Rupiah	51,3	45,6	88,89	51,3	45,6	88,89
36	Indeks Kepuasan Pelayanan Investor		Nilai	85,72	89,4	104,29	85,72	89,4	104,29
37	Indeks Pembangunan Kepemudaan		Nilai	40	49,17	122,93	40	49,17	122,93
38	Indeks Pembangunan Olahraga		Nilai	40	40	100	40	40	100
39	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah. Satuan (%)		Persen	100	100	100	100	100	100
40	Indeks minat baca masyarakat		Nilai	45	58,77	130,6	45	58,77	130,6
41	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan		Persen	95	100	105,26	95	100	105,26
42	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan		Persen	4,8	2,5*	52	4,8	2,5*	52
43	Persentase peningkatan		Persen	3,04	2,94*	96,71	3,04	2,94*	96,71

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI*	%
	nilai PDRB sektor Pariwisata							
44	Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	Persen	6	6	100	6	6	100
45	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Persen	32,71	45,99	140	32,71	45,99	140
46	Rasio elektrifikasi	Persen	100	97,41	97	100	97,41	97
47	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	Persen	0,63	0,63*	100	0,63	0,63*	100
48	LPE Sektor Perindustrian	Persen	4,45	4,9*	110,11	4,45	4,9*	110,11
49	LPE Sektor Perdagangan	Persen	6,4	0,89*	13,91	6,4	0,89*	13,91
50	Tingkat Inflasi Bahan Pokok	Persen	4	2,43	164	4	2,43	164
51	Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100
52	Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten (LPPD)	Persen	100	100	100	100	100	100
53	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	100	100	100
54	Persentase Manajemen Reformasi Birokrasi	Persen	100	100	100	100	100	100
55	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima	Persen	100	100	100	100	100	100
56	Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
57	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
58	Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan	Persen	100	100	100	100	100	100
59	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam RPJMD maupun Dokumen RKPDP	Persen	100	100	100	100	100	100
60	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	Persen	80	70,83	88,54	80	70,83	88,54

NO	INDIKATOR KINERJA			SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
					TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI*	%
61	Penilaian	Perencanaan, Pengukuran, dan capaian kinerja	pelaporan	Nilai	A (80-90)	65,8	82,35	A (80-90)	65,8	82,35
62	Cakupan	Penelitian dan pengembangan		Persen	100	100	100	100	100	100
63	Maturitas	SIPD		Persen	75	75	100	75	75	100
64	Capaian terhadap keuangan daerah	Opini BPK laporan pemerintah		Opini	WTP	WTP*	100	WTP	WTP*	100
65	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah			Persen	63,19	62,69	99,21	63,19	62,69	99,21
66	Persentase Indeks ASN	Peningkatan Profesionalitas		Persen	90	81,52	90,5	90	81,52	90,5
67	Persentase Indeks Kompetensi ASN	Peningkatan		Persen	25	24,69*	98	25	24,69*	98
68	Capaian Publik Penghubung	Pelayanan Badan		Persen	100	90	90	100	90	90
69	Capaian Maturitas SPIP			Nilai	4	3	100	4	3	100
70	Capaian Kapabilitas APIP			Nilai	3	3	100	3	3	100
71	Indeks Indonesia	Demokrasi		Nilai	78	78	100	78	78	100
72	Penanganan masyarakat	konflik		Persen	100	100	100	100	100	100

Secara umum, ringkasan kinerja capaian indikator pada sasaran perangkat daerah tersebut dari 78 indikator terdapat 57 indikator berpredikat sangat tinggi, 12 indikator berpredikat Tinggi, 6 indikator sedang, 1 indikator berpredikat rendah dan 1 indikator berpredikat sangat rendah.

2.2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Tahun Berjalan

Pelaksanaan hasil program sampai dengan Triwulan I tahun 2023 dimana realisasi keuangan dengan capaian (10≥20) sebanyak 9 Perangkat Daerah, dengan capaian (5≥10) sebanyak 15 Perangkat Daerah dan yang berada pada capaian dibawah (≤5) ada 8 Perangkat Daerah, secara rinci dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 167
Realisasi Capaian Kinerja Program sampai dengan TW I 2023

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.317.617.820.859	169.729.438.564	12,88
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.689.309.853.572	110.277.557.103	6,53
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	3.800.000.000	-	-
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	109.520.000.000	-	-
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	200.000.000	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Total		3.120.447.674.431	280.006.995.667	8,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	531.302.032.604	43.365.151.872	8,16
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	543.026.669.853	69.645.622.846	12,83
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	77.138.856.700	4.118.633.050	5,34
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	835.940.000	91.335.500	10,93
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.117.082.500	412.345.600	13,23
		1.155.420.581.657	117.633.088.868	10,18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Total				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	127.741.779.660	15.526.234.946	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	128.756.359.291	2.891.983.200	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	46.070.000.000	151.509.200	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.830.000.000	-	

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
	REGIONAL			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	450.000.000	-	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	63.750.000.000	1.792.348.077	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	124.880.150.000	1.942.053.174	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	597.473.169.449	5.516.897.350	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.435.407.600	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.750.000.000	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.500.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Total		1.105.636.866.000	27.821.025.947	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.387.050.000	3.210.726.403	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	21.500.000.000	-	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	80.798.000.000	-	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	379.526.950.000	-	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	500.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Total		520.712.000.000	3.210.726.403	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	59.199.260.000	6.115.532.131	

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.752.396.000	161.262.000	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	17.463.344.000	243.650.000	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.775.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Total		92.190.000.000	6.520.444.131	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.815.389.700	2.532.743.560	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.949.750.000	-	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.433.194.000	83.550.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	53.054.802.500	-	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.199.863.800	-	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	75.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Total		112.528.000.000	2.616.293.560	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	64.292.623.700	5.220.151.189	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	14.996.136.300	7.800.000	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.400.000.000	38.880.000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.567.060.000	188.186.000	
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.149.341.000	-	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	92.839.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Total		87.498.000.000	5.455.017.189	

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.545.590.000	3.685.746.267	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	7.548.424.000	977.165.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.317.188.000	129.506.460	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.494.955.000	64.350.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	200.000.000	19.950.000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	880.000.000	41.100.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.251.728.000	88.710.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Total		36.237.885.000	5.006.527.727	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.099.420.700	2.915.413.071	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	24.292.579.300	104.175.000	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.700.000.000	-	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	977.000.000	52.093.800	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.320.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Total		50.389.000.000	3.071.681.871	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	100.000.000	-	
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	200.000.000	-	

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Total		500.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.068.584.800	4.486.419.242	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.901.057.000	34.754.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	551.000.000	26.832.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	916.000.000	24.830.000	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	735.000.000	44.400.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.819.445.000	111.002.900	
	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	774.500.000	20.180.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	128.419.200	9.460.000	
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	384.546.000	-	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	744.000.000	-	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	468.000.000	17.400.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Total		66.490.552.000	4.775.278.142	
URUSAN	PROGRAM	850.000.000	41.884.220	

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	PENDAFTARAN PENDUDUK			
	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	750.000.000	59.164.480	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	560.000.000	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	104.915.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL Total		2.264.915.000	101.048.700	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.039.072.000	2.314.430.508	
	PROGRAM PENATAAN DESA	500.000.000	51.699.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1.535.000.000	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	11.630.888.000	2.151.338.000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.424.040.000	489.417.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Total		32.129.000.000	5.006.885.008	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	565.000.000	17.745.900	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.124.000.000	56.228.974	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.194.400.000	154.400.000	
URUSAN		6.883.400.000	228.374.874	

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Total				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.355.695.000	3.950.850.146	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	31.749.305.000	210.968.695	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.580.000.000	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.050.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Total		72.735.000.000	4.161.818.841	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.803.650.511	1.542.591.382	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	12.686.573.000	472.514.500	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	28.509.955.389	221.112.900	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Total		65.000.178.900	2.236.218.782	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.034.355.900	1.675.802.657	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3.499.874.000	3.300.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.310.474.100	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.073.763.000	-	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	584.160.000	-	
	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.892.154.000	12.000.000	

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Total		27.394.781.000	1.691.102.657	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.477.000.000	2.251.449.499	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	5.920.000.000	7.165.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	4.778.244.000	29.740.500	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.250.000.000	11.997.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.774.600.000	27.816.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	350.000.000	9.511.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Total		35.549.844.000	2.337.678.999	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.201.852.150	2.904.714.425	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5.200.000.000	67.200.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	61.024.245.600	1.007.736.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.581.902.250	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Total		89.008.000.000	3.979.650.425	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.055.542.600	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Total		1.055.542.600	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.750.278.500	24.996.000	
URUSAN		2.750.278.500	24.996.000	

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Total				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.100.000.000	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.280.000.000	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	420.000.000	-	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.650.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Total		7.450.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.880.572.700	1.849.491.565	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.881.664.300	73.761.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Total		25.762.237.000	1.923.253.065	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.233.915.000	11.586.270	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	999.848.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Total		3.233.763.000	11.586.270	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.351.971.900	3.270.043.830	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.995.000.000	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	35.565.006.200	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	8.937.286.000	-	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	700.000.000	-	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.613.405.900	-	
URUSAN		109.162.670.000	3.270.043.830	

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Total				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.580.290.000	1.584.468.031	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	18.615.355.000	-	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.295.355.000	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.300.000.000	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.850.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Total		49.641.000.000	1.584.468.031	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.635.086.500	6.083.859.200	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	32.295.008.900	271.798.956	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.073.562.600	54.158.900	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.373.542.000	119.030.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.100.000.000	-	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	250.000.000	-	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	7.367.800.000	55.660.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Total		119.095.000.000	6.584.507.056	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.510.470.000	14.365.000	
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	2.996.540.000	6.302.500	
	PROGRAM PENDIDIKAN	703.650.000	12.466.000	

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
	DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	958.788.000	6.056.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Total		11.169.448.000	39.189.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.332.519.000	3.701.383.586	
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.340.000.000	8.770.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	579.237.000	26.624.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	17.299.549.000	273.437.580	
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	606.695.000	8.421.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Total		44.158.000.000	4.018.636.166	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	950.000.000	-	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.200.000.000	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.100.000.000	-	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.848.315.600	-	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	710.000.000	-	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	460.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Total		9.268.315.600	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	73.862.291.400	2.472.569.541	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN	6.260.393.000	-	

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
	PEMBANGUNAN INDUSTRI			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	300.000.000	-	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	600.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Total		81.022.684.400	2.472.569.541	
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	226.736.795.264	24.261.627.673	
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.819.183.000	-	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.350.000.000	-	
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.480.000.000	-	
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.265.727.200	-	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.191.070.251	53.644.125	
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.950.224.285	-	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.000.000.000	-	
SEKRETARIAT DAERAH Total		259.793.000.000	24.315.271.798	
SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	240.127.225.000	35.312.012.453	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	248.784.775.000	33.037.252.384	
SEKRETARIAT DPRD Total		488.912.000.000	68.349.264.837	
PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.079.483.800	6.630.636.095	
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	8.399.999.900	475.791.110	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.431.516.300	101.426.845	
PERENCANAAN Total		50.911.000.000	7.207.854.050	
KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	326.998.678.022	41.420.741.601	

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
	DAERAH PROVINSI			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.156.650.622.973	534.334.321.473	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11.094.129.000	310.735.300	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	23.068.622.652	-	
KEUANGAN Total		3.517.812.052.647	576.065.798.374	
KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.837.392.200	3.778.002.120	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.746.607.800	650.150.500	
KEPEGAWAIAN Total		65.584.000.000	4.428.152.620	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.139.080.600	5.314.127.102	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19.842.919.400	911.498.949	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Total		53.982.000.000	6.225.626.051	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.550.000.000	6.984.000	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Total		3.550.000.000	6.984.000	
PENGELOLAAN PENGHUBUNG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.670.608.170	689.764.278	
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.583.391.830	-	
PENGELOLAAN PENGHUBUNG Total		13.254.000.000	689.764.278	
INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	62.868.778.000	7.493.852.648	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.789.982.000	97.204.250	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	984.240.000	-	
INSPEKTORAT DAERAH Total		71.643.000.000	7.591.056.898	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.935.547.817	2.006.056.669	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	6.212.583.055	60.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN	38.172.070.000	10.761.300	

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
	PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.560.000.000	70.217.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.923.996.300	200.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	35.621.423.828	5.990.000.000	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Total		106.425.621.000	8.337.034.969	

2.2.5 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal

Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintahan apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dikategorikan dalam dua hal, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk memastikan penyelenggaraan Pelayanan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara berjalan optimal, maka ditetapkan ukuran yaitu melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai suatu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, penerapan SPM Pemerintah Provinsi Banten sampai dengan Tahun 2022, berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 belum optimal.

Selanjutnya evaluasi capaian standar minimal per bidang dan jenis pelayanan dasar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 168
Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Bantan 2019-2022

NO	BIDANG DAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021			CAPAIAN TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	BIDANG PENDIDIKAN													
a	Pendidikan Menengah	Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	435.894	435.894	100	138.205	138.205	100	129.081	129.081	100			
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional												
b	Pendidikan Khusus	Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	5930	5930	100	1.198	1.198	100	1.282	1.282	100			
2	BIDANG KESEHATAN													
a	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	61.539	61.539	100	418.873	418.873	100%	115.464	115.464	100%			
b	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	61.539	61.539	100									
3	BIDANG PEKERJAAN UMUM													
a	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	0	0	0									
b	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	0	0	0									
4	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT													
a	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni				483	483	100%	230	66,25	25,87%			

NO	BIDANG DAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021			CAPAIAN TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	layak huni bagi Provinsi													
b	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah				100%	0	0	100%	0	0			
5	BIDANG TRANTIBUMLINMAS													
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi				1	1	100%	4	4	100%			
6	BIDANG SOSIAL													
a	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	1			20	20	100	30	0	0			
b	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	1			15	15	100	20	20	100			
c	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	1			60	60	100	60	60	100			
d	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	1			10	10	100	40	25	62,50			
e	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	Jumlah warga negara korban bencana Provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	1			1.300	4.195	100	1.300	1.630	125,38			

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022, di masa pandemi COVID-19, membawa beberapa konsekuensi yang mengandung resiko. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan di Banten sebagai dasar pijakan dalam perencanaan ke depan, yang terangkum sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Akselerasi Sumber Daya Ekonomi Unggulan Dan Potensial, yang disebabkan oleh:
 - a) Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Pertanian;
 - b) Belum Optimalnya Produksi dan Produktivitas Perikanan;
 - c) Belum Optimalnya peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan Strategis;
 - d) Belum Optimalnya Tata Kelola Perdagangan;
 - e) Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata;
 - f) Belum optimalnya Daya Saing Industri dan Rendahnya Kualitas SDM;
 - g) Belum Optimalnya Penanaman Modal;
 - h) Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil.
2. Relatif Rendahnya Daya Saing SDM, yang disebabkan oleh :
 - a) Belum memadainya pelayanan kesehatan;
 - Belum tercukupinya tenaga kesehatan dilihat dari rasio jumlah dokter adalah 1;2500 idealnya, Provinsi Banten

berada pada angka 0,83 pada tahun 2019 dengan daerah yang masih kekurangan adalah Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kab. Tangerang masih di bawah standar, untuk rasio perawat secara keseluruhan Provinsi Banten sebesar 0,47 pada tahun 2019 dan hanya Kota Cilegon yang memiliki rasio jumlah perawat di atas standar.

- Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan belum maksimal;

Indeks komposit ketersediaan/aksesibilitas Faskes (%) di Provinsi Banten sebesar 82,04%, dengan rincian Kab. Pandeglang sebesar 67,78%, Kab. Lebak 64,79%, Kab. Tangerang sebesar 96,81%, Kab. Serang sebesar 91,09%, Kota Serang 98,91%, dan 100% untuk Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangsel. Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk di Provinsi Banten tahun 2022 sebesar 91,33% atau 12.145.161 jiwa yang tercover.

- Masih terbatasnya jumlah rumah sakit;

Total Rumah Sakit terakreditasi sebanyak 88 Rumah Sakit. Dan RS terakreditasi di Kab Pandeglang hanya 1 yaitu RSUD Berkah Pandeglang. Rasio Puskesmas per penduduk adalah 1 : 16.000, Tidak ada Kab/Kota yang memiliki rasio jumlah puskesmas di atas standar. Namun, klinik pratama sebanyak 895 unit, namun belum ada rincian sebaran kab/kotanya

- b) Belum memadainya pelayanan Pendidikan, Kepemudaan dan olahraga, disebabkan antara lain;

- Ketersediaan sarana pendidikan belum memadai.

Dimana masih terdapat ruang kelas rusak Rusak Berat sebesar 4,9%. Jumlah ruang kelas jenjang SMK sebanyak 7.206 kelas dengan kondisi Rusak Berat sebesar 5,1%. Jumlah ruang kelas jenjang SLB sebanyak 815 kelas dengan kondisi ruang kelas Rusak Berat sebesar 2,9%. Selain itu persentase sekolah yang memiliki perpustakaan masih di bawah 67%.

- Kualitas Tenaga Pendidik Belum Baik
 Persentase guru kualifikasi (minimal S1) pada jenjang SMA 94%, SMK 91% dan PLB 77% dan Persentase guru tersertifikasi jenjang SMA 36,01%; SMK 22,24%; PLB 38,2%. Menunjukkan belum semua guru sekolah kewenangan Provinsi sudah di jenjang S1 dan untuk sertifikasi guru masih belum diatas 50%.
 - Ketersediaan Tenaga Pendidik Belum Merata.
 Rasio guru-murid tahun 2017 SMA di Provinsi Banten sebesar 10,79, Rasio guru-murid tahun 2017 SMK di Provinsi Banten sebesar 19,54. Kekurangan guru SMA terdapat di beberapa wilayah yaitu Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan. Data jumlah guru yang ada di sekolah negeri masih belum mampu mengimbangi jumlah murid.
- c) Belum terpenuhinya kesejahteraan masyarakat.
3. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah serta Tingginya Potensi Bencana dan Perubahan Iklim, yang disebabkan oleh:
- a) Masih rendahnya kapasitas dalam mengelola LH dan menghadapi bencana alam;
 Belum banyak masyarakat yang memiliki pemahaman Pengelolaan LH dan mitigasi bencana Kinerja Lembaga pengelolaan LH dan penanggulangan bencana belum efektif
 - b) Ancaman bencana alam dan kerusakan LH yang tinggi;
 menurut IRB tahun 2020 terkait Potensi tanah longsor terdapat 2 Kabupaten yang memiliki risiko bencana tanah longsor yaitu Kab Pandeglang dan Kab Lebak dengan skor 24 kelas risiko Tinggi. Potensi bencana gempa menjadi ancaman paling luas karena seluruh kabupaten/kota di Banten memiliki risiko gempa dengan skor 21,50 kelas risiko Tinggi. Potensi tsunami beresiko di 6 wilayah yaitu Kab Pandeglang, Kab Lebak, Kab Tangerang, Kab Serang, Kota Cilegon, Kota Serang dengan nilai skor 24 kelas risiko Tinggi. Banten memiliki ancaman bencana yang tinggi dengan nilai indeks Risiko Bencana sebesar 154,87.

- c) Tingginya kerentanan terhadap bencana, yang disebabkan oleh;
- Kerentanan sosial
 - Kerentanan ekonomi
 - Kerentanan fisik
 - Kerentanan lingkungan
4. Belum Optimalnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan tingkat Demokrasi, yang disebabkan oleh:
- a) Kualitas pelayanan publik masih rendah
- Pelayanan public yang prima merupakan bentuk kondisi ideal dari pelayanan yang harus diterima oleh masyarakat, menjadi penting pemerintah daerah memperhatikan hal-hal yang kurang dalam pelayanan publik adapun permasalahan dari kurang optimalnya pelayanan publik di Banten adalah masih rendahnya Tatalaksana Pelayanan Publik yang dimana belum adanya kebijakan standar pelayanan dan Inovasi Daerah masih rendah dimana belum adanya Hub JIPP dan menurunnya peringkat IGA Provinsi Banten dari tahun ke tahun walaupun masih dalam kategori terinovatif.
- b) Belum efektivitas dan efisiensi nya manajemen pemerintahan;
- Penguatan reformasi birokrasi sudah diterapkan sejak beberapa tahun kebelakang namun masih banyak kendala yang belum dapat di tuntaskan oleh Pemerintah Provinsi Banten beberapa permasalahan diantaranya adalah belum optimalnya Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah dimana nilai IPKD Provinsi Banten tercatat 55,89. Belum optimalnya pencegahan korupsi dimana Indeks Persepsi Anti Korupsi di Banten masih berada pada skala 2, dan Belum optimalnya SAKIP yang bisa dilihat dari nilai SAKIP yang masih B dalam 3 tahun berturut-turut dengan nilai di tahun 2021 sebesar 63,11.
- c) Tingkat Kualitas Demokrasi yang masih rendah
- Penguatan kualitas demokrasi bukan hanya secara prosedural namun harus bersifat substansial, beberapa tahun terakhir indeks demokrasi Banten berada pada angka

yang semakin meningkat yaitu sebesar 75,82, adapun beberapa komponen yang belum maksimal dan perlu perbaikan adalah aspek kebebasan, penguatan Lembaga demokrasi dan aspek kesetaraan gender dalam berdemokrasi.

2.3.1.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.1.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Permasalahan utama pada Pendidikan adalah:

- Ketersediaan tenaga pendidik belum merata, dimana tercatat pada angka rasio murid-guru yang belum ideal untuk jenjang pendidikan SMK karena melebihi batas ideal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio jumlah peserta didik terhadap guru di jenjang SMK adalah 15:1 dimana seorang guru seharusnya mengajar 15 murid. Rasio murid- guru yang rendah dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih kondusif, guru pun dapat memberi perhatian dan pengawasan kepada siswa dengan mudah.
- Ketersediaan sarana pendidikan belum memadai, tercatat masih ada kondisi ruang kelas yang rusak sedang-berat sebesar $\pm 11,2\%$, selain itu ada sarana penunjang seperti laboratorium dan Perpustakaan sekolah yang belum ada di tiap sekolah.
- Kualitas tenaga pendidik belum baik, Jumlah guru tersertifikasi pada tiap jenjang masih rendah yaitu $<50\%$ dan belum semua guru memiliki kualifikasi S1 dimana diharapkan semua guru jenjang SMA, SMK dan SKH telah memiliki jenjang Pendidikan S1.

a. Kesehatan

Permasalahan utama pada urusan Kesehatan adalah:

- Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan belum maksimal, persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang mudah diakses belum

mencapai 100% (target). Tingkat kemudahan mencapai RS di Pandeglang dan Lebak di bawah 50%

- Masih terbatasnya jumlah rumah sakit dan puskesmas, Jumlah RS di Banten Selatan minim, di Pandeglang hanya 1, dan masih terbatasnya jumlah rumah sakit dan puskesmas Rasio jumlah puskesmas terhadap penduduk di bawah standar.
- Belum tercukupinya tenaga Kesehatan, belum meratanya sumber daya kesehatan baik dilihat dari sumber daya manusia tenaga Kesehatan, dimana rasio jumlah dokter:penduduk di 4 kabupaten masih di bawah standar, rasio jumlah perawat terhadap penduduk di 7 Kab/Kota di bawah standar, rasio jumlah bidan terhadap penduduk di bawah standar
- Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), juga menandakan masih rendahnya status kesehatan masyarakat. Prevalensi stunting di Provinsi Banten belum mencapai target

b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama pada urusan pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah;

- Kemantapan jalan nasional dan jalan Provinsi di Banten masih belum 100%, data menunjukkan sebesar kemantapan jalan Provinsi sebesar 94,62%. Namun, secara distribusi, kemantapan jalan di kab. Pandeglang dan kab. Lebak masih kurang baik;
- Sebagian jalan Provinsi di Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak dalam keadaan rusak;
- Rasio jalan terhadap luas wilayah relatif rendah, Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Provinsi Banten senilai 0,76 sedangkan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Provinsi DKI Jakarta senilai 10,68, Provinsi Jawa Tengah senilai 0,87, Provinsi Jawa Timur senilai 0,83, Provinsi DI Yogyakarta senilai 1,98. Hanya lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki rasio 0,70;

- Penatagunaan sumber daya air yang baru mencapai 75 persen serta belum optimalnya ketersediaan sarana irigasi yang dapat menjamin kebutuhan air bagi usaha pertanian sawah di Provinsi. Kecukupan pemenuhan kebutuhan air bagi usaha pertanian sawah perlu diarahkan pada sistem penyediaan air yang memiliki ketahanan akan kondisi musim yang ada baik kemarau maupun penghujan;
- Belum seluruh penduduk terlayani akses sanitasi yang layak alini terjadi karena belum optimalnya penyediaan pengolahan dan jaringan sistem air limbah domestik regional;
- Kurang optimalnya penanganan persampahan regional. Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah di Provinsi Banten pada tahun 2020 sebanyak 42.23% berasal dari sampah rumah tangga;
- Kurangnya pasokan air baku di Kawasan Industri wilayah utara Banten;
- Belum optimalnya penyediaan air baku bagi warga masyarakat.

c. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman antara lain:

- Pelayanan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau mengalami penurunan (di bawah rata-rata nasional) dimana di tahun-tahun sebelumnya selalu di atas rata-rata nasional.
- Belum optimalnya program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk pengentasan kawasan kumuh.
 - SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut, dalam pelaksanaan urusan ini perlu memperhatikan dokumen mitigasi bencana serta rencana

pembangunan yang memerlukan realokasi tempat tinggal masyarakat.

- Harga hunian komersil dan MBR yang kurang terjangkau. Daya beli hunian yang tertekan. Belum optimalnya kapasitas ketersediaan hunian komersial dan MBR.

d. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

- Standar operasional prosedur Satpol PP;
- Standar sarana prasarana Satpol PP;
- Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Permasalahan selanjutnya terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dimana pada tahun 2020, IDI Provinsi Banten aspek hal-hal politik menjadi yang terendah yaitu 66,18 dibandingkan dengan aspek lainnya. Aspek lembaga demokrasi juga mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2020 menjadi 76,55. Perlu adanya peran pemerintah untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di tingkat Provinsi agar IDI Provinsi Banten di setiap aspek terus meningkat dan hak-hak masyarakat dalam hal politik semakin terjamin.

Bencana daerah merupakan bagian dari urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain;

- Masih belum optimalnya kebijakan kebencanaan daerah
- SOP kebencanaan masih belum semua dibuat dan dilaksanakan
- Data kebencanaan yang masih belum optimal

e. Sosial

- Permasalahan utama terkait bidang sosial yaitu masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) rumah tangga miskin (>600.000 KK) dan anak terlantar (>97.000 jiwa) di Provinsi Banten.
- Isu lainnya yaitu cakupan PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial belum mencapai target. Cakupan PSKS yang meningkat partisipasi sosialnya juga baru terealisasi 15,71 persen. Belum tercapainya target PMKS dan PSKS ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran akibat dampak pandemi COVID-19.
- Validitas data masyarakat miskin dalam program bantuan sosial JAMSOSRATU untuk warga Banten dan penerimaan bantuan program keluarga harapan (PKH
- Permasalahan lainnya di Bidang Sosial adalah upaya pemenuhan kecukupan SPM Sosial. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten jenis pelayanan SPM yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi adalah:
 - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
 - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi.
 - Berdasarkan rujukan tersebut, maka permasalahan di bidang sosial yang harus mendapatkan perhatian Pemerintah Provinsi Banten adalah upaya pemenuhan sarana dan prasarana panti sosial dalam bentuk kuantitas dan kualitas mutu pelayanan. Hal

lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah upaya mitigasi bencana di daerah sehingga upaya pemenuhan kebutuhan dan perlindungan sosial dapat dilakukan secara optimal.

2.3.1.3 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Permasalahan utama pada urusan Tenaga Kerja terutama pada tahun 2021 adalah:

- Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten saat ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian relatif terhadap jumlah penduduk Banten secara keseluruhan masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata pasokan nasional.
- Masih belum optimalnya penciptaan kewirausahaan baru
- Belum optimalnya Kerjasama antara pelaku usaha, Akademisi dan perihal lain terkait
- Belum optimalnya penempatan tenaga kerja
- Belum optimalnya BLKI Provinsi Banten

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah terkait upaya pembangunan gender di Provinsi Banten telah meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender, akan tetapi peningkatan kualitas ini belum diimbangi dengan pemberdayaan peran gender dalam aktivitas ekonomi dan politik. Selain itu, belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga ditandai dengan masih terdapat PMKS anak terlantar pada tahun 2020 sebanyak 97.416 orang dimana hal ini kemudian membutuhkan upaya optimalisasi pengelolaan sistem data gender dan anak.

c. Pangan

Permasalahan utama pada urusan Pangan adalah masih rendahnya ketersediaan pangan strategis dan terjaminnya keamanan dan mutu pangan dimana hal ini disebabkan oleh belum optimalnya

upaya peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan dengan beberapa rincian permasalahan sebagai berikut:

- Rata-rata konsumsi kalori penduduk di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, namun untuk konsumsi protein terjadi sebaliknya;
- Kurang memadainya sarana dan prasarana UPTD sertifikasi mutu dan keamanan pangan;
- Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan.

d. Lingkungan Hidup

Permasalahan utama pada urusan Lingkungan Hidup adalah:

- kondisi lingkungan hidup yang belum baik dan masih rendahnya kualitas air, udara dan air laut;
- belum optimalnya pengelolaan limbah B3 dan penanganan sampah;
- Masih banyaknya pencemaran Daerah Air sungai;
- Belum optimalnya pengendalian lingkungan dan penegakan hukum.

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan utama pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana pelayanan kependudukan yang berbasis teknologi dan informasi masih perlu ditingkatkan.

f. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan utama pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Pelayanan Pemerintah Provinsi ke Masyarakat Desa masih belum optimal ditandai dengan masih terdapat 227 Desa Tertinggal dan 8 Desa Sangat Tertinggal. Selain itu pemerataan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan desa juga masih belum optimal.

Ketertinggalan pembangunan desa di wilayah Provinsi Banten dibandingkan dengan wilayah Provinsi lainnya juga dapat dilihat dari capaian indikator Indeks Desa Membangun (IDM).

Berdasarkan data IDM tahun 2021 yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, nilai IDM Provinsi Banten hanya mencapai 0,645 dan menempati peringkat ke 23 dari 33 Provinsi di Indonesia (Keterangan; DKI Jakarta tidak dihitung karena tidak memiliki desa). Peringkat tersebut mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya yaitu peringkat 22 di tahun 2020. Kondisi ini tentu harus diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan akselerasi pembangunan desa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan kewenangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah masih tingginya angka kelahiran dimana belum optimalnya pengendalian penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan beberapa permasalahan antara lain:

- Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Banten masih di atas 2 (dua), angka ini lebih tinggi jika dibandingkan Jawa Timur yang sudah mencapai angka 1 (satu);
- Adanya penurunan persentase pemakaian kontrasepsi modern dan kenaikan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 2018- 2020;
- Pembangunan berwawasan kependudukan belum menjadi arus utama pembangunan daerah;
- Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) masih rendah;
- Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) masih tinggi (kesadaran masyarakat yang masih rendah);
- Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Ratio) masih tinggi;
- Tingkat putus pakai (DO) pemakaian kontrasepsi masih tinggi; dan
- Pengembangan kampung KB yang belum optimal.

h. Perhubungan

Permasalahan utama pada urusan Perhubungan adalah belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan jasa perhubungan, kinerja pelayanan angkutan umum dan sistem keselamatan serta kelancaran transportasi antara lain:

- Sistem transportasi masih kurang baik
- Penataan jaringan pelayanan angkutan umum yang belum optimal;
- Masih terbatasnya ketersediaan prasarana transportasi dan belum terpenuhinya standar perlengkapan jalan;
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan dan penyelenggaraan perhubungan.

i. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah dimana kinerja pelayanan publik belum optimal yang ditandai dengan belum optimalnya capaian SPBE dan belum optimalnya pelayanan informasi publik yang terinformasikan ke masyarakat antara lain:

- Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- Belum optimalnya Penerapan Manajemen SPBE;
- Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi belum memadai;
- Belum optimalnya penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas;
- Rendahnya SDM di bidang informasi dan komunikasi publik.

j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan utama pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah:

- Koperasi aktif di beberapa Kabupaten/Kota di Banten hanya mencapai 50 persen pada tahun 2018;
- Perlunya meningkatkan upaya pendataan UMKM sebagai dasar kebijakan;

- Kurangnya upaya pemerintah dalam mewadahi dukungan untuk UMKM (pelatihan peningkatan keahlian, memperluas supply produk, membantu dalam kesempatan ekspor);
- Kurangnya bantuan dalam integrasi ekonomi digital untuk membantu UMKM;
- Kurangnya promosi mengenai UMKM;
- Upah tenaga kerja yang dinilai terlalu tinggi;
- Pengelolaan sistem teknologi informasi di PTSP yang masih belum optimal; dan
- Kegiatan pelatihan, pembinaan dan pameran untuk UKM belum tepat sasaran dan efektif.

k. Penanaman Modal

Permasalahan utama pada urusan Penanaman Modal adalah belum optimalnya peningkatan realisasi penanaman modal dan kemudahan berusaha antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- Ketimpangan sebaran penanaman modal (terkonsentrasi di Banten Utara);
- Penanaman modal didominasi oleh investasi padat modal;
- Belum tersedianya Investment Project Ready to Offer (IPRO);
- Belum optimalnya strategi promosi dan branding penanaman modal;
- Rendahnya pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM;
- Rendahnya pengawasan kepada pelaku usaha;
- Masih adanya tumpang tindih kewenangan perizinan;
- Sistem perizinan yang mudah perlu untuk terus dikembangkan;
- Promosi investasi yang belum efektif; dan
- Belum optimalnya pelayanan perizinan.

l. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama pada urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah belum optimalnya pelayanan kepemudaan, masih rendahnya pembinaan dan pemberdayaan serta peningkatan kualitas sarana prasarana keolahragaan, masih kurangnya lembaga olahraga dan standarisasi yang mengikuti POPNAS dan masih kurangnya pembinaan dan pelatihan olahraga antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- Belum optimalnya peningkatan kapasitas daya saing pemuda;
- Belum berkualitasnya perencanaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- Belum optimalnya advokasi terhadap pemuda;
- Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan;
- Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan olahraga;
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana keolahragaan;
- Kurangnya event kejuaraan olahraga;
- Masih rendahnya prestasi olahraga;
- Belum seluruhnya lembaga olahraga yang terstandarisasi serta pengembangan dan kerjasama organisasi keolahragaan;
- Masih kurangnya SDM Olahraga berkualitas.

m. Statistik

Permasalahan utama pada urusan statistik adalah belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral serta pencatatan data statistik daerah yang terintegrasi serta dukungan ketersediaan SDM statistisi yang belum tersedia.

n. Persandian

Permasalahan utama pada urusan persandian adalah belum optimalnya sarana dan prasarana persandian serta belum optimalnya cakupan pengelolaan persandian, keamanan informasi dan keterbatasan infrastruktur dan SDM pemerintah yang dapat memanfaatkan persandian.

o. Kebudayaan

Permasalahan utama pada bidang Kebudayaan adalah masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan antara lain:

- Belum optimalnya pengembangan kebudayaan di daerah;
- Masih belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan kebudayaan;
- Belum optimalnya pengembangan cagar budaya dan museum;
- Belum optimalnya usaha pelestarian arsip nilai budaya dan sejarah;
- Belum optimalnya pelayanan museum dan pemberdayaan masyarakat adat.

p. Perpustakaan

Permasalahan utama pada bidang perpustakaan adalah belum optimalnya nilai kegemaran membaca masyarakat dan indeks pembangunan literasi masyarakat dimana Provinsi Banten ke-9 (sembilan) se-Indonesia dalam Indeks Kegemaran Membaca (IKM) berdasarkan hasil penelitian Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun 2020, dengan perolehan angka 58,77. Angka ini masih perlu ditingkatkan.

q. Kearsipan

Permasalahan utama pada urusan Kearsipan adalah belum optimalnya peningkatan ketersediaan, keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban yang disebabkan antara lain:

- Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis Provinsi;
- Belum optimalnya pengelolaan arsip statis daerah Provinsi;
- Belum optimalnya pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional tingkat Provinsi;
- Belum optimalnya autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Provinsi;
- Persentase pengelolaan arsip OPD sesuai standar masih belum optimal;
- Belum optimalnya fungsi arsiparis; dan
- Kebutuhan penggunaan aplikasi TIK dalam dokumentasi arsip daerah.

2.3.1.4 Urusan Pilihan

a. Pariwisata

Permasalahan utama pada urusan pariwisata adalah belum optimalnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif yang disebabkan antara lain oleh:

- Pengembangan objek wisata belum memadai dan terintegrasi
- Pengembangan atraksi wisata yang belum maksimal (Minimnya keterlibatan masyarakat lokal)
- Kurangnya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat
- Kurangnya promosi wisata jumlah

- amenities belum memadai Banyaknya usaha pendukung pada usaha akomodasi pariwisata di Banten Selatan hanya sekitar 112 usaha (44%). Jumlah tempat tidur yang mendukung akomodasi hanya sekitar 3.876 (16%)
- Terbatasnya aksesibilitas menuju objek wisata terutama wisata alam
- Belum maksimalnya kegiatan Bangga Berwisata Banten yang dikenal sebagai Gerakan BWI

b. Pertanian

Permasalahan utama pada urusan Pertanian adalah belum optimalnya PDRB Sektor Unggulan (Pertanian) yang antara lain disebabkan oleh:

- Belum optimalnya produksi pertanian;
- Terbatasnya pengembangan pertanian di daerah perkotaan;
- Ketahanan pangan di perkotaan masih perlu ditingkatkan;
- Kurangnya ketersediaan air, benih padi bermutu, sistem tanam modern dan penggunaan pupuk yang sesuai di beberapa kabupaten;
- Sarpras penunjang kawasan pertanian belum memadai;
- Alih fungsi lahan pertanian;
- Belum optimalnya pengelolaan pasca panen/off farm produktif; dan
- Menurunnya jumlah populasi ternak besar.

c. Kehutanan

Permasalahan utama pada urusan kehutanan adalah masih rendahnya kualitas tutupan hutan serta pemanfaatan sumberdaya hutan yang disebabkan oleh antara lain :

- Belum efektifnya penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi;
- Belum optimalnya perencanaan, penyediaan data serta koordinasi pemanfaatan hutan produksi dan lindung serta pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu diluar kawasan hutan;
- Penurunan tutupan lahan dan hutan;
- Masih luasnya lahan kritis;

- Terbatasnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan dan produktif bagi masyarakat;
- Belum optimalnya pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi; dan
- Belum optimalnya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dan penguatan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan;
- Belum optimalnya penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial;
- Belum optimalnya rencana, fungsi daya dukung DAS dan pengembangan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS;
- Belum optimalnya penanganan catchment area.

d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan utama pada urusan energi dan sumber daya mineral adalah belum optimalnya ketersediaan pelayanan dan pengendalian berbagai aspek di sektor energi dan sumber daya mineral antara lain:

- Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi untuk pengembangan geowisata (geopark dan geodiversity) Banten dan pengendalian air tanah di CAT kewenangan Provinsi (CAT Malingping, Labuan dan Rawa Dano) dan batubara;
- Belum optimalnya pengendalian teknis kebencanaan geologi, pengembangan geowisata dan penggunaan air di CAT kewenangan Propinsi (CAT Malingping, Labuan dan Rawa Dano);
- Belum optimalnya pelayanan rekomendasi teknis (REKOMTEK) pada sumber daya mineral kewenangan Provinsi;
- Masih adanya 85.313 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Banten yang belum memiliki akses terhadap energi listrik (mayoritas terletak di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak);
- Masih rendahnya pemanfaatan potensi sumber energy baru terbarukan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil.

e. Perdagangan

Permasalahan utama pada urusan perdagangan adalah belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan disebabkan antara lain oleh:

- Belum optimalnya daya saing komoditi, produk, perdagangan, daerah;
- Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional;
- Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga;
- Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar;
- Kurangnya pemasaran bagi produk Industri Kecil dan Menengah;
- Banyaknya kerugian dan menurunnya aktivitas perdagangan karena pandemi COVID-19;
- Belum berjalannya Manajemen Pusat Distribusi Perdagangan Provinsi;
- Kurang terbinanya pelaku ekspor dari calon eksportir menjadi eksportir; dan
- Belum optimalnya pengembangan UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

f. Perindustrian

Permasalahan utama pada urusan perindustrian adalah belum optimalnya pertumbuhan sektor industri disebabkan antara lain oleh:

- Pertumbuhan dan daya saing industri yang belum optimal;
- Masih adanya ketergantungan terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah;
- Perlunya peningkatan dukungan terhadap peranan industri kreatif dan industri kecil dan menengah (IKM) dalam sektor perekonomian;
- Masih terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi dan pasar;
- Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan monitoring secara berkelanjutan;

- Kondisi pandemi COVID-19 juga mengganggu jalannya kegiatan perindustrian yang bahkan menyebabkan perusahaan gulung tikar dan meningkatnya fenomena Putus Hubungan Kerja (PHK);
- Belum optimalnya perencanaan pembangunan industri Provinsi;
- Okupansi kawasan yang tidak merata;
- Belum terintegrasinya antara industri hulu dengan hilir; dan
- Minimnya SDM yang memiliki kompetensi.

g. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama pada urusan kelautan dan perikanan adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang disebabkan antara lain oleh:

- Jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya cenderung menurun Volume perikanan tangkap di Pandeglang dan Lebak pada tahun 2019 mencapai 141.869 ton. Terdapat penurunan volume yang cukup signifikan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 37.679 ton.
- Jumlah produksi (pembesaran dan pembenihan 1000 ekor) perikanan budidaya wilayah Banten Selatan masih di bawah wilayah Banten Utara, terutama Kabupaten Serang.
 - Alat dan sarpras pendukung masih tradisional
 - Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sebagian besar nelayan Banten masih menggunakan alat tangkap ikan terlarang Masih ada sekitar 800 unit alat tangkap ikan cantrang yang digunakan nelayan di sejumlah daerah di Banten
 - Terbatasnya akses modal
 - Pemberian bantuan benih ikan masih minim karena keberadaan Pokdakan air tawar saat ini masih sedikit. Hal itu diketahui dari masih minimnya serapan bantuan benih ikan tahun 2022.
 - Pola pemasaran hasil perikanan masih tradisional belum menerapkan sistem rantai dingin pada penanganan hasil produk perikanan
- Rendahnya Kualitas ikan dan harga jual ikan menurun pasca penangkapan

- Kurangnya pemahaman nelayan Kelompok usaha mandiri (perikanan) di Provinsi Banten pada tahun 2022 hanya berjumlah 173 kelompok. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat berjumlah 582 kelompok, Jawa Tengah berjumlah 421 kelompok, D.I Yogyakarta berjumlah 355 kelompok, Jawa Timur berjumlah 465 kelompok
- Industri olahan perikanan dengan kode (102) jumlahnya hanya 18 industri dengan serapan tenaga kerja sebesar 2.383 orang
- Sarpras pendukung belum memadai Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan adalah melalui investasi pengadaan cold storage khususnya bagi nelayan-nelayan kecil.
- Penanganan pasca penangkapan ikan kurang baik Kualitas ikan sangat cepat menurun jika es batu tidak segera tersedia yang berakibat pada penurunan harga jual, terlebih pada saat hasil tangkapan melimpah
- Belum maksimalnya industri pengolahan perikanan
 - jumlah kelompok usaha mandiri perikanan relatif sedikit
 - Jumlah industri pengolahan dan pengawetan perikanan relatif masih sedikit.

h. Perencanaan

Permasalahan utama pada urusan perencanaan pembangunan adalah belum optimalnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang disebabkan antara lain oleh:

- Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan;
- Koordinasi antar instansi masih kurang maksimal;
- Pemerintah Provinsi Banten perlu menerapkan e-government dan SIPD yang terintegrasi;
- Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui anggaran berbasis kinerja perlu ditingkatkan;
- Perencanaan kinerja Perangkat Daerah masih belum efektif dikarenakan masih adanya ketidaksepahaman antar Perangkat Daerah terkait penyusunan indikator sasaran strategis, indikator program, indikator kegiatan pada penyusunan dokumen perencanaan;

- Belum optimalnya komponen pengukuran kinerja disebabkan kurang efektifnya koordinasi perencanaan dengan Bappeda Kabupaten/Kota, keselarasan antar Kementerian dan kebijakan Kementerian yang kurang konsisten serta kurangnya SDM terhadap urusan perencanaan;
- Tingkat ketersediaan data dan kepatuhan penyerahan data.

i. Keuangan

Permasalahan utama pada urusan keuangan adalah belum optimalnya pendapatan daerah antara lain disebabkan oleh:

- Rendahnya optimasi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Belum optimalnya ketercapaian pendapatan lain-lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah;
- Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak; dan
- Belum optimalnya manajemen aset daerah.

j. Kepegawaian

Permasalahan utama pada urusan kepegawaian adalah pelaksanaan manajemen ASN belum optimal antara lain disebabkan oleh:

- Kualitas ASN yang perlu ditingkatkan dapat dilihat dari persentase ASN yang profesional yang masih kurang; dan
- Kualitas pelaksanaan Manajemen ASN perlu ditingkatkan.

k. Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama pada urusan pendidikan dan pelatihan adalah adanya kesenjangan kompetensi ASN antara kondisi saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain disebabkan oleh:

- Belum optimalnya kompetensi ASN dalam bidang teknis umum, substantif dan pemerintahan;
- Belum optimalnya kompetensi ASN dalam bidang kompetensi dasar, kepemimpinan, manajemen dan kompetensi fungsional;
- Belum optimalnya penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pengendalian mutu serta penunjang kediklatan; dan
- Belum tersedianya analisis kebutuhan diklat jabatan dan fungsional.

1. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan utama pada urusan penelitian dan pengembangan adalah kebijakan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya didasari hasil penelitian kemudian, belum optimalnya penerapan inovasi pada perangkat daerah antara lain disebabkan oleh:

- Rencana kerja litbang yang belum tuntas;
- Kurangnya komitmen OPD dalam berinovasi;
- Kebutuhan akan pengembangan triple helix dengan pihak swasta dan universitas; dan
- Kebutuhan koordinasi dengan BRIN.

2.3.1.5 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Masih belum Optimalnya Pengimplementasian SAKIP Daerah, dimana kurangnya koordinasi dan tindaklanjut hasil SAKIP yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB belum sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Pemberlakuan atas UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih harus ditindaklanjuti dengan pendataan dan pengkajian terhadap produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) yang terdampak. Kemudian atas tindaklanjut tersebut dilakukan penyederhanaan produk hukum daerah.

Dalam menjalankan Kerjasama daerah pemerintah Provinsi Banten belum maksimal dilakukan hanya sebatas Kerjasama dalam negeri saja. Rumusan bahan kebijakan yang dihasilkan dari beberapa kajian, koordinasi, dan harmonisasi pada tahun sebelumnya tidak seluruhnya dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan paket kebijakan berupa peraturan daerah, peraturan Gubernur, atau berbagai pedoman yang dibutuhkan pada bidang terkait. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan peta permasalahan, isu strategis, serta skala prioritas daerah, sehingga konstelasi permasalahan dan agenda kebijakan yang semula dijadikan pijakan sudah tidak relevan.

Optimalisasi kinerja BUMD yang dimiliki Pemprov Banten masih belum maksimal dan ini perlu kolaborasi antara Biro ekonomi dan Administrasi pembangunan dengan BUMD.

b. Sekretariat DPRD

Permasalahan pada Sekretariat DPRD adalah masih belum optimalnya fasilitasi dukungan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.1.6 Unsur Pengawasan

Permasalahan utama pada urusan pengawasan adalah belum optimalnya maturitas SPIP dan belum optimalnya pencegahan korupsi disebabkan antara lain oleh:

- Belum optimalnya pelaksanaan audit, reviu, pendampingan monitoring dan tindak lanjut;
- Masih rendahnya tingkat penyelesaian kerugian negara;
- Belum terimplementasikannya Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Unit Kerja yang bersentuhan dengan pelayanan publik;
- Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan masih belum memadai dibanding dengan jumlah objek pengawasan (Perangkat daerah, desa dan kelurahan serta objek lainnya); dan
- Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan juga belum memadai.

2.3.1.7 Unsur Pemerintahan Umum

Permasalahan pada Badan Kesatuan bangsa dan politik adalah masih kurangnya Kegiatan dalam mendukung IDI pada tingkat capaian Aspek Kebebasan belum dilaksanakan secara optimal dari angka capaian Aspek Kebebasan di Provinsi Banten yaitu sebesar 74,28 poin, lebih rendah dari angka capaian Aspek Kebebasan Nasional yaitu sebesar 80,30 poin; Kegiatan dalam mendukung tingkat capaian Aspek Kesenjangan juga belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan dilihat dari angka capaian Aspek Kesenjangan di Provinsi Banten yaitu sebesar 63,72 poin.

Pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak sesuai dengan UU nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, untuk itu pemerintah perlu penyiapan terhadap aspek fasilitas pemerintahan

dan keamanan, untuk mendukung kesuksesan Pemilu serentak di 2024.

2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan kondisi terkini yang dipengaruhi oleh situasi baik nasional dan global, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Daya Saing sumber daya manusia yang kompetitif;
2. Sumber daya ekonomi unggulan dan potensial yang berdaya ungkit;
3. Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup berkelanjutan; dan
4. Reformasi birokrasi dan demokrasi yang harmonis.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

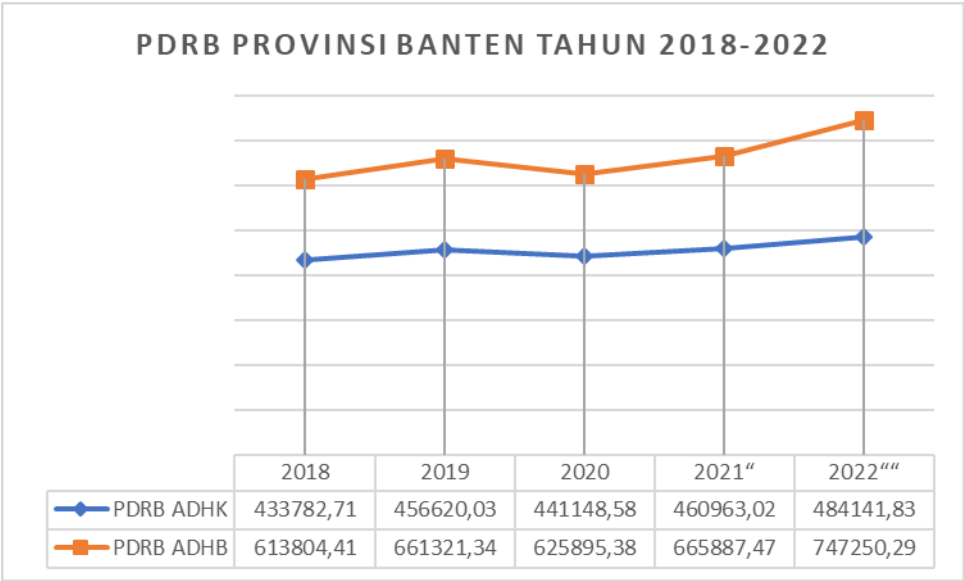
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2018-2022

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Tahun 2024 sesuai dengan RPD 2023-2026 adalah dalam rangka pemantapan daya saing perekonomian dengan terus meningkatkan kualitas penunjang infrastruktur perekonomian dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB Provinsi Banten menggambarkan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi setiap tahunnya. Dari gambar 3.1 terlihat bahwa PDRB Banten cukup besar di angka 747.250,29 miliar pada Tahun 2022 atau meningkat 81.362,82 miliar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB Banten setiap tahunnya menggambarkan baiknya pertumbuhan ekonomi Banten yang disumbangkan oleh berbagai sektor yang ada di Provinsi Banten.

PDRB digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah, bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa, bahan analisis produktivitas secara sektoral serta alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. Dari angka PDRB kita bisa melihat bahwa ekonomi Banten selalu tumbuh bahkan pertumbuhannya cukup akseleratif salah satu tandanya adalah pertumbuhan ekonomi Banten selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya Banten merupakan Provinsi yang mampu tumbuh dengan baik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang mungkin saja perlu usaha lebih agar ekonominya tumbuh.



Gambar 3. 1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Banten Tahun 2018-2022
(SIPD Provinsi Banten, 2023)

Perhitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010.

Dalam menghitung PDRB, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan berbeda. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Tabel 3.1 PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (LU) merupakan perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa dari sisi produksi yang terdiri dari 17 LU, industri pengolahan merupakan LU dengan PDRB terbesar di Provinsi Banten. Maka tidak salah jika Provinsi Banten dikatakan sebagai provinsi industri karena proporsi terbesar PDRB berasal dari industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, real estate, dan transportasi. LU pertanian baru mampu duduk di peringkat 6 penyumbang PDRB Provinsi Banten salah satu penyebabnya adalah masih terlalu pendeknya rantai pasok LU pertanian sehingga nilai tambah yang dihasilkan lebih rendah daripada nilai tambah potensial yang sebenarnya dimiliki.

Tabel 3. 1
PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (LU) di Provinsi Banten (miliar rupiah), Tahun 2018-2022

Lapangan <i>Usaha/Industry</i>	2018	2019	2020	2021	2022
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	191862,88	203249,81	195331,62	209815,06	227675,91
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycle</i>	76660,79	84199,74	83240,61	85898,99	93547,29
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	65452,94	73327,25	71551,76	82113,95	91202,80
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	67325,20	71188,56	40458,22	41693,88	71165,36
L Real Estate/ <i>Real Estate Activities</i>	46579,27	52186,16	54258,20	56397,21	60289,40
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	35573,82	37018,35	38998,27	40199,75	44050,68
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	21695,57	23278,14	25200,74	26574,75	28218,24
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	18929,68	19713,72	20300,42	22323,34	25307,29
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	21129,74	23716,27	24495,93	24346,20	24581,06
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	14632,81	15852,96	15154,34	15890,83	17447,46
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	12301,12	13657,22	14210,48	14457,87	15227,22
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	12770,04	12035,57	10504,20	12140,42	13016,30
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	10018,08	11149,97	10861,69	11163,47	12163,45
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Human Health and Social Work Activities	7444,37	8369,18	9183,12	10298,33	10687,98
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6674,14	7492,68	7325,21	7329,42	7914,75
B Pertambangan dan Penggalan/ <i>Mining and Quarrying</i>	4272,13	4375,91	4269,64	4658,86	4142,44
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang <i>Water Supply; Sewerage, Waste Managemet, and Remediation Activities</i>	481,83	509,83	550,95	585,16	612,68
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	613804,41	661321,34	625895,38	665887,47	747250,29

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2023

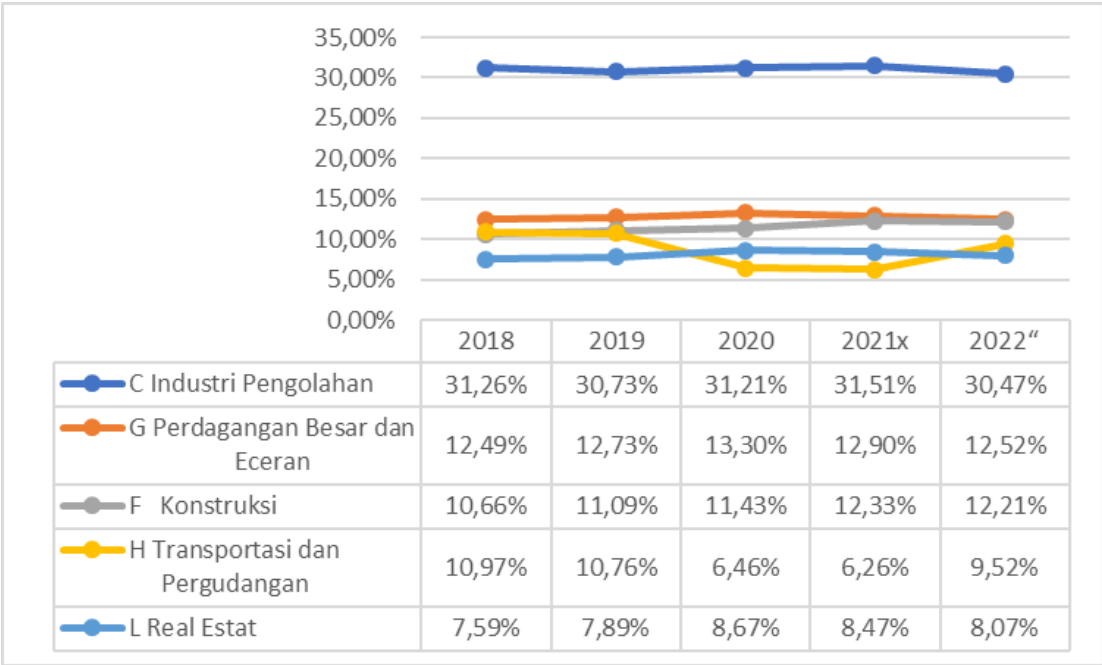
Dilihat lebih dalam ke sektor industri pengolahan, maka dari tabel di bawah bisa dilihat bahwa sektor industri di Banten terutama berasal dari Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional. Pada tahun 2017, Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik masih setara dengan industri kimia, tetapi pada Tahun 2021, industri kimia sudah jauh melesat meninggalkan industri barang logam. Angka ini menunjukkan bahwa ke depan Provinsi Banten bisa menyiapkan lebih banyak daya dukung terhadap industri kimia yang pertumbuhannya luar biasa.

Tabel 3. 2
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
 Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan di Provinsi Banten (miliar
 rupiah), Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2018	2019	2020	2021	2022
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	149425,06	154760,72	147538,56	155027,99	160615,99
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycle</i>	58614,23	62297,07	60481,98	61595,34	64030,67
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	42363,00	46048,00	44727,31	49561,84	51954,77
LReal Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	37260,63	40521,47	41391,71	42634,90	44509,24
JInformasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	24998,29	27244,33	29735,82	31371,53	33161,90
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	29068,52	29256,38	20871,02	22064,04	27949,96
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	23880,77	24408,33	25275,08	25416,58	26485,81
KJasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	12873,62	13134,12	13491,85	14243,52	14912,06
PJasa Pendidikan/ <i>Education</i>	13103,71	14111,91	14299,37	14140,83	13992,86
IPenyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	10664,40	11449,00	10865,79	11333,21	12249,58
OAdministrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>PublicAdministration and Defence; Compulsory Social Security</i>	7517,97	8109,26	8056,83	7990,33	8129,36
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	6535,99	7102,43	6716,94	6812,51	7198,00
QJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial <i>Human Health and Social Work Activities</i>	5249,40	5698,34	6125,81	6735,46	6857,86
M,NJasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	4458,98	4841,09	4627,21	4565,19	4732,95
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	4480,41	4317,96	3832,07	4318,93	4639,69
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	2871,46	2881,66	2640,63	2656,62	2208,48
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	416,27	437,98	470,59	494,19	512,65
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	433782,71	456620,03	441148,58	460963,02	484141,83

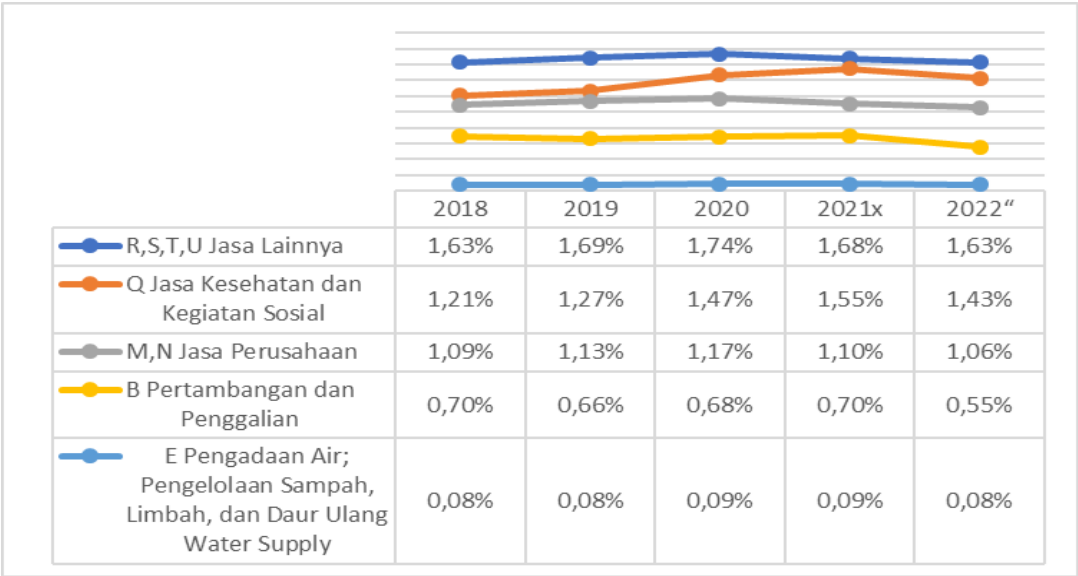
Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Pada Gambar 3.2 menunjukan bahwa dominasi sektor industri pengolahan di Provinsi Banten belum tergoyahkan dalam hal kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Banten. Bahkan sektor transportasi dan pergudangan kontribusinya menurun dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini sebenarnya memiliki potensi negatif karena ekonomi Banten bisa dikatakan terlalu bergantung pada sektor industri pengolahan. Jika industri pengolahan mengalami hal yang tidak diinginkan, maka dampaknya akan sangat terasa bagi perekonomian Banten. Sehingga perlu upaya dari pemerintah Provinsi Banten agar terjadi diversifikasi kontributor lapangan usaha di Provinsi Banten sehingga jika terjadi hal yang buruk terhadap sektor industri, sektor lainnya bisa membackup perekonomian Banten.



Gambar 3.2
Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Provinsi Banten Tahun 2018-2022
(Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022)

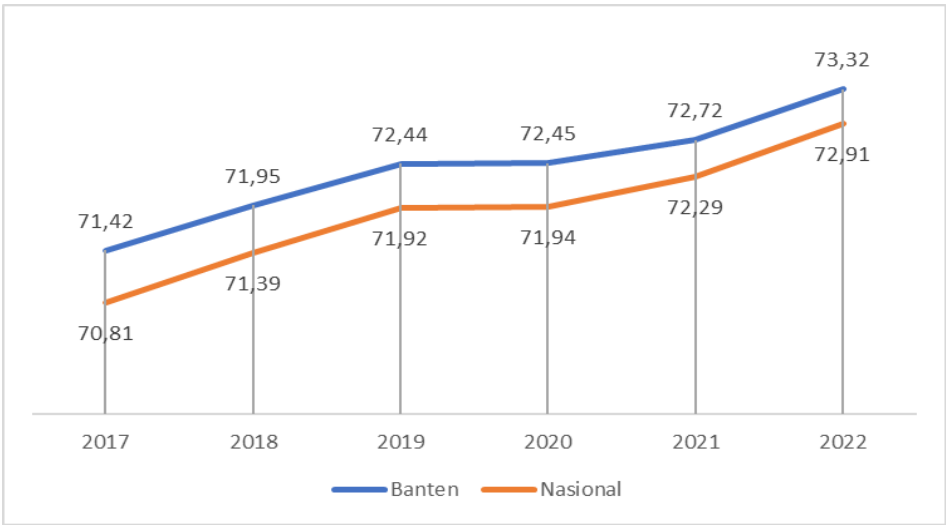
Sektor yang memiliki kontribusi terendah bagi perekonomian Banten adalah sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Padahal pada tingkat nasional, terdapat gerakan ekonomi sirkular yang bisa jadi meningkatkan kontribusi sektor ini. Penerapan ekonomi sirkular mencakup pengelolaan sumber daya alam pada lima sektor prioritas (Elektronik, Makanan dan Minuman, Tekstil, Konstruksi, dan Retail), yang berfokus pada kemasan plastik) berpotensi meningkatkan PDB pada kisaran Rp 593 triliun hingga Rp 638 triliun, menciptakan 4,4 juta lapangan pekerjaan, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 126 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030.



Gambar 3. 3
Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Provinsi Banten
Tahun 2018-2022
(Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022)

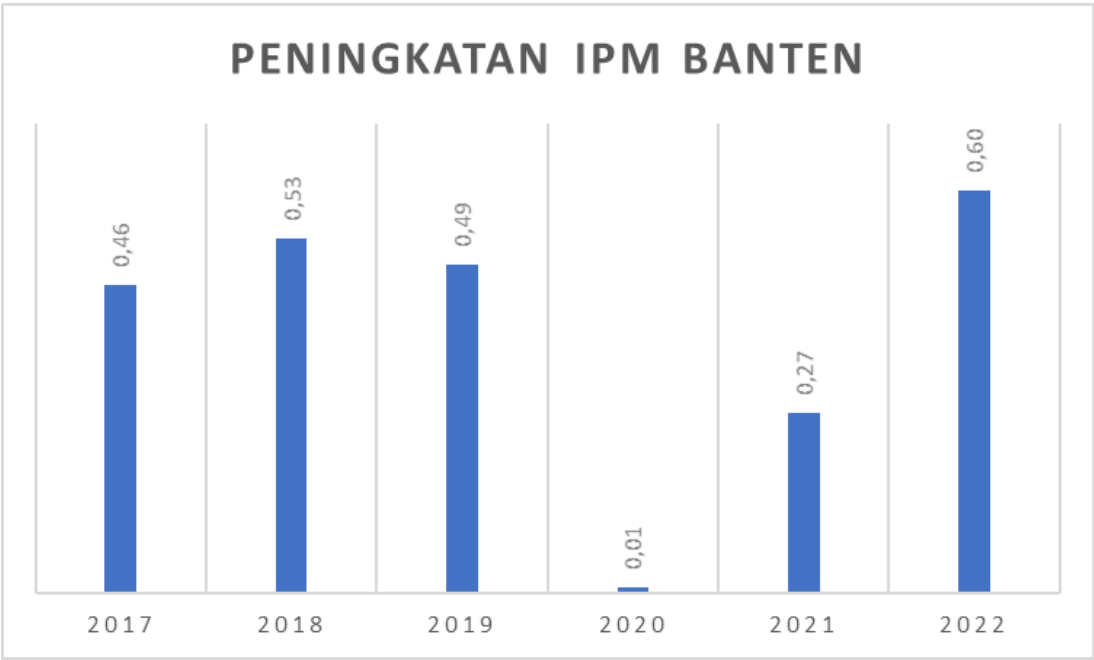
3.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM Banten secara umum dalam beberapa tahun terakhir selalu meningkat yang artinya terjadi peningkatan kualitas hidup di Provinsi Banten dan mengindikasikan adanya perbaikan capaian pembangunan manusia.



Gambar 3. 4
IPM Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2017-2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

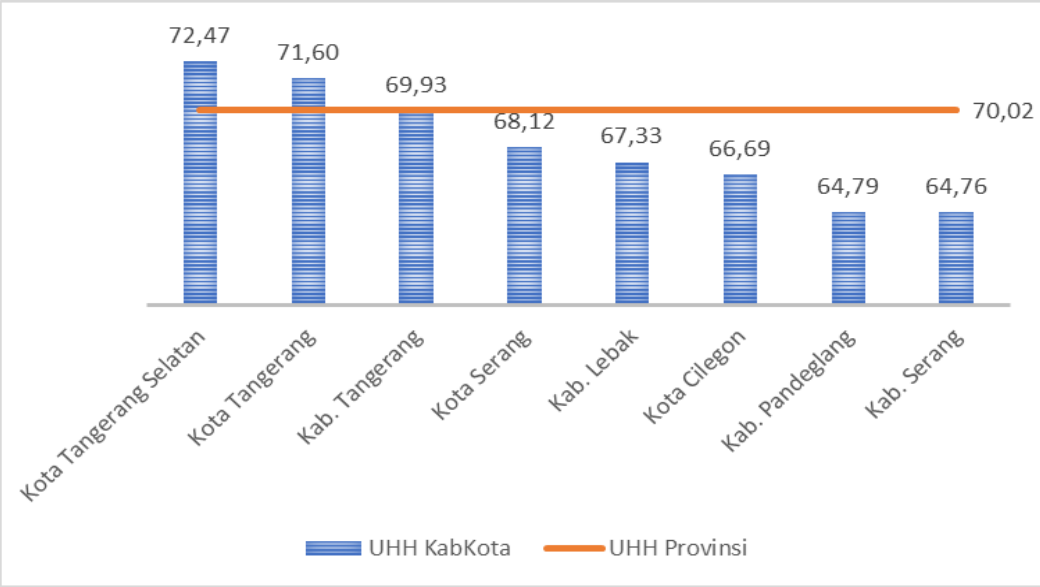
Akan tetapi, peningkatan IPM di Provinsi Banten tidak begitu akseleratif karena dari tahun ke tahunnya hanya tumbuh di bawah satu poin, bahkan pada tahun 2020 tercatat hanya meningkat 0,01 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya pengungkit dalam hal peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Banten sehingga kualitas hidup masyarakat Banten dapat meningkat. IPM Provinsi Banten juga belum mampu menembus kategori sangat tinggi.



Gambar 3. 5
Peningkatan Nilai IPM Provinsi Banten Tahun 2017-2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

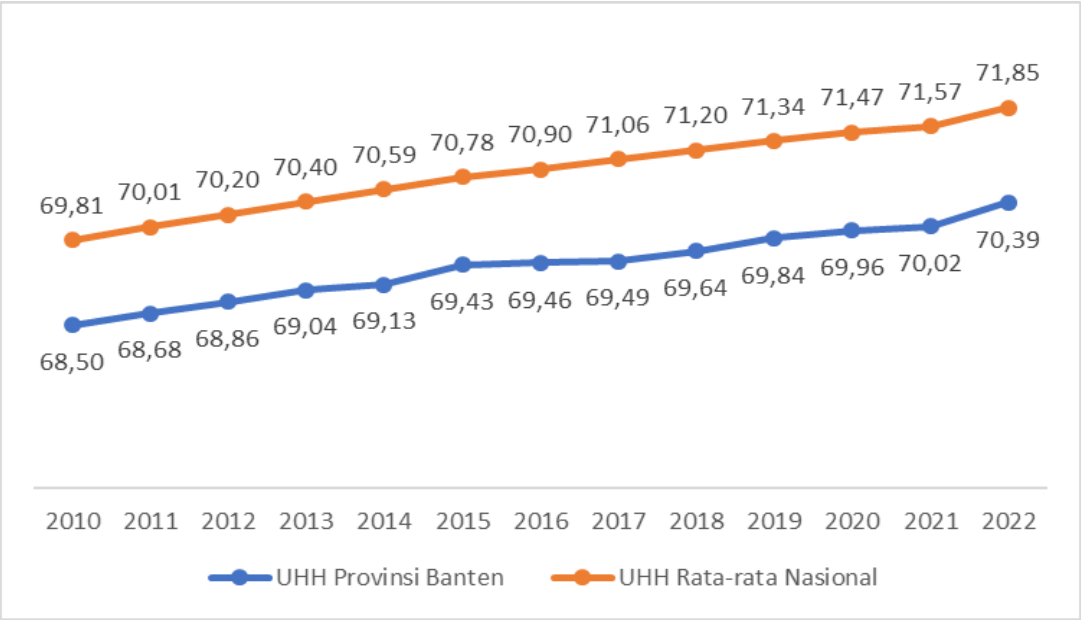
A. IPM Aspek Kesehatan

IPM aspek kesehatan dapat dilihat dari angka Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH di Provinsi Banten pada Tahun 2022 adalah 70,39 yang artinya bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup hingga 70,30 Tahun.



Gambar 3. 6
UHH Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

UHH di Provinsi Banten dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan yang artinya terjadi perbaikan terutama di aspek kesehatan sehingga bayi yang baru lahir memiliki peluang bertahan hidup semakin panjang. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan UHH rata-rata nasional yang mencapai angka 71,85 tahun, maka Pemerintah Provinsi Banten harus melakukan kerja ekstra agar bayi yang baru lahir di Provinsi Banten setidaknya memiliki peluang bertahan hidup di atas rata-rata nasional.

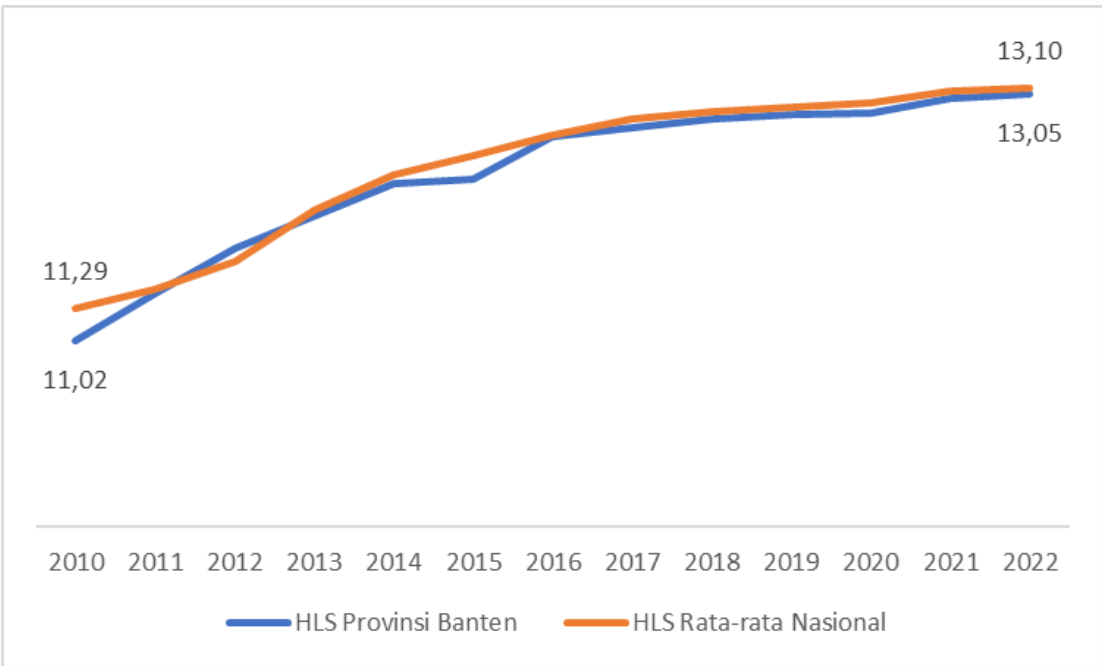


Gambar 3. 7
Perbandingan UHH Provinsi Banten dan Rata-rata Nasional
Tahun 2010-2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

B. IPM Aspek Pendidikan

- Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Banten pada tahun 2022 sebesar 13,05 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,05 tahun atau setara dengan Diploma I.

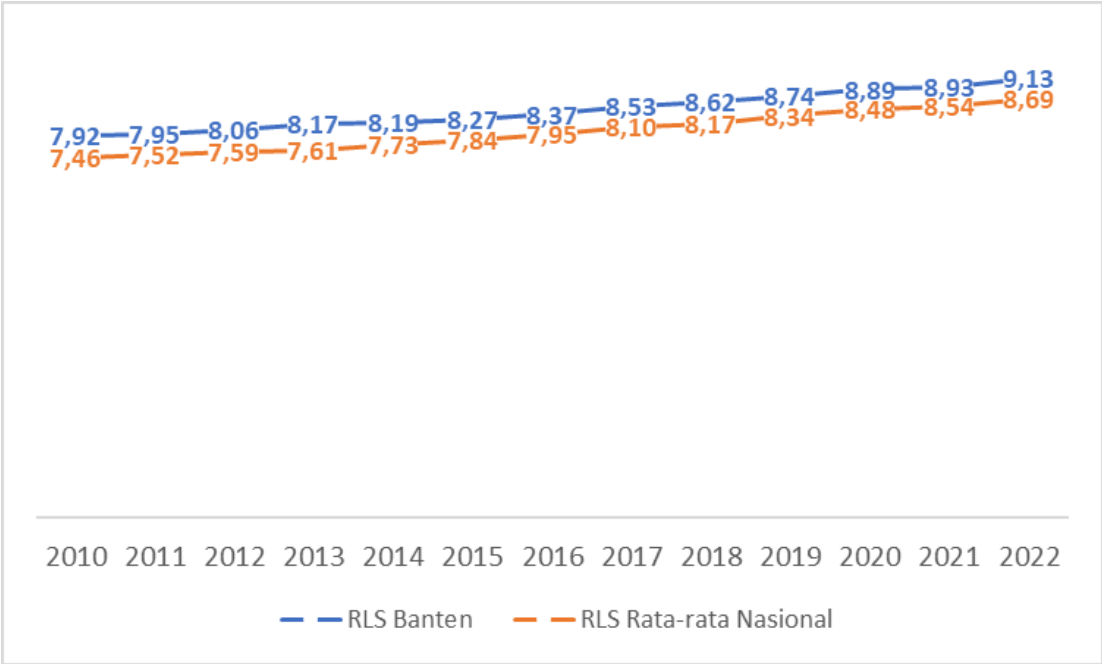


Gambar 3. 8
HLS Provinsi Banten dan HLS Rata-rata Nasional Tahun 2010-2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat

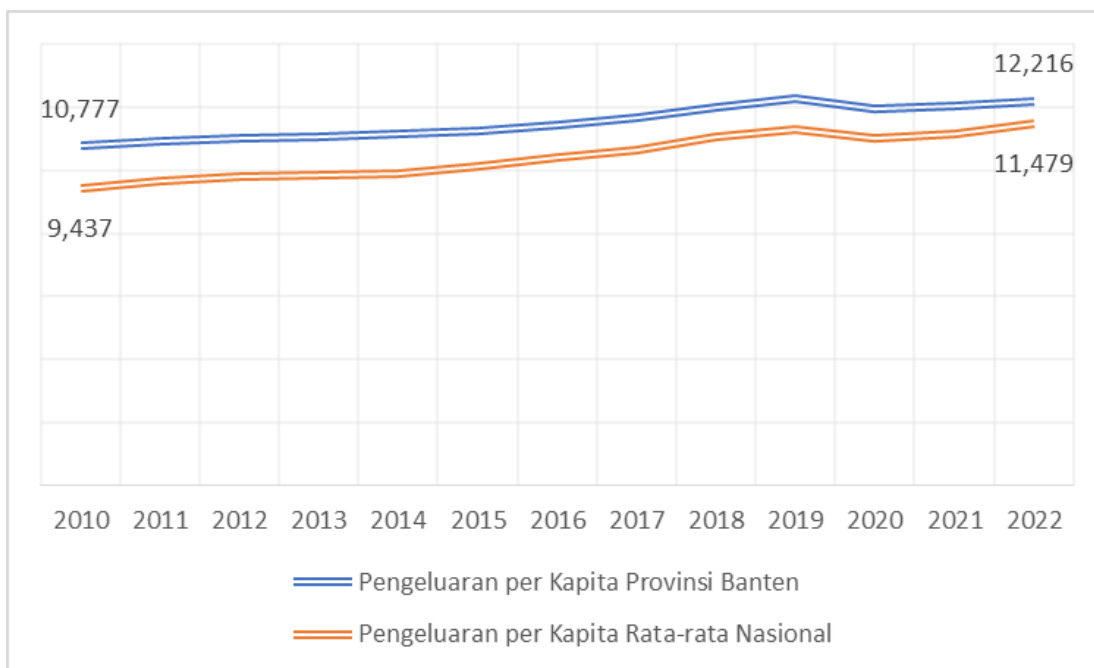
dalam suatu wilayah. RLS Banten pada tahun 2022 sebesar 9,13 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Banten yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,13 tahun atau hampir menamatkan kelas X.



Gambar 3. 9
RLS Provinsi Banten dan Rata-rata Nasional Tahun 2010-2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

1IPM Aspek Pengeluaran

IPM aspek pengeluaran dilihat dari Pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Penghitungan paritas daya beli mengacu pada Kota Jakarta Selatan, sementara tahun rujukan adalah 2012. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.



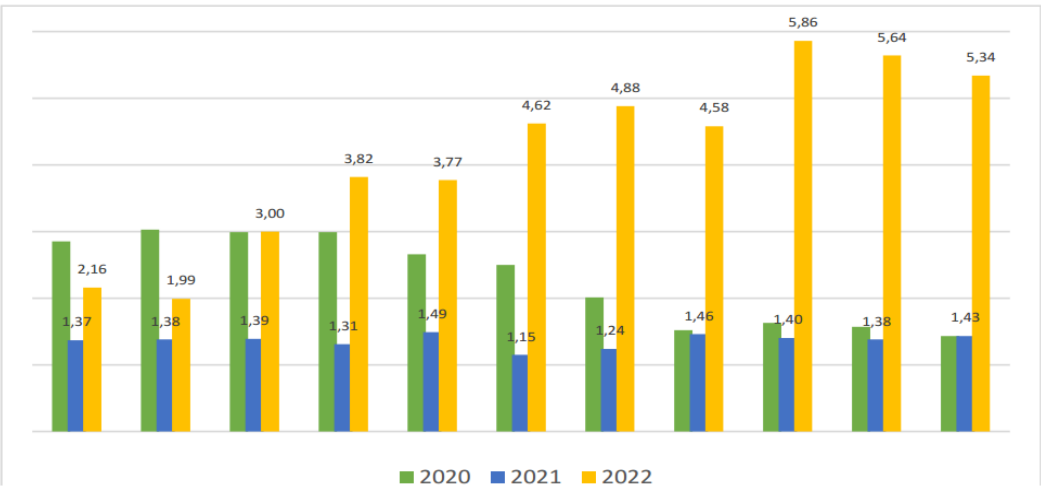
Gambar 3. 10
 Pengeluaran Per Kapita Provinsi Banten dan Nasional
 Tahun 2010-2022
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran per kapita Banten pada tahun 2022 sebesar Rp 12.216.000 artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk Banten selama setahun adalah Rp 12.216.000.

- Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi yang rendah terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak Pandemi Covid-19, pasokan yang memadai, dan sinergi

kebijakan antar lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Inflasi yang terjaga adalah di kisaran 3-4%. Dalam beberapa bulan terakhir di Tahun 2022, inflasi Banten sudah melewati angka 4%. Hal ini menjadi alarm agar Pemerintah Provinsi Banten segera melakukan langkah-langkah untuk menekan laju inflasi agar tidak jauh melebihi 4%. Di beberapa Provinsi lain di Indonesia, inflasi sudah jauh melewati angka 4% yang menandakan bahwa sejauh ini inflasi di Provinsi Banten relatif terjaga.

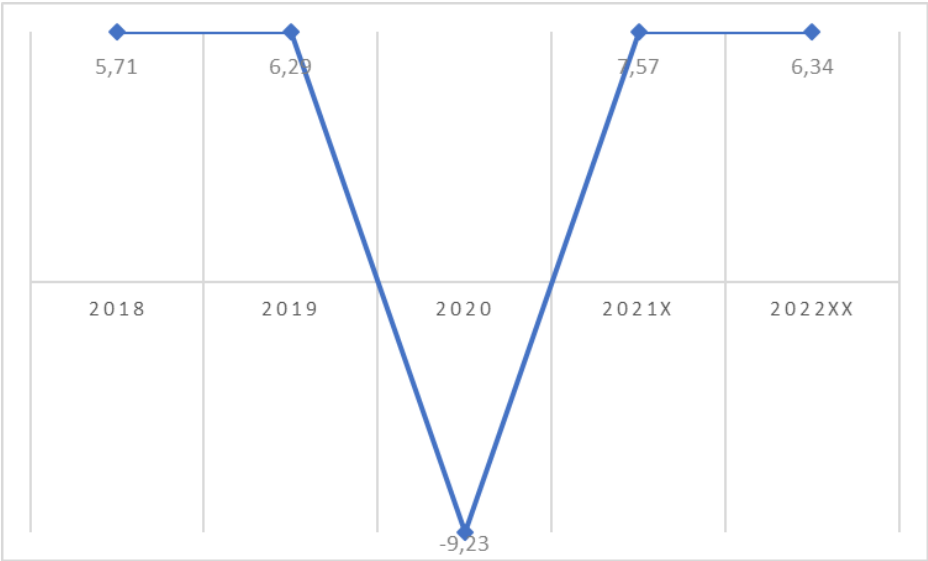


Gambar 3.11
 Inflasi Bulan Januari-November Tahun 2020-2022
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

3.1.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Semakin kecil nilai koefisien ICOR, semakin efisien perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu.

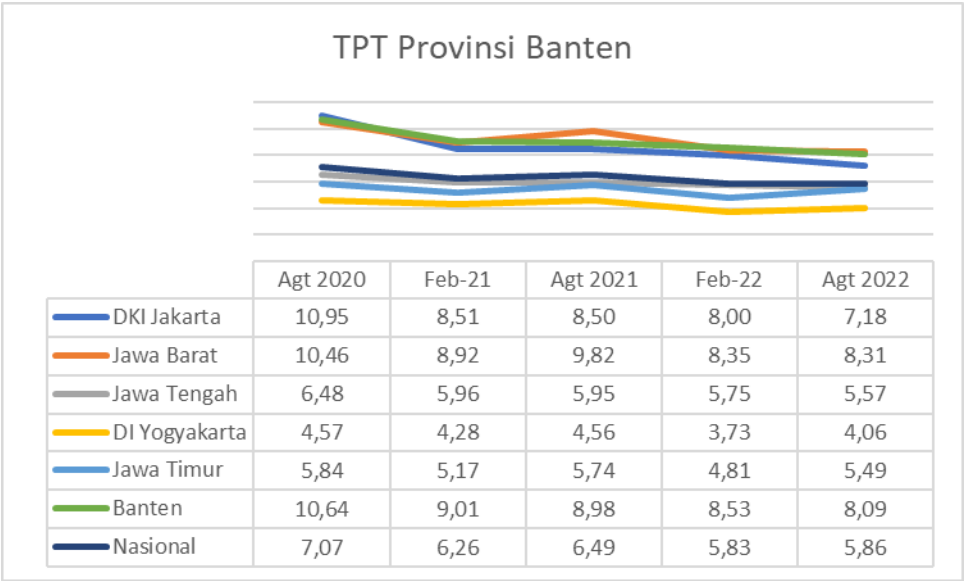
Dari gambar dapat dilihat bahwa secara umum, dalam lima tahun terakhir, ICOR Banten memiliki kecenderungan terus meningkat. Ada sejumlah faktor yang menjadi pemicu tingginya ICOR, antara lain rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tingginya biaya logistik, reformasi birokrasi berjalan belum optimal. Pada tahun 2020, ICOR Banten negatif terjadi karena output pada tahun 2020 lebih kecil dari pada tahun sebelumnya.



Gambar 3. 12
Perkembangan ICOR Banten, 2017-2021
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

3.1.5 Ketenagakerjaan

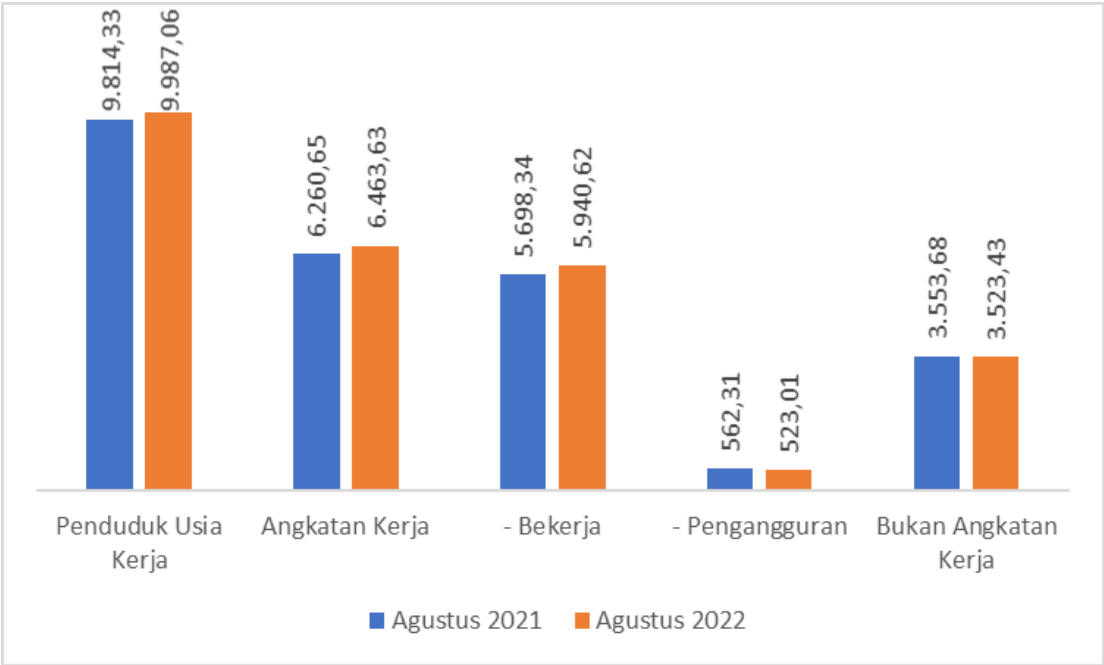
Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja di Provinsi Banten pada Agustus 2022 adalah sebanyak 9.987.060 orang atau meningkat 172.730 orang dibandingkan setahun yang lalu. Peningkatan penduduk usia kerja ini adalah sebuah sinyal positif bahwa penduduk usia produktif di Provinsi Banten terus bertambah guna mendorong kebutuhan tenaga kerja di Provinsi Banten. Dari 9 juta orang yang termasuk ke dalam penduduk usia kerja, terbagi lagi ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.



Gambar 3. 13
Perkembangan TPT Provinsi Banten Dibandingkan dengan TPT di Pulau Jawa dan TPT Rata-rata Nasional, Agustus 2020-Agustus 2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Angkatan kerja di Provinsi Banten pada Agustus 2022 adalah sebanyak 6.463.630 orang atau meningkat 202.980 orang dibandingkan tahun lalu. Peningkatan yang luar biasa ini di satu sisi merupakan hal positif karena tersedianya tenaga kerja guna salah satu faktor produksi dalam kegiatan perekonomian. Akan tetapi, di sisi lain, peningkatan ini juga memunculkan tantangan apakah pasar lapangan kerja siap untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja tersebut. Sejauh ini pertumbuhan angkatan kerja tersebut masih tertangani salah satunya tercermin dari bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja dan di saat yang bersamaan berkurangnya penduduk yang menganggur.

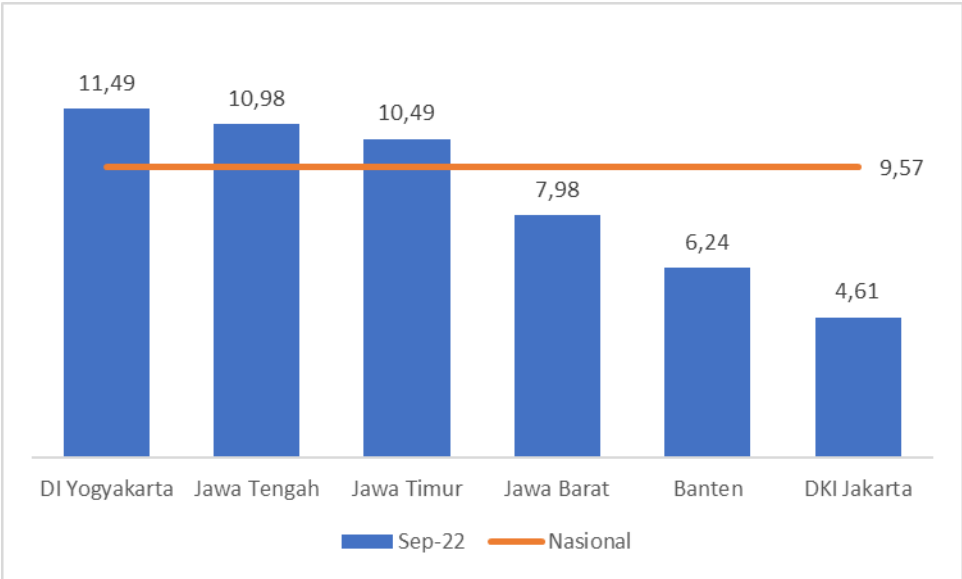
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Penduduk Banten yang bekerja pada Agustus 2022 adalah sebanyak 5.940.620 orang atau bertambah 242.270 orang, sedangkan penduduk Banten yang menganggur adalah sebanyak 523.010 orang atau berkurang sebanyak 39.300 orang.



Gambar 3.14
Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Bekerja, Pengangguran, dan Bukan
Angkatan Kerja di Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

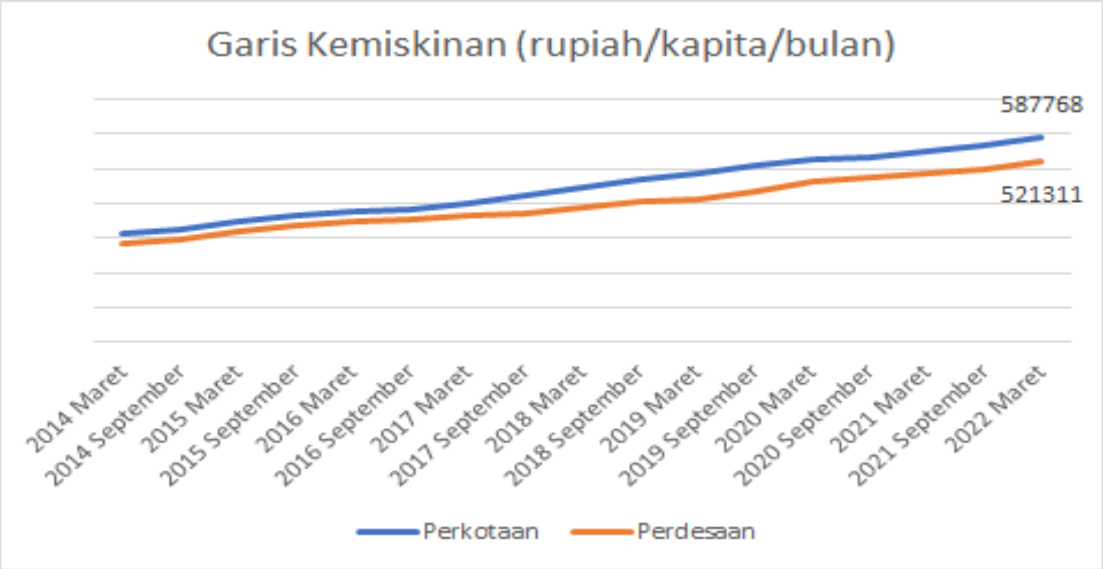
3.1.6 Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.



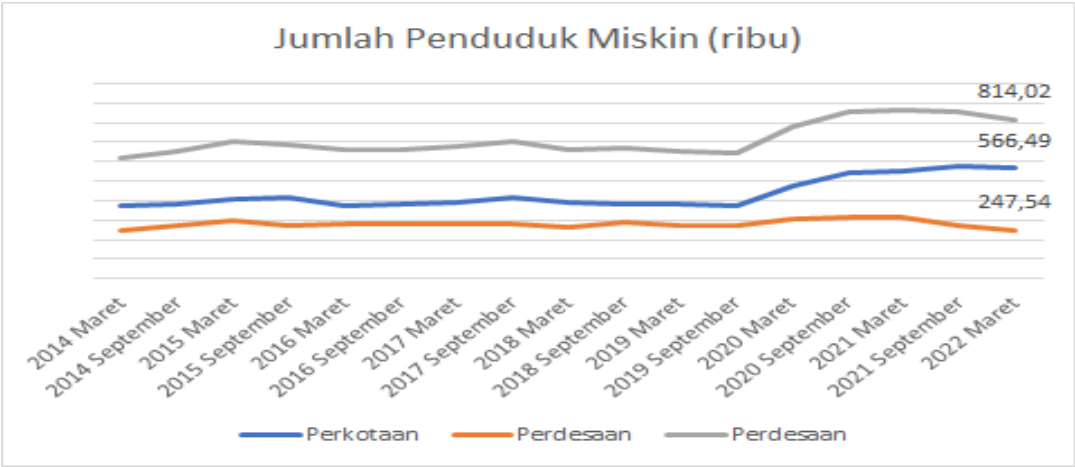
Gambar 3.15
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Banten dibandingkan dengan Provinsi di Pulau Jawa dan Rata-rata Nasional Tahun 2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Gambar 3.14 menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu GK terus meningkat seiring dengan meningkatnya berbagai kebutuhan baik makanan ataupun non makanan. Usaha untuk menekan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin juga mendapatkan tantangan yang cukup berat karena harus berusaha untuk menaikkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang terus meningkat. Lebih dari itu, pemerintah juga harus menjaga agar penduduk yang hanya berada sedikit di atas GK untuk tidak jatuh ke bawah GK. Gambar 3.14 juga memperlihatkan bahwa jarak GK antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan perdesaan semakin menjauh. Hal ini terutama disebabkan karena biaya non makanan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Biaya-biaya tersebut misalnya perbedaan harga perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya di perkotaan dengan perdesaan yang cukup signifikan.



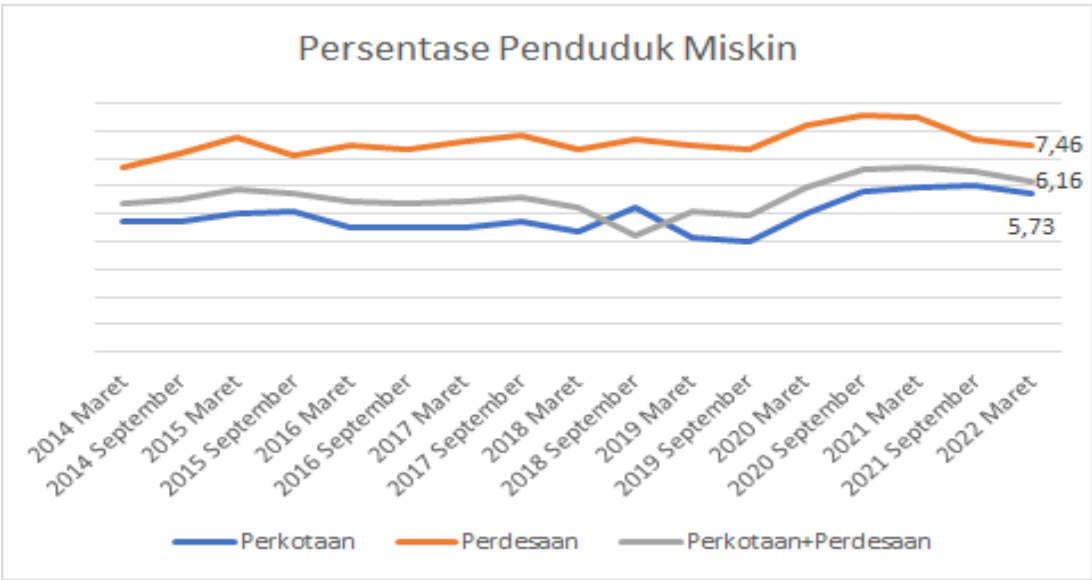
Gambar 3.16
Garis Kemiskinan dan Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Banten Tahun
2014-2021
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Provinsi Banten memiliki tantangan yang cukup berat karena berdasarkan data pada gambar 3.15 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin sejak September 2019 mengalami peningkatan yang luar biasa di mana sebelum September 2019, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten masih di angka 600-an ribu sedangkan dari September 2019 hingga sekarang, jumlah penduduk miskin sudah mencapai angka 852 ribu. Peningkatan yang luar biasa ini diperparah dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang memiliki dampak negatif ke berbagai sektor di Provinsi Banten. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten terutama disumbangkan oleh penduduk miskin yang tinggal di perkotaan. Di saat jumlah penduduk miskin di perdesaan memiliki tren positif, jumlah penduduk di perkotaan malah sebaliknya.



Gambar 3.17
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2014-2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

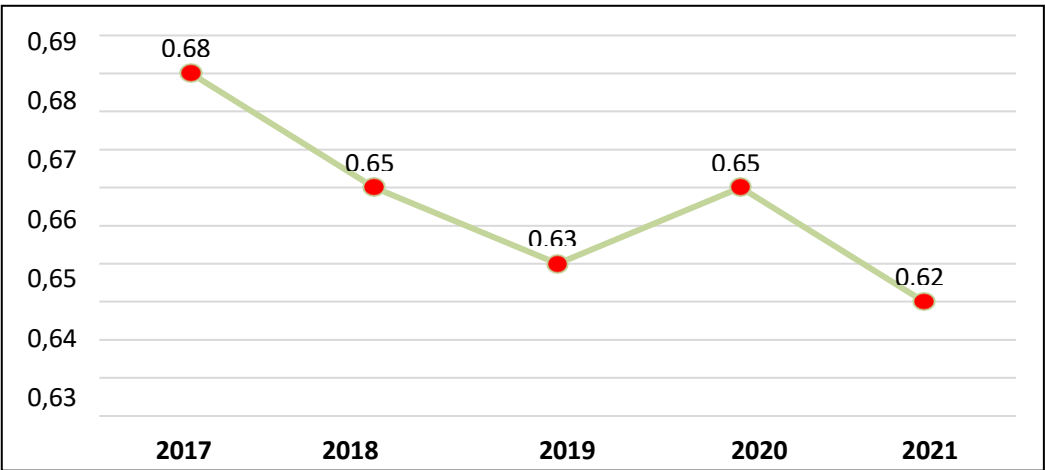
Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kegunaan angka ini adalah untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Dilihat dari gambar 3.16, persentase kemiskinan Provinsi Banten juga sedang di angka yang tidak terlalu menggembirakan karena berada di angka 6% di mana di tahun-tahun sebelumnya berada di angka 5%. Ada yang menarik terkait dengan angka kemiskinan di Provinsi Banten di mana jika melihat angka penduduk miskin, maka yang terbanyak adalah di perkotaan, tetapi jika melihat angka persentase, maka angka tertinggi ada di perdesaan.



Gambar 3.18
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

3.1.7 Ketimpangan Regional

Indeks Williamson merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah. Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Dalam penghitungan ini, ketimpangan dilihat berdasarkan perbandingan PDRB sebagai *proxy* produksi yang dihasilkan suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk. Angka Indeks Williamson dalam lima tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun yang artinya ketimpangan berkurang dari tahun ke tahunnya walaupun memang belum begitu signifikan. Pada tahun 2020 angka Indeks Williamson bahkan sempat meningkat akibat dari dampak Pandemi Covid-19.



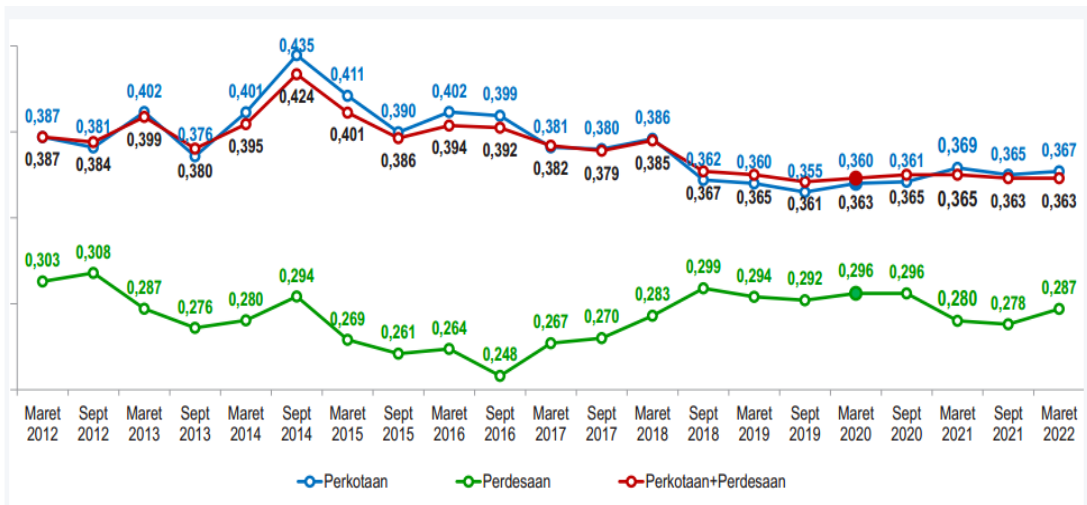
Gambar 3.19
Indeks Williamson Tahun 2017-2021
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Mulai beroperasinya jalan Tol Serang-Panimbang seksi 1 yakni Serang-Rangkasbitung serta mulai dibangunnya seksi 2 (Rangkasbitung-Cileles) diharapkan mampu menumbuhkan minat investor menanamkan modalnya untuk membuka usaha ekonomi di wilayah Rangkasbitung dan Pandeglang. Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi di kedua wilayah tersebut, diharapkan kontribusi PDRB meningkat sehingga dapat menurunkan indeks williamson di Provinsi Banten.

3.1.8 Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks atau rasio ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara yang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Rasio Gini Provinsi Banten yang digambarkan dengan garis merah menunjukkan stagnasi dalam beberapa tahun terakhir di mana rasio gini Provinsi Banten berkisar antara 0,35-0,36. hal ini mengindikasikan bahwa perlu program kegiatan yang lebih kuat dalam menekan angka rasio gini sehingga dalam beberapa tahun ke depan, rasio gini bisa turun secara lebih signifikan. Jika dilihat perbedaan antara rasio gini di perkotaan dan perdesaan, maka bisa dilihat bahwa ketimpangan terjadi lebih besar di perkotaan sehingga program kegiatan untuk menekan angka ketimpangan bisa difokuskan di daerah perkotaan.

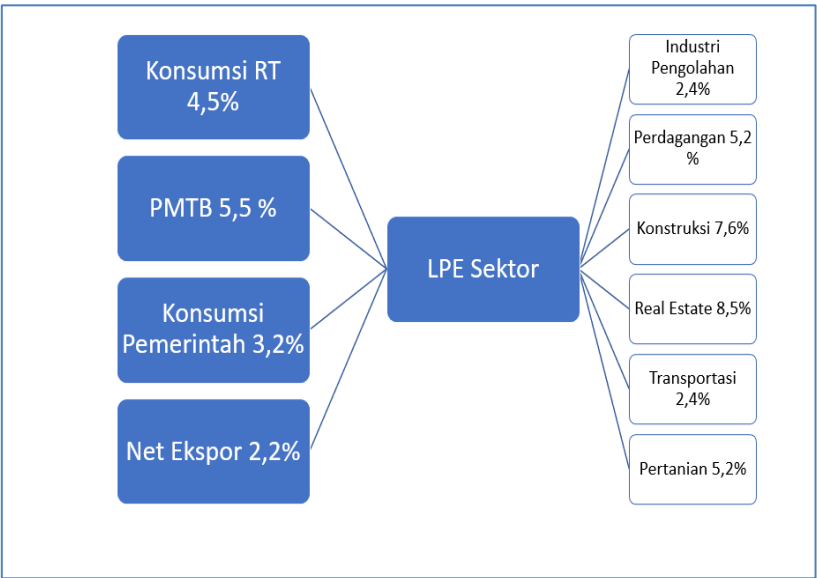


Gambar 3.20
Rasio Gini Provinsi Banten Tahun 2012-2022
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Penanganan Pandemi Covid-19 serta cakupan vaksinasi yang tinggi terbukti mampu mengendalikan pandemi covid-19 baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan berangsur membaiknya kondisi perekonomian, diharapkan penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat dapat terwujud.

3.1.9 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023 dan 2024

Kondisi perekonomian tahun 2023 dan tahun 2024 diproyeksikan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dengan sudah tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2022 dan sudah mencapai 5%. Selain itu berbagai lembaga internasional seperti *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF), *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memperkirakan ekonomi global pada 2023 akan tumbuh pada kisaran 5%. Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional serta nasional dan melihat perkembangan pandemi covid-19 maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,33 %. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan asumsi pertumbuhan positif sektor industri pengolahan yang memberikan dominasi sumbangsih pada perekonomian Banten. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mampu mencapai 5%.



Proyeksi kinerja perekonomian Banten didasarkan pada beberapa asumsi:

Faktor Pendorong:

1. Peningkatan daya saing untuk produk baja olahan domestik seiring pencabutan kebijakan tax rebate Tiongkok untuk komoditas baja;
2. Mulai beroperasinya sejumlah pabrik baru dan peningkatan kapasitas produksi besar pada industri baja dan petrokimia di Provinsi Banten;
3. Berlanjutnya pembangunan beberapa PSN di wilayah Banten, seperti proyek jalan tol dan bendungan;
4. Akselerasi penjualan ekspor untuk produk baja berupa Hot Rolled Coil dengan level margin yang lebih baik ke negara non tradisional;
5. Konsumsi RT berpotensi meningkat sejalan dengan menguatnya daya beli masyarakat dan mobilisasi, serta didukung oleh berlanjutnya stimulus serta relaksasi perekonomian yang melanjutkan tren peningkatan;
6. Pemulihan kinerja korporasi;
7. TPT lebih rendah dibandingkan periode sebelum Covid-19;
8. Memastikan ketersediaan lapangan kerja dan dialog untuk mempertahankan industri padat karya di Banten;
9. Sektor Pertanian potensial untuk menyerap tenaga kerja, didukung oleh ketersediaan lahan pertanian. Langkah yang ditempuh pemda melalui pembangunan Jalan Usaha Tani dan Irigasi Pertanian;
10. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi – Pro Job, yaitu penguatan efektivitas MOU Pendidikan Vokasi;
11. Banten penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, didukung oleh banyaknya Industri skala besar dan menengah;
12. Insentif ataupun kemudahan perizinan maupun fasilitas pendukung investasi lainnya;
13. Adanya kemajuan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten;

14. Di Pulau Jawa, IPM Provinsi Banten pada tahun 2022 berada di posisi tertinggi ketiga. Secara nasional, berada di posisi delapan dan selalu tercatat lebih tinggi dari angka nasional;
15. Upaya meningkatkan RLS antara lain penggratisan biaya pendidikan sekolah dasar, menengah, dan khusus, pembangunan USB, RKB, dan pemberian BOSDA;
16. Upaya mendorong AHH dengan memberikan dukungan biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pembangunan Rumah Sakit beserta infrastrukturnya (RSUD Banten, RSUD Labuan, RSUD Ciligrang, RS Jiwa dan Ketergantungan Obat), pembentukan tematik holistik penanggulangan stunting, dan pembentukan tim penanggulangan stunting;
17. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan;
18. Mengurangi jumlah pengangguran khususnya yang berada di wilayah Banten selatan. Upaya yang ditempuh antara lain pengutan pendidikan vokasi, penguatan pelatihan tenaga kerja, revitalisasi BLKI. Sementara untuk mengatasi ketimpangan dilakukan dengan pembangunan infrastruktur konektivitas;
19. Ekspektasi inflasi yang semakin terkendali pasca penetapan berbagai kebijakan pendukung;
20. Sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah yang terjaga dengan baik berbagai kebijakan dan program nyata Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga harga di level stabil.

Faktor Penahan:

1. Krisis energi yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku;
2. Penerapan berbagai kebijakan dalam negeri di tengah ketidakpastian global dapat mendorong peningkatan harga bahan baku komoditas dunia dan berpotensi menahan konsumsi masyarakat;

3. Pergeseran bentuk pengeluaran masyarakat dari kebutuhan leisure ke non- leisure serta kecenderungan masyarakat berpendapatan tinggi yang masih menahan konsumsi;
4. Potensi risiko perpindahan industri ke provinsi lain dikarenakan Upah Minimum Regional yang lebih rendah;
5. Belum optimalnya penyelarasan (matching) antara kebutuhan Industri dengan kurikulum pendidikan atau pelatihan SDM;
6. Perbedaan antara kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Industri dengan kompetensi para pencari kerja;
7. Rendahnya daya saing pekerja Banten (mayoritas pekerja yang berpendidikan SD ke bawah);
8. Besarnya jumlah penduduk migran yang datang ke Provinsi Banten untuk mencari pekerjaan dengan tingkat keterampilan dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada relatif tingginya Upah Minimum Regional (UMR) dan adanya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
9. Dari 729 SMK (81 Negeri dan 648 Swasta), hanya 281 sekolah yang berorientasi industry;
10. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, by name by address untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;
11. Belum optimalnya orkestrasi kebijakan yang diambil oleh setiap Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk dapat secara simultan mengatasi kemiskinan di masing-masing kota/Kabupaten;
12. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, by name by address untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;
13. Belum optimalnya orkestrasi kebijakan yang diambil oleh setiap Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk dapat secara simultan mengatasi kemiskinan di masing-masing kota/Kabupaten.

Tabel 3. 3
 Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun
 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2023	2024
1.Pertumbuhan Ekonomi				
a.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,70 - 5,20	4,83 - 5,33
b.	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp	500.662,7	518.185,9
c.	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp	723624,1	748950,9
2.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,9	7,77
b.	Jumlah Penganggur	Orang	542.898	542.898
3.Kemiskinan				
a.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,10	6,06
b.	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	731.000	731.000
4.Indeks Pembangunan Manusia				
a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,27	73,83
b.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,40	70,40
c.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,11	9,11
d.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,75	13,75
e.	Pengeluaran per Kapita	Rp	12.168.000	12.168.000
5.Ketimpangan				
a.	Rasio Gini	Indeks	0,3764	0,375
b.	Indeks Ketimpangan Regional	Indeks	0,622	0,622

Sumber: Analisis Bappeda, 2023** RKPD 2023

3.2 Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- 1) Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- 4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
- 5) Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- 6) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 7) Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 8) Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;
- 9) Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
- 10) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 11) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- 12) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Provinsi Banten;
- 2) Perekonomian diasumsikan kembali mulai beranjak normal pada tahun 2024;
- 3) Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Provinsi Banten; dan
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian.

b. Dana Transfer

Pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana transfer-perimbangan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

- 1) Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Intensifikasi dan optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Provinsi Banten sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten; dan
- 4) Penghitungan besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah dihitung secara konservatif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari Kementerian/Lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian/ Lembaga.

3.2.2 Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Komponen belanja dan belanja transfer mengalami pertumbuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. Rata-rata pertumbuhan belanja tak terduga mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan optimisme prediksi

- Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten dalam pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi COVID-19;
- c. Belanja transfer bantuan keuangan untuk Pemerintah Daerah lainnya akan diatur dalam perencanaan tahunan;
 - d. Pembiayaan untuk proyek fokus pembangunan kepala daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya.

3.2.3 Pembiayaan

Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan SILPA tahun 2024 dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
- b. Penerimaan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi BUMD, BUMN dan/atau perusahaan lainnya yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- c. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan.

Realisasi tahun 2022, tahun 2023 (per Maret 2023) Tahun, Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Realisasi Pencapaian Belanja dan Pembiayaan (Rupiah)
Tahun 2022

NO	URAIAN	APBD 2022			
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	11.442.414.915.990	11.094.558.631.346	-347.856.284.644	96,96
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.383.940.534.413	8.092.075.334.346	-291.865.200.067	96,52
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.052.922.341.577	2.996.931.257.000	-55.991.084.577	98,17
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.552.040.000	5.552.040.000	0	100
5	BELANJA DAERAH	11.972.895.803.452	11.282.399.714.969	-690.496.088.483	94,23
5.1	BELANJA OPERASI	6.793.840.922.618	6.393.880.790.052	-399.960.132.566	94,11
5.2	BELANJA MODAL	1.881.548.668.278	1.658.595.314.256	-222.953.354.022	88,15
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	90.314.044.586	37.907.839.840	-52.406.204.746	41,97
5.4	BELANJA TRANSFER	3.207.192.167.970	3.192.015.770.821	-15.176.397.149	99,53
	SURPLUS / (DEFISIT)	-530.480.887.462	-187.841.083.623	342.639.803.839	35,41

NO	URAIAN	APBD 2022			
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	530.480.887.462	542.022.365.215	11.541.477.753	102,18
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	570.105.320.721	570.105.320.721	0	100
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39.624.433.259	28.082.955.506	-11.541.477.753	70,87
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	354.181.281.592	354.181.281.592	0

Sumber: BPKAD Bappeda Provinsi Banten, 2023

Apabila melihat kinerja pendapatan daerah Provinsi Banten pada tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan cenderung mengalami peningkatan di tahun 2023, hal ini dimungkinkan sebagai pulihnya perekonomian pasca pandemi COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat yang akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan daerah, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2023 pendapatan daerah akan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun pendapatan Tahun 2023 masih dihadapkan pada tantangan terutama isu geopolitik dan juga inflasi.

Tabel 3. 5
Realisasi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (Rupiah)
Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD 2023 (PER 31 MARET 2023)			
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	11.547.460.023.771	2.587.719.005.535	-8.959.741.018.236	22,41
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.544.574.336.460	1.729.175.648.676	-6.815.398.687.784	20,24
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.989.040.250.000	858.543.356.859	-2.130.496.893.141	28,72
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.845.437.311	0	-13.845.437.311	0
5	BELANJA DAERAH	11.774.651.290.735	1.768.766.737.852	-10.005.884.552.883	15,02
5.1	BELANJA OPERASI	6.835.097.862.719	790.919.531.291	-6.044.178.331.428	11,57
5.2	BELANJA MODAL	1.794.289.757.043	7.435.415.950	-1.786.854.341.093	0,41
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	79.042.715.378	350.725.160	-78.691.990.218	0,44
5.4	BELANJA TRANSFER	3.066.220.955.595	970.061.065.451	-2.096.159.890.144	31,64
	SURPLUS / (DEFISIT)	-227.191.266.964	818.952.267.683	1.046.143.534.647	-360,47
6	PEMBIAYAAN DAERAH	227.191.266.964	-108.665.911.012	-335.857.177.976	-47,83

6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	615.689.000.000	0	-615.689.000.000	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	388.497.733.036	108.665.911.012	-279.831.822.024	27,97
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	710.286.356.671	710.286.356.671	0

Sumber: BPKAD Bappeda Provinsi Banten, 2023.

Penyusunan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang diproyeksikan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 walaupun peningkatannya belum signifikan. Hal ini terkait dengan semakin pulihnya perekonomian pasca pandemic Covid-19, dan potensi yang dimiliki, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, serta upaya intensifikasi akan dilakukan. Selain hal tersebut, di Provinsi Banten masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara pada tahun-tahun mendatang.

Belanja Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah yang diprioritaskan untuk pemenuhan belanja urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, belanja yang bersifat wajib dan mengikat, belanja mandatory sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan belanja prioritas dalam rangka pencapaian target pembangunan. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024 yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer yang merupakan alokasi anggaran bersifat indikatif dengan memperhatikan penganggaran tahun sebelumnya. Komposisi proyeksi belanja daerah sebagaimana dimaksud memungkinkan terjadi adanya perubahan setelah input rincian belanja.

Proyeksi Kerangka Pendanaan secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 4
 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (Rupiah)

Tahun 2024

KODE	URAIAN	PAGU INDIKATIF
4	PENDAPATAN DAERAH	11.261.199.562.039
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.457.052.033.549
4.1.01	Pajak Daerah	8.084.849.811.619
4.1.02	Retribusi Daerah	21.930.691.760
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	58.558.590.039
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	291.712.940.131
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.797.820.765.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.797.820.765.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.326.763.490
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.326.763.490
5	BELANJA	11.611.199.562.039
5.1	BELANJA OPERASI	6.569.008.336.666
5.1.01	Belanja Pegawai	2.563.557.032.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.184.429.802.316
5.1.03	Belanja Bunga	1.029.672.328
5.1.05	Belanja Hibah	776.491.830.022
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	43.500.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.821.133.377.748
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	62.696.892.030
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	62.696.892.030
5.4	BELANJA TRANSFER	3.158.360.955.595
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.866.940.955.595
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	291.420.000.000
Total Surplus/(Defisit)		(350.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	350.000.000.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	493.497.733.036
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	243.497.733.036
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	250.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	143.497.733.036
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	138.497.733.036
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Sumber: Bappeda Provinsi Banten, 2023.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari penyelenggaraan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Dokumen RPD ini merupakan periode kelima dari RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 yaitu tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, adalah “*Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa*”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

- 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
- 2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
- 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan
- 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2024	2026 (Akhir)
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan 6,50% (2021) menjadi 5,37% (2026)	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	52,83	63,46	71,06

VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2024	2026 (Akhir)
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,644	0,675	0,695
				Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,71	7,75	7,79
			Tingkat Pengangguran Terbuka 8,98% (2021) menjadi 8,20% (2026)	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	64,48	65,54	76,04
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	8,93	9,20	9,40
				dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,02	13,93	14,30
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,02	70,54	70,83
					Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	24,50	23,00	22,00
				Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	91,67	93,35	93,91
				Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	52,63	56,23	58,63
					Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	48,67	50,17	51,67
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,44% (2021) menjadi 5,27 - 5,41 (2026)	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,87	4,92	6,82
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,93	5,06	5,69

VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2024	2026 (Akhir)
					LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	1,84	3,04	4,24
				Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,30	4,48	4,66
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,56	0,80	1,04
			Indeks Williamson 0,625 (2021) menjadi 0,618 (2026)	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Tinggi	tinggi	Sangat tinggi
			Indeks Gini 0,363 (2021) menjadi 0,336 (2026)	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.033	12,303	12.573
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 14,48% (2021) menjadi 20% (2026)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,94	63,04	63,14
				Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	149,08	145,31	140,02
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi 61 (2021) menjadi 81 (2026)	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	65,88	73,16	80,00
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	55,89	84,30	87,60
					Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2	2-3	2-3
					Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan: nilai)	3,45	3,49	3,53
				Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Tangguh

Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Banten untuk Tahun 2024 tersebut menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2024.

Adapun strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan
 Provinsi Banten Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA			
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas			
1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	1.1. Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera	1.1.1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program keluarga berencana	▪ Peningkatan kerjasama dengan kabupaten/kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk
	1.2. Meningkatnya pelayanan sosial	1.2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar sosial bagi penerima pelayanan dasar sosial	▪ Peningkatan pemberdayaan dan pemenuhan SPM bidang sosial
	1.3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan	1.3.1. Meningkatkan akses pelayanan publik bagi masyarakat desa	▪ Peningkatan kelembagaan pemerintah desa dan pelayanan publik bagi masyarakat desa
	1.4. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	1.4.1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing pelatihan calon tenaga kerja	a. Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan Balai Latihan Kerja
			b. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan penyandang disabilitas
	1.5. Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	1.5.1. Mengembangkan kebijakan pendidikan vokasi	▪ Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan vokasi
		1.5.2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	▪ Peningkatan kualitas dan ketersediaan alat praktek

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		1.5.3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah	▪ Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah
		1.5.4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Khusus	▪ Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Khusus
		1.5.5. Mengembangkan kebudayaan, kesenian, dan sejarah daerah melalui sarana pendidikan dan festival budaya	▪ Kolaborasi program-program pemajuan kebudayaan
	1.6. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1.6.1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan ketersediaan tenaga medis, sarana, dan prasarana kesehatan	a. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan b. Peningkatan upaya penanggulangan pandemi covid-19
		1.6.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	▪ Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
		1.6.3. Menurunkan upaya preventif stunting dengan pendekatan lintas sektor	▪ Peningkatan upaya preventif stunting dengan pendekatan lintas sektor
	1.7. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	1.7.1. Meningkatkan kesetaraan gender	▪ Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi
		1.7.2. Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota. b. Penyediaan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi.

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
			c. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota
		1.7.3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	▪ Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Provinsi.
		1.7.4. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan	▪ Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
	1.8. Terbentuknya karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	1.8.1. Mengembangkan kebudayaan, kesenian, dan sejarah daerah melalui sarana pendidikan dan festival budaya	▪ Kolaborasi program-program pemajuan kebudayaan
		1.8.2. Memperkuat karakter pemuda melalui prestasi olahraga dan non-olahraga	▪ Peningkatan Pengembangan potensi Pemuda dan pengembangan prestasi olahraga Tingkat Nasional
Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan			
2. Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	2.1. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	2.1.1. Meningkatkan Cadangan Pangan dan Perlindungan Pangan Daerah	a. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi
			b. Penyediaan lumbung pangan melalui BUMD yang bergerak di sektor pangan
		2.1.2. Meningkatkan Kualitas Koperasi Binaan	▪ Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Pelayanan Usaha Terpadu
		2.1.3. Meningkatkan Akses UMKM terhadap Pemasaran Digital	▪ Peningkatan pembinaan UMKM terhadap pemasaran digital

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		2.1.4. Meningkatkan Omset UMKM	Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Pelayanan Usaha Terpadu
	2.2. Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	2.2.1. Meningkatkan Nilai Investasi dengan Promosi Potensi Daerah	Peningkatan Promosi investasi berbasis potensi unggulan dan kajian I-PRO
		2.2.2. Meningkatkan Pelayanan dengan Optimal	Meningkatkan Pelayanan investasi dengan Kemudahan Perizinan sesuai UU Cipta Kerja (Pemerintah Terbitkan Perppu No.2 Tahun 2022 Jadi Pengganti UU Cipta Kerja, 30 Des 2022)
			Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha di Provinsi Banten
	2.3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	2.3.1. Meningkatkan Pangsa Pasar Ekspor Non Migas Komoditas Unggulan Daerah (Luar daerah dan Luar negeri)	Peningkatan Jumlah Eksportir Non Migas Komoditas Unggulan Daerah
		2.3.2. Meningkatkan Stabilitas Barang Pokok	Penguatan Manajemen Pusat Distribusi Perdagangan
		2.3.3. Mengembangkan sektor industri	Penembangan kualitas produk industri
	2.4. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.4.1. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata dan Mengembangkan Potensi Ekonomi Kreatif	Peningkatan destinasi pariwisata Provinsi dan Ekonomi Kreatif melalui Optimalisasi Aset
	2.5. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	2.5.1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan Infrastruktur Pokok Pelabuhan Perikanan Provinsi dan Produk turunannya
		2.5.2. Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Peningkatan Infrastruktur Penunjang dan optimalisasi pengelolaan Pasca Panen (<i>off farm</i>)

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
	2.6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	2.6.1. Meningkatkan kualitas jalan provinsi	▪ Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, dan kelengkapan jalan
		2.6.2. Meningkatkan ketersediaan jaringan jalan Provinsi	▪ Pembangunan jalan untuk mendukung pusat kegiatan Provinsi
		2.6.3. Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindung	▪ Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan
		2.6.4. Meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi	▪ Pemanfaatan bendungan dan embung untuk berbagai keperluan secara terpadu untuk irigasi
		2.6.5. Meningkatkan prasarana sistem drainase dalam WS Provinsi dan pencegahan bencana tsunami di wilayah Provinsi	▪ Pengelolaan prasarana pengendalian banjir
		2.6.6. Meningkatkan profesionalisme badan usaha jasa konstruksi	▪ Peningkatan sumber daya badan usaha jasa konstruksi
		2.6.7. Meningkatkan prasarana akses air bersih	▪ Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum.
		2.6.8. Membangun TPA/TPST Regional	▪ Perencanaan pembangunan TPA/TPST Regional yang berkualitas
		2.6.9. Penangan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana	▪ Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik
		2.6.10. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah	▪ Penataan kawasan permukiman, infrastruktur permukiman kumuh

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		2.6.11. Membangun SPAL-D Regional	▪ Perencanaan pembangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
		2.6.12. Meningkatkan pembangunan dan pengelola gedung sarana dan prasarana Kawasan Strategis Provinsi	▪ Pembangunan dan peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan Strategis Provinsi
		2.6.13. Meningkatkan sarana, prasarana, dan Penyelenggaraan Perhubungan	▪ Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan
		2.6.14. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur, koordinasi dan pelayanan sub sektor energi dan ketenagalistrikan	▪ Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, peningkatan pelayanan rekomendasi perjinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data energi dan ketenagalistrikan
Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;			
3. Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	3.1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3.1.1. Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat	▪ Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan dan peningkatan pengelolaan Tahura Banten serta perhutanan sosial
		3.1.2. Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan	▪ Peningkatan kualitas air dan udara serta melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		3.1.3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang	▪ Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi, Pembinaan dan pengawasan
		3.1.4. Meningkatkan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	▪ Pengembangan dan pemetaan, peningkatan pelayanan rekomendasi perjinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek kegeologian dan sumber daya mineral
	3.2. Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana	3.1.5. Meningkatkan mitigasi dan pengurangan resiko bencana	▪ Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana, dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan
Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
4.Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	4.1. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	4.1.1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan
			b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan
			c. Peningkatan kualitas informasi kinerja Perangkat Daerah
			d. Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah
			e. Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		4.1.2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pendapatan daerah	▪ Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah ▪ Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana insentif daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset, dan Peningkatan Kinerja BUMD
		4.1.3. Meningkatkan pelayanan publik	a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis <i>e-government</i> b. Peningkatan manajemen dan profesionalisme aparatur c. Peningkatan kualitas kajian dan implementasi kebijakan, serta inovasi pelayanan publik berdasarkan prinsip Organisasi Perangkat Kerja Daerah hemat struktur kaya fungsi
		4.1.4. Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	▪ Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal
	4.3. Meningkatkan Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	4.3.1. Meningkatkan ketahanan sosial budaya ideologi dan kerukunan sosial	a. Peningkatan budaya politik yg demokratis, jujur dan bertanggung jawab berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa b. Penurunan kerawanan konflik masyarakat c. Peningkatan kualitas demokrasi melalui dukungan pelaksanaan PEMILU-PILKADA Langsung

Sumber: Bappeda Provinsi Banten, Tahun 2023

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan tersebut, dirumuskan prioritas pembangunan daerah untuk Tahun 2024.

4.2 Tema RKPD 2024

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mempedomani RKP, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah. Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Tahun 2024 dan tema RKP Tahun 2024, adalah “*Pemantapan Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Kerangka Tahap Modernisasi*”. Keselarasan antara tema RKP Tahun 2023-2026 dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 disajikan dalam diagram berikut.



Gambar 4.1
Keselarasan antara tema RKP Tahun 2023-2026 dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2024

Tema pembangunan tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Pada Bab II, telah dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang merupakan analisis kesenjangan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil evaluasi RKPD, analisis arah kebijakan RPD, serta analisis arah kebijakan RPJMN. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut adalah:

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
2. Masih Rendahnya Pemanfaatan Potensi Komoditas Unggulan;
3. Tingginya risiko bencana alam, dan perubahan iklim, serta belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi belum optimal; dan
5. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan PEMILU.

Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. Isu-isu strategis daerah Tahun 2024 adalah:

1. Daya saing sumber daya manusia yang kompetitif;
2. Sumber daya ekonomi unggulan dan potensial yang berdaya ungkit;
3. Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup, berkelanjutan; dan
4. Reformasi birokrasi yang berkualitas
5. Demokrasi yang harmonis.

Berdasarkan isu-isu strategis daerah tersebut, dirumuskan fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2024. Untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas, dilakukan pembobotan melalui diskusi kelompok terpumpun. Hasil dari diskusi tersebut dianalisis dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi. Variabel yang digunakan untuk menilai prioritas adalah: ketersediaan anggaran dan SDM, keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, akselerasi pencapaian indikator makro daerah, kondisi lingkungan strategis untuk menunjang pencapaian

kinerja, sinergitas dengan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota, keterlibatan aktor pembangunan, serta keterkaitan dengan RPJPD.

Partisipan dalam diskusi kelompok memilih isu pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama, disusul oleh peningkatan daya saing SDM, diikuti oleh isu lingkungan dan reformasi birokrasi. Dengan demikian, hierarki prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU

Keterkaitan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis dan prioritas pembangunan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis dan Prioritas Daerah

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Tahun 2024
1	Masih rendahnya kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan	Daya saing sumber daya manusia yang kompetitif	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia
2	Masih Rendahnya Pemanfaatan Potensi Komoditas Unggulan	Sumber daya ekonomi unggulan dan potensial yang berdaya ungkit	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi
3	Tingginya risiko bencana alam, dan perubahan iklim, serta belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup, berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan
4	Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi belum optimal	Reformasi birokrasi yang berkualitas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
5	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan PEMILU	Demokrasi yang harmonis.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU

Sumber : Bappeda, Tahun 2023

Selanjutnya, rumusan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten tahun 2024 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten yang tertuang dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sehingga menghasilkan arah pembangunan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Prioritas Daerah Provinsi Banten Tahun 2024

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan : nilai)	63,46	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Peningkatan kualitas keluarga sejahtera	Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,675		Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan	Peningkatan Kelembagaan Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik bagi Masyarakat Desa
		Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,75		Peningkatan Pelayanan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan dan Pemenuhan SPM Bidang Sosial
		Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	71,85		Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Balai Latihan Kerja
		Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	9,20		Peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	▪ Peningkatan akses dan kualitas pendidikan khusus ▪ Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							▪ Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah ▪ Peningkatan kualitas dan ketersediaan alat praktek
			Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,93			Peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,54		Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	▪ Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat ▪ Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan ▪ Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
			Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	23,00		Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan peran lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting
		Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	93,35		Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	▪ Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi ▪ Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ▪ Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							▪ Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus ▪ Penyediaan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi.
		Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	56,23		Pembentukan karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	Kolaborasi program-program pemajuan kebudayaan
			Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	50,17		Pembentukan karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	Peningkatan Pengembangan potensi Pemuda dan pengembangan prestasi olahraga tingkat nasional
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.303	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Daya Beli Masyarakat	• Peningkatan pembinaan UMKM terhadap pemasaran digital • Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Pelayanan Usaha Terpadu

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							•Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Pelayanan Usaha Terpadu •Peningkatan Ketersedian Pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi
		Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	4,92		Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha	•Peningkatan Promosi investasi berbasis potensi unggulan dan kajian I-PRO •Peningkatan pelayanan investasi dengan Kemudahan Perizinan sesuai UU Cipta Kerja Pemerintah Terbitkan Perppu No.2 Tahun 2022 Jadi Pengganti UU Cipta Kerja, 30 Des 2022 •Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha di Provinsi Banten
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	5,06		Peningkatan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	•Pengembangan kualitas produk industri
			LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	3,04			•Penguatan Manajemen Pusat Distribusi •Peningkatan Jumlah Eksportir Non Migas

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							Komoditas Unggulan Daerah
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,48		Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan destinasi pariwisata Provinsi dan Ekonomi Kreatif melalui Optimalisasi Aset
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,80		Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	• Peningkatan Infrastruktur Penunjang dan optimalisasi pengelolaan Pasca Panen (off farm) • Peningkatan Infrastruktur Pokok Pelabuhan Perikanan Provinsi dan Produk turunannya
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Tinggi		Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	• Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, dan kelengkapan jalan • Pembangunan jalan untuk mendukung pusat kegiatan provinsi • Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan • Pemanfaatan Bendung dan embung untuk berbagai keperluan secara terpadu untuk irigasi • Pengelolaan prasarana pengendalian banjir • Perencanaan pembangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional • Perencanaan pembangunan

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							TPA /TPST Regional yang berkualitas • Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis Provinsi • Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, • Peningkatan Sumber Daya Badan Usaha Jasa Konstruksi • Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik • penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh • Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan • Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, peningkatan pelayanan rekomendasi perjinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							energi dan ketenagalistrikan
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	63,04	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam	• Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan Tahura Banten • Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi • Peningkatan kualitas air dan udara serta melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan • Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							perbenihan tanaman hutan ● Pengembangan dan pemetaan, peningkatan pelayanan rekomendasi perjinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek kegeologian dan sumber daya mineral
		Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	145,31		Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan yang Efektif	● Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana ● Menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	73,16	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.	Peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi	● Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan ● Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan ● Peningkatan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah ● Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah ● Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	84,30			● Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							pemerintah daerah • Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana insentif daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset, dan Peningkatan Kinerja BUMD
			Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2-3			• Peningkatan manajemen dan profesionalisme Aparatur • Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan: nilai)	3,49			• Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis e-government • Peningkatan kualitas dan implementasi kebijakan, Kajian dan Inovasi pelayanan publik • Peningkatan kualitas kebijakan BLUD
		Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU	Peningkatan Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	• Peningkatan budaya politik yang demokratis, jujur dan bertanggungjawab berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa • Penurunan kerawanan konflik masyarakat

Sumber : Bappeda, Tahun 2023

Prioritas Daerah tersebut juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam RKP Tahun 2024 sebagai berikut.

1. *Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;*

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. *Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;*

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. *Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;*

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. *Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;*

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. *Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;*

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. *Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;*

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. *Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.*

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Hasil penyelarasan Prioritas Daerah tersebut juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Interkoneksi Prioritas Daerah Provinsi Banten
dengan Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja 2024	Program Pembangunan Daerah
1	PN-1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12,303	Peningkatan Daya Beli Masyarakat
			Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	4,92	Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	5,06	Peningkatan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan
				LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	3,04	
			Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,48	Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,80	Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan
2	PN-2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Tinggi	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,675	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan
3	PN-3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan : nilai)	63,46	Peningkatan kualitas keluarga sejahtera

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja 2024	Program Pembangunan Daerah
			Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,75	Peningkatan Pelayanan Sosial
			Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	71,85	Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
			Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	9,20	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat
				Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,93	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,54	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
				Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	23,00	
			Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	93,35	Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender
			Membentuk Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	50,17	Peningkatan karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya
4	PN-4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Membentuk Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	56,23	Peningkatan karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya
5	PN-5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Tinggi	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis
6	PN-6 Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	63,04	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja 2024	Program Pembangunan Daerah
			Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	145,31	Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan yang Efektif
7	PN-7 Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	73,16	Peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	84,30	
				Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2-3	
				Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan: nilai)	3,49	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Peningkatan Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten

Sumber Data : SIPD Provinsi Banten, 2023

4.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten dalam lingkup Kewilayahan Nasional Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan di daerah yang menjadi bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen pembangunan jangka menengah nasional ataupun rencana pembangunan tahun yang disusun di tingkat nasional, Oleh karenanya, RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, diarahkan untuk mendukung 7 agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta prioritas dan sasaran pembangunan dalam dokumen RKP 2023 berdasarkan basis kewilayahan.

Basis kewilayahan menjadi bagian penting dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD 2024. Fokus perhatian kepada potensi dan permasalahan wilayah serta pertimbangan kondisi regional, nasional dan global menjadikan formulasi prioritas dan sasaran pembangunan menjadi lebih komprehensif dan aktual berdasarkan kondisi yang ada.

A. Target Pembangunan Wilayah

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, target pembangunan yang ditetapkan untuk Provinsi Banten dalam RPJMN Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Target Pembangunan Provinsi Banten dalam
RPJMN Tahun 2020-2024

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024				
		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)*	5,40	5,50	5,60	5,70	5,3 – 5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka*	8,00	7,80	7,70	7,30	7,10 – 7,78
3	Tingkat Kemiskinan*	4,80	4,50	4,00	3,65	3,50 – 4,00

Sumber : RPJMN 2020-2024

Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada penghujung Tahun 2019, berlanjut di tahun 2020 serta belum sepenuhnya kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun 2021 menyebabkan berbagai target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2024-2024 menjadi tidak tercapai. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi nasional, indikator Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE) dan Persentase kemiskinan provinsi Banten menunjukkan kondisi yang lebih baik. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Realisasi Indikator Pembangunan Nasional dan Provinsi Banten
Tahun 2020-2022

Indikator	2020		2021		2022	
	Nasional	Banten	Nasional	Banten	Nasional	Banten
LPE	-2,07	-3,38	5,02	5,19	5,72	5,71
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,07	10,64	6,27	8,98	5,86	8,09
Persentase Penduduk Miskin	10,19	6,63	9,71	6,50	9,54	6,16

Sumber: SIPD Tahun 2022

Tabel 4.7 juga menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dari pemerintah provinsi Banten untuk dapat mewujudkan target pembangunan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yakni realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 sebesar 5,8%, Tingkat

Pengangguran terbuka 7,0% dan Persentase kemiskinan sebesar 3,48. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka isu perwujudan lingkungan yang kondusif bagi percepatan laju pertumbuhan ekonomi, upaya yang lebih akseleratif dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi prioritas dalam dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2024.

B. Prioritas Pembangunan Wilayah

Provinsi Banten terdiri dari delapan kabupaten kota yang memiliki karakteristik berbeda jika dilihat dari struktur perekonomiannya. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menunjukkan bahwa sektor pertanian mendominasi struktur Produk Domestik Regional Bruto wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Berbeda halnya dengan wilayah lainnya seperti Kabupaten Serang, Tangerang dan Kota Cilegon yang memperlihatkan kontribusi sektor Industri Pengolahan dalam struktur PDRBnya, serta dominasi sektor Jasa pada wilayah Kota Tangsel, Serang dan Kota Tangerang. Ragam dominasi sektoral ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Banten dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan aspek kewilayahan.

Penetapan prioritas pembangunan berdasarkan aspek kewilayahan juga merujuk kepada dokumen RPJMN 2020-2024 yang menyebutkan bahwa lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Koridor pertumbuhan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan meliputi wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Penetapan Kota Cilegon dan Kota Serang berdasarkan rencana pengembangan kedua wilayah tersebut sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) mengingat di wilayah Cilegon merupakan cluster industri yang menghasilkan produk sebagai bahan baku bagi industri lainnya ataupun besi baja yang menjadi backbone bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia, sedangkan penetapan Kota Serang pusat Kegiatan Wilayah (PKW) mengingat kota Serang sebagai pusat ibu kota provinsi Banten diharapkan menjadi trigger bagi pertumbuhan wilayah di sekitarnya.

Pembangunan Wilayah Jawa-Bali dalam RPJMN Tahun 2020-2024, akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Adapun untuk Provinsi Banten adalah Pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur menyediakan pelayanan dasar dan mendukung kegiatan operasional pelaku ekonomi. Infrastruktur yang memadai membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya bersaing. Infrastruktur yang memadai akan mendukung aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien

Tabel 4.8
 Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur

DAYA SAING DAERAH PILAR INFRASTRUKTUR				
DIMENSI	INDIKATOR		SUMBER DATA	
Infrastruktur transportasi	1	Konektivitas jalan	1	Kementerian PUPR & Mabes Polri
	2	Kualitas infrastruktur jalan	2	Kementerian PUPR
	3	Proporsi jumlah stasiun kereta api	3	Kementerian Perhubungan
	4	Proporsi jumlah bandara	4	Kementerian Perhubungan
	5	Proporsi jumlah Pelabuhan	5	Kementerian Perhubungan
Infrastruktur utilitas kelistrikan	1	Rasio elektrifikasi	1	Kementerian ESDM
	2	Susut energi listrik*	2	PLN
Infrastruktur utilitas air minum	1	Air minum layak	1	Kementerian PUPR
	2	Tingkat kehilangan air*	2	Kementerian PUPR

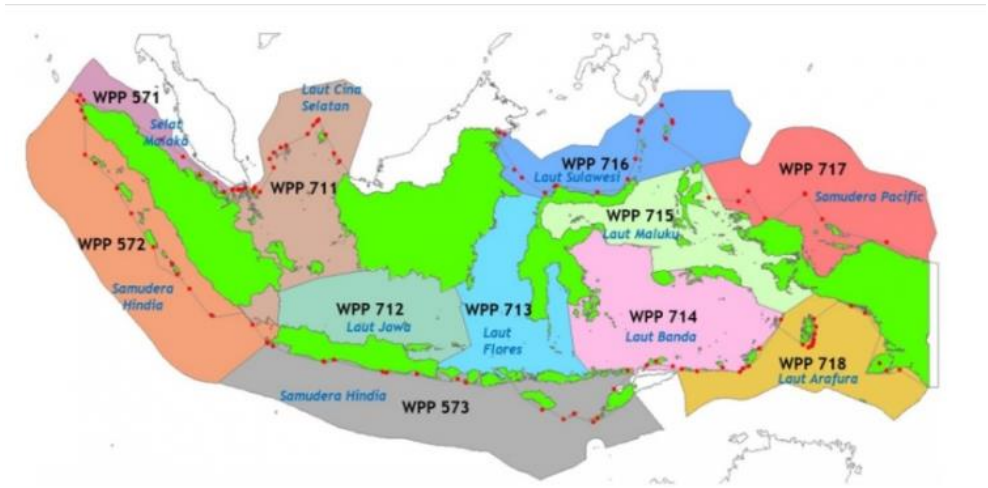
Sumber : IDSD, 2022

4.4.1 Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada Kegiatan Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan pada tahun 2020-2024 adalah:

- Pengembangan komoditas unggulan, yang untuk Provinsi Banten adalah kopi, lada, dan pala,. Sedangkan untuk sentra produksi pertanian dan perkebunan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) adalah komoditas jagung.
- Pengembangan sektor perikanan melalui WPP antara lain WPP 712 (berlokasi di Laut Jawa) dan WPP 573 (berlokasi di Samudera Hindia/Selatan Jawa) dan perikanan budidaya. Mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014

tentang penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan, sumberdaya pengelolaan perikanan tangkap di wilayah provinsi Banten termasuk dalam tiga zona sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.2
Wilayah Pengelolaan Perikanan, sumberdaya pengelolaan perikanan tangkap di wilayah Provinsi Banten
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014

Berdasarkan gambar di atas kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten meliputi WPP 572, 712 dan 573. Untuk prioritas pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2024 harus diarahkan kepada peningkatan produksi dan produktivitas di ketiga wilayah tadi.

Penetapan prioritas pembangunan berdasarkan pendekatan komoditas unggulan diharapkan dapat menjawab permasalahan ketertinggalan perekonomian di wilayah Banten Selatan sebagaimana disampaikan dalam hasil kajian Direktorat Regional I Bappenas tahun 2022. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan ketertinggalan perekonomian Banten Selatan diantaranya disebabkan oleh relatif rendahnya produktivitas dan nilai tambah sektor perikanan serta lambatnya pertumbuhan sektor pertanian sebagai sektor basis. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2024 diarahkan kepada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan dan pertanian dalam perekonomian terutama di wilayah Banten Selatan.

4.4.2 Pengembangan Kawasan Strategis

Dokumen RPJMN tahun 2020-2024 memuat Proyek prioritas yang akan dilaksanakan di Provinsi Banten, yang diatur dalam skala regional pada Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 1 tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten 2023-2043, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang, pasal 7 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0 serta sektor industri kreatif dan jasa, yang untuk Provinsi Banten, di KEK Tanjung Lesung;
- 2) Pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi, yang untuk Provinsi Banten, adalah Pembangunan Jalan Tol Serang –Panimbang, Jalur Ganda KA Rangkasbitung– Merak, Reaktivasi KA Rangkasbitung-Labuan/Bayah;
- 3) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- 4) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, yang meliputi:
 - a. Pengembangan SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan;
 - b. Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan manajer perusahaan (gedung);
 - c. Penanganan anak tidak sekolah.

Keberpihakan pemerintah pusat dalam pengembangan industri manufaktur perlu ditindaklanjuti Pemerintah provinsi Banten dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong tumbuh kembangnya industri. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah revitalisasi kawasan industri yang ada untuk peningkatan daya saing industri daerah melalui peningkatan pelayanan, penyediaan sarana dan sarana penunjang serta penyiapan sumber daya manusia produktif.

Pengembangan kawasan strategis juga diarahkan kepada realisasi rencana pembangunan kawasan Industri di Cileles Kabupaten Lebak yang sudah mendapatkan dukungan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ataupun Kemenko Maritim dan Investasi. Pembangunan Kawasan Industri seluas 3.190 Hektare tersebut selain sebagai bagian dari optimalisasi keberadaan Tol Serang-Panimbang juga diharapkan membawa pertumbuhan perekonomian daerah.

4.4.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah Pengembangan kawasan perkotaan (RPJMN 2020-2024). Untuk Provinsi Banten, pengembangan kawasan perkotaan akan diarahkan di wilayah Kota Cilegon dan Kota Serang. Kota Cilegon sebagai wilayah cluster industri yang memproduksi bahan baku industri lainnya ataupun besi baja sebagai penunjang pembangunan infrastruktur tentu saja keberadaannya sangat dibutuhkan. Untuk itu, multiplier effect keberadaan industri di wilayah Cilegon ini perlu ditunjang dengan kebijakan pengembangan kawasan sekitar dengan memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Prioritas pengembangan kawasan perkotaan lainnya yang menjadi perhatian dalam RKPD 2024 adalah pengembangan Kota Serang. Selain diarahkan kepada penanganan kawasan kumuh perkotaan, adanya kejadian banjir bandang yang melanda sebagian wilayah Kota Serang pada tahun 2022 menuntut upaya mitigasi dengan peningkatan perlindungan dan daya dukung lingkungan dalam pengembangan kota. Selain itu, adanya rencana relokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, mulai beroperasinya kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin membutuhkan antisipasi penyediaan lingkungan perumahan di Kota Serang.

4.4.4 Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Daerah Entas Tertinggal

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015-2019 mengeluarkan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang sebagai daerah tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa

berbagai kebijakan program dan kegiatan mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi Banten sampai dengan tingkat kabupaten telah menghasilkan pembangunan yang membawa pada kemajuan daerah. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Banten perlu memberikan perhatian yang lebih kepada dua wilayah ini mengingat Daerah tertinggal yang sudah terentaskan hanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian/Lembaga selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai daerah yang sudah terentaskan (Kepmendesa, PDT dan transmigrasi nomor 79/2019 menyebutkan). Hal ini menunjukkan bahwa, pembinaan dalam bentuk pendampingan program dan kegiatan di kedua wilayah ini akan mengalami penurunan pada tahun anggaran 2024.

Kegiatan prioritas lainnya yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah pengembangan kawasan Perdesaan. Kawasan Perdesaan di provinsi Banten yang masuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) meliputi dua wilayah yakni (KPPN) Cibaliung dan KPPN Labuan-Jiput yang meliputi Desa Labuan, Banyubiru, Caringin, Teluk, Jiput, Sukacai, Tenjolahang dan Banyuresmi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan pendampingan pada upaya pengembangan kedua kawasan tersebut mengingat alokasi kegiatan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 hanya sampai tahun 2022. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dilakukan melalui penguatan sinergi antar desa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama.

Prioritas pengembangan wilayah lainnya yang menjadi perhatian pemerintah provinsi Banten adalah pengembangan kawasan perdesaan melalui skema kerjasama antar desa lintas kabupaten kota yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi (UU 23/2014). Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2024 pemerintah provinsi Banten perlu merealisasikan terwujudnya kesepakatan bersama antar desa yang berbeda wilayah kabupaten dalam rangka peningkatan pelayanan publik, peningkatan nilai tambah perekonomian atau meminimalisir kegiatan yang dapat menimbulkan dampak eksternalitas. Konsep pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan skema kerjasama ini

sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. Untuk itu, dalam RKPD tahun 2024 peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur desa untuk merealisasikan kerjasama desa menjadi sangat krusial dan harus dipandang sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan pembangunan. Hasil pendataan awal yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, di Provinsi Banten terdapat 164 desa dari 45 kecamatan yang merupakan desa perbatasan lintas kabupaten. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Status Desa di Provinsi Banten

Kabupaten	Kec	Desa		
		Tertinggal	Berkembang	Maju
Tangerang	7		12	7
Lebak	8	14	25	3
Pandeglang	17	3	46	7
Serang	13		44	3
Jumlah	45;	17	127	20

Sumber: SIPD Tahun 2022

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa sebanyak 17 desa di wilayah perbatasan tergolong dalam klasifikasi desa tertinggal dan 127 tergolong desa berkembang. Untuk itu, kerjasama desa di wilayah perbatasan sangat relevan untuk percepatan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik atau nilai tambah perekonomian.

Pembangunan kawasan perdesaan atau daerah entas tertinggal juga perlu diarahkan kepada pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang untuk Provinsi Banten ditujukan pada Pemantapan pemulihan paska bencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya. Oleh karena itu, kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim perlu dilakukan dan menjadi prioritas pada RKPD 2024.

4.4.5 Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
- 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi.

- 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
- 9) Pengembangan kerjasama antardaerah; dan
- 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak.
- 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang untuk Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
- 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas untuk Provinsi Banten meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang;
- 13) Penataan Ruang dan Lahan
 - a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
 - b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
 - c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
 - d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
 - f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral;
 - g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
 - h. Pembentukan bank tanah;

- i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
 - j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
- 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
- a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
 - b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
 - c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana;
 - d. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, yang meliputi:
 - a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. Pertahanan luasan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan, terutama padi;
 - d. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air.
 - e. Konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci;
 - f. Pengembangan energi baru terbarukan;
 - g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
 - h. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Sedangkan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) di Provinsi Banten untuk mendorong percepatan pembangunan Wilayah, adalah Pembangunan Kota Baru Maja, dan Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda.

4.5 Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi. Hal ini diatur pada Bab mengenai Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 7 dan Pasal 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan

perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, meliputi pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan, sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan, yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan, ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Penerapan pendekatan tersebut, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

Pendekatan tematik pada RKPD Provinsi Banten 2024 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam RKPD 2024 adalah sebagai berikut:

4.5.1 Peningkatan Investasi melalui optimalisasi Jalan Tol Serang Panimbang

Tematik ini diarahkan melalui strategi dan fokus penanganan :

a. Daya Dukung Regulasi dan Kebijakan Investasi;

Fokus Penanganan :

- Kemudahan Izin berusaha dan Rekomendasi Kebijakan Perizinan berbasis resiko
- Promosi Penanaman Modal
- Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

b. Intensifikasi Utilitas Kawasan Industri dan Ekstensifikasi Kawasan Industri

- Kawasan industri hijau dan industri tematik

c. Pengembangan destinasi wisata

- Penguatan kebijakan dan strategi destinasi wisata

- d. Pengembangan Kawasan Pertanian
 - Peningkatan Komoditas Pertanian
- e. Pengusahaan Ikan Tangkap dan Budidaya Perikanan
Peningkatan Komoditas Perikanan Tangkap dan Budidaya
- f. Aksesibilitas dan Infrastruktur Penunjang
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aksesibilitas
- g. Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja
 - Modernisasi dan Revitalisasi Balai Latihan Kerja
- h. Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam MoU SMK/Vokasi
 - Kerjasama dan Vokasi
- i. Jejaring
 - Kemitraan Usaha Kecil dengan usaha besar dan industri

Strategi dan fokus penanganan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Integrasi Program pada Tematik Peningkatan Investasi melalui optimalisasi Jalan Tol Serang Panimbang

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Daya Dukung Regulasi dan Kebijakan Investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Kemudahan Izin berusaha dan Rekomendasi Kebijakan Perizinan berbasis resiko	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	(Kota Serang, Curug, Sukajaya, BANTEN)	100%	50,000,000	
						Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	8 Kabupaten/Kota, BANTEN (Kota Serang, Curug, Sukajaya, BANTEN)	50 Dokumen	50,000,000	
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	(Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya (KP3B), KOTA SERANG)	4 Dokumen	2,000,000,000	
						Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	(Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya (KP3B), KOTA SERANG)	1 Dokumen	100,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	8 Kabupaten/Kota, BANTEN	2 Dokumen	213,746,100	
						Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	(Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya (KP3B), KOTA SERANG)	1 Dokumen	100,000,000	
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	(Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya (KP3B), KOTA SERANG)	100 Pelaku Usaha	75,000,000	
					Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan dan pengelolaan Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		50 Orang	75,000,000	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pengawasan Penanaman Modal	8 Kabupaten/Kota, BANTEN	100 Kegiatan Usaha	75,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kabupaten/Kota, BANTEN	100 Pelaku Usaha	75,000,000	
						Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	8 Kabupaten/Kota, BANTEN	100 Kegiatan Usaha	75,000,000	
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	(Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya (KP3B), KOTA SERANG)	2 Dokumen 75,000,000
2	Intensifikasi Utilitas Kawasan Industri dan Ekstensifikasi Kawasan Industri	DISPERINDAG	Kawasan industri hijau dan industri tematik	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				
3	Pengembangan destinasi wisata	Dinas Pariwisata	Penguatan kebijakan dan strategi destinasi wisata	Program Penguatan kebijakan dan strategi destinasi wisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				
						Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	- Kampung Wisata Pipitan, Kec. Walantaka, Kota Serang - Ranggawulung, Desa Crurug bitung, Kec. Curugbitung, Kab. Lebak	3 Lokasi	1,000,000,000	
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	- Situ Cikoncang, Desa Katapang, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak - Situ Gede, Kelapa Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	2 Dokumen	500,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	- Situ Cikuncang, Desa Katapang, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak - Situ Gede, Kelapa Indah, Kec, Tangerang, Kota Tangerang - Citorek, Kab. Lebak -Desa Cirendeui, Kec. Ciligrang, Kab. Lebak - Desa Ciboleger, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak - Pasir bungur, Kab. Lebak - Desa Cikatomas, Kec. Ciligrang, Kab. Lebak - Desa Cikamunding, Kec. Ciligrang, Kab. Lebak - Desa Hegarmanah, Kab. Lebak	2 Lokasi	3,292,910,200	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	- Kota Serang, Kecamatan Curug, Kelurahan Cilaku - Kota Serang, Kecamatan Serang, Kelurahan Sumur pecung	2 Usaha	400,000,000	
				Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	- Kota Serang, Kecamatan Curug, Sukajaya - Kota Serang, Kecamatan Kasemen, Banten Lama - Kota Cilegon, Kecamatan Pulomerak, Tamansari - Kabupaten Lebak, Kecamatan Cibeber, Cisungsang - Kabupaten Lebak, Kecamatan Bayah, Sawarna - Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang	4 Dokumen	1,000,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	jakarta pusat kec tanah abang kota tangerang, kec, tangerang, sukarasa kab lebak, ke rangkas bitung kab lebak, ciboleger Lebak, cilogra Pandeglang, panimbang Kota tangerang, tangerang Tangsel,kranggan	3 Kegiatan	1,000,000,000	
						Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kota Serang, Kecamatan Curug, Sukajaya	4 Dokumen	700,000,000	
4	Pengembangan Kawasan Pertanian	Dinas Pertanian	Peningkatan Komoditas Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kab Lebak, Kab Pandeglang, kab. Serang, Kab. Tangerang	4 Dokumen	400,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Kab Lebak, Kab Pandeglang, kab. Serang, Kab. Tangerang	4 Dokumen	100,000,000	
5	Pengusahaan Ikan Tangkap dan Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Komoditas Perikanan Tangkap dan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		15 kelompok	1,500,000,000	pemberian hibah alat penangkapan ikan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		10 rekomendasi	50,000,000	
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		20 rekomendasi	50,000,000	
6	Aksesibilitas dan Infrastruktur Penunjang	DPUPR	Dukungan Jalan Arteri Provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jembatan pada ruas jalan Ciruas-Petir-Warunggunung (Kab. Serang)	15 Unit	300,000,000	Pemeliharaan rutin jembatan pada UPTD Serang-Cilegon
						Pembangunan Jembatan				
						Pelebaran Jalan Menambah Lajur				
						Pembangunan Jalan	Kota Serang dan Kab. Serang	2,5 Ha	5,000,000,000	Pengadaan Lahan Boru – Cikeusal
						Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan Raya Saketi Malingping (Kab. Pandeglang)	0,8 km	3,139,650,000	Perbaikan drainase
						Penggantian Jembatan	Jembatan Petir (Kab. Serang)	1 Unit	6,000,000,000	Ruas Ciruas-Petir-Warunggunung
						Rekonstruksi Jalan				
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Ciruas-Petir-Warunggunung (Kab. Serang)	14,5 km	1,000,000,000	Pemeliharaan rutin ruas jalan pada UPTD

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Serang-Cilegon
							Tanjung Lesung - Sumur (Kab. Pandeglang)	22 km	1,650,000,000	Pemeliharaan rutin ruas jalan pada UPTD Pandeglang
							Munjul-Panimbang (Kab. Pandeglang)	20 km	920,000,000	Pemeliharaan rutin ruas jalan pada UPTD Pandeglang
							Saketi - Picung (Kab. Pandeglang)	15 km	1,515,000,000	Pemeliharaan rutin ruas jalan pada UPTD Pandeglang
							Picung - Malingping - Simpang (Kab. Lebak)	45 km	2,416,500,000	Pemeliharaan rutin ruas jalan pada UPTD Lebak
			Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
						Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembangunan TPA/TPST/SPA				
						Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA				
			Sistem dan Pengelolaan Air Limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat				
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				
		DPRKP	Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi		-	-	Tidak ada penanganan terkait masyarakat yang terdampak optimalisasi jalan tol Serang – Panimbang
			Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk		20	4,000,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Utilitas Umum (PSU)		Menunjang Fungsi Permukiman				
						Kerjasama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman		-	-	
		DLHK	Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pengelolaan sampah Regional				
						Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional				
						Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Kabupaten Lebak - Kecamatan Cibeber Desa Citorek, - Kecamatan Cilograng Desa Cibareno, Desa Cirendeul Tempat Wisata 1. kelapa warna Cihara Lebak (tpst,cator)2. ranggawulung Curugbitung Lebak (tpst, cator)Kota Tangsel - keranggan, tangsel (tpst, cator)	120 Ton	1,200,000,000	1. penanganan kebersihan banten lama 2. Pembinaan bank sampah di 8 kab/ kota (pembelian cator 6 unit untuk daerah wisata, dan biaya pendukung kegiatan pembinaannya). 3. Pengerukan

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di WKP III	Kab. Lebak, Kab. Pandeglang	2500 m2	775,000,000.00	
						- Pengadaan dan Pemasangan APJ/PJU Stang pada ruas jalan Ciseukeut - Sobang – Tela	Ciseukeut - Sobang - Tela	30 unit	174,000,000.00	
						- Pengadaan dan Pemasangan APJ/PJU Single Arm pada ruas jalan Tanjung Lesung - Sumur	Tanjung Lesung – Sumur	12 tiang	200,000,000.00	
						- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar WKP II (e-katalog)	Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	80 unit	184,000,000.00	
						- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar WKP III (e-katalog)	Kab. Lebak, Kab. Pandeglang	80 unit	184,000,000.00	
						- Pengadaan dan Pemasangan RPPJ/RPPJ Peringatan WKP II	Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	10 unit	190,000,000.00	
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				
7	Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS	Modernisasi BLKI Serpong dan Pembangunan BLKI Baru	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				
			Kuantitas Permintaan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar Kerja				
						Perluasan Kesempatan Kerja				
8	Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam MoU SMK/Vokasi	DISPERINDAG	Kerjasama	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				
		DINDIKBUD	Vokasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				
9	Jejaring	DPMPTSP	Kemitraan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi				

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINKOPUKM		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik		20 Unit Usaha	59,000,000	
				Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			457 Unit Usaha	103,643,406	

TEMATIK PENGURANGAN PENGANGGURAN MELALUI LINK AND MATCH PENDIDIKAN VOKASI

No	INTEGRASI TEMA	PERANGKAT DAERAH	FOKUS PENGEMBANGAN	INDIKASI KEGIATAN			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Revitalisasi SMK melalui penguatan kelembagaan SMK, Penguatan pengelolaan keuangan SMK dan Penguatan Manajerial SMK Negeri dan SMK Swasta	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	Provinsi Banten		885,736,636,742	
2	Penciptaan wirausaha	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Kewirausahaan Pemuda	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	8 Kab/Kota	Orang	1,350,000,000	Berjumlah 350 Orang
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	8 Kab/Kota	Persentase	150,000,000	30 Persentase

No	INTEGRASI TEMA	PERANGKAT DAERAH	FOKUS PENGEMBANGAN	INDIKASI KEGIATAN			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Modernisasi BLKI Serpong dan Pembangunan BLKI Baru	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tangerang Selatan		3,287,441,247	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tangerang Selatan		250,000,000	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tangerang Selatan		165,000,000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tangerang Selatan		100,000,000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Tangerang Selatan		1,100,000,000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tangerang Selatan		100,000,000	

No	INTEGRASI TEMA	PERANGKAT DAERAH	FOKUS PENGEMBANGAN	INDIKASI KEGIATAN			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
				Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	8 Kab/Kota		7,500,000,000	
						Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	8 Kab/Kota		550,000,000	
			Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar Kerja	8 Kab/Kota		368,001,000	
						Perluasan Kesempatan Kerja	8 Kab/Kota		500,000,000	
4	Penciptaan wirausaha	DP3AKKB	Kewirausahaan Perempuan	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	8 Kab/Kota	Orang	300,000,000	

No	INTEGRASI TEMA	PERANGKAT DAERAH	FOKUS PENGEMBANGAN	INDIKASI KEGIATAN			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	DPMPPTSP	Peningkatan Investasi Industri dan Dunia Usaha	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	8 Kab/Kota	Dokumen	213,746,100	
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Dinas Pariwisata	Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	§Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	8 Kab/Kota		200,000,000	
						§Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			200,000,000	
						§Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			400,000,000	
					Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	§Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	8 Kab/Kota		200,000,000	
						§Standarisasi Usaha dan Sertifikasi			200,000,000	

No	INTEGRASI TEMA	PERANGKAT DAERAH	FOKUS PENGEMBANGAN	INDIKASI KEGIATAN			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
							Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif			
7	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Dinkop UKM	Keterlibatan UKM dalam menyerap angkatan kerJa	Pengembangan UMKM	Pengembangana Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	8 Kab/Kota		103,643,406	
8	Usaha Kecil Masyarakat Miskin	Dinas Sosial	Usaha Kecil Masyarakat Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	8 Kabupaten/Kota (Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa)	Orang	1,850,000,000	Bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif), Rp. 2.500.000,- x 740 Orang (Paket) : Warungan Sembako, Warungan Non Sembako, Tata Boga dll

No	INTEGRASI TEMA	PERANGKAT DAERAH	FOKUS PENGEMBANGAN	INDIKASI KEGIATAN			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
										8 Kabupaten/Kota : 1. Kab. Lebak : 93 Orang, 2. Kab. Pandeglang : 93 Orang, 3. Kab. Serang : 93 Orang, 4. Kab. Tangerang : 93 Orang , 5. Kota , 6. Kota Cilegon : 92 Orang Tangerang : 92 Orang, 7. Kota Serang : 92 Orang, 8. Kota Tangerang Selatan : 92 Orang
9	Peningkatan Kuantitas Permintaan Tenaga Kerja	Disperindag	Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam MoU SMK/Vokasi	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kota Serang, Kota Cilegon	Orang	400,000,000	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri	■Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Serang	Orang	50,000,000	

No	INTEGRASI TEMA	PERANGKAT DAERAH	FOKUS PENGEMBANGAN	INDIKASI KEGIATAN			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Nasional (SIINas)					
10	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten	Literasi dan Minat Baca	Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi	Pengembangan dan Pemeliharaan Pelayanan Perpustakaan Elektronik	8 Kab/Kota	6 Kegiatan	290,799,610	
						Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Serang	7 Kegiatan	291,000,000	
						Pengembangan Pelayanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	8 Kab/ Kota	6 Kegiatan	610,000,000	
						Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	8 Kab/Kota dan Luar Daerah	3 Kegiatan	600,000,000	

No	INTEGRASI TEMA	PERANGKAT DAERAH	FOKUS PENGEMBANGAN	INDIKASI KEGIATAN			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	8 Kab/ Kota	3 Kegiatan	280,000,000	
						Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	8 Kab/ Kota	2 Kegiatan	100,000,000	
						Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	8 Kab/ Kota	2 Kegiatan	100,000,000	

4.5.2 Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), Dan Bangga Berwisata Indonesia Di Banten (BBWIB)

Tematik ini daerah diarahkan melalui strategi dan fokus penanganan :

- a. Peningkatan Jumlah UMKM Onboarding
 - Transaksi Belanja Produk UKM
- b. Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN)
 - Optimalisasi Belanja Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri
- c. Bangga Berwisata Indonesia di Banten
 - Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Lokal

Strategi dan fokus penanganan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Integrasi Program pada Tematik Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), Dan Bangga Berwisata Indonesia Di Banten (BBWIB)

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Lokasi	Indikasi Kegiatan			Target	Pagu Anggaran	Keterangan
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	Peningkatan Jumlah UMKM Onboarding	DINKOPUKM	Transaksi Belanja Produk UMKM	Kota Serang	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Tangguh	457 Unit Usaha	59,000,000	
				Kota Serang			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	457 Unit Usaha	1,249,985,500	
				Kota Serang			Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100 Unit Usaha	59,000,000	
				Kota Serang			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	59,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Lokasi	Indikasi Kegiatan			Target	Pagu Anggaran	Keterangan
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
				Kota Serang			Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	20 Unit Usaha	59,000,000	
				Kota Serang			Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	100 Unit Usaha	59,000,000	
				Kota Serang			Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil	100 Unit Usaha	59,000,000	
				Kota Serang	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	457 Unit Usaha	103,643,406	
				Kota Serang			Pengembangan Usaha Kecil	457 Unit Usaha	59,000,000	
		DISPERIND AG	Promosi Dagang melalui Pameran	Provinsi Banten	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Internasional/Nasiona l	6 Pelaku Usaha	300,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Lokasi	Indikasi Kegiatan			Target	Pagu Anggaran	Keterangan
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
			Banten Industrial Expo 2024	Provinsi Banten			Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	200,000,000	
			Inacraft Banten 2024	Kota Serang			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	60 Pelaku Usaha	200,000,000	
				Kota Serang			Peningkatan Citra Produk Ekspor	60 Pelaku Usaha	50,000,000	
				Kota Serang		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelayanan Pengujian	350 Sertifikat	6,410,878,340	
				Kota Serang			Pemantauan Mutu Produk	2 Produk	100,000,000	
				Kota Serang			Pengembangan Pelayanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	10 Sertifikat	100,000,000	
		DPMPTSP	Kemitraan UMKM dengan Usaha Besar dan Industri	Kota Serang Provinsi Banten	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	10 Dokumen	50,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Lokasi	Indikasi Kegiatan			Target	Pagu Anggaran	Keterangan
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
		DISPORA	Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pemuda	Kota Serang	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	340 orang	350,000,000	sudah diralat kegiatan, sub kegiatan, pagu, dan anggaran
	DLHK	Produksi Kelompok Tani Hutan		Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab./Kota Serang	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	40 Kelompok	125,000,000	
				Kec. Bojongmanik Kab. Lebak			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (Bimtek Produk Bambu)	1 Unit Managemen		
				Kec. Munjul Kab. Pandeglang	Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (Bimtek Aren)	1 Unit Managemen	375,000,000	
				Kec. Ciomas Kab. Serang			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (Bimtek Kopi)	1 Unit Managemen		

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Lokasi	Indikasi Kegiatan			Target	Pagu Anggaran	Keterangan
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
				Kec. Petir Kab. Serang			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (Bimtek Jamur Tiram)	1 Unit Managem ent		
				Kec. Sajira Kab. Lebak			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (Bimtek Lebah Madu Tiweul)	1 Unit Managem ent		
		DISTAN	Korporasi Produksi petani	Kota Serang	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	2 unit	350,000,000	
		DISKOMIN FO	Pengelolaan Media Digital	Kota Serang	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	120,000,000	
				Provinsi Banten			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	12 Dokumen	50,000,000	
		DKP	Hari Ikan Nasional	Kota Serang	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberian insentif dan Fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan Lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2 Kali	300,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Lokasi	Indikasi Kegiatan			Target	Pagu Anggaran	Keterangan
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
			Kontes Iksn Hias	Kota Serang	Progrsm Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberian insentif dan Fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan Lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2 Kali	250,000,000	
2	Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN)	DISPERIND AG	Optimalisasi Belanja Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri	Kota Serang	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	8 UMKM	150,000,000	
				Kota Serang			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	100 Pelaku Usaha	100,000,000	
				Kota Serang			Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	2 Laporan	150,000,000	
		Biro Barjas	Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah daerah	Kota Serang Provinsi Banten	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	130,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Lokasi	Indikasi Kegiatan			Target	Pagu Anggaran	Keterangan
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
							Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	200,000,000	
							Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	70,000,000	
		PUPR		Kota Serang	Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	270 Org	575,000,000	
							Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	2 Dokumen	100,000,000	
							Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	50 Orang	175,000,000	
							Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1 Dokumen	100,000,000	
3	Bangga Berwisata Indonesia di Banten	Dinas Pariwisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Lokal	Provinsi Banten	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	3 Lokasi	1,000,000,000	
				Provinsi Banten		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	500,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Lokasi	Indikasi Kegiatan			Target	Pagu Anggaran	Keterangan
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
				Provinsi Banten			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	10 Unit	1,000,000,000	
				Provinsi Banten			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Lokasi	4,000,000,000	
				Provinsi Banten			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 Orang	728,000,000	
				Provinsi Banten		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	200,000,000	
				Provinsi Banten			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	5 Lokasi	1,154,723,200	
				Provinsi Banten	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	800,000,000	Ralat Pagu
				Provinsi Banten			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	1,000,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Lokasi	Indikasi Kegiatan			Target	Pagu Anggaran	Keterangan
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
				Provinsi Banten	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	2 Dokumen	1,000,000,00 0	
				Provinsi Banten	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 Orang	200,000,000	
					JUMLAH				24,430,230,446	

4.5.3 Stabilisasi Inflasi Melalui Ketahanan Pangan Daerah

Tematik ketahanan pangan daerah diarahkan melalui strategi dan fokus penanganan :

- a. Peningkatan produksi pangan
 - Irigasi Primer dan Sekunder
 - Irigasi Tersier, Sumur Pantek dan Irigasi Perpipaan
 - Jalan Usaha Tani
 - Revitalisasi Pelabuhan
 - Sentra Produksi Pertanian
 - Sentra Produksi Peternakan
 - Komoditas perikanan budidaya
 - Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan
 - Ketersediaan lahan untuk pengembangan *Food Estate*
- b. Ketersediaan dan distribusi pangan
 - Keragaman pangan, ketersediaan pangan lokal, pemenuhan Cadangan Pangan Provinsi
 - Pusat Distribusi Provinsi (PDP)
 - Peningkatan kerjasama daerah untuk ketersediaan pangan.
- c. Keterjangkauan dan Penanganan Kerawanan Pangan
 - Akses Pangan Masyarakat
 - Penurunan daerah rawan pangan

Strategi dan fokus penanganan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Integrasi Program pada Tematik Stabilisasi Inflasi melalui Ketahanan Pangan Daerah

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Produksi Pangan	DPUPR	Irigasi Primer dan Sekunder	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Cibanten Kota Serang, Cibiruangeun Kab Lebak, Cicinta Kab Serang, Cikalumpang Kab Serang, Cikamunding 1 Kab Lebak, Cikamunding 2 Kab Lebak, Cikarang udik Kab Serang, Cikoncang Kab Lebak, Cilangkahan 1 Kab Lebak, Cilemer Kab Pandeglang, Cimanyangray Kab Lebak, Cipalabuh Kab Lebak, Cipari/Ciwuni Kab Serang, Cisangu Atas Kab Lebak, Cisangu Bawah Kab Lebak, Cisata Kab Pandeglang, Ciwaka Bawah Kota Serang, Kadugenep Kab Serang, Pasir Eurih Kab Pandeglang, Cisihih Kab Lebak	20856 m	13,400,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Irigasi dan Rawa	Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang dan Kota Serang	16 Dokumen	4,300,000,000	Pengawasan di Cibanten Kota Serang, Cibuangeun Kab Lebak, Cicinta Kab Serang, Cikalumpang Kab Serang, Cikamunding 1 Kab Lebak, Cikamunding 2 Kab Lebak, Cikarang udik Kab Serang, Cikoncang Kab Lebak, Cilangkahan 1 Kab Lebak, Cilemer Kab Pandeglang, Cimonyangray Kab Lebak, Cipalabuh Kab Lebak, Cipari/Ciwuni Kab Serang, Cisangu Atas Kab Lebak, Cisangu Bawah Kab Lebak, Cisata Kab Pandeglang, Ciwaka Bawah Kota Serang, Kadugenep Kab

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
										Serang, Pasir Eurih Kab Pandeglang, Cisi Kab LebakDED Cikalumpang Kab Serang, Cikarang udik Kab Serang, Cilangkahan 1 Kab Lebak, Cimanyangray Kab Lebak, Ciwaka Bawah Kota Serang,Cisangu Atas Kab Lebak, Cisangu Bawah Kab Lebak, Kadugenep Kab Serang, Pasir Eurih Kab Pandeglang

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
						Pengelolaan dan Pengawasan alokasi air irigasi	Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang dan Kota Serang	20 Daerah Irigasi (DI)	1,500,000,000	Fasilitasi Komisi Irigasi Provinsi Banten
		Dinas Pertanian	Irigasi Tersier dan Jalan Usaha Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kec Wanasalam, Kab Lebak dan Kec Cikeusik Kab Pandeglang	1 Dokumen	500,000,000	
						Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kec Wanasalam, Kab Lebak	1 Dokumen	300,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
			Sentra Produksi Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	8 Kabupaten/Kota	1 laporan	2,125,000,000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	8 Kabupaten/Kota	1 laporan	940,000,000	
						Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanenan Perkebunan	8 Kabupaten/Kota	1 laporan	350,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
						Pengawasan Sebaran Sarana Pascapane n Tanaman Pangan	8 Kabupaten/Kota	1 laporan	500,000,000	
						Pengawasan Sebaran Sarana Pascapane n Hortikultura	8 Kabupaten/Kota	1 laporan	400,000,000	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Bibit Tanaman		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih, Tanaman Pangan, Horti dan Perkebunan	8 Kabupaten/Kota	12 laporan	5,300,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
			Sentra Produksi Peternakan		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	8 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	390,000,000	
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	8 Kabupaten/Kota	1 laporan	300,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangka t Daerah	Fokus Pengem bangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokume n, dll)	Pagu Anggara n (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
				Kewenangan Provinsi						
						Penjamina n Peredaran Benih/Bib it Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	8 Kabupaten/Kota	1 Dokume n	300,000, 000	
		Dinas Kelautan dan Perikana n	Komodi tas Perikan an Budida ya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaa n Ikan di Laut	Penyediaa n Prasarana Pembudid ayaan Ikan di Laut	Desa Cigorondong, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang	1 Unit	16,757,8 10,000	Pembangunan Prasarana Produksi Unit Pembenihan Ikan Air Payau dan Laut untuk mendukung kegiatan pemberian benih bagi pokdakan ikan di Provinsi Banten

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
						Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Desa Cigorondong, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang	1 Unit	650,000,000	Pembangunan Sarana Produksi Unit Pembenihan Ikan Air Payau dan Laut untuk mendukung kegiatan pemberian benih bagi pokdakan ikan di Provinsi Banten
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah	Desa Cipeucang, Kecamatan Curugbarang, Kabupaten Pandeglang	1 Unit	1,321,190,000	Pembangunan Prasarana Produksi Unit Pembenihan Ikan Air Tawar untuk mendukung kegiatan pemberian benih ikan Air Tawar bagi pokdakan ikan di Provinsi Banten

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
						Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
						Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau	Desa Cipeucang, Kecamatan Curugbarang, Kabupaten Pandeglang	1 Unit	1,300,000,000	Pembangunan Sarana Produksi Unit Pembenihan Ikan Air Tawar untuk mendukung kegiatan pemberian benih ikan Air Tawar bagi pokdakan ikan di Provinsi Banten

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
						Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
		Komoditas Perikanan Tangkap		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (Induk)	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	(Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya (KP3B), KOTA SERANG)	3 Pelabuhan Perikanan	800,000,000	Penyusunan masterplan, DED dan AMDAL Pelabuhan Perikanan Cituis sebagai pendukung produksi perikanan tangkap
						Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	(Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya (KP3B), KOTA SERANG)	3 Layanan	150,000,000	Rapat Koordinasi Penyaluran BBM Bersubsidi bagi kapal perikanan kewenangan Provinsi serta pelaksanaan kesyahbandaran perikanan

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (KCD Selatan)	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan Muara Binuangeun Kabupaten Lebak	1 pelabuhan perikanan	56,000,000,000	pembangunan jetty, turap dan pabrik es Pelabuhan Perikanan Binuangeun-Cikeusik sebagai pendukung produksi perikanan tangkap
		DLHK		Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang dan Kota Serang	40 Kelompok	125,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
				Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu atau HHBK	Pembudidayaan Hasil Hutan Buka Kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya	Kecamatan Bojongmanik Kabupaten Lebak, Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Petir Kabupaten Serang, Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak	1 Unit Manajemen	375,000,000	Bimtek Produk Bambu di Kecamatan Bojongmanik Kabupaten Lebak, Bimtek Produk Aren di Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang, Bimtek produk Kopi di Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang, Bimtek Produk Jamur Tiram di Kecamatan Petir Kabupaten Serang, Bimtek Produk Lebah Madu Teuweul di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak
					Pelaksanaan Rehabilitasi di luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)	Pembangunan Penghijauan Di Lingkungan di luar Kawasan		200.000 Batang	750,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
						Hutan Negara				
2	Ketersediaan dan Distribusi Pangan	BPKAD	Ketersediaan lahan dan pemanfaatan aset untuk Food Estate	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	(Kota Serang, Curug, Sukajaya, BANTEN)	100%	400,000,000	
		Dinas Ketapang	Keberagaman Pangan, Ketersediaan pangan lokal, pemenuhan cadang	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	8 Kabupaten/Kota	1 laporan	200,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
			an pangan Provinsi		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	8 Kabupaten/Kota	1 laporan	200,000,000	
						Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	(Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya (KP3B), KOTA SERANG)	1 laporan	50,000,000	
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	8 Kabupaten/Kota, BANTEN	200 Ton	200,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	(Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya (KP3B), KOTA SERANG)	184 Ton	2,300,000,000	
		Dinas Perindustrian		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Penyusunan Peta Logistik Distribusi Komoditas Bahan Pokok	(Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya (KP3B), KOTA SERANG)	1 Dokumen	200,000,000	
						Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Provinsi	(Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya(KP3B), KOTASERANG)	1 Dokumen	100,000,000	
				Program Stabilitas Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Penjaminan Ketersediaan Barang Penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Tingkat Distributor dan Sub	8 Kabupaten/Kota, BANTEN	1 Dokumen	800,000,000	

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
						Distributor				
					Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota	(Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya-Masjid Al Bantani (KP3B), KOTA SERANG) dan 6 Lokasi untuk Pasar Murah	1 Dokumen	1,000,000,000	Bazar yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri dan HUT Banten. Pasar murah (Kelurahan Kotabaru Kecamatan Serang Kota Serang, Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Komp Persada Banten Kecamatan Walantaka Kota Serang, Ktr Camat Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, Puspem Kab Kecamatan Tigaraksa Kabupaten

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
										Tangerang, kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon)
		Biro Ekonomi dan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama Daerah untuk keterseediaan pangan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	(Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya (KP3B), KOTA SERANG)	2 Dokumen	80,000,000	2 kali rapat HLM, 3 kali rapat triwulanan
						Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Parekraf	(Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya (KP3B), KOTA SERANG)	1 Dokumen	75,000,000	3 kali rapat

No	Integrasi Tema	Perangkat Daerah	Fokus Pengembangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokumen, dll)	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
		Biro Pemerintahan	Peningkatan Kerjasama Daerah untuk keterseediaan pangan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	8 Kabupaten/Kota, APPSI dan 10 Provinsi Anggota FKD - MPU	10 dokumen	770,000,000	Iuran APPSI FKD-MPU tahun 2024, Fasilitasi agenda MOU/kerjasama, koordinasi dan konsultasi dalam rangka sinergitas penyelenggaraan kerjasama ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kab/Kota, menghadiri undangan Rakernas/Seminar pada Kementerian/Lembaga APPSI dan 10 anggota FKD-MPU dalam rangka optimalisasi kerjasama daerah
						Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	8 Kabupaten/Kota, BANTEN	1 Dokumen	100,000,000	Fasilitasi kerjasama Badan Usaha/Swasta, koordinasi dan konsultasi ke Kementerian/Lembaga dan

No	Integrasi Tema	Perangka t Daerah	Fokus Pengem bangan	Indikasi Kegiatan			Lokasi (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa)	Target (Km. Ha, Unit, Dokume n, dll)	Pagu Anggara n (Rp.)	Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
										pemerintah Kabupaten/Kota
3	Keterjangkaua n dan Penurunan Daerah Rawan Pangan	Dinas Ketapan g	Akses Pangan Masyar akat	Program Peningkata n Diversifikas i Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengemba ngan Kelembag aan Distribusi pangan Provinsi	Kab Pandeglang, Lebak dan Kab Serang	10 Unit	200,000, 000	
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Koordinasi Penyeleng garaan Cadangan Pangan Pemerinta h Provinsi	8 Kabupaten/Kota, BANTEN	1 laporan	250,000, 000	

Sumber Data : Bappeda, Tahun 2023

4.5.4 Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki keterkaitan yang kuat dengan prevalensi stunting. Menurut Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kunci untuk menurunkan stunting adalah penanganan kemiskinan, karena kemiskinan merupakan salah satu penyebab ibu dan anak tak memperoleh gizi yang cukup. Pertimbangan inilah yang menjadi dasar pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting menjadi satu kesatuan yang harus menjadi fokus perhatian pada tahun anggaran 2024 dengan pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan spasial.

Penanganan secara menyeluruh (holistik) serta pelaksanaan program dan kegiatan dari masing-masing unit kerja yang dilakukan secara integratif diharapkan dapat mewujudkan sasaran target pencapaian pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di Provinsi Banten. Merujuk kepada data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Jumlah penduduk yang tergolong dalam kategori kemiskinan berjumlah 156.450 jiwa atau mencapai 1,18% dari total penduduk. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 1,50%, namun komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan target 0% kemiskinan ekstrem di tahun 2024 serta dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menjadikan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tetap memberikan fokus perhatian terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah.

Tabel 4.13
Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan Ekstrem di
Provinsi Banten

Kabupaten/ Kota	2021		2022	
	Jumlah Penduduk Miskin ekstrem (dlm 000)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem	Jumlah Penduduk Miskin ekstrem (dlm 000)	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem
Pandeglang	27,41	2,24	22,43	1,82
Lebak	24,03	1,83	28,51	2,17
Tangerang	84,28	2,20	59,44	1,52
Serang	9,46	0,63	11,37	0,75
Kota Tangerang	36,54	1,61	17,29	0,75
Kota Cilegon	2,27	0,51	2,44	0,54
Kota Serang	7,32	1,04	7,21	1,01
Kota Tangsel	4,57	0,26	7,76	0,44
PROVINSI BANTEN	195,88	1,50	156,45	1,18

Sumber: BPS Provinsi Banten

Data sebagaimana tertuang pada tabel diatas memberikan rujukan perlunya pendekatan spasial dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi. Kabupaten Lebak dan Pandeglang merupakan daerah dengan persentase kemiskinan ekstrem di atas nilai rata-rata provinsi. Bahkan jika dibandingkan data tahun sebelumnya, persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lebak justru menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021 persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lebak menunjukkan angka 1,83% meningkat menjadi 2,17% pada tahun 2022.

Pendekatan penanganan kemiskinan ekstrem secara spasial juga didasari pada pertimbangan jumlah penduduk yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem. Tabel diatas juga memperlihatkan kabupaten Tangerang merupakan wilayah di Provinsi Banten yang memiliki jumlah kemiskinan ekstrem paling besar. Pada Tahun 2022 jumlah penduduk yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem sebesar 59.440 jiwa atau mencapai 37,77% dari total penduduk penyandang kemiskinan ekstrem di provinsi Banten.

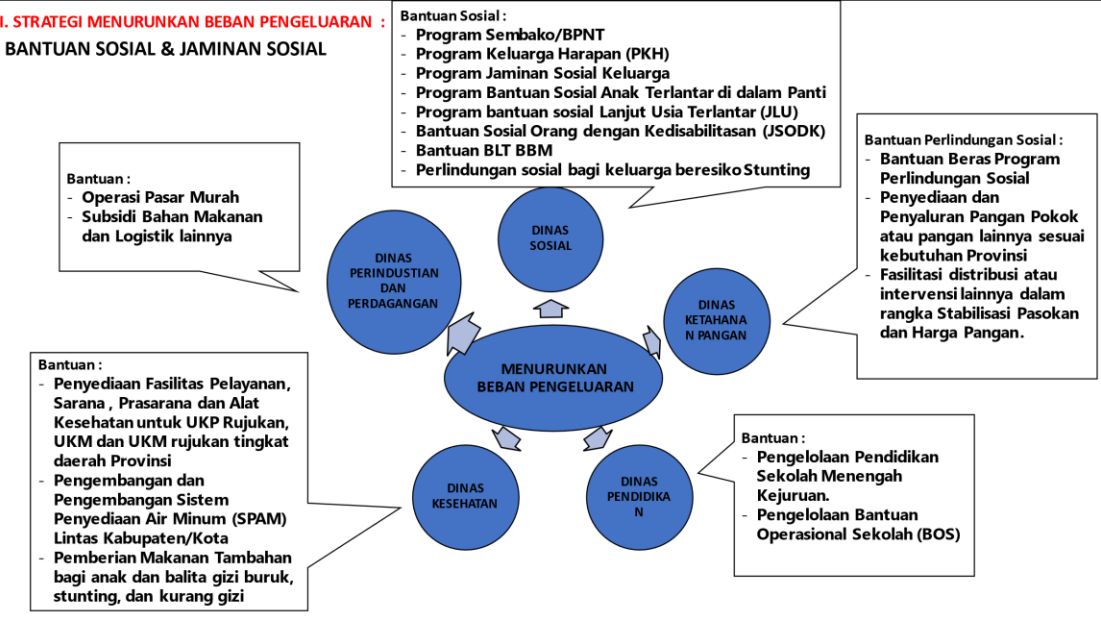
Strategi penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun anggaran 2024 tetap mengacu kepada strategi penanganan kemiskinan ekstrem yang ada di Pemerintah Pusat. Berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- pengurangan beban pengeluaran masyarakat
- peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Berdasarkan rujukan strategi penanganan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan Pemerintah, maka pada level Pemerintah daerah, implementasi strategi tersebut disajikan sebagai berikut:

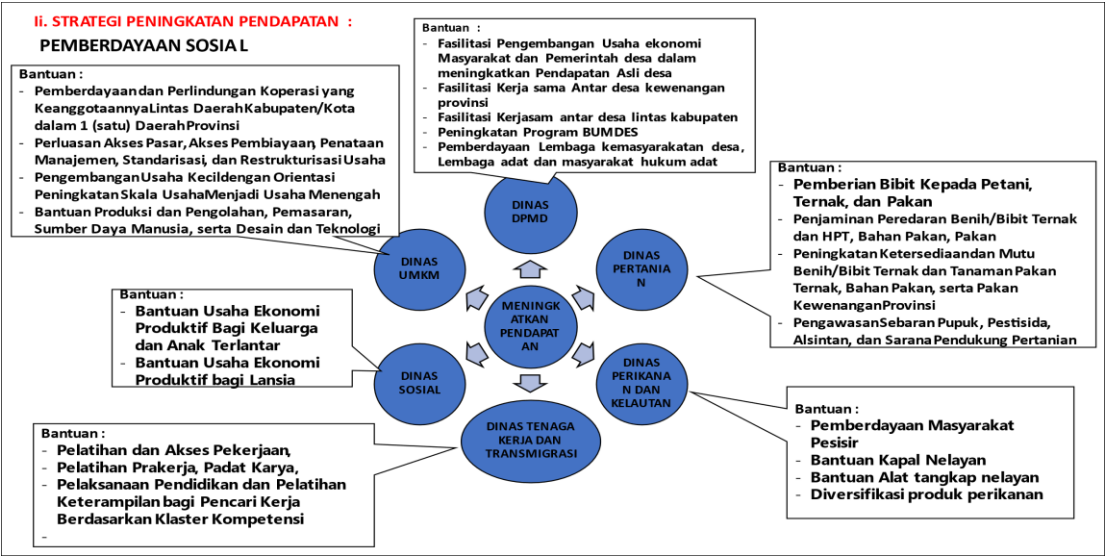


Gambar 4.3
Strategi penanganan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan pada level Pemerintah Daerah



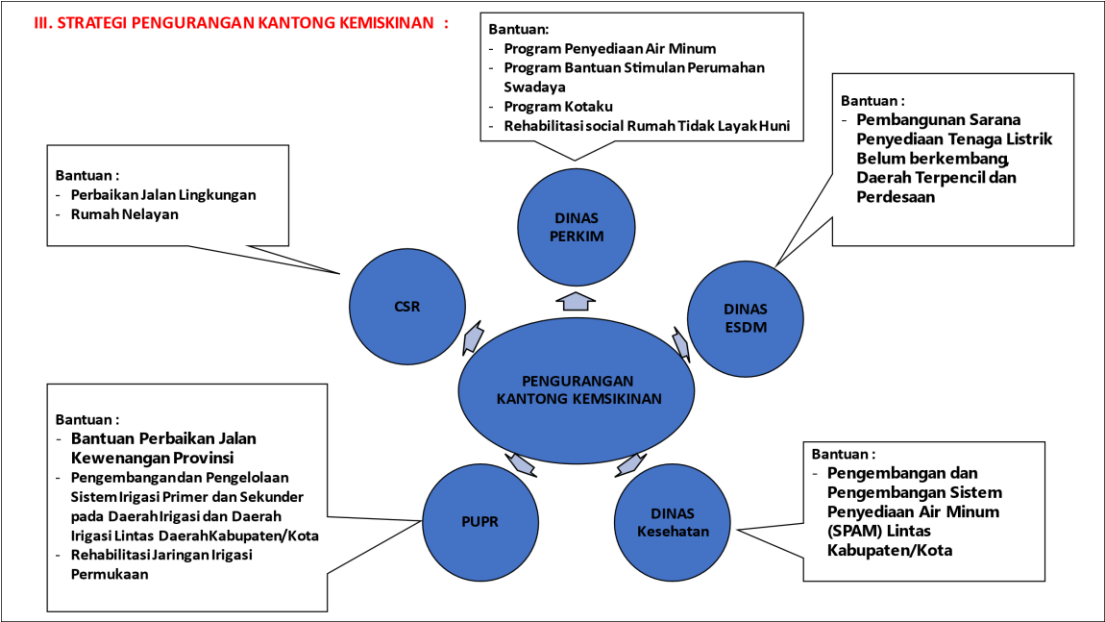
Gambar 4.4
Strategi Menurunkan Beban Pengeluaran

Strategi kebijakan melalui penurunan beban pengeluaran masyarakat dilakukan Pemerintah Provinsi Banten melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesehatan, Perindustrian dan Perdagangan Ketahanan Pangan Serta Pendidikan. Seluruh program dan kegiatan ini menyasar individu sasaran yang terdapat dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).



Gambar 4.5
Strategi Peningkatan Pendapatan

Strategi kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem berikutnya dilakukan melalui pendekatan guna meningkatkan pendapatan masyarakat sasaran sehingga mereka tidak lagi hidup dibawah standar garis kemiskinan ekstrem setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*), serta pendekatan lokasi lingkungan tempat tinggal kelompok sasaran agar mereka mendapatkan pelayanan dasar dalam rangka peningkatan kualitas hidupnya. Dengan adanya pendekatan lokasi ini diharapkan kantong kantong kemiskinan dapat diminimalisir.



Gambar 4.6
Strategi Pengurangan Kantong Kemiskinan

Pendekatan kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan masing-masing

Perangkat Daerah juga menjadi bagian penanganan permasalahan stunting. Adanya kurang asupan gizi untuk ibu dan anak serta kondisi sanitasi yang tidak layak sebagai faktor penyebab stunting dapat diminimalisir dengan implementasi strategi kebijakan yang telah disampaikan sebelumnya. Meskipun demikian, kebijakan spesifik penanganan stunting tetap mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yakni Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagai berikut:

- A. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa
- B. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- C. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah;
- D. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- E. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Operasionalisasi kelima pilar tersebut dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini:

- Peningkatan Investasi Industri dan Dunia Usaha;
 - Intensifikasi Utilitas Kawasan Industri dan Ekstensifikasi Kawasan Industri.
- c. Penciptaan Wirausaha
- Pengembangan Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT);
 - Pembinaan dan pengembangan UKM;
 - Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - Kewirausahaan Pemuda;
 - Kewirausahaan Perempuan;
 - Pembinaan dan Pengembangan IKM.

Adapun program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana pada tematik Pengurangan Pengangguran dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Integrasi Program pada Tematik Penanganan Pengangguran melalui Link and Match Pendidikan Vokasi

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	OPD Pelaksana
Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Revitalisasi SMK melalui penguatan kelembagaan SMK, Penguatan pengelolaan keuangan SMK dan Penguatan Manajerial SMK Negeri dan SMK Swasta	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Menengah	Pendidikan Kejuruan	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dindikbud
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Teknis	Kompetensi Akuntansi Keuangan Bagi Guru SMK; Pelatihan Pengelolaan Dana BOS Bagi Bendahara SMA/SMK dan SKh	Kab. Pandeglang	BPSDM
	Modernisasi BLKI Serpong dan Pembangunan BLKI Baru	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Kota Tangerang Kota Serang	Disnaker
			▪ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ▪ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan			

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		
	Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Pelayanan Antar Kerja - Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Disnaker
	Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata - Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif - Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dispar
Peningkatan Kuantitas Permintaan Tenaga Kerja	Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam MoU SMK/Vokasi	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Serang	

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
	Implementasi Super Deductive Tax	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Kota Serang	DPMPTSP
	Keterlibatan UKM dalam menyerap angkatan kerJa	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dinkop UKM
	Evaluasi Pasar Kerja mengenai efektivitas MoU SMK/Vokasi dengan Dunia Usaha/Dunia Industri	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Kota Serang	Dindikbud
		Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Disnakertrans
	Peningkatan Investasi Industri dan Dunia Usaha	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	DPMPTSP

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
	Intensifikasi Utilitas Kawasan Industri dan Ekstensifikasi Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Disperindag
Penciptaan wirausaha	Pengembangan Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT)	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dinkop KUKM
	Pembinaan dan pengembangan UKM	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dinkop KUKM
	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dispar
	Kewirausahaan Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang	Dispora

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
				Kota Cilegon	
				Kota Tangerang	
				Kota Tangsel	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Kab. Serang	Dispora
				Kab. Tangerang	
				Kab. Pandeglang	
				Kab. Lebak	
				Kota Serang	
				Kota Cilegon	
				Kota Tangerang	
				Kota Tangsel	
	Kewirausahaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kab. Serang	DP3AKKB
				Kab. Tangerang	
				Kab. Pandeglang	
				Kab. Lebak	
				Kota Serang	
				Kota Cilegon	
				Kota Tangerang	
	Pembinaan dan Pengembangan IKM	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Serang	Disperindag
				Kab. Tangerang	
				Kab. Kota Cilegon	
				Kota Tangerang	
	Literasi dan Minat Baca	Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi - Pengembangan dan Pemeliharaan Pelayanan Perpustakaan Elektronik - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan - Pengembangan Pelayanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Serang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Kab. Tangerang	
				Kab. Pandeglang	
				Kab. Lebak	
				Kota Serang	
				Kota Cilegon	
				Kota Tangerang	
				Kota Tangsel	
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan	Kab. Serang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Kab. Tangerang	

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	OPD Pelaksana
			Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Tingkat Pendidikan	Kab. Pandeglang	
			▪ Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Kab. Lebak	
					Kota Serang	
					Kota Cilegon	
					Kota Tangerang	
					Kota Tangsel	
		Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Provinsi	Dinamis	Kab. Serang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			▪ Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Kab. Tangerang	
			▪ Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi		Kab. Pandeglang	
			▪ Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		Kab. Lebak	
			▪ Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI		Kota Serang	
			▪ Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		Kota Cilegon	
			▪ Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		Kota Tangerang	
					Kota Tangsel	
			Pengelolaan dalam Sistem Kearsipan Provinsi	Simpul Jaringan Informasi Nasional Tingkat	Kab. Serang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			▪ Penyediaan Informasi, Akses dan Pelayanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		Kab. Tangerang	
					Kab. Pandeglang	
					Kab. Lebak	
					Kota Serang	
					Kota Cilegon	
					Kota Tangerang	
					Kota Tangsel	
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		Kab. Serang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			▪ Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Kab. Tangerang	
					Kab. Pandeglang	
					Kab. Lebak	
					Kota Serang	
					Kota Cilegon	
					Kota Tangerang	
					Kota Tangsel	

Sumber Data : Bappeda, Tahun 2023

4.5.6 Akselerasi Reformasi Birokrasi Berdampak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024. Pemerintah melakukan akselerasi dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi, sehingga semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat disinkronisasikan pada hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Sehingga harus dilakukan perubahan terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten.

Tabel 4.15
Akselerasi Reformasi Birokrasi Berdampak

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
Kelembagaan dan Tata Laksana yang Lincah dan Efektif	Optimalisasi penyederhanaan birokrasi	Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan • Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Pemprov Banten	Biro Organisasi
	Evaluasi implementasi peta proses bisnis	Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja • Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Pemprov Banten	Biro Organisasi
Sistem Akuntabilitas dan Pengawasan yang Berkualitas	Peningkatan kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja • Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Pemprov Banten	Biro Organisasi
		Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan • Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah • Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemprov Banten	Bappeda

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Pemprov Banten	Bappeda
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal • Reviu Laporan Kinerja • Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pemprov Banten	Inspektorat
	Akselerasi pembangunan zona integritas	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi • Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pemprov Banten	Inspektorat
	Penguatan SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal • Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah • Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah • Kerjasama Pengawasan Internal	Pemprov Banten	Inspektorat
	Penguatan SPBE dalam optimalisasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi • Pendaftaran nama domain Pemerintah Provinsi • Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi • Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi	Pemprov Banten	DKISP
			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi • Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi • Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik • Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah • Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah • Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi • Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Pemprov Banten	DKISP

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			• Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik • Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas • Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah • Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) • Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		
Regulasi yang Harmonis dan Berbasis Bukti	Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi/kebijakan	Fasilitasi Koordinasi Hukum	Dan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan • Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Provinsi Banten	Biro Hukum
	Optimalisasi evaluasi regulasi/kebijakan	Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayan Dasar • Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan • Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan • Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayan Dasar • Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata • Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja • Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi,	Provinsi Banten	Biro Pemotda

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		
		Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam • Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan • Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup • Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD • Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha • Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi • Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD • Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah • Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Provinsi Banten	Biro Ekbang
Kapasitas dan Profesionalitas ASN	Akselerasi penyusunan HCDP	Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN • Pengelolaan Assessment Center	Provinsi Banten	BKD
	Penyelenggaraan Diklat berbasis data	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis • Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum • Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,	Provinsi Banten	BPSDM

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			dan Urusan Pemerintahan Umum		
	Pengembangan Manajemen Talenta ASN	Kepegawaian Daerah		Provinsi Banten	BKD
Core Value ASN BerAKHLAK	Peningkatan Budaya Kerja	Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Provinsi Banten	Biro ORB
	Pemberian Reward bagi PD yang berhasil menerapkan Core Value ASN Berakhlak	Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Provinsi Banten	Biro ORB
Dukungan Penyelenggaraan PEMILU	Peningkatan Koordinasi penyelenggara n PEMILU	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemprov Banten	Bakesbangpol

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
	Optimalisasi evaluasi persiapan penyelenggaraa n PEMILU	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik • Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemprov Banten	Bakesbangpol

Sumber Data : Bappeda, 2023

4.6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan Rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Provinsi Banten Tahun 2024, disajikan sebagaimana tabel 4.16

Tabel 4.16
Rumusan Usulan Program/kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
Urusan Sosial					
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dapat menyebabkan kehidupan orang lanjut usia tidak terjamin, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan sosial untuk lansia	Masyarakat	25	Dinas Sosial
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Masih kurangnya sarana dan prasarana posyandu di desa, sehingga pemerintah Provinsi Banten dimohon memberikan bantuan berupa (Pembangunan sarana dan prasarana posyandu)	Masyarakat	41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terbatasnya SDM di kelurahan sehingga pelayanan kurang maksimal	Pegawai Kelurahan	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penataan Desa	Penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat	Bantuan balai warga desa status desa tertinggal	Masyarakat	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Masih banyak masyarakat yang belum bisa memaksimalkan kemampuannya sehingga belum siap bekerja yang mengakibatkan banyaknya pengangguran, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat melaksanakan (pelatihan kerja)	Masyarakat	17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi	Kurangnya fasilitas olahraga untuk menunjang kegemaran masyarakat dalam bidang olahraga	Masyarakat	8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
	kewenangan provinsi	daerah			
Urusan Pariwisata					
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan strategis provinsi	kawasan pariwisata Masih kurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi Danau Kelapa Dua, diharapkan untuk mempromosikan wisata Danau	Masyarakat	7	Dinas Pariwisata
Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi					
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Kerja Kompetensi	Latihan Berdasarkan Belum Optimalnya Penyediaan lapangan pekerjaan telah mengakibatkan angka pengangguran terus mengalami peningkatan, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan pelatihan sablon kaos	Masyarakat	37	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi	Masyarakat banyak yang belum paham tata cara perizinan bagi pelaku UMKM	Masyarakat	4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang Menjadi	Masih kurangnya pembinaan publikasi penguatan daerah khususnya pada media massa damar banten, sehingga	Masyarakat	1	Dinas Penanaman Modal dan

Program	Kegiatan		Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
	Kewenangan Provinsi	Daerah	pemerintah terkait agar memberikan support/pembinaan terhadap media khususnya media Damar banten			Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Energi Sumber Daya Mineral						
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Belum adanya perahu karet untuk evakuasi korban banjir	Masyarakat	1	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Terpencil dan Perdesaan		- Masih banyak nya Lampu penerangan jalan yang belum terpasang - Kondisi warga yang masih belum menikmati listrik sehingga perlu adanya penambahan tiang listrik Masih terbatasnya tiang listrik yang ada sekarang	Masyarakat	3	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Urusan Ketahanan Pangan						
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum memiliki alat atau mesin usaha sehingga menjadi kendala usaha	Masyarakat	2	Dinas Ketahanan Pangan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	- kenaikan harga bahan pokok yang terus melambung sehingga daya beli masyarakat menurun	Masyarakat	1	Dinas Ketahanan Pangan
Urusan Kesehatan					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	- tidak adanya sarana operasional/kendaraan gawat darurat menjadi kendala masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan (bantuan alat transportasi ambulance) - masih adanya gizi buruk di kota Serang - masih banyak terdapat anak balita yang kurang gizi dan stunting - masih banyak terdapat gizi buruk dan stunting di kota Serang - Masih kurangnya prasarana kesehatan yang memadai sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberi bantuan Mobil Ambulance	- Masyara kat - Balita dan anak-anak - Ibu hamil dan anak balita	5	Dinas Kesehatan
Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana					
Program Pemberdayaan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta	- Masih kurangnya pemberdayaan perempuan telah menghambat	- Masyara kat	6	Dinas Pemberdayaan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	peningkatan perekonomian keluarga, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan melalui bimtek (bimbingan teknis) tata boga - kurangnya pembinaan dan pengembangan SDM Terhadap kelompok tata boga - Banyak Ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan memperoleh penghasilan belum mempunyai keterampilan yang mumpuni - Tingginya minat ibu rumah tangga yang ingin berjualan makanan dan memerlukan pelatihan tata boga	Provinsi Banten, Kader Partai Politik, dan Lembaga Masyarakat Kelompok Tata Boga - Masyarakat - Masyarakat		Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	- Kurang berdayanya perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga - peningkatan SDM perempuan sangat dibutuhkan karena di kota Serang masih minim nya calon legislatif perempuan di setiap pemilu - peranan perempuan di bidang ekonomi sudah mulai meningkat maka dibutuhkan adanya pelatihan dan pemberdayaan perempuan - Pendangkalan dan penyempitan saluran drainase telah menghambat pengaliran air, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun drainase lingkungan/udith	- Masyarakat - KPPI - Provinsi Banten - Kaukus Parlemen Perempuan Banten	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		- Belum optimalnya pembinaan terhadap perempuan sehingga pemerintah provinsi banten dapat mensupport kegiatan pembinaan atau pelatihan - Masih belum optimalnya pembinaan dan pelatihan terhadap perempuan, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan untuk membantu mendorong program pada kaukus parlemen perempuan banten - Pengelolaan dan penghasilan produksi UMKM sangat rendah, karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam berwirausaha UMKM, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bimbingan/pelatihan e marketing - kurang berdayanya perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga			
Usulan Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	- Masih kurangnya prasarana persampahan telah meningkatkan pencemaran lingkungan, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan kendaraan angkutan sampah roda tiga - kurangnya sarana dan prasarana kebersihan di desa, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat	- Pengelola Bank Sampah - Masyarakat Bank Sampah	59	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		(membantu memberikan motor pengangkut sampah)	- Kelompok bank sampah dan Masyarakat		
		- Masih kurangnya sarana/prasarana persampahan telah meningkatkan pencemaran lingkungan, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan menyediakan TPPS			
		- Masih kurangnya tempat pembuangan sampah sementara			
		- Kurangnya kendaraan pengangkut sampah			
		- Membutuhkan alat bantuan untuk pengangkutan sampah Cator			
		- Telah terjadi penumpukan sampah lingkungan menimbulkan bau tak sedap dan dapat menimbulkan penyakit, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diminta menyediakan bak penampungan sampah/gerobak sampah			
		- tidak adanya gerobak sampah			
		- masih kurangnya prasarana persampahan telah meningkatkan pencemaran lingkungan , sehingga pemerintah diharapkan memberikan bantuan berupa pembinaan terhadap masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan pembentukan bank sampah dan bantuan kendaraan angkutan sampah / gerobak sampah			

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		- Agar sampah organik bisa diolah dan dimanfaatkan - Belum adanya TPA - Akibat terjadi penumpukan sampah telah mengganggu kesehatan masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan Gerobak Sampah - Masih kurangnya sarana tempat sampah telah meningkatnya tumpukan sampah dan pencemaran lingkungan, diharapkan Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan tempat sampah yang bisa diangkut menggunakan truk - Masih Kurangnya sarana dan Prasarana Persampahan sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. - Masih kurangnya sarana prasarana Persampahan akan mengakibatkan pencemaran di lingkungan permukiman Warga, Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan Kendaraan alat angkut roda tiga/Cator dan dapat dapat membangun tempat Penampungan sampah sementara - Masyarakat mengharapkan adanya tempat penampungan sampah sementara dan mengharap bantuan kendaraan roda			

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		tiga/Cator dari Pemerintah Provinsi Banten			
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	- Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi - Banyaknya lahan kosong/ Reboisasi di wilayah kec.cirinten karena adanya paska tambang jadi lahan tersebut rawan longsor,masyarakat cirinten meminta kepada dinas dlhk,dinas lingkungan hidup prov banten,untuk bersedia memberikan benih-benih unggul untk di tanam d lahan tersebut luas nya mencapay 5 H	Masyara kat	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	- Banyaknya lahan kosong, ingin peningkatan bagi warga desa untuk budidaya pohon rambutan dan mengurangnya pengangguran para pemuda sehingga pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan	Masyara kat	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- untuk program penghijauan kembali, atau penghutanan kembali dengan penanaman kembali hutan yang telah ditebang supaya tidak terjadi bahaya dari letusan gunung berapi. - Kerusakan jalan di kawasan permukiman telah menghambat aktivitas masyarakat,	Masyara kat	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun jalan lingkungan			
		- belum tersedianya turap bantaran kali Ciberang yang dikhawatirkan longsor , sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun turap bantaran kali ciberang			
Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	- minimnya sarana penyerapan air ketika musim penghujan tiba - Kondisi warga yang mendesak akan kebutuhan air bersih, karena sumur bor yang ada sekarang tidak bisa mengcover jumlah warga yang semakin banyak	- Masyarakat	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Usulan Perhubungan					
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	- banyak pejalan kaki yang mengeluh bahwa di sekitar tempat tinggalnya jarang sekali terdapat trotoar padahal desa cikande permai adalah tempat yang padat penduduk dan pabrik sehingga sangat dibutuhkan trotoar demi kenyamanan dan keamanan masyarakat (pembangunan trotoar) - kurangnya Pencahayaan jalan sehingga banyak terjadi kecelakaan dan kejahatan, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan (pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU))	- Masyarakat	77	Dinas Perhubungan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		- Belum adanya dan optimalnya penerangan jalan Umum desa - Minimnya PJU mengakibatkan Terjadinya Kejahatan dan menjadikan lokasi tempat asusila, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun Penerangan Jasa/Jalan Umum - Minimnya Penerangan Jalan, dapat menghambat aktivitas masyarakat dan sering mengakibatkan kecelakaan, mohon kepada pemerintah agar membantu PJU - Akibat kurangnya penerangan jalan mengakibatkan rawannya tindak kriminal dan banyak kendaraan yang terperosok - Masih kurangnya sarana perlengkapan jalan dapat membahayakan pengguna jalan, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan melakukan pemasangan APJ - masih belum terpasangnya rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk arah menuju suatu wilayah - Jln Raya Cipanas Kab,Bogor jln ketika malam hari sangat gelap di titik tertentu yg ada di kawasan jln provinsi. - Masyarakat Mengeluhkan Penerangan Jalan Yang Minim, Bahkan nyaris Tidak			

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		ada Penerangan jln dari Pemerintah Provinsi Banten - Minimnya prasarana penunjuk jalan dan penerangan jalan raya yg berlokasi di Maja dan Curug Bitung wilayah/denah jln Provinsi Banten - Para sopir Angkutan Antar kota Mini Bus/Elf/PS Mengeluhkan adanya Angkutan BUS AKP,DAMRI Karena Penumpang Berkurang Yang Jadi nya Berkurang nya Penghasilan para sopir. - Masih kurangnya sarana perlengkapan jalan dapat membahayakan pengguna jalan, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan melakukan pemasangan PJU - Penerangan Jaringan lampu yang terbatas sehingga akses jalan yang menjadi gelap - Belum adanya PJU di kawasan permukiman rawan kecelakaan dan criminal - kurangnya penerangan jalan umum telah sering mengakibatkan terjadinya kurang tidaknyaman pengguna jalan - Kurangnya sarana prasarana jalan Umum telah menghambat Aktivitas Masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi Banten			

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		diharapkan membangun sarana prasarana Umum - Belum adanya PJU di kawasan Jl. raya palka dari desa sukadan s/d desa ujung tebu rawan kecelakaan dan kriminal - Dikeluhkan penerangan jalan - Kurang Baiknya kondisi penerangan jalan - Lampu Penerangan jalan umum - penerangan jalan yang belum ada membuat masyarakat sulit beraktifitas pada malam hari - tidak ada Lampu penerangan jalan - Tidak ada lampu Penerangan jalan Umum - Banyak lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi di sekitar jalan protokol yang berstatus Provinsi dari jalan PCI Cilegon sampai ke arah Merak - Belum adanya lampu penerangan jalan - Pemasangan lampu penerangan jalan di Rt.04 Rt. 09 Rw. 04 Kel. Bagendung Kec. Cilegon Kota Cilegon - ruas jalan yang dilalui pada malam hari cukup gelap dikhawatirkan mengundang aksi kejahatan - Belum optimalnya penyediaan perlengkapan infrastruktur pendukung jalan raya, sehingga masyarakat membutuhkan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU)			

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		- Mengharapkan lampu penerangan jalan guna menunjang aktivitas Masyarakat - Perlu adanya Lampu Penerangan jalan untuk menghindari rawan kecelakaan - Untuk menghindari kerawanan serta banyak juga Masyarakat yang lalulalang beraktivitas siang dan malam. - untuk menghindari kerawanan serta mobilisasi Masyarakat siang dan malam.			
Urusan Pertanian					
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	- Keterbatasan permodalan usaha pembibitan ternak, sehingga pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan (bantuan bibit ternak) - masih kurangnya prasarana pertanian sehingga menghambat hasil panen para petani (bantuan hand traktor) - pertanian di kecamatan walantaka masih menggunakan proses manual atau tradisional maka hasil yang diperoleh pun belum mencapai hasil yang baik untuk pemenuhan kebutuhan pangan warga. - Banyaknya lahan kosong, ingin peningkatan bagi warga desa-desa yg berlokasi di kabupaten Lebak Membutuhkan benih tanam seperti Cabay merah besar & cabe Merah Kriting.Cabe Rawit, 3 jenis itu Yang	- Peternak - Petani - Masyara kat - kelompok tani panca makmur	56	Dinas Pertanian

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		dibutuhkan masyarakat Kab.Lebak Mengurangi pengangguran para pemuda Menjadi Petani Milenial,Petani Produktif Dan Aktif d sektor pertanian,sehingga pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan Benih yg diusulkan diharapkan masyarakat Kab. lebak. - Banyaknya lahan kosong, ingin peningkatan bagi warga desa untuk budidaya benih hortikultura dan mengurangnya pengangguran para pemuda sehingga pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan. - Masih kekurangannya prasarana pertanian telah menghambat upaya peningkatan kesejahteraan petani dan hasil pasca panen kurang maksimal sehingga pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan - Masyarakat Bojongmanik Meminta Kepada Dinas Pertanian Program Penanaman Kacang Tanah Di Lahan Yang Berlokasi Di Ds,Bojongmanik - Masyarakat Petani Kab.Lebak / Para Kelompok tani yang ada di Kab.Lebak mengajukan atau mengusulkan pengadaan 200 Unit power Thresher, 500			

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		Unit Hand Sprayer Elektrik dan 100 unit mesin rumput, akan menunjang kemudahan para kelompok tani yang ada di Kab.Lebak. - Masyarakat meminta kepada pemerintah provinsi banten untuk mengalokasikan anggaran bibit pohon penanggulangan longsor akibat reboisasi lahan. - Pengembangan ternak/peternakan untuk di desa tersebut dan kotoran ternak tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat bisa dijadikan pupuk organik - Tidak adanya saluran irigasi untuk luas sawah 10 h di daerah desa ciherang yg panjangnya mencapai 2000 meter bangunan irigasi permanen - Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membajak sawah - rendahnya SDM yang dimiliki oleh petani dan hewan ternak yang sulit didapat untuk mengolah tanah yang luas serta tidak cukupnya biaya untuk membeli alat pertanian mengakibatkan sering terjadi keterlambatan pengolahan tanah - belum adanya teknologi dan inovasi untuk peningkatan hasil dan kualitas pertanian			

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		- pengelolaan pertanian masih manual dan belum ada inovasi teknologi - Masih kurangnya prasarana pertanian telah menghambat upaya peningkatan kesejahteraan petani, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan Hand traktor - Masih kurangnya prasarana pertanian telah menghambat upaya peningkatan kesejahteraan petani, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan Quick Capung/hand traktor - Kesulitan masyarakat dalam hal pengolahan tanah sawah yang selama ini mengandalkan dari alat Tradisional, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat menyediakan alat Traktor untuk membajak sawah - kurangnya alat pertanian di Desa Pasir Eurih dan Luasnya lahan Pertanian sehingga Membutuhkan alat Pertanian untuk mempercepat pengolahan tanah			
Urusan Perpustakaan dan Kearsipan					
Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	- banyaknya kesibukan bagi warga yang bekerja maka untuk ke kantor dukcapil membuat KTP membutuhkan waktu luang.	- Masyarakat	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	- PAUD KEMUNING kel. Gaga, Kec. Larangan Belum mempunyai Perpustakaan, tempat tersedia dan mengharapkan adanya buku-buku perpustakaan untuk sekolah tersebut - Masih rendahnya minat baca khususnya kaum pelajar	Masyarakat	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins	- Untuk Menunjang Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Perdagangan UMKM di Ds.Kp,dan Kec. yg Ada Di Kab.Lebak. Banten	Masyarakat	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	- Untuk Menunjang Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian,Perdagangan UMKM Di Wilayah Kab.Lebak.Banten - Masih Kurangnya Pelaku UMKM terhadap Teknologi Digital	- Masyarakat - Pelaku UMKM	2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	- Masih belum optimalnya pembinaan dan pelatihan UMKM pada yayasan, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan untuk membantu dan mensupport pelatihan UMKM	- Yayasan Pemberd ayaan perempuan an	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
	Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				
Urusan Penanggulangan Bencana Daerah					
Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	- Tidak adanya Penurapan Bahu Jalan Yang Kerap Terjadi Longsor	- Masyarakat	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Urusan Pendidikan					
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas	Keterbatasan ruang kelas telah menyebabkan lulusan SMP sederajat tidak tertampung, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun unit sekolah baru -	- Siswa sekolah menengah atas	4 usulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sudah tidak bisa menampung jumlah siswa, di karenakan kurang lahan untuk penambahan ruang kelas	- Sekolah dan masyarakat	2 usulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Belum adanya Sekolah Menengah Atas, mengharapka adanya pembangunan Sekolah Menengah Atas	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kurangnya Daya Tampung SMA Negeri yang sudah ada	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Buruknya kondisi halaman sekolah	- Sekolah SMA 8	1 usulan	Dinas Pendidikan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
			Negeri Kota Serang		dan Kebudayaan
		Tidak ada pagar pembatas Sekolah Menengah Negeri 8 Kota Serang	- Sekolah SMA 8 Negeri Kota Serang	1 usulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Sekolah Kejuruan	Pendidikan Menengah Keterbatasan ruang kelas telah menyebabkan lulusan SMP sederajat tidak tertampung, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun unit sekolah baru	- Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	1 usulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Masih banyak masyarakat yang belum bisa memaksimalkan kemampuannya sehingga belum siap bekerja yang mengakibatkan banyaknya pengangguran, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat melaksanakan pelatihan kerja	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Belum tersedia SMK Negeri di wilayah Ciledug, Cipondoh, dan Cisauk	- Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	4 usulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Masih belum terdapatnya sarana prasarana pendukung bagi kegiatan belajar mengajar di sekolah SMK	- Siswa	2 usulan	Dinas Pendidikan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		Menambahkan Ruang kelas SMK Serpong Utara	- Masyarakat	1 usulan	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Banyak lulusan SMK yang sulit mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah maka pemerintah mengupayakan lowongan pekerjaan bagi calon lulusan SMK	- Anak sekolah	1 usulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kurangnya SMKN di wilayah Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg Dengan Jumlah Penduduk Yang Padat	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Khusus Pendidikan	Belum tersedia SKH negeri di wilayah Kota Tangerang	- Siswa Sekolah Khusus	1 usulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi sosial bagi warga disabilitas keluarga tidak mampu	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Belum adanya pendidikan khusus untuk Penyandang Disabilitas	- Masyarakat	3 usulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Masih terdapat sekolah SD , SLTP dan SLTA yang bangunannya kurang mendukung bagi aktivitas belajar anak	- Anak sekolah	1 usulan	Dinas Pendidikan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					dan Kebudayaan
		Masih minimnya sekolah SMA/SMK Negeri di Pulomerak dimana kebijakan Pemerintah dalam PPDB berdasarkan Zonasi sehingga sangat menyulitkan warga	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Banyaknya lahan kosong/Reboisasi di wilayah kec.cirinten karena adanya pasca tambang jadi lahan tersebut rawan longsor, masyarakat Cirinten meminta kepada dinas dlhk, dinas lingkungan hidup Provinsi Banten untuk bersedia memberikan benih-benih unggul untuk di tanam di lahan tersebut luasnya mencapai 5h	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Banyaknya lahan kosong, ingin peningkatan bagi warga desa untuk budidaya pohon rambutan dan mengurangnya pengangguran para pemuda sehingga pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Masih banyak terdapat warga kota serang yang masih belum paham pola hidup bersih	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Kurangnya fasilitas olahraga untuk menunjang kegemaran masyarakat dalam bidang olahraga	- Masyarakat	3 usulan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Kondisi Lapangan Bola sekarang kondisinya rusak sehingga diperlukan perbaikan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Bantuan alat olahraga	- Sekolah	1 usulan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Bantuan prasarana sekolah	- SMAN 1 CIKEUS AL	1 usulan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kerusakan jalan di kawasan permukiman telah menghambat aktivitas masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun jalan lingkungan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		kurangnya akses penghubung antar desa, sehingga diharapkan Pemerintah Provinsi Banten membangun Jembatan Gantung	- masyarakat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					Penataan Ruang
		Jalan lingkungan di lingkungan kelurahan pabuaran membutuhkan perhatian pemerintah untuk segera dibangun.	- masyarakat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		masih terdapat jalan lingkungan yang rusak total sehingga harus dibangun dari awal	- masyarakat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		masih terdapat jalan yang tidak layak dilalui oleh pengendara motor dan pejalan kaki	- masyarakat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Masyarakat Desa Cikareo Ds cikamuning kec.Curug Bitung berbatasan dengan kecamatan maja masyarakat mengajukan jln / jembatan gantung permanen Karena jembatan gantung tersebut akses satu satu nya masyarakat.	- masyarakat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Masyarakat desa Sawarna meminta Kepada Pemerintah Provinsi Banten Untuk Mengalokasikan Anggaran Di Peruntukan Pembangunan Jembatan Permanen, Karena jembatan tersebut akses masyarakat & wisata pantai Legon Pari.	- masyarakat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		Masyarakat kp,panjapan meminta kepada pemerintah provinsi Banten mengalokasikan anggaran untuk jembatan gantung permanen yg berlokasi di Ds.karya jaya	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Masyarakat mengusulkan jembatan gantung permanen kepada pemerintah prov,Banten Agar mengalokasikan anggaran untuk jembatan gantung permanen yg berlokasi di cibeas . Karena jembatan tersebut akses masyarakat untuk meraup ekonomi dan jembatan tersebut akses nya berwisata ke pantai legon pari	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Masyarakat Pengguna jalan tersebut Mengeluhkan Jln simpang Maja stasiun terlalu kecil banyaknya laka lantas,kami warga kecamatan Maja meminta kepada pemerintah provinsi Banten Untuk Mengalokasikan Anggaran Pelebaran jln simpang maja kawasan provinsi banten.	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penghubung Pembangunan Jalan antar prov Banten & Prov Jawa Barat ,Berlokasi Di Mulai Dari Batas Kecamatan Bayah & Cibeber Sampai Dengan Batas Kabupaten Sukabumi/Pelabuhan Ratu Jawa Barat.	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jalan HOS Cokroaminoto depan Puri Beta 1 dan Puri Beta 2, rusak akibat seringnya Banjir dan genangan air hujan, serta menimbulkan kemacetan, yang disebabkan	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		jembatan kurang tinggi dan penyumbatan jembatan tersebut.			Penataan Ruang
		Kerusakan jalan pemukiman padat penduduk, kami berharap Pemerintah Provinsi Banten dapat menindak lanjuti.	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemeliharaan/perawatan jalan lingkungan tepatnya di kawasan padat penduduk, dimana akses jalan tersebut sering digunakan masyarakat dalam beraktivitas, Pemerintah Provinsi Banten dapat pemeliharaan	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Perlunya pemeliharaan untuk jalan lingkungan tepatnya di kawasan pemukiman padat penduduk, saat ini pemeliharaan belum ada tindak lanjutnya, dimana akses jalan tersebut adalah jalan yang setiap hari dipergunakan oleh penduduk sekitar, sehingga Pemerintah Provinsi Banten dapat memperbaiki jalan tersebut.	- masyar akat	2 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rusaknya jembatan penyeberangan bagi masyarakat yang melintasi dari benteng betawi ke komplek royal	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jalan tersebut perlu dibangun mengingat sudah rusak	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					Penataan Ruang
		Warga mengharapkan jalan tersebut dibangun karena sudah rusak parah	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	kondisi turap dalam keadaan rusak yang dikhawatirkan terjadinya banjir/longsor, sehingga provinsi banten diharapkan membangun turap	- masyar akat	2 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Masyarakat desa ciherang mengusul/menganggarkan pembangunan irigasi/gorong-gorong/penurapan kepada pihak pemerintah provinsi banten yg terletak di desa ciherang sepanjang 1000 meter	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Tidak Ada Fasilitas TPA di wilayah kecamatan maja masyarakat maja meminta kepada pemerintah provinsi untuk di bangunkannya TPA/TPSA di wilayah kec maja,masyarakat sdh menyiapkan lahan seluas 2 h untuk TPSA/TPA	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kondisi tanggul sungai tidak memadai jika air sungai meluap menyebabkan banjir, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun tanggul sungai.	- masyar akat	2 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		Normalisasi Kali cirarab	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Normalisasi Sungai Cimanceuri	- Masyar akat Sekitar	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		sering terjadinya banjir di lingkungan sekitar yang diakibatkan meluapnya air kali	- masyar akat	2 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		sering terjadinya tanggul penahan air jebol di musim penghujan	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Ketika Hujan turun lebat sering terjadi banjir dan longsor di kali Sambi	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Perlunya dibangun sodetan kali sehingga bisa terhindar dari luapan air kali	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					Penataan Ruang
		Mengingat sangat pentingnya Normalisasi kali tersebut sehingga tidak ada pendangkalan, Masyarakat khawatir dikala musim hujan air kali bisa meluap ke Pemukiman Warga.	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	kurang lancarnya arus pengairan dengan intensitas debit air yang tidak stabil, tidak teraturnya aliran air ke persawahan dikarenakan belum tersedianya sarana bendungan, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat membangun bendungan	- petani	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		masih terdapat saluran irigasi yang belum dibangun sesuai SOP sehingga kualitasnya tidak memenuhi kebutuhan warga kecamatan walantaka	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kerusakan jalan di kawasan permukiman telah menghambat aktivitas masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun jalan lingkungan	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Masyarakat mengusulkan pembangunan irigasi sungai karena lahan pertanian terkikis habis oleh abrasi air raha yg mengakibatkan bantaran sungai longsor.	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					Penataan Ruang
		Minimnya Kesian Air Bersih Untuk Dikonsumsi masyarakat Maka dari Itu Masyarakat Meminta Kepada Pemerintah Prov,Banten Agar Membangun Tempat Persediaan Air Bersih Untuk Dikonsumsi Masyarakat.	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sepanjang Jalan Provinsi Banten Wilayah Selatan Kec CiBeber, Banyak nya Irigasi Tersendat & Rawan longsor Karena Tidak adanya Penurapan Tebing Yang Rawan Bencana Di Sepanjang Jalan Raya Provinsi Banten sampai dengan Batas Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kab.Sukabumi.	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kerusakan Irigasi yang diakibatkan Bencana Alam yang berdampak terganggunya aktivitas persawahan dan pertanian warga masyarakat	- Masyar akat / Pertani an / Perkebu nan	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pendangkalan dan penyempitan jaringan irigasi telah menghambat pengaliran air, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun irigasi/turap	- masyar akat	3 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kerusakan tanggul irigasi Sungai Cibeuteung Peurih telah menghambat aliran air ke lahan pertanian.	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					Penataan Ruang
		pendangkalan dasar sungai yang memicu banjir	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		sering terjadinya banjir	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Terdapat beberapa titik banjir di lingkungan	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Terdapat titik genangan air	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Akibat pendangkalan dan penyempitan saluran air ke area persawahan mengakibatkan tidak optimalnya fungsi irigasi, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun Irigasi	- masyar akat	1 usulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman					

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Belum memadainya sarana MCK berpengaruh terhadap kesehatan santri/masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun MCK	- Santri/ Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan jalan di kawasan permukiman telah menghambat aktivitas masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun jalan lingkungan	- Masyarakat	1.809 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pendangkalan dan penyempitan saluran drainase telah menghambat pengaliran air, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun drainase lingkungan/u-dith	- Masyarakat	579 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Sarana pemberdayaan masyarakat yang tidak memadai telah menghambat pelayanan pemerintahan di tingkat RT/RW, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun balai warga	- Masyarakat	64 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Belum memadainya sarana MCK berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun MCK komunal	- Masyarakat	10 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Belum tersedianya ruang terbuka hijau telah menghambat upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman, sehingga	- Masyarakat	19 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan pembangunannya			Kawasan Permukiman
		Belum tersedianya fasilitas umum (Balai Warga)	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan jalan di sekitar penyebrangan rel kereta api	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		kondisi turap dalam keadaan rusak yang dikhawatirkan terjadinya banjir/longsor, sehingga provinsi banten diharapkan membangun turap	- Masyarakat	3 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Pembangunan Jalan Lingkungan/Paving Block) A	- Masyarakat	13 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		kondisi rumah sudah tidak layak sehingga tidak menyehatkan dan membahayakan bagi penghuninya, Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat (membangun Rumah Tidak Layak Huni)	- Masyarakat	206 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		air limbah sering meluap ke jalan membuat jalanan rusak dan jalan licin, sehingga	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		Pemerintah Provinsi Banten diharapkan (membangun saluran pembuangan air limbah (SPAL))			Rakyat dan Kawasan Permukiman
		badan jalan hampir longsor sehingga membahayakan masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun Tembok Penahan Tanah (TPT)	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		cikande permai merupakan desa yang dekat daerah industri dan kekurangan lahan terbuka hijau untuk mengakomodasi keperluan warga sekitar perlu dibangun RTH (pembangunan Ruang Terbuka Hijau)	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan jalan dan kurangnya akses jalan di kawasan permukiman telah menghambat aktivitas masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun jalan lingkungan (hotmix)	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan jalan di kawasan permukiman telah menghambat aktivitas masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun jalan antar desa (betonisasi)	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan jalan di kawasan permukiman telah menghambat aktivitas masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun jalan lingkungan (Pembangunan Jalan Poros Desa)	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		Kerusakan jalan di kawasan permukiman telah menghambat aktivitas masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun jalan lingkungan (pembangunan rabat beton)	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurangnya rasa kenyamanan, kebersihan dan keindahan di lingkungan makam, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat (membangun pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU))	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		kurangnya sarana dan prasarana air bersih untuk warga (pembangunan sarana air bersih)	- Masyarakat	7 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		kurangnya sarana dan prasarana serta rusaknya bangunan mck sehingga menghambat aktivitas masyarakat (pembangunan MCK)	- Masyarakat	7 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		kurangnya sarana dan prasarana tempat ibadah di kecamatan tunjung teja, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat membangun Masjid (pembangunan Masjid)	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		kurangnya sarana dan prasarana tempat ibadah di sekitar desa, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat (membangun musholla)	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					Kawasan Permukiman
		kurangnya sikap peduli terhadap keamanan masyarakat di daerah sekitar, sehingga pemerintah Provinsi Banten diharapkan (membangun Pos Kamling)	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Banyaknya RTLH di kawasan permukiman, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun Rumah Layak Huni	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Masih banyak Rumah tak layak huni	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Kerusakan dan Sempitnya akses jalan menuju Jembatan Kedaung barat kec.sepatan Timur di kawasan permukiman telah menghambat aktivitas masyarakat dan menimbulkan kemacetan, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun/pelebaran jalan lingkungan	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan dan Sempitnya akses jalan menuju SMAN 25 Kecamatan Sepatan Timur telah menghambat aktivitas masyarakat dan para Siswa, sehingga Pemerintah Provinsi	- Masyarakat dan Siswa-	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		Banten diharapkan membangun/pelebaran jalan lingkungan	Siswi Sekolah		
		Kerusakan jalan lingkungan menghambat aktivitas masyarakat/ Belum Optimalnya perbaikan jalan Betonisasi (Peningkatan/Perbaikan Jalan	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurangnya Ruang Terbuka Hijau dan Pojok UMKM bagi masyarakat Kec.Sepatan Timur.Sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan Membangun dan meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Dan Pojok UMKM	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Terjadi pendangkalan dan penyempitan menyebabkan fungsi Drainase lingkungan tidak optimal dan Belum optimalnya pembuangan /tertatanya saluran air	- Masyarakat	4 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Masih banyak jalan lingkungan yang kurang memadai, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat	- Masyarakat	22 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan Rumah milik warga yang tidak mampu telah membahayakan keselamatan penghuninya, sehingga pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun Rumah Layak Huni	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Lemahnya ekonomi masyarakat, mengakibatkan tidak terbangunnya tempat	- Masyarakat	10 usulan	Dinas Perumahan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		tinggal yang layak untuk masyarakat kurang mampu			Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah serta Tingginya Potensi Bencana dan Perubahan Iklim	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan Fasos dan Fasum di kawasan Taman Desa Kresek	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan jalan di kawasan permukiman telah menghambat aktivitas masyarakat untuk itu diharapkan Kepada Pemerintah Provinsi Untuk Memberikan Bantuan Pembangunan Jalan Dengan Hotmix/ Aspal	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan jalan di kawasan permukiman telah menghambat aktivitas masyarakat untuk itu diharapkan Kepada Pemerintah Provinsi Untuk Memberikan Bantuan Pembangunan Jalan Dengan Paving Block	- Masyarakat	50 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		masih terdapat beberapa rumah yang tidak layak huni bagi warga kota serang	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		banyak terdapat jalan lingkungan di kelurahan teritih yang masih belum layak digunakan	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		belum adanya fasilitas air bersih bagi warga masyarakat	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		belum terbangunnya drainase yang baik di lingkungan kelurahan banjarsari sehingga saat hujan deras tiba air yang di selokan pada naik ke jalan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		belum terpenuhinya kebutuhan sarana olah raga futsal dan sepak bola indoor	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		jalan lingkungan warga masih belum layak digunakan karena becek saat hujan turun	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		masih banyak jalan yang rusak di lingkungan kelurahan pasuluhan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					Kawasan Permukiman
		masih banyak warga yang membuang sampah di sembarang tempat karena belum adanya tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		masih belum dibangun drainase di lingkungan kelurahan cipete	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan rumah di kawasan permukiman yang telah terkena bencana alam, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun rumah	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Tidak adanya sarana MCK di lingkungan kp,wantasari,kp,leuwidamar & kp .parahiang	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Masih kekurangannya penataan pariwisata telah menghambat upaya peningkatan kunjungan wisata sehingga pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan pengembangan prasarana pariwisata	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		Rumah terdampak bencana sehingga tidak layak huni	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Aktivitas tempat pertemuan para masyarakat belum memadai	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Diperlukan pembangunan jalan lingkungan karena sudah sangat tidak layak di wilayah tersebut	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Drainase di wilayah tersebut sudah rusak sehingga perlu adanya perbaikan supaya air hujan tidak berdampak pada ketidaknyamanan jalan lingkungan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jalan lingkungan di wilayah tersebut rusak dan perlu adanya perbaikan Keadaan jalan lingkungan di wilayah tersebut sudah sangat rusak sehingga perlu diperbaiki lagi	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jaringan air bersih sangat terbatas	- Masyarakat	6 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		Keadaan jalan lingkungan di wilayah tersebut sudah sangat rusak sehingga perlu diperbaiki lagi	- Masyarakat	97 usulan	Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Ketika curah hujan lumayan deras, Drainase di wilayah tersebut tidak berfungsi dengan baik karena sudah rusak dan harus diperbaiki supaya masyarakat sekitar merasa aman	- Masyarakat	21 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kondisi Jaringan saluran pembuangan Air Hujan di wilayah tersebut sudah waktunya diperbaiki karena tidak bekerja dengan baik ketika curah hujan tinggi.	- Masyarakat	5 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Keberadaan Balai Warga setiap Kelurahan di Kota Cilegon sangat dibutuhkan untuk kegiatan warga, seperti rapat warga dan sebagainya	- Masyarakat	43 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		banyaknya masyarakat yang belum mempunyai Kamar mandi atau jamban	- Masyarakat	8 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Lemahnya ekonomi masyarakat, mengakibatkan tidak terbangunnya tempat	- Masyarakat	10 usulan	Dinas Perumahan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		tinggal yang layak untuk masyarakat kurang mampu			Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Lemahnya ekonomi masyarakat, mengakibatkan tidak terbangunnya tempat tinggal yang layak untuk masyarakat kurang mampu Masyarakat	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kondisi Rumah sudah tidak layak huni sehingga pemerintah Prov Banten Memberi Bantu untuk bedah rumah	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Akibat pendangkalan dan penyempitan menyebabkan fungsi drainase tidak optimal , untuk menanggulagi banjir bila hujan , melanjutkan perbaikan Saluran di sisi hilir	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		akibat pendangkalan dan Penyempitan menyebabkan fungsi Drainase tidak Optimal sehingga pemerintah Prov Banten diharapkan membangun Drainase Kampung setu	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Akibat terjadinya Pendangkalan dan Penyempitan menyebabkan fungsi drainase tidak optimal	- Masyarakat	3 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		akibat Terjadi Pendangkalan dan penyempitan menyebabkan fungsi Drainase tidak optimal sehingga Pemerintahan Provinsi Banten diharapkan membangun Drainase Gg Kaimin	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		akibat terjadinya pendangkalan dan Penyempitan menyebabkan fungsi drainase tidak optimal sehingga pemerintah Prov Banten di harapkan membanan drainase di jalan Pahlawan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		akibat terrainase tidak optimal sehingga air ajdi nya Pendangkalan dan Penyempitan menyebabkan fungsi drainase tidak optomal sehingga air selokan meluber ke rumah2 yang ada di sekitar	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Akibat terjadinya Pendangkalan dan Penyempitan menyebabkan Fungsi Drainase tidak Optimal sehingga Pemerintah Prov Banten Diharapkan membanguin Drainase di Amal Bakti	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		kondisi jalan rusak parah link Jln RE Martadinata	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kondisi Jalan Rusak di gang Bojong 001/02 sehingga warga Mengiginkan Pengaspalan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		Kondisi Jalan Rusak di Link jln Cendana III	- Masyarakat	1 usulan	Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kondisi Jalan rusak parah di jln gg H Rasam	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		kondisi jalan rusak parah di link Kel Rempoa	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kondisi jalan Rusak Parah link Cendana I	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		kondisi jalan yang ada sekarang rusak sehingga perlu adanya pengaspalan jalan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kondisi rusak Jalan parah di Link gg Buntu Kel Rempoa	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					Rakyat dan Kawasan Permukiman
		lokasi belum ada Saluran air ukuran kecil hasil swadaya warga .akibatnya selalu terjadi genangan di sepanjang jalan karena saluran air kecil yang ada difungsikan sebagai tempat buangan air cucian kotor rumah tangga sekitar	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan Jembatan di kawasan antar desa sudah memprihatinkan dan rusak parah sehingga menghambat Perekonomian, Pendidikan serta aktivitas warga	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Salah satu penunjang prasarana jalan yaitu tebing yang menopang ruas jalan poros desa sudah sangat memprihatinkan yang bisa menyebabkan longsor dan kecelakaan untuk itu perlu adanya pembangunan perkuatan tebing sebagai penunjang	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Salah satu prasarana jalan yaitu tebing yang menopang ruas jalan poros desa sudah sangat memprihatinkan yang bisa menyebabkan longsor dan kecelakaan untuk itu perlu adanya pembangunan perkuatan tebing	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan Jalan di kawasan lingkungan sudah memprihatinkan sehingga menghambat aktivitas warga untuk itu warga	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		berharap untuk perbaikan jalan, karena akses jalan untuk pendidikan juga perekonomian warga yang terhambat saat ini karena rusaknya jalan tersebut			Kawasan Permukiman
		Kerusakan Jalan saat ini tidak dapat dilalui oleh masyarakat karena kondisinya yang sudah parah, jalan tersebut adalah prasarana ekonomi warga terutama bagi para petani dan para pedagang	- Masyarakat	5 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Masih kurangnya prasarana persampahan telah meningkatkan pencemaran lingkungan, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan kendaraan angkutan sampah roda tiga	- Masyarakat	29 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Rusaknya Drainase yang menyebabkan banjir pada jalan sehingga sering terjadinya laka lantas	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kurangnya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Tidak Adanya Saluran Air	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		Tidak Adanya Sarana Ruang Terbuka Hijau	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		drainase akibat pengikisan jalan yang amblas di kawasan permukiman telah menghambat aktivitas masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun Drainase	- Masyarakat	3 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurangnya fasilitas umum di bidang olahraga maka masyarakat menghimbau untuk diadakan pembangunan lapangan bulu tangkis	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan Jalan di Kawasan Permukiman Telah Menghambat Aktivitas Masyarakat Sehingga Pemerintah Provinsi Banten Diharapkan Membangun Jalan Lingkungan dan SPAL YUDIT.	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Tidak adanya jembatan Penyeberangan sehingga terhambatnya aktivitas masyarakat untuk itu diharapkan Pemerintah Provinsi untuk Memberikan Bantuan Pembangunan jembatan penyeberangan umum	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayah Desa Daon sehingga membuat genangan air di wilayahnya	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					Kawasan Permukiman
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayah Desa Sindang Sono sehingga membuat genangan air di wilayahnya	- Masyar akat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayah Kp. Benyawakan Desa Klebet sehingga membuat genangan air diwilayahnya	- Masyar akat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayahnya Kp. Cadas Desa Karet sehingga membuat genangan air diwilayahnya	- Masyar akat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayah Kp. Gembong sehingga membuat genangan air diwilayahnya	- Masyar akat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayah Kp. Kayu Apuk Desa Klebet sehingga membuat genangan air diwilayahnya	- Masyar akat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayah Perumahan Cluster Parahyangan	- Masyar akat	1 Usulan	Dinas Perumahan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		sehingga membuat genangan air diwilayahnya			Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayah Perumahan Griya Lebak wangi 2 Sarakan sehingga membuat genangan air diwilayahnya	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayah Perumahan Nuansa Mekarsari 2 sehingga membuat genangan air diwilayahnya	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayah Perumahan Permata Puri Thamarin sehingga membuat genangan air diwilayahnya	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayah Perumahan TKP I sehingga membuat genangan air diwilayahnya	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayah Perumahan Viktoria sehingga membuat genangan air diwilayahnya	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayah Perumahan Villa Permata Sarakan sehingga membuat genangan air diwilayahnya	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayah Perumahan Villa Permata Sarakan sehingga membuat genangan air diwilayahnya	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayah perum duta asri 2 sehingga membuat genangan air diwilayahnya	- Masyarakat	2 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurang berjalannya air pada Saluran Air di wilayah perum permata sepatan sehingga membuat genangan air diwilayahnya	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurangnya Sarana Prasarana Gapura	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Masyarakat banyak mengeluh terkait adanya air bersih di wilayah Kp. Nagreg	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					Kawasan Permukiman
		Masyarakat banyak mengeluh terkait adanya air bersih di wilayah Kp.onom	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Masyarakat banyak mengeluh terkait adanya air bersih di wilayah kp. Pandan indah	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Masyarakat banyak mengeluh terkait adanya air bersih di wilayah kp. Pulo Ceger	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pembangunan Balai Warga agar integritas sosial masyarakat, (acara rapat-rapat, pertemuan serta kegiatan lainnya	- Masyarakat	8 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kondisi jalan becek saat hujan	- Masyarakat	4 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kondisi jalan hancur	- Masyarakat	6 Usulan	Dinas Perumahan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kondisi jalan sangat tidak layak	- Masyarakat	2 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kondisi jalan yang tidak memadai	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kondisi jalan tidak baik	- Masyarakat	3 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kondisi jalan tidak prima	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Penataan jalan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		Perlu adanya pemerataan jalan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Perlu adanya perbaikan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Perlu adanya bantuan penataan jalan paving block	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jalan antara RT.006 dan 005 RW.08, menuju mushola Al Ikhlas, Kel. Larangan Selatan, kec. Larangan yang dulu pernah dikonblok sekarang rusak parah sepanjang 40 m x 2.5 m. dan ada jembatan kali panjang 7m lebar 3 m sudah tidak layak lagi.	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan jalan lingkungan yang pernah diaspal tahun 2017 sampai sekarang belum pernah lagi sekarang sudah rusak dan berlubang dan hanya diurug tanah jadilah becek dan kotor	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pembuatan gorong-gorong/udit sebanyak 6 Lokasi di lingkungan RW. 008, kel Larangan Selatan, Kec. Larangan	- Masyarakat	2 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					Kawasan Permukiman
		Sepanjang Jln. Hos Cokroaminoto dari kreosampai dengan Pasar Cileduk baik kanan kiri belum ada Granase dan Trotoar	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Warga RW. 08 Kel. Larangan Selatan mengharapkan adanya Pengeboran air bersih atau adanya pemasangan PDAM, karena warga tersebut jarang sekali adanya air bersih adanya air kuning dan berminyak sehingga tidak dapat untuk kebutuhan sehari-hari	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Ruas Jalan Menuju Pemakaman	- Masyarakat	2 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		warga masih belum menyadari terkait kesehatan dan masih menggunakan air sumur dan sungai	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		jalan lingkungan yang rusak	- Masyarakat	6 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		kondisi aliran air yang kurang berfungsi dengan baik	- Masyarakat	23 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		kondisi saluran pembuangan air limbah rumahan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		masyarakat berharap adanya perbaikan jalan lingkungan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pembangunan atau perbaikan jalan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pembangunan Ruang terbuka hijau	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Saluran kurang berfungsi	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					Kawasan Permukiman
		Akibat terjadinya pendangkalan dan penyempitan menyebabkan fungsi drainase tidak optimal, sehingga pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun drainase lingkungan ciwandan	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Masih seringnya terjadinya banjir di Kota Cilegon	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Minimnya bak penampung sampah dan belum adanya alat pengelolaan sampah organik	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pemeliharaan jalan yang kondisinya rusak	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Perbaikan jalan perbatasan cilegon dari kampung gedung ingas (Bojonegara) sampai kelingkungan langon (Pulomerak)	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Rusaknya kondisi jalan protokol di jalan raya Ciwandan banyak berlubang	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Seringnya terjadi banjir yang diakibatkan oleh dangkalnya kali dan kurang lebarnya sodetan	- Masyarakat	1 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Seringnya terjadi banjir yang diakibatkan oleh gorong-gorong yang tidak berfungsi dengan baik	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Seringnya terjadi banjir yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya saluran gorong-gorong	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Sering terjadinya banjir diakibatkan oleh tidak berfungsinya drainase dengan baik sehingga perlu perawatan	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Akibat Kesulitan untuk memperoleh air bersih sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun IPAL sumur bor beserta saluran pipa ke rumah-rumah warga	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		Belum adanya tempat Yang dapat menampung warga dalam kegiatan keagamaan atau yang lainnya, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan Membangun Majelis / pendopo.	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		kondisi Rumah Ibadah (masjid Al-Ikhlas) yang sudah lapuk serta kurang dapat menampung warga dalam kegiatan keagamaan sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan membangun Rumah Ibadah tersebut	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jalan lingkungan yang menuju ke desa bunar perlu perbaikan	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jalan menuju Pemakaman umum masih tanah dan licin bila musim hujan	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		mck di lingkungan pondok pesantren perlu perbaikan	- Masyarakat dan Santri	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Belum optimalnya penyediaan lapangan pekerjaan telah mengakibatkan angka pengangguran terus mengalami peningkatan,	- Masyarakat	4 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan pelatihan Make Up Dasar			Kawasan Permukiman
		Belum optimalnya penyediaan lapangan pekerjaan telah mengakibatkan angka pengangguran terus mengalami peningkatan, sehingga Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan pelatihan sablon kaos	- Masyarakat	4 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		BELUM ADANYA SALURAN AIR YANG MEMADAI SEHINGGA AIR MELUAP HINGGA KE JALAN DAN MENGAKIBATKAN BANJIR PADA SAAT HUJAN	- Masyarakat	23 usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Masih kurangnya sarana tempat sampah telah meningkatnya tumpukan sampah dan pencemaran lingkungan, Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberikan bantuan tempat sampah yang bisa di angkut menggunakan truk	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		rusaknya jalan paving blok yang menyebabkan bergelombang dan berlubangnya jalan, diharapkan Pemerintah Provinsi Banten memperbaiki / mengganti paving blok tersebut agar kembali rata dan nyaman	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		terjadinya erosi di bibir kali yang melintasi kompleks perumahan polri di Batuceper,	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
		diharapkan dibangun turap di sepanjang bibir kali tersebut			Kawasan Permukiman
		Warga menghendaki adanya pemagaran Tempat Pemakaman Umum(TPU)	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Diharapkan Pemerintah dapat membamngun jalan tersebut	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jalan penghubung Cibaga,Mangunraja dan Sumuranja Jalan tersebut merupakan jalan akses sering terjadi kecelakaan Pemerintah diharapkan dapat membangun jalan tersebut dengan Hotmix.	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		jalan tersebut tidak layak untuk dilalui dan banyak kubangan sehingga banyak pengendara roda dua terjatuh	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kerusakan Jalan di kawasan Permukiman akses menuju Wakaf Kuburan	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Masyarakat keluhkan tagihan air disetrakan dengan Perumahan elit	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan

Program	Kegiatan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Jumlah Usulan	Perangkat Daerah
					Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Masyarakat meminta jalan tersebut segera di bangun mengingat jalan tersebut sudah rusak	- Masyarakat	2 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Masyarakat mengharapkan adanya tempat pembangunan tempat pembuangan sampah sementara	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Masyarakat mengharapkan Perhatian dari Pemerintah Provinsi Banten Terkait Saluran Air Sepanjang Jalan Nasional, agar dikala musim hujan Air meluap ke jalan sampai menggenang ke Permukiman Warga	- Masyarakat	1 Usulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber Data : SIPD Tahun 2022

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah perlu dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Gubernur untuk menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota.

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan tersebut merupakan bagian dari pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota, sebagai pelaksana tugas Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek dari pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di daerah provinsi tersebut.

Pada prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2024 memperhatikan target Pembangunan Wilayah, Prioritas Pembangunan Wilayah, dan Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP 2024 maupun Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026.

Dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap target dan sasaran pembangunan pemerintah maupun pemerintah provinsi diimplementasikan berdasarkan RPJMD kabupaten/kota melalui arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, target pembangunan yang ditetapkan untuk

wilayah Provinsi Banten dalam RPJMN Tahun 2020-2024 pada tahun perencanaan yaitu tahun 2024 serta Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 pada tahun perencanaan yaitu tahun 2024. Dari perencanaan tahun 2024 tersebut kemudian diturunkan ke dalam target pembangunan kabupaten/kota pada tahun 2024.

Sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Akhir RKPD kabupaten/kota, maka arahan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tahun 2024, dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 ini, adalah sebagai berikut:

5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pandeglang

Target pembangunan yang ditetapkan Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang dalam RKPD 2024

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2024		
	Provinsi Banten ¹⁾	Kabupaten Pandeglang	
		Teknokratik ²⁾	RPJMD ³⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11 - 5,25	4,74 - 4,88	3,5
Tingkat Kemiskinan (%)	5,49	9,70	9,43
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,51	8,23	8,06
Keterangan:			
1) RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026			
2) Hasil Perhitungan			
3) RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 - 2026			

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, pada Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali di Provinsi Banten sesuai lokus di wilayah Kabupaten Pandeglang yaitu :

Pengembangan Kawasan Strategis :

- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung
- Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran

Pengembangan Sektor Unggulan :

- Komoditas unggulan perkebunan
- Komoditas unggulan perikanan

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi :

- 8 (delapan) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional yaitu KPPN Pandeglang, KPPN Sukabumi, KPPN Magelang, KPPN Kendal, KPPN Pamekasan, KPPN Banyuwangi, KPPN Buleleng, KPPN Klungkung
- Pengentasan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang, termasuk desa di wilayah Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang
- Peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri, termasuk desa di wilayah Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 1 :

- Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 2 :

- Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 3 :

- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 5 :

- Transformasi Digital
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

Usulan Daerah Provinsi Banten yang prospektif masuk dalam RKP 2024

- Pembangunan TPA dan IPLT (5 Ha)
- Pembangunan Pelabuhan di dalam KEK Tanjung Lesung

Pada pendekatan tematik pada RKPD Provinsi Banten 2024 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam RKPD 2024 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Investasi melalui optimalisasi Jalan Tol Serang Panimbang
- Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), Dan Bangga Berwisata Indonesia Di Banten (BBWIB)
- Stabilisasi Inflasi Melalui Ketahanan Pangan Daerah
- Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
- Penanganan Pengangguran melalui Link and Match Pendidikan Vokasi
- Akselerasi Reformasi Birokrasi Berdampak

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan pada RKPD Provinsi Banten di tahun 2024, maka penanganan di wilayah Kabupaten Pandeglang difokuskan pada:

Infrastruktur Kesehatan

- Operasional RSUD Labuan

Infrastruktur jalan dan jembatan

- Pelebaran Jalan Mengger – Caringin
- Pembangunan Jalan Sumur - Taman Jaya → pandeglang
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan
- Rehabilitasi Jembatan sesuai kewenangan Provinsi Banten

Sumber Daya Air

- Penanganan Banjir Sungai Cipunteun Agung (TPI Pandeglang)
- Rehabilitasi Sungai Cilatak
- Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Cilemer

Sosial

- Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem

Sarana Prasarana Umum

- Penyediaan PSU
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

- Dukungan Jalan Mantap yang berkeselamatan pada ruas jalan Provinsi meliputi Marka Jalan, ZoSS, PJU, rambu, trafficlight dan sebagainya

Perikanan dan Kelautan

- Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Binuangeun-Cikeusik
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Cigorondong

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPDP Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Pandeglang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut:

Tabel 5. 2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pandeglang

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
Misi 1	<i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan	• Pemantapan kualitas kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	• Pemantapan kualitas kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
	<i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i> • Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan • Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha	• Pemantapan kualitas kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i> • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan • Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	• Pemantapan kualitas kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan
	<i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i> • Pembinaan kesehatan lingkungan • Pencegahan dan penanggulangan penyakit • Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat	• Pemantapan kualitas kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan
	<i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial • Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial • Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS	• Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
	<i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i> • Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan • Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan	• Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
	- Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha - Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial - Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan	
	<i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i> - Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha - Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya - Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain	Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
	<i>Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa</i> - Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak - Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan - Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa - Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa - Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan - Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif	Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i> - Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaan keluarga berencana - Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana - Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi	Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
	<i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i> Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan	Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
	<i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i>	Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
Misi 2	• Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan • Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda	
	<i>Peningkatan pelayan masyarakat dan prestasi olah raga</i> • Pembinaan dan pelayan masyarakat olah raga • Peningkatan prasarana dan sarana olah raga • Pembinaan manajemen keolahragaan	• Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
	<i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i> • Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi • Pemberian insentif pajak bagi investor • Jaminan kepastian hukum berusaha • Promosi investasi	• Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas investasi daerah.
	<i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitas modal usaha • Fasilitas aksesibilitas pasar • Fasilitas kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk	• Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas investasi daerah.
	<i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	• Pemantapan pengelolaan potensi sektor unggulan ekonomi daerah
	<i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitas modal usaha • Fasilitas aksesibilitas pasar • Fasilitas kerjasama perdagangan • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	• Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas investasi daerah.

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
	<i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i> • Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan • Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar	• Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas investasi daerah.
	<i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i> • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar	• Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas investasi daerah.
	<i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata • Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata • Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata • Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata • Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata	• Pemantapan pengelolaan potensi sektor unggulan ekonomi daerah
	<i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i> • Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan • Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi	• Peningkatan kualitas sarana prasarana sumber- sumber PAD potensial

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
	informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan	
	<i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i> • Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan • Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan • Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan • Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan • Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan • Perumusan kebijakan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan • Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan	• Pemantapan pengelolaan potensi sektor unggulan ekonomi daerah
	<i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i> • Pembangunan dan peningkatan pelabuhan • Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang Pelabuhan • Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan	• Pemantapan infrastruktur kualitas
	<i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i> • Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas • Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera	• Pemantapan infrastruktur kualitas
	<i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i> • Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP • Revitalisasi jaringan kereta api • Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan	• Pemantapan infrastruktur kualitas
	<i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i> • Pengelolaan bandar udara yang ada • Pengembangan bandar udara perintis di wilayah selatan	• Pemantapan infrastruktur kualitas

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang	
	<i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i> • Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) • Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi	• Pemantapan infrastruktur	kualitas
	<i>Pengelolaan pengendalian banjir</i> • Pengelolaan prasarana pengendalian banjir • Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase	• Pemantapan infrastruktur	kualitas
	<i>Peningkatan pelayanan air bersih</i> • Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih	• Pemantapan infrastruktur	kualitas
	<i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i> • Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) • Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional	• Pemantapan infrastruktur	kualitas
	<i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i> • Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik • Peningkatan pemanfaatan energi alternatif • Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan	• Pemantapan infrastruktur	kualitas
	<i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i> • Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu • Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan	• Pemantapan infrastruktur	kualitas
	<i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i> • Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu • Fasilitasi usaha pengembangan perumahan	• Pemantapan infrastruktur	kualitas
	<i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i> • Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman • Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh	• Pemantapan infrastruktur	kualitas
Misi 3	<i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i>	• Pemantapan infrastruktur	kualitas

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang	
Misi 4	- Sinkronisasi, harmonisasi dan pemadu serasian rencana tata ruang wilayah - Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang - Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang		
	<i>Pengembangan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i> - Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I - Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II - Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III	Pemantapan infrastruktur	kualitas
	<i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i> - Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya - Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup - Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Pemantapan infrastruktur	kualitas
	<i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i> - Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam - Fasilitasi penanggulangan bencana alam	Pemantapan infrastruktur	kualitas
	<i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i> - Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan - Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur - Kompetensi sesuai bidang keahlian - Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur - Peningkatan kualitas kearsipan daerah		
	<i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i> Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah		

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
	• Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	
	<i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i> • Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain • Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan Tinggi	
	<i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik	
	<i>Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab/kota dan instansi vertikal</i>	
	<i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah	
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat • Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
	<i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i> • Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan • Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru	
	<i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum • Penegakan dan penataan produk hukum daerah • Penegakan supremasi hukum	
	<i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi • Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik	
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i> • Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib • Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	

5.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lebak

Target pembangunan yang ditetapkan Kabupaten Lebak untuk Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 3
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak dalam RKPD 2024

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2024		
	Provinsi Banten ¹⁾	Kabupaten Lebak	
		Teknokratik ²⁾	RPJMD ³⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11 - 5,25	5,04 - 5,18	5,00
Tingkat Kemiskinan (%)	5,49	8,79	8,9
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,51	7,98	8,5
Keterangan:	¹⁾ RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026		

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2024		
	Provinsi Banten ¹⁾	Kabupaten Lebak	
		Teknokratik ²⁾	RPJMD ³⁾
²⁾ Hasil Perhitungan			
³⁾ RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019 - 2024			

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, pada Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali di Provinsi Banten sesuai lokus di wilayah Kabupaten Lebak yaitu :

Pengembangan Kawasan Strategis :

- Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran

Pengembangan Sektor Unggulan :

- Komoditas unggulan perkebunan
- Komoditas unggulan perikanan

Pengembangan Kawasan Perkotaan :

- Pembangunan Kota Baru Maja

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi :

- Pengentasan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang, termasuk desa di wilayah Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang
- Peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri, termasuk desa di wilayah Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 1 :

- Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 2 :

- Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)
- Major Project (MP) Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 3 :

- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 5 :

- Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA (wilayah Banten di Kota Baru Maja)
- Transformasi Digital
- Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

Usulan Daerah Provinsi Banten yang prospektif masuk dalam RKP 2024

- Jalan Usaha Tani (147 km)
- Pembangunan Unit Pengolahan Gula Aren menjadi Gula Semut dan Fasilitas pendukung

Pada pendekatan tematik pada RKPD Provinsi Banten 2024 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam RKPD 2024 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Investasi melalui optimalisasi Jalan Tol Serang Panimbang

- Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), Dan Bangga Berwisata Indonesia Di Banten (BBWIB)
- Stabilisasi Inflasi Melalui Ketahanan Pangan Daerah
- Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
- Penanganan Pengangguran melalui Link and Match Pendidikan Vokasi
- Akselerasi Reformasi Birokrasi Berdampak

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan pada RKPD Provinsi Banten di tahun 2024, maka penanganan di wilayah Kabupaten Lebak difokuskan pada:

Infrastruktur Kesehatan

- Operasional RSUD Ciligrang
- Pengembangan RSUD Malingping

Infrastruktur jalan dan jembatan

- Pembangunan Jalan Ciparay – Cikumpay
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan

Sumber Daya Air

- Pembangunan Pengaman Pantai Binuangeun
- Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Cibinuangeun
- Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Cilangkahan 1

Sosial

- Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem
- Pembangunan Panti Terpadu dalam mendukung pemenuhan SPM Sosial

Sarana Prasarana Umum

- Penyediaan PSU
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
- Dukungan Jalan Mantap yang berkeselamatan pada ruas jalan Provinsi meliputi Marka Jalan, ZoSS, PJU, rambu, trafficlight dan sebagainya

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

- Penataan Destinasi Situ Cikoncang
- Penataan Dekorasi Pantai Ciantir Sawarna

Perikanan dan Kelautan

- Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Binuangeun-Cikeusik

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Lebak, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak, sebagai berikut :

Tabel 5. 4
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lebak

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
Misi 1	<i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan	• Meningkatkan pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat, pemeliharaan desa adat
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	• Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan yang terjangkau dan merata, meningkatkan partisipasi pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah
	<i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i> • Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan	• Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan yang terjangkau dan merata, meningkatkan partisipasi pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
	Fasilitasi pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha	
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i> - Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan - Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan - Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan - Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat - Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan
	<i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i> - Pembinaan kesehatan lingkungan - Pencegahan dan penanggulangan penyakit - Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan
	<i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i> - Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial - Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial - Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial - Pelayanan dan rehabilitasi sosial - Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS	Optimalisasi penanganan PMKS, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat serta pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
	<i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i> - Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan - Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan - Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha - Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial - Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan	Peningkatan pembangunan ketenagakerjaan, peningkatan peran lembaga kerjasama Tripartit dalam peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
	<i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i>	Peningkatan pembangunan ketenagakerjaan, peningkatan peran lembaga kerjasama Tripartit dalam

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
	• Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha • Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya • Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain	peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
	Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa • Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak • Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan • Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa • Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa • Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan • Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif	• Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak pemenuhan hak anak • Meningkatkan keberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan desa
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i> • Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaan keluarga berencana • Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana • Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi	• Pengendalian kelahiran, menurunkan TFR dan pelayanan kesehatan reproduksi
	<i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i> • Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan	• Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima
	<i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan • Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda	• Meningkatkan kemandirian, partisipasi dan prestasi pemuda, peran serta kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup, prestasi pemuda
	<i>Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah raga</i> • Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga • Peningkatan prasarana dan sarana olah raga • Pembinaan manajemen keolahragaan	• Meningkatkan prestasi keolahragaan, jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik Kabupaten Lebak

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
Misi 2	<i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i> • Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi • Pemberian insentif pajak bagi investor • Jaminan kepastian hukum berusaha • Promosi investasi	• Meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi, peningkatan jumlah investor PMA dan PMDN berskala nasional
	<i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk	• Meningkatkan produktivitas sektor UMKM, daya saing Usaha Mikro dan Kecil, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
	<i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	• Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah subsektor pertanian dan perkebunan serta kualitas sumberdaya manusia dan pengelolaan hasil produksi • Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah subsektor peternakan • Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah sub sektor perikanan, produksi usaha perikanan yang mandiri dan berdaya saing
	<i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	• Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah subsektor pertanian dan perkebunan serta kualitas sumberdaya manusia dan pengelolaan hasil produksi • Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah subsektor peternakan • Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah sub sektor perikanan, produksi usaha

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
		perikanan yang mandiri dan berdaya saing
	<i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i> • Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan • Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar	• Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
	<i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i> • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar	
	<i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata • Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata • Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata • Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata • Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata	• Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah, peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung dan daya tarik wisata
	<i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i> • Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan • Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan	
	<i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i> • Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan	• Terjaminnya ketersediaan, distribusi dan pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
	- Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan - Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan - Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan - Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan - Perumusan kebijakan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan - Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan	serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan
	<i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i> - Pembangunan dan peningkatan pelabuhan - Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang Pelabuhan - Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan	
	<i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i> - Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas - Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, gedung pemerintah dan penataan ruang, peningkatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan jalan perdesaan, pengurangan kawasan yang terkena dampak banjir
	<i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i> - Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP - Revitalisasi jaringan kereta api - Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan	- Meningkatkan ketaatan pengguna jalan, pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan - Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	<i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i> - Pengelolaan bandar udara yang ada - Pengembangan bandar udara perintis di wilayah selatan	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	<i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i> - Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) - Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, gedung pemerintah dan penataan ruang, peningkatan konektivitas antar wilayah dan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
		pembangunan jalan perdesaan, pengurangan kawasan yang terkena dampak banjir
	<i>Pengelolaan pengendalian banjir</i> • Pengelolaan prasarana pengendalian banjir • Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase	• meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, gedung pemerintah dan penataan ruang, peningkatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan jalan perdesaan, pengurangan kawasan yang terkena dampak banjir
	<i>Peningkatan pelayanan air bersih</i> • Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih	• meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, gedung pemerintah dan penataan ruang, peningkatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan jalan perdesaan, pengurangan kawasan yang terkena dampak banjir
	<i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i> • Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) • Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional	• Terjagakan kualitas lingkungan hidup
	<i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i> • Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik • Peningkatan pemanfaatan energi alternatif • Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan	
	<i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i> • Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu • Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan	• Meningkatkan pengguna teknologi informasi pemerintah daerah, komunikasi informasi pemerintah daerah serta pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses dalam rangka optimalisasi pelayanan publik
	<i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i>	• Meningkatkan kualitas lingkungan hunian, rumah tidak layak huni, kawasan kumuh serta penanganan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
	- Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu - Fasilitasi usaha pengembangan perumahan	fungsi PSU lingkungan perumahan
	<i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i> - Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman - Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh	Meningkatkan kualitas lingkungan hunian, rumah tidak layak huni, kawasan kumuh serta penanganan fungsi PSU lingkungan perumahan
	<i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i> - Sinkronisasi, harmonisasi dan pepadu serasian rencana tata ruang wilayah - Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang - Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang	Persentase penggunaan lahan berdasarkan RTRW, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya
	<i>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i> - Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I - Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II - Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III	Persentase penggunaan lahan berdasarkan RTRW, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya
Misi 3	<i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i> - Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya - Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup - Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hunian, rumah tidak layak huni, kawasan kumuh serta penanganan fungsi PSU lingkungan perumahan
	<i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i> - Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam - Fasilitasi penanggulangan bencana alam	Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana
	<i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i> - Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan - Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur - Kompetensi sesuai bidang keahlian	Meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara
Misi 4		

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
	• Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur • Peningkatan kualitas kearsipan daerah	
	<i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i> • Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah • Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	• Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah
	<i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i> • Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain • Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan Tinggi	
	<i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab/kota dan instansi vertikal	• Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	<i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah	• Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat • Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	
	<i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i> • Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan • Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru	• Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah
	<i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum • Penegakan dan penataan produk hukum daerah • Penegakan supremasi hukum	• Meningkatkan mutu pelayanan dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
	<i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi • Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik	
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i> • Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib • Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	• Meningkatkan mutu pelayanan dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

5.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang

Target pembangunan yang ditetapkan Kabupaten Tangerang untuk Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 5
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang dalam
RKPD 2024

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2024		
	Provinsi Banten ¹⁾	Kabupaten Tangerang	
		Teknokratik ²⁾	RPD ³⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11 - 5,25	4,75 - 4,89	5,11 - 5,25
Tingkat Kemiskinan (%)	5,49	5,40	5,94
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,51	9,55	7,51
Keterangan :	¹⁾ RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026		
	²⁾ Hasil Perhitungan		
	³⁾ RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026		

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, pada Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali di Provinsi Banten sesuai lokus di wilayah Kabupaten Tangerang yaitu :

Pengembangan Kawasan Perkotaan :

- 5 (lima) Wilayah Metropolitan WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, WM Denpasar

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi :

- Peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri, termasuk desa di wilayah Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 3 :

- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 5 :

- Transformasi Digital

- Pemulihan 4 DAS Kritis (wilayah Banten di DAS Cisadane)
- 18 Waduk Multiguna (antara lain Modernisasi DI Cisadane)
- Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa
- Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

Pada pendekatan tematik pada RKPD Provinsi Banten 2024 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam RKPD 2024 adalah sebagai berikut:

- Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), Dan Bangga Berwisata Indonesia Di Banten (BBWIB)
- Stabilisasi Inflasi Melalui Ketahanan Pangan Daerah
- Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
- Penanganan Pengangguran melalui Link and Match Pendidikan Vokasi
- Akselerasi Reformasi Birokrasi Berdampak

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan pada RKPD Provinsi Banten di tahun 2024, maka penanganan di wilayah Kabupaten Tangerang difokuskan pada:

Infrastruktur jalan dan jembatan

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan

Sosial

- Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem

Sarana Prasarana Umum

- Penyediaan PSU
- Dukungan Jalan Mantap yang berkeselamatan pada ruas jalan Provinsi meliputi Marka Jalan, ZoSS, PJU, rambu, trafficlight dan sebagainya

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Tangerang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :

Tabel 5. 6
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
Misi 1	<i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan	• Melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat • Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal melalui pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan • Pembinaan tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dan pemanfaatan modal sosial
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	• Pemenuhan kebutuhan ruang kelas untuk peserta didik • Sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan PAUD bagi pengembangan potensi anak • Peningkatan standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan • Meningkatkan pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik
	<i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i> • Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan • Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha	
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i> • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan	• Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinu dengan penekanan promotif dan preventif • Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
	- Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan - Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat - Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	Penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik
	<i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i> - Pembinaan kesehatan lingkungan - Pencegahan dan penanggulangan penyakit - Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat	- Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisectoral, guna pencegahan dan pengendalian penyakit - Penguatan pelayanan Kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP Pemerintah dan FKTP Swasta - Pengembangan tenaga Kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan Kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas
	<i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i> - Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial - Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial - Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial - Pelayanan dan rehabilitasi sosial - Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS	- Meningkatkan cakupan penerima bantuan bagi PPKS - Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS - Meningkatkan pemutakhiran data penerima bantuan - Meningkatkan pemberdayaan melalui KUBE dan UEP bagi PPKS
	<i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i> - Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan - Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan - Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha - Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial - Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan	- Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan pemagangan - Peningkatan akses dan kemudahan pelayanan informasi lowongan kerja bagi pencari kerja melalui sistem informasi berbasis web - Peningkatan perlindungan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha
	<i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i> - Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha - Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai	Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan pemagangan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
	kebutuhan dan potensi sumberdaya	
	Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain	
	Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa - Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak - Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan - Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa - Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa - Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan - Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif	- Peningkatan komitmen Pemda, masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender dan dalam pemenuhan hak-hak anak - Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengeliminasi tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan jejaring kerjasama dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak - Peningkatan kebijakan menuju Kabupaten Layak Anak - Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan - Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Desa dan Perangkat Desa - Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi pembinaan SDM masyarakat desa - Meningkatkan penguatan fasilitasi pengembangan produk unggulan di desa - Meningkatkan penguatan fasilitasi pengembangan produk unggulan di desa - Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi kualitas lingkungan desa - Meningkatkan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i> - Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaan keluarga berencana - Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana - Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi	- Koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan pengendalian kependudukan - Mengoptimalkan penyediaan data kependudukan berbasis NIK - Melakukan pemetaan data kependudukan - Peningkatan kapasitas dan pendayagunaan PKB, PLKB dan Kader dalam penyuluhan dan pembinaan KB - Menyusun dasar hukum kebijakan GDPK untuk pengendalian penduduk - Meningkatkan kapasitas SDM dalam menemu kenali dampak kependudukan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
		• Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam pembangunan kependudukan • Meningkatkan sikap ego program/sektoral dalam pelaksanaan pembinaan ber-KB • Mengoptimalkan data dan pemetaan sasaran dalam melakukan advokasi • Mengoptimalkan pendayagunaan mitra kerja dalam pelayanan KB • Menyediakan data dan pemetaan sasaran kelompok pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera • Meningkatkan strategi, desain program dan inovasi advokasi dan KIE dalam pelaksanaan pembinaan • Menyediakan data sasaran untuk perencanaan sarpras dan dukungan operasional dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran K3 • Mengoptimalkan pendayagunaan organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan peningkatan • Menyediakan pusat informasi dan konseling ketahanan keluarga
	<i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i> • Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan	• Meningkatkan cakupan perekaman penduduk wajib KTP-el, KIA, aktivasi identitas Kependudukan Digital, cakupan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian • Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil yang membahagiakan melalui inovasi • Pemanfaatan data kependudukan
	<i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan • Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda	• Dibentuknya program pembinaan pemuda dalam hal pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan organisasi kepemudaan, program kewirausahaan pemuda, program pembudayaan olahraga sejak dini, program pemusatan Latihan pada sentra olahraga, program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan OPK, program promosi dan festival seni budaya, program pembangunan gedung pertunjukan kesenian kebudayaan, program perencanaan kawasan strategis pariwisata • Dibentuknya rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
	<i>Peningkatan pelayan masyarakat dan prestasi olah raga</i> - Pembinaan dan pelayan masyarakat olah raga - Peningkatan prasarana dan sarana olah raga - Pembinaan manajemen keolahragaan	Dibentuknya program pembinaan pemuda dalam hal pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan organisasi kepemudaan, program kewirausahaan pemuda, program pembudayaan olahraga sejak dini, program pemusatan Latihan pada sentra olahraga, program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan OPK, program promosi dan festival seni budaya, program pembangunan gedung pertunjukan kesenian kebudayaan, program perencanaan kawasan strategis pariwisata
Misi 2	<i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i> - Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi - Pemberian insentif pajak bagi investor - Jaminan kepastian hukum berusaha - Promosi investasi	- Perbaikan iklim penanaman modal sebagai pelayanan yang mudah bagi investor - Menerapkan OSS dan SIPINTER dalam pelayanan sistem online perizinan berusaha dan non perizinan
	<i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i> - Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM - Pembinaan manajemen usaha - Fasilitasi modal usaha - Fasilitasi aksesibilitas pasar - Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi - Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk	- Pembentukan koordinator wilayah pelayanan dana bergulir - Pembentukan jaringan kerjasama, pemasaran dan informasi produk koperasi - Peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola koperasi - Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan intensitas pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi - Penguatan manajemen usaha koperasi melalui pengembangan dan restrukturisasi usaha serta peningkatan kualitas produksi
	<i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	- Peningkatan sarpras penangkapan ikan, produk hasil perikanan, pengolahan produk hasil perikanan dan perikanan budidaya serta pendidikan pelatihan dan bimtek penangkapan ikan bagi kelompok nelayan - Meningkatkan ketersediaan bibit tanaman dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura serta BPP - Melaksanakan penyediaan bibit ternak ruminansia dan unggas - Menyediakan obat-obatan hewan yang bermutu serta sarana kesehatan hewan yang berkualitas

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
		• Peningkatan sistem pengawasan terhadap kelompok usaha perikanan
	<i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	• Peningkatan pelayanan TPI dalam permodalan, meningkatkan kebersihan TPI melalui Gerakan Jumat Bersih, mendorong seluruh nelayan melelangkan hasil tangkapannya ke TPI melalui sosialisasi & penertiban • Peningkatan sistem pengawasan terhadap kelompok usaha perikanan • Meningkatkan pendampingan kepada para petani dalam melaksanakan GAP • Melaksanakan bimbingan teknis pengolahan pakan ternak dengan pemanfaatan sumber bahan baku • Mengembangkan kelompok tani ternak yang handal dalam melakukan manajemen usaha
	<i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i> • Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan • Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar	• Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan lanjutan
	<i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i> • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar	• Peningkatan akses pembiayaan, kemitraan dan promosi dengan pelaku usaha kecil dan menengah serta kualitas produk usaha mikro

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
	<i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata • Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata • Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata • Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata • Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata	• Promosi dan publikasi sosial media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri • Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan lanjutan
	<i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i> • Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan • Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan	•
	<i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i> • Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan • Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan • Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan • Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan • Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan • Perumusan kebijakan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan • Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan	• Mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan • Meningkatkan koordinasi dan kerja sama pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah • Mengembangkan dan memperkuat keterampilan masyarakat dalam hal menyediakan makanan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang • Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan • Peningkatan capaian skor PPH dengan meningkatkan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal • Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi • Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan • Meningkatkan ketersediaan benih unggul melalui pembinaan kepada para penangkar benih • Meningkatkan ketersediaan alat mesin pertanian pra-panen

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
		Meningkatkan sistem agribisnis terintegrasi on-farm sampai dengan off-farm di lokasi pusat kawasan agropolitan
	<i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i> - Pembangunan dan peningkatan pelabuhan - Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang Pelabuhan - Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan	
	<i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i> - Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas - Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera	- Penyediaan lahan, alat berat, dokumen pengelolaan SDA, dokumen perencanaan teknis drainase dan fisik konstruksi - Memperbarui SK Jalan Kabupaten - Pemeliharaan drainase jalan kabupaten
	<i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i> - Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP - Revitalisasi jaringan kereta api - Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan	- Pembangunan sarpras transportasi - Beroperasinya moda transportasi angkutan - Melakukan pengawasan pengendalian lalu lintas
	<i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i> - Pengelolaan bandar udara yang ada - Pengembangan bandar udara perintis di wilayah selatan	
	<i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i> - Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) - Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi	
	<i>Pengelolaan pengendalian banjir</i> - Pengelolaan prasarana pengendalian banjir - Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase	- Penyediaan lahan, alat berat, dokumen pengelolaan SDA, dokumen perencanaan teknis drainase dan fisik konstruksi - Pemeliharaan drainase jalan kabupaten
	<i>Peningkatan pelayanan air bersih</i> Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih	- Menyediakan sarana air bersih bagi masyarakat - Melakukan pelayanan pendistribusian air bersih secara maksimal
	<i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i>	Menyediakan sarana sanitasi bagi masyarakat miskin

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
Misi 3	• Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) • Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional	• Melakukan pelayanan penyedotan air limbah domestik baik niaga maupun non niaga secara maksimal • Melakukan peningkatan jalan lingkungan, sanitasi dan drainase lingkungan
	<i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i> • Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik • Peningkatan pemanfaatan energi alternatif • Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan	
	<i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i> • Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu • Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan	
	<i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i> • Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu • Fasilitasi usaha pengembangan perumahan	• Melakukan penataan pada PSU perumahan • Melakukan pembangunan sarpras pemakaman
	<i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i> • Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman • Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh	• Menyediakan sarana sanitasi bagi masyarakat miskin
	<i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i> • Sinkronisasi, harmonisasi dan pepadu serasian rencana tata ruang wilayah • Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang • Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang	• Pemanfaatan SIG sebagai database permohonan perizinan dan non perizinan • Membangun kawasan prioritas yang perlu ditetapkan RDTR secara berkesinambungan • Optimalisasi sosialisasi penataan ruang secara langsung maupun tidak langsung • Meningkatkan ketegasan dalam tindakan penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Mengoptimalkan koordinasi antar pihak terkait dalam bidang penataan ruang
	<i>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i> • Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I	• Pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang tepat peruntukannya

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
	- Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II - Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III	
	<i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i> - Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya - Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup - Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup - Melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan - Meningkatkan luas RTH - Meningkatkan sarpras dan pengelolaan dan penanganan persampahan - Terkelolanya pengolahan sampah melalui teknologi ramah lingkungan
	<i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i> - Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam - Fasilitasi penanggulangan bencana alam	- Pengembangan kegiatan komunikasi informasi dan edukasi bagi masyarakat di daerah rawan bencana - Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana dan penyelamatan evaluasi mandiri - Peningkatan cakupan layanan pemadam kebakaran melalui penambahan pos damkar di wilayah manajemen kebakaran, peningkatan kapasitas aparatur damkar, dan peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan damkar - Peningkatan peran relawan pemadam kebakaran dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa/kelurahan
Misi 4	<i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i> - Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan - Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur - Kompetensi sesuai bidang keahlian - Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur - Peningkatan kualitas kearsipan daerah	- Peningkatan profesionalisme aparatur - Peningkatan pengembangan karir aparatur melalui talent pool dan rencana suksesi - Peningkatan pelayanan kepegawaian sesuai standar pelayanan - Peningkatan terhadap bobot dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
	<i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i> • Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah • Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	• Peningkatan penyelenggaraan BIMTEK dan Diklat bagi perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan • Optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan • Peningkatan integrasi data perencanaan pembangunan • Membangun sistem perencanaan pembangunan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh stakeholder • Peningkatan pemahaman PD terkait konsep anggaran berbasis kinerja • Pemanfaatan hasil kajian sebagai dasar dalam implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
	<i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i> • Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain • Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan Tinggi	
	<i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik • Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah • Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab/kota dan instansi vertikal	• Meningkatkan kebijakan internal, strategi dan perencanaan tata kelola pemerintah berbasis elektronik • Meningkatkan penyelenggaraan informasi publik oleh Badan Publik melalui Forum PPID • Meningkatkan sarpras persandian • Meningkatkan penyediaan data sektoral
	<i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik	• Peningkatan penatausahaan keuangan • Peningkatan manajemen aset daerah melalui aplikasi yang handal dan terintegrasi • Inventarisasi bidang tanah milik Pemda • Pengoptimalan pengelolaan aset daerah • Peningkatan jaminan pengamanan aset daerah

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kabupaten Tangerang
	Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah	Peningkatan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i> - Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat - Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	
	<i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i> - Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan - Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru	
	<i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i> - Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum - Penegakan dan penataan produk hukum daerah - Penegakan supremasi hukum	
	<i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i> - Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi - Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik	
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i> - Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib - Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- Melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat - Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal melalui pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan - Pembinaan tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dan pemanfaatan modal sosial

5.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang

Target pembangunan yang ditetapkan Kabupaten Serang untuk Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 7
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kabupaten Serang
dalam RKPD 2024

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2024		
	Provinsi Banten ¹⁾	Kabupaten Serang	
		Teknokratik ²⁾	RPJMD ³⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11 - 5,25	4,55 - 4,69	1,78
Tingkat Kemiskinan (%)	5,49	4,51	4,1
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,51	11,91	11,22
Keterangan:	¹⁾ RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026		
	²⁾ Hasil Perhitungan		
	³⁾ RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026		

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, pada Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali di Provinsi Banten sesuai lokus di wilayah Kabupaten Serang yaitu :

Pengembangan Kawasan Strategis :

- Kawasan Industri (KI) Pancapuri

Pengembangan Sektor Unggulan :

- Komoditas unggulan perikanan

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi :

- Pengentasan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang, termasuk desa di wilayah Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang
- Peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri, termasuk desa di wilayah Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 2 :

- Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 3 :

- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 5 :

- Transformasi Digital
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

Pada pendekatan tematik pada RKPD Provinsi Banten 2024 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam RKPD 2024 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Investasi melalui optimalisasi Jalan Tol Serang Panimbang
- Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), Dan Bangga Berwisata Indonesia Di Banten (BBWIB)
- Stabilisasi Inflasi Melalui Ketahanan Pangan Daerah
- Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
- Penanganan Pengangguran melalui Link and Match Pendidikan Vokasi
- Akselerasi Reformasi Birokrasi Berdampak

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan pada RKPDP Provinsi Banten di tahun 2024, maka penanganan di wilayah Kabupaten Serang difokuskan pada:

Infrastruktur jalan dan jembatan

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan
- Rehabilitasi Jembatan sesuai kewenangan Provinsi Banten

Sumber Daya Air

- Penataan Situ Terate

Sosial

- Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem

Sarana Prasarana Umum

- Penyediaan PSU
- Dukungan Jalan Mantap yang berkeselamatan pada ruas jalan Provinsi meliputi Marka Jalan, ZoSS, PJU, rambu, trafficligh dan sebagainya

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

- Pembangunan Landmark dan Pedestrian Padarincang

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPDP Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Serang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang, sebagai berikut:

Tabel 5.8.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
Misi 1	<i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan	• Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan berbasis seni budaya dan tradisi lokal • Penguatan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan seni budaya, kearifan lokal dan nilai budaya tradisi di masyarakat sebagai potensi daerah

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	• Pengembangan pelayanan pendidikan dasar yang merata di seluruh unit pendidikan
	<i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i> • Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan • Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha	• Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i> • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan • Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	• Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
	<i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i> • Pembinaan kesehatan lingkungan • Pencegahan dan penanggulangan penyakit • Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat	• Mengendalikan penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang serta penyehatan lingkungan
	<i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial	• Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
	• Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial • Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial • Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS	
	<i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i> • Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan • Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan • Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha • Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial • Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan	• Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul • Peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja
	<i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i> • Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha • Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya • Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain	• Peningkatan Kerjasama Pengembangan, peng arahan dan fasilitasi penempatan pada wilayah Transmigrasi
	<i>Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa</i> • Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak • Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan • Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa • Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa • Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan • Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif	• Pemberdayaan perempuan di setiap kegiatan pembangunan • Perlindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan • Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i> • Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaan keluarga berencana • Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana • Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi	• Peningkatan kapasitas sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	<i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i> • Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan	• Peningkatan kapasitas sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	<i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan • Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda	• Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan: pemuda yang mandiri dan kreatif
	<i>Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah raga</i> • Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga • Peningkatan prasarana dan sarana olah raga • Pembinaan manajemen keolahragaan	• Meningkatkan sarana prasarana olahraga
	<i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i> • Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi • Pemberian insentif pajak bagi investor • Jaminan kepastian hukum berusaha • Promosi investasi	• Memperbaharui dan mensosialisasikan kebijakan penanaman modal dan perizinan-perizinan serta meningkatkan promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal
Misi 2	<i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk	• Peningkatan Akses pasar UMKM dan koperasi ke daerah-daerah yang potensial • Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi UKM dan Koperasi
	<i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian,	• Pengembangan komoditas unggulan pertanian • Peningkatan produksi perikanan tangkap

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
	perkebunan, kehutanan dan kelautan	
	<i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	• Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil pertanian) • Pengembangan sistem pemasaran produk agro • Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha perikanan (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil perikanan)
	<i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i> • Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan • Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar	• Roadmap pengembangan potensi sektor Industri
	<i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i> • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar	• Pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas perdagangan yang semakin tersebar dan merata
	<i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i>	• Pengembangan Desa Wisata dan Roadmap Pemulihan Destinasi Wisata

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
	- Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata - Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata - Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata - Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata - Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata	
	<i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i> - Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan - Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan	
	<i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i> - Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan - Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan - Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan - Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan - Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan - Perumusan kebijakan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan - Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan	Peningkatan keamanan pangan
	<i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i> - Pembangunan dan peningkatan pelabuhan - Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang Pelabuhan - Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan	
	<i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i> - Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas - Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera	Pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan strategis, sentra produksi dan pemasaran

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
	<i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i> • Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP • Revitalisasi jaringan kereta api • Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan	• Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ • Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan serta ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan umum • Meningkatkan ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan Laut
	<i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i> • Pengelolaan bandar udara yang ada • Pengembangan bandar udara perintis di wilayah selatan	
	<i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i> • Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) • Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi	• Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan dan sarana produksi lainnya di wilayah sentra produksi pertanian
	<i>Pengelolaan pengendalian banjir</i> • Pengelolaan prasarana pengendalian banjir • Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase	• Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan dan sarana produksi lainnya di wilayah sentra produksi pertanian
	<i>Peningkatan pelayanan air bersih</i> • Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih	• Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air bersih untuk mendukung kebutuhan masyarakat
	<i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i> • Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) • Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional	• Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah
	<i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i> • Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik • Peningkatan pemanfaatan energi alternatif • Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan	
	<i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i> • Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu • Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan	• Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu big data • Penyediaan infrastruktur pendukung pelayanan teknologi informatika • Pengembangan aplikasi pendukung pelayanan publik, informasi, promosi potensi

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
		daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya
	<i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i> - Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu - Fasilitasi usaha pengembangan perumahan	- Pembangunan Rumah Layak Huni - Penataan kawasan perumahan dan permukiman - Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan permukiman - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan perumahan dan permukiman
	<i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i> - Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman - Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh	Penataan kawasan kumuh perkotaan
Misi 3	<i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i> - Sinkronisasi, harmonisasi dan pepadu serasian rencana tata ruang wilayah - Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang - Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang	Penataan kawasan guna mendukung harmonisasi dan keberlanjutan wilayah
	<i>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i> - Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I - Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II - Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
	<i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i> - Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya - Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup - Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan di perkotaan - Meningkatkan perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan pemulihan SDA LH

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
Misi 4	<i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i> • Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam • Fasilitasi penanggulangan bencana alam	• Peningkatan kesepahaman mengenai pengurangan risiko bencana ada di semua elemen (urusan)
	<i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i> • Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan • Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur • Kompetensi sesuai bidang keahlian • Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur • Peningkatan kualitas kearsipan daerah	• Peningkatan kualitas SDM, disiplin kerja dan kesejahteraan aparatur
	<i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i> • Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah • Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	• Penguatan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang komprehensif dan integratif, didukung oleh kapasitas perencana yang handal serta data dan informasi yang tepat dan terarah • Optimalisasi kegiatan koordinasi dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
	<i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i> • Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain • Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan Tinggi	• Peningkatan tertib administrasi arsip dan pelayanan publik
	<i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab/kota dan instansi vertikal	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
	<i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah	• Peningkatan pendapatan dan penataan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat • Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	• Penguatan tugas-tugas kewilayahan
	<i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i> • Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan • Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru	
	<i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum • Penegakan dan penataan produk hukum daerah • Penegakan supremasi hukum	• Penguatan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	<i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi • Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik	• Perumusan pengarusutamaan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan demokrasi di setiap tingkatan masyarakat
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i> • Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib • Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	• Penguatan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

5.1.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang

Target pembangunan yang ditetapkan Kota Tangerang untuk Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 8
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kota Tangerang dalam RKP
Tahun 2024

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2024		
	Provinsi Banten ¹⁾	Kota Tangerang	
		Teknokratik ²⁾	RPD ³⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11 - 5,25	4,19 - 4,33	4,58 - 4,74
Tingkat Kemiskinan (%)	5,49	4,80	5,01 - 5,31
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,51	7,07	6,37 - 6,54
Keterangan:	¹⁾ RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026		
	²⁾ Hasil Perhitungan		
	³⁾ RPD Kota Tangerang Tahun 2024 - 2026		

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, pada Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali di Provinsi Banten sesuai lokus di wilayah Kota Tangerang yaitu :

Pengembangan Kawasan Perkotaan :

- 5 (lima) Wilayah Metropolitan WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, WM Denpasar

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 3 :

- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 5 :

- Transformasi Digital
- Pemulihan 4 DAS Kritis (wilayah Banten di DAS Cisadane)
- 18 Waduk Multiguna (antara lain Modernisasi DI Cisadane)
- Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
- Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

Pada pendekatan tematik pada RKPD Provinsi Banten 2024 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam RKPD 2024 adalah sebagai berikut:

- Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), Dan Bangga Berwisata Indonesia Di Banten (BBWIB)
- Stabilisasi Inflasi Melalui Ketahanan Pangan Daerah
- Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
- Penanganan Pengangguran melalui Link and Match Pendidikan Vokasi
- Akselerasi Reformasi Birokrasi Berdampak

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan pada RKPD Provinsi Banten di tahun 2024, maka penanganan di wilayah Kota Tangerang difokuskan pada:

Infrastruktur jalan dan jembatan

- Rehabilitasi Jembatan sesuai kewenangan Provinsi Banten

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SKh

Sosial

- Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem

Sarana Prasarana Umum

- Penyediaan PSU
- Dukungan Jalan Mantap yang berkeselamatan pada ruas jalan Provinsi meliputi Marka Jalan, ZoSS, PJU, rambu, trafficligh dan sebagainya
- DPPT Pembangunan Terminal Tipe B – Ciledug

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

- Penataan Destinasi Situ Gede

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kota Tangerang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang, sebagai berikut:

Tabel 5. 9
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Tangerang
Misi 1	<i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan	• Meningkatkan kualitas sumber daya (fasilitas, peralatan, sanggar, SDM) kebudayaan serta mengembangkan festival budaya dan pagelaran kesenian daerah, taman budaya, museum kota dan kawasan cagar budaya
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	• Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kurikulum, manajemen kelembagaan, sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan, minat, bakat, prestasi peserta didik, serta penguatan pendidikan karakter akhlak mulia, kesusilaan, budaya, kreatif dan inovatif serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan non formal
	<i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i> • Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan • Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha	
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i> • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan	• Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dan pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, produksi pangan (makanan minuman), serta kesadaran

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Tangerang
	• Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	• perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
	<i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i> • Pembinaan kesehatan lingkungan • Pencegahan dan penanggulangan penyakit • Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat	• Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dan pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, produksi pangan (makanan minuman), serta kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
	<i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial • Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial • Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS	• Meningkatkan perlindungan, jaminan dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemberdayaan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial serta memperluas dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat miskin
	<i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i> • Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan • Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan • Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha • Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial • Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan	• Memperluas bursa tenaga kerja dan wirausaha serta mengembangkan kelembagaan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja
	<i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i> • Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha • Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya	• Memperluas bursa tenaga kerja dan wirausaha serta mengembangkan kelembagaan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Tangerang
	Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain	
	Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa - Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak - Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan - Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa - Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa - Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan - Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif	- Meningkatkan kapasitas Kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Meningkatkan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayan masyarakat di kelurahan
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i> - Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaan keluarga berencana - Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana - Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan advokasi dan pendayagunaan PLKB dan kader KB serta memperkuat kesertaan KB dan ketahanan kesejahteraan keluarga
	<i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i> Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan	Mengembangkan dan meningkatkan system online dan mobile dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan
	<i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i> - Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan - Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda	Mengembangkan, meningkatkan dan membina kualitas SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana kepemudaan serta fasilitasi kepramukaan
	<i>Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah raga</i> - Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga - Peningkatan prasarana dan sarana olah raga - Pembinaan manajemen keolahragaan	Mengembangkan dan mengelola sarana, prasarana dan fasilitas olah raga serta meningkatkan pemasyarakatan dan prestasi olahraga
Misi 2	<i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i> Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi	Menyederhanakan system dan mempermudah pelayanan investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Tangerang
	- Pemberian insentif pajak bagi investor - Jaminan kepastian hukum berusaha - Promosi investasi	mengembangkan insentif dan disinsentif investasi
	<i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i> - Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM - Pembinaan manajemen usaha - Fasilitasi modal usaha - Fasilitasi aksesibilitas pasar - Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi - Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk	- Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi - Memberdayakan meningkatkan kualitas produk UMKM serta memperluas akses pelaku UMKM terhadap sumber daya produktif (kapasitas SDM, manajemen, pasar dan pemasaran, permodalan)
	<i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	Memberdayakan meningkatkan kualitas produk pertanian, perikanan dan peternakan serta memperluas akses pelaku pertanian, perikanan dan peternakan terhadap sumber daya produktif (kapasitas SDM, manajemen, pasar dan pemasaran, permodalan)
	<i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> - Pembinaan manajemen usaha - Fasilitasi modal usaha - Fasilitasi aksesibilitas pasar - Fasilitasi kerjasama perdagangan - Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	Memberdayakan meningkatkan kualitas produk pertanian, perikanan dan peternakan serta memperluas akses pelaku pertanian, perikanan dan peternakan terhadap sumber daya produktif (kapasitas SDM, manajemen, pasar dan pemasaran, permodalan)
	<i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i> - Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan - Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor - Fasilitasi aksesibilitas pasar - Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah - Pengembangan dan peningkatan kualitas produk	Memperluas akses pelaku industri kecil menengah (IKM) terhadap sumber daya produktif (kapasitas SDM, manajemen, sarana prasarana produksi, pasar dan pemasaran, permodalan) serta meningkatkan fasilitasi dan pengendalian izin usaha industri

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Tangerang
	industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar	
	<i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i> • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar	• Mengembangkan, meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan pasar tradisional, perluasan akses pasar dan pemasaran bagi pelaku usaha perdagangan, stabilisasi ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan penting, serta standarisasi dan perlindungan konsumen
	<i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata • Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata • Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata • Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata • Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata	• Mengembangkan potensi, destinasi, promosi, sumber daya manusia, fasilitas dan jasa pendukung pariwisata serta ekonomi kreatif
	<i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i> • Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan • Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan	•
	<i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i> • Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan • Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan • Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan • Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan • Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan • Perumusan kebijakan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	• Mengendalikan stabilitas ketersediaan bahan pangan strategis yang berkualitas dan terjangkau serta mengembangkan kerjasama penyediaan bahan pangan strategis

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Tangerang
	Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan	
	<i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i> - Pembangunan dan peningkatan pelabuhan - Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang Pelabuhan - Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan	
	<i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i> - Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas - Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera	Mengembangkan ketersediaan dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar
	<i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i> - Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP - Revitalisasi jaringan kereta api - Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan	Mengembangkan, mengintegrasikan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana transportasi umum serta meningkatkan penerangan jalan, manajemen dan rekayasa lintas, pengendalian dan penertiban angkutan jalan
	<i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i> - Pengelolaan bandar udara yang ada - Pengembangan bandar udara perintis di wilayah selatan	
	<i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i> - Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) - Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi	Mengembangkan ketersediaan, kapasitas dan merehabilitasi sistem jaringan drainase dan sumber daya air
	<i>Pengelolaan pengendalian banjir</i> - Pengelolaan prasarana pengendalian banjir - Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase	
	<i>Peningkatan pelayanan air bersih</i> Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih	Mengembangkan jaringan penyediaan air minum perpipaan
	<i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i> Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal)	- Mengembangkan kapasitas IPAL - Mengembangkan kapasitas TPA dan meningkatkan pengurangan dan pengangkutan sampah

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Tangerang
	Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional	
	<i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i> - Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik - Peningkatan pemanfaatan energi alternatif - Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan	
	<i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i> - Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu - Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan	Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur data center, pelayanan internet/intranet, standarisasi dan integrasi aplikasi system informasi pelayanan publik dan pemerintahan serta meningkatkan diseminasi dan kemitraan komunikasi publik untuk mendukung system pemerintahan berbasis elektronik dan <i>smart city</i>
	<i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i> - Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu - Fasilitasi usaha pengembangan perumahan	Merehabilitasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas prasarana sarana dasar permukiman serta mengembangkan rumah susun layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
	<i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i> - Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman - Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh	Merehabilitasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas prasarana sarana dasar permukiman serta mengembangkan rumah susun layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
	<i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i> - Sinkronisasi, harmonisasi dan pepadu serasian rencana tata ruang wilayah - Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang - Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang	- Mengembangkan ketersediaan ruang terbuka hijau public - Menyusun dan mensosialisasikan rencana tata ruang serta mengendalikan pemanfaatan ruang
Misi 3	<i>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i> - Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I - Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Tangerang
Misi 4	Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III	
	<i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i> - Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya - Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup - Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan penataan dan kapasitas lingkungan hidup serta pemantauan kualitas, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	<i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i> - Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam - Fasilitasi penanggulangan bencana alam	Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana
	<i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i> - Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan - Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur - Kompetensi sesuai bidang keahlian - Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur - Peningkatan kualitas kearsipan daerah	Mengembangkan dan meningkatkan system pengelolaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan SDM aparatur
	<i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i> - Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah - Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah - Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	- Mengembangkan dan meningkatkan system perencanaan pembangunan yang partisipatif, komunikatif, dan berkualitas - Mengembangkan Kelengkapan ketersediaan konten, meningkatkan kapasitas, kualitas SDM dan system pengelolaan serta pelayanan dan publikasi data statistik daerah - Meningkatkan pembinaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan daerah serta kesejahteraan rakyat
	<i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i> - Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain - Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan Tinggi	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Tangerang
	<i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik • Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah • Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab/kota dan instansi vertikal	• Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur data center, pelayanan internet/intranet, standarisasi dan integrasi aplikasi system informasi pelayanan publik dan pemerintahan serta meningkatkan diseminasi dan kemitraan komunikasi publik untuk mendukung system pemerintahan berbasis elektronik dan smart city
	<i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah	• Mengembangkan dan meningkatkan intensifikasi potensi sumber pendapatan, kualitas sistem dan pelayanan pendapatan daerah • Meningkatkan system pengelolaan anggaran dan akuntansi keuangan daerah serta pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat • Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	
	<i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i> • Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan • Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru	
	<i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum • Penegakan dan penataan produk hukum daerah • Penegakan supremasi hukum	
	<i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i>	• Meningkatkan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, politik

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Tangerang
	- Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi - Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik	dalam negeri dan ketahanan bangsa
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i> - Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib - Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban masyarakat

5.1.6 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang Selatan

Target pembangunan yang ditetapkan Kota Tangerang Selatan untuk Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 10
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan dalam RKPD 2024

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2024		
	Provinsi Banten ¹⁾	Kota Tangerang Selatan	
		Teknokratik ²⁾	RPJMD ³⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11 - 5,25	6,77 - 6,91	6,63 - 7,17
Tingkat Kemiskinan (%)	5,49	1,71	1,75
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,51	5,27	7,22
Keterangan :			
¹⁾ RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026			
²⁾ Hasil Perhitungan			
³⁾ RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 - 2026			

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, pada Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali di Provinsi Banten sesuai lokus di wilayah Kota Tangerang Selatan yaitu :

Pengembangan Kawasan Perkotaan :

- 5 (lima) Wilayah Metropolitan WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, WM Denpasar

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 3 :

- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 5 :

- Transformasi Digital
- Pemulihan 4 DAS Kritis (wilayah Banten di DAS Cisadane)
- Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
- Akses Air Minum Perpipa (10 Juta Sambungan Rumah)
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

Pada pendekatan tematik pada RKPD Provinsi Banten 2024 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam RKPD 2024 adalah sebagai berikut:

- Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), Dan Bangga Berwisata Indonesia Di Banten (BBWIB)
- Stabilisasi Inflasi Melalui Ketahanan Pangan Daerah
- Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
- Penanganan Pengangguran melalui Link and Match Pendidikan Vokasi
- Akselerasi Reformasi Birokrasi Berdampak

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan pada RKPD Provinsi Banten di tahun 2024, maka penanganan di wilayah Kota Tangerang Selatan difokuskan pada:

Sosial

- Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem
- Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Balai Latihan Kerja

Sarana Prasarana Umum

- Penyediaan PSU
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
- Dukungan Jalan Mantap yang berkeselamatan pada ruas jalan Provinsi meliputi Marka Jalan, ZoSS, PJU, rambu, trafficlight dan sebagainya

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kota Tangerang Selatan, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

Tabel 5. 11
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang Selatan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
Misi 1	<i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan	• Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	• Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan
	<i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan lptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i>	• Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
	- Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan - Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha	
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i> - Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan - Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan - Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan - Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat - Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan
	<i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i> - Pembinaan kesehatan lingkungan - Pencegahan dan penanggulangan penyakit - Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat	Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan
	<i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i> - Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial - Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial - Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial - Pelayanan dan rehabilitasi sosial - Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS	Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan
	<i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i> - Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan - Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan - Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha	Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
	- Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial - Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan	
	<i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i> - Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha - Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya - Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain	Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa - Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak - Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan - Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa - Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa - Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan - Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif	Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i> - Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaan keluarga berencana - Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana - Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi	Penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i> Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan	Penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i> - Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan - Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda	Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
	<i>Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah raga</i> • Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga • Peningkatan prasarana dan sarana olah raga • Pembinaan manajemen keolahragaan	• Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan
Misi 2	<i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i> • Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi • Pemberian insentif pajak bagi investor • Jaminan kepastian hukum berusaha • Promosi investasi	• Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk	• Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	• Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	• Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i> • Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan	• Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
	• Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar	
	<i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i> • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar	• Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata • Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata • Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata • Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata • Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata	• Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i> • Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan • Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan	• Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i> • Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan • Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan	• Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
	- Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan - Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan - Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan - Perumusan kebijakan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan - Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan	
	<i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i> - Pembangunan dan peningkatan pelabuhan - Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang Pelabuhan - Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan	
	<i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i> - Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas - Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan
	<i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i> - Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP - Revitalisasi jaringan kereta api - Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan	Pengembangan sistem jaringan transportasi publik massal perkotaan
	<i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i> - Pengelolaan bandar udara yang ada - Pengembangan bandar udara perintis di wilayah selatan	
	<i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i> - Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) - Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan
	<i>Pengelolaan pengendalian banjir</i> Pengelolaan prasarana pengendalian banjir	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
	Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase	
	<i>Peningkatan pelayanan air bersih</i> Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan
	<i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i> - Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) - Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan
	<i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i> - Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik - Peningkatan pemanfaatan energi alternatif - Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan	
	<i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i> - Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu - Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan	Penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i> - Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu - Fasilitasi usaha pengembangan perumahan	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan
	<i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i> - Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman - Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan
	<i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i> - Sinkronisasi, harmonisasi dan pepadu serasian rencana tata ruang wilayah - Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang - Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan
	<i>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i>	
Misi 3		

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
Misi 4	• Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I • Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II • Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III	
	<i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i> • Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya • Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup • Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	• Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan
	<i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i> • Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam • Fasilitasi penanggulangan bencana alam	• Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan
	<i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i> • Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan • Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur • Kompetensi sesuai bidang keahlian • Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur • Peningkatan kualitas kearsipan daerah	• Penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i> • Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah • Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	• Penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i> • Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain • Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia	• Penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan		
	usaha, LSM, Ormas, Perguruan Tinggi			
	<i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah	• Penguatan pemerintahan dan pelayanan publik	tata	kelola kualitas
	<i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab/kota dan instansi vertikal	• Penguatan pemerintahan dan pelayanan publik	tata	kelola kualitas
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat • Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	• Penguatan pemerintahan dan pelayanan publik	tata	kelola kualitas
	<i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i> • Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan • Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru	• Penguatan pemerintahan dan pelayanan publik	tata	kelola kualitas
	<i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum • Penegakan dan penataan produk hukum daerah • Penegakan supremasi hukum	• Penguatan pemerintahan dan pelayanan publik	tata	kelola kualitas

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
	<i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi • Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik	• Penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i> • Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib • Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	• Penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

5.1.7 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Serang

Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten sehingga arah kebijakan pembangunan di Kota Serang dapat mencerminkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten (Kota Serang sebagai etalase Provinsi Banten).

Target pembangunan yang ditetapkan Kota Serang untuk Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 12
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kota Serang dalam RKPD 2024

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2024		
	Provinsi Banten ¹⁾	Kota Serang	
		Teknokratik ²⁾	RPD ³⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11 - 5,25	5,83 - 5,97	5,72
Tingkat Kemiskinan (%)	5,49	5,60	5,72
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,51	8,04	7,95
Keterangan:	¹⁾ RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026		
	²⁾ Hasil Perhitungan		
	³⁾ RPD Kota Serang Tahun 2024 - 2026		

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, pada Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali di Provinsi Banten sesuai lokus di wilayah Kota Serang yaitu :
Pengembangan Kawasan Perkotaan :

- Pembangunan 3 kota besar (Serang, Surakarta, dan Malang)

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 3 :

- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 5 :

- Transformasi Digital
- Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

Usulan Daerah Provinsi Banten yang prospektif masuk dalam RKP 2024

- Pembangunan IPLT Kota Serang

Pada pendekatan tematik pada RKPD Provinsi Banten 2024 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam RKPD 2024 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Investasi melalui optimalisasi Jalan Tol Serang Panimbang
- Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), Dan Bangga Berwisata Indonesia Di Banten (BBWIB)
- Stabilisasi Inflasi Melalui Ketahanan Pangan Daerah
- Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
- Penanganan Pengangguran melalui Link and Match Pendidikan Vokasi
- Akselerasi Reformasi Birokrasi Berdampak

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan pada RKPD Provinsi Banten di tahun 2024, maka penanganan di wilayah Kota Serang difokuskan pada:

Infrastruktur Kesehatan

- Pembangunan RSJKO
- Pengembangan RSUD Banten

Infrastruktur jalan dan jembatan

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan
- Rehabilitasi Jembatan sesuai kewenangan Provinsi Banten
- DPPT Pengadaan Lahan Fly Over Sudirman Kota Serang

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA

Sosial

- Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem

Sarana Prasarana Umum

- Penyediaan PSU
- Dukungan Jalan Mantap yang berkeselamatan pada ruas jalan Provinsi meliputi Marka Jalan, ZoSS, PJU, rambu, trafficligh dan sebagainya

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kota Serang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kota Serang, sebagai berikut:

Tabel 5. 13
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Serang

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Serang
Misi 1	<i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan	• Meningkatnya pengelolaan pelestarian budaya
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan	• Pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Serang
	• Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	
	<i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i> • Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan • Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha	
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i> • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan • Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	•
	<i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i> • Pembinaan kesehatan lingkungan • Pencegahan dan penanggulangan penyakit • Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat	• Pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat dan penanganan stunting
	<i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial • Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial • Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS	• Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat • Terjaminnya rehabilitasi sosial dasar PPKS, termasuk peningkatan cakupan jaminan pelayanan pendidikan dan kesehatan
	<i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i> • Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan • Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan • Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha • Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	• Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja • Dorongan implementasi upah tenaga kerja di atas Upah Minimum Regional (UMR)

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Serang
	Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan	
	<i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i> - Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha - Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya - Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain	
	Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa - Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak - Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan - Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa - Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa - Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan - Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif	Peningkatan kompetensi angkatan kerja perempuan
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i> - Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaan keluarga berencana - Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana - Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi	
	<i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i> Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan	
	<i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i> - Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan - Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda	
	<i>Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah raga</i> - Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga - Peningkatan prasarana dan sarana olah raga - Pembinaan manajemen keolahragaan	
	<i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i> - Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi - Pemberian insentif pajak bagi investor - Jaminan kepastian hukum berusaha	Peningkatan penanaman modal guna mengembangkan sektor industri padat modal
Misi 2		

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Serang
	Promosi investasi	
	<i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i> - Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM - Pembinaan manajemen usaha - Fasilitasi modal usaha - Fasilitasi aksesibilitas pasar - Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi - Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk	Dukungan pemerintah dalam pengembangan kewirausahaan daerah
	<i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	Peningkatan produktivitas sektor pertanian
	<i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> - Pembinaan manajemen usaha - Fasilitasi modal usaha - Fasilitasi aksesibilitas pasar - Fasilitasi kerjasama perdagangan - Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	
	<i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i> - Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan - Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor - Fasilitasi aksesibilitas pasar - Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah - Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar	Peningkatan kompetensi industri mikro kecil
	<i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i> - Fasilitasi kerjasama perdagangan - Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) - Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar	- Peningkatan komoditas sektor perdagangan berskala ekspor - Optimalisasi sektor ekonomi perdagangan guna penguatan stabilisasi harga
	<i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i>	Optimalisasi potensi wisata unggulan Serang

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Serang
	- Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata - Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata - Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata - Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata - Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata	
	<i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i> - Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan - Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan	
	<i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i> - Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan - Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan - Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan - Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan - Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan - Perumusan kebijakan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan - Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan dan kecukupan pangan masyarakat
	<i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i> - Pembangunan dan peningkatan pelabuhan - Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang Pelabuhan - Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan	
	<i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i> - Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas - Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera	
	<i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i> - Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP - Revitalisasi jaringan kereta api - Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan	Optimalisasi sarana dan prasarana perhubungan
	<i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i> Pengelolaan bandar udara yang ada	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Serang
	Pengembangan bandar udara perintis di wilayah selatan	
	<i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i>	
	- Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) - Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi	
	<i>Pengelolaan pengendalian banjir</i>	
	- Pengelolaan prasarana pengendalian banjir - Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase	
	<i>Peningkatan pelayanan air bersih</i>	
	Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih	
	<i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i>	
	- Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) - Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional	
	<i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i>	
Misi 3	- Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik - Peningkatan pemanfaatan energi alternatif - Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan	
	<i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i>	
	- Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu - Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan	- Peningkatan akuntabilitas dan pengawasan penggunaan keuangan daerah berbasis IT - Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT
	<i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i>	
	- Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu - Fasilitasi usaha pengembangan perumahan	Peningkatan kualitas kawasan permukiman dan perumahan layak huni
	<i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i>	
	- Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman - Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh	
	<i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i>	
	- Sinkronisasi, harmonisasi dan pepadu serasian rencana tata ruang wilayah - Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang - Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang	
	<i>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i>	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Serang
Misi 4	- Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I - Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II - Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III	
	<i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i> - Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya - Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup - Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Penguatan perizinan dan pengawasan aktivitas pembangunan yang berpotensi degradasi kualitas lingkungan hidup
	<i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i> - Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam - Fasilitasi penanggulangan bencana alam	
	<i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i> - Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan - Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur - Kompetensi sesuai bidang keahlian - Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur - Peningkatan kualitas kearsipan daerah	
	<i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i> - Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah - Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah - Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Peningkatan implementasi perencanaan pembangunan daerah, khususnya monitoring dan evaluasi setiap tahapan pembangunan
	<i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i> - Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain - Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan Tinggi	
	<i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i> - Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik - Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik - Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik - Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPD Kota Serang
	Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab/kota dan instansi vertikal	
	<i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i> - Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah - Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik - Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah	Digitalisasi tata Kelola keuangan daerah
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i> - Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat - Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	
	<i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i> - Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan - Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru	
	<i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i> - Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum - Penegakan dan penataan produk hukum daerah - Penegakan supremasi hukum	
	<i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i> - Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi - Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik	
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i> - Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib - Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kondusivitas keamanan daerah

5.1.8
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cilegon

Target pembangunan yang ditetapkan Kota Cilegon untuk Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 14
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kota Cilegon
dalam RKPD 2024

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2024		
	Provinsi Banten ¹⁾	Kota Cilegon	
		Teknokratik ²⁾	RPJMD ³⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11 - 5,25	5,01 - 5,15	5,37
Tingkat Kemiskinan (%)	5,49	3,44	3,18
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,51	10,08	9,81
Keterangan:	¹⁾ RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026		
	²⁾ Hasil Perhitungan		
	³⁾ RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026		

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, pada Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali di Provinsi Banten sesuai lokus di wilayah Kota Cilegon yaitu :

Pengembangan Kawasan Strategis :

- Kawasan Industri (KI) Pancapuri

Pengembangan Kawasan Perkotaan :

- Pembangunan 11 kota sedang (Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, Kediri, Batu, Pasuruan, dan Probolinggo)

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 1 :

- Industri 4.0 pada subsektor - subsektor industri prioritas

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 3 :

- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Major Project di wilayah Provinsi Banten yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 5 :

- Transformasi Digital
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

Usulan Daerah Provinsi Banten yang prospektif masuk dalam RKP 2024

- Pembangunan Pasar Merak
- Pembangunan Rest Area KM 97 (Tol Tangerang-Merak) oleh BUJT

Pada pendekatan tematik pada RKPD Provinsi Banten 2024 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam RKPD 2024 adalah sebagai berikut:

- Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), Dan Bangga Berwisata Indonesia Di Banten (BBWIB)
- Stabilisasi Inflasi Melalui Ketahanan Pangan Daerah
- Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
- Penanganan Pengangguran melalui Link and Match Pendidikan Vokasi

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan pada RKPD Provinsi Banten di tahun 2024, maka penanganan di wilayah Cilegon difokuskan pada:

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Kimia

Sosial

- Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem

Sarana Prasarana Umum

- Penyediaan PSU

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kota Cilegon, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon, sebagai berikut:

Tabel 5. 15
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cilegon

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
Misi 1	<i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan	• Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota • Pengembangan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota • Peningkatan fasilitasi program lembaga- lembaga keagamaan dan penggerak kegiatan keagamaan di tingkat wilayah
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	• Peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah
	<i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i> • Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan • Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha	• Peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah serta peningkatan akreditasi sekolah
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i> • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan • Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	• Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal • Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal • Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan, perluasan cakupan dan kualitas pengawasan obat dan pangan beresiko
	<i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i>	• Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
	- Pembinaan kesehatan lingkungan - Pencegahan dan penanggulangan penyakit - Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat	- Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal - Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan, perluasan cakupan dan kualitas pengawasan obat dan pangan beresiko
	<i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i> - Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial - Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial - Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial - Pelayanan dan rehabilitasi sosial - Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS	Rehabilitasi sosial dasar PMKS dengan prioritas pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti
	<i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i> - Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan - Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan - Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha - Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial - Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan	- Peningkatan pelayanan informasi ketenagakerjaan - Peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi serta fasilitasi pemagangan pada perusahaan - Pembinaan lembaga pelatihan kerja
	<i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i> - Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha - Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya - Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain	
	Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak	- Peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan - Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui program-program di bidang ekonomi dan sosial, dalam upaya

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
	- Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan - Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa - Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa - Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan - Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif	- mendukung pencapaian sasaran program pembangunan - Peningkatan peran kelembagaan perempuan dalam pemberdayaan perempuan - Peningkatan perlindungan perempuan melalui pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia pelayanan perlindungan perempuan - Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan terhadap anak korban kekerasan dan pemenuhan hak anak - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia pelayanan perlindungan anak
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i> - Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaan keluarga berencana - Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana - Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi	- Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana - Peningkatan kualitas keluarga melalui peningkatan peran serta ormas dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta usaha lainnya melalui penguatan kebijakan daerah
	<i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i> Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan	- Peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil - Peningkatan edukasi masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan - Peningkatan penerapan regulasi tentang sanksi/insentif kepemilikan dokumen kependudukan
	<i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i> - Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan - Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda	- Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor - Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan - Peningkatan pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader
	<i>Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah raga</i> - Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga - Peningkatan prasarana dan sarana olah raga	Peningkatan kualitas pembinaan dan penghargaan atlet olahraga prestasi, penyelenggaraan event olahraga prestasi, serta pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan organisasi olahraga prestasi

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
	Pembinaan manajemen keolahragaan	
Misi 2	<i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i> - Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi - Pemberian insentif pajak bagi investor - Jaminan kepastian hukum berusaha - Promosi investasi	- Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengelolaan data dan informasi secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal - Pemberian insentif/fasilitasi kemudahan berusaha penanaman modal - Peningkatan investasi daerah dengan prioritas pada sektor pengelolaan limbah industri, perdagangan dan keuangan
	<i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i> - Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM - Pembinaan manajemen usaha - Fasilitasi modal usaha - Fasilitasi aksesibilitas pasar - Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi - Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk	- Peningkatan fasilitasi usaha pelaku usaha mikro kecil meliputi konsultasi bisnis, pendampingan atau inkubasi usaha, promosi, fasilitasi akses pembiayaan, pelatihan bisnis, jaringan kerjasama usaha serta pelayanan informasi usaha - Peningkatan kemitraan UMK dengan usaha retail modern serta pengembangan kampung UMK
	<i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	- Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya - Peningkatan nilai tambah produk perikanan - Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian - Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner - Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
	<i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> - Pembinaan manajemen usaha - Fasilitasi modal usaha - Fasilitasi aksesibilitas pasar - Fasilitasi kerjasama perdagangan - Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	- Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya - Peningkatan nilai tambah produk perikanan - Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian - Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner - Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
	<i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i>	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK)

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
	- Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan - Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor - Fasilitasi aksesibilitas pasar - Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah - Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar	- Peningkatan pengendalian dan evaluasi kepatuhan industri dalam penyampaian data ke sistem informasi industri nasional - Peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan prioritas pada pemutakhiran data
	<i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i> - Fasilitasi kerjasama perdagangan - Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) - Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar	- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) - Peningkatan pengendalian dan evaluasi kepatuhan industri dalam penyampaian data ke sistem informasi industri nasional - Peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan prioritas pada pemutakhiran data
	<i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i> - Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata - Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata - Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata - Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata - Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata	- Peningkatan penyelenggaraan event-event kreatif dengan prioritas pada penyelenggaraan festival seni budaya dan fasilitasi pelaku seni budaya - Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
	<i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i> - Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan - Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan	Peningkatan investasi daerah dengan prioritas pada sektor pengelolaan limbah industri, perdagangan dan keuangan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
	<i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i> • Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan • Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan • Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan • Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan • Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan • Perumusan kebijakan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan • Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan	• Peningkatan diversifikasi pangan • Peningkatan pengawasan keamanan pangan
	<i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i> • Pembangunan dan peningkatan pelabuhan • Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang Pelabuhan • Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan	
	<i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i> • Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas • Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera	• Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dengan prioritas pada pembangunan JLU, peningkatan jalan penghubung tingkat kecamatan dan kelurahan, jalan akses ke lokasi wisata, KPT serta jalur evakuasi dan mitigasi bencana
	<i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i> • Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP • Revitalisasi jaringan kereta api • Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan	• Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung perhubungan (perlengkapan jalan, halte, pju dsb nya) serta melakukan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta dalam pengelolaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)
	<i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i> • Pengelolaan bandar udara yang ada • Pengembangan bandar udara perintis di wilayah selatan	
	<i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i> • Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ)	• Pembangunan dan peningkatan sistem drainase perkotaan dan sungai

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
	Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi	
	<i>Pengelolaan pengendalian banjir</i> - Pengelolaan prasarana pengendalian banjir - Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase	Pembangunan dan peningkatan sistem drainase perkotaan dan sungai
	<i>Peningkatan pelayanan air bersih</i> Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih	Pengelolaan dan pengembangan SPAM melalui jaringan perpipaan
	<i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i> - Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) - Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional	- Peningkatan pengelolaan dan pengurangan persampahan - Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
	<i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i> - Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik - Peningkatan pemanfaatan energi alternatif - Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan	
	<i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i> - Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu - Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan	Integrasi sistem informasi pelayanan pemerintahan, integrasi pelayanan aduan, peningkatan pelayanan jaringan SPBE, peningkatan pelayanan pusat data
	<i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i> - Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu - Fasilitasi usaha pengembangan perumahan	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penyediaan PSU
	<i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i> - Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman - Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penyediaan PSU
	<i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i> - Sinkronisasi, harmonisasi dan pepadu serasian rencana tata ruang wilayah - Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang - Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang	- Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang dengan fokus pada penyusunan RRTR serta koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang - Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang dengan prioritas pada penyediaan ruang terbuka publik yang representatif
Misi 3		

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang	dan ramah difabel serta penyediaan fasilitas hobi
	<i>Pengembangan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i> - Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I - Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II - Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III	
	<i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i> - Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya - Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup - Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	- Penetapan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta penyediaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) - Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
	<i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i> - Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam - Fasilitasi penanggulangan bencana alam	- Optimalisasi pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana - Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana, penyediaan jalur evakuasi dan mitigasi bencana, pemasangan rambu dan sistem peringatan dini serta penyediaan tempat evakuasi bencana sementara dengan fasilitas pendukungnya
	<i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i> - Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan - Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur - Kompetensi sesuai bidang keahlian - Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur - Peningkatan kualitas kearsipan daerah	Peningkatan Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan pegawai, promosi dan mutasi berdasarkan prestasi dan kompetensi (hasil assessment), integrasi sistem informasi kepegawaian, pemberian TPP berdasarkan kinerja
Misi 4	<i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i> - Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah - Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah - Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian,	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan kualitas pengendalian pembangunan, serta pembangunan satu data pembangunan daerah

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
	pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	
	<i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i> • Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain • Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan Tinggi	• Mendorong percepatan kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan Pelabuhan Warnasari melalui pendekatan politis, dukungan regulasi dan perizinan serta peningkatan tata kelola manajemen • Peningkatan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta dalam optimalisasi pemanfaatan aset daerah • Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung perhubungan (perlengkapan jalan, halte, pju dsb nya) serta melakukan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta dalam pengelolaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)
	<i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik <i>Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab/kota dan instansi vertikal</i>	• Penyelenggaraan pelayanan publik satu pintu yang ditunjang oleh penguatan regulasi, tata kelola, sarana prasarana pelayanan • Pengelolaan pengaduan secara terpadu, tindak lanjut hasil penilaian kepuasan masyarakat secara menyeluruh serta mendorong peningkatan inovasi pelayanan • Peningkatan inovasi pelayanan publik di tingkat kewilayahan, pengelolaan pengaduan secara terpadu, serta tindak lanjut hasil penilaian kepuasan masyarakat secara menyeluruh
	<i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah	• Peningkatan pengelolaan sumber daya manusia, aset, keuangan, perencanaan, informasi dan kearsipan di tingkat perangkat daerah • Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah • Peningkatan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta dalam optimalisasi pemanfaatan aset daerah
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
	Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	
	<i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i> - Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan - Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru	
	<i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i> - Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum - Penegakan dan penataan produk hukum daerah - Penegakan supremasi hukum	- Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban daerah - Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan
	<i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i> - Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi - Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik	Perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemilukada serta situasi politik
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i> - Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib - Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban daerah - Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1 Rencana Kerja

Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten yang telah dibahas pada Bab IV, dengan merujuk pada hasil evaluasi pembangunan Tahun 2022, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2024 serta pagu indikatifnya. Rencana Kerja dan Pembangunan Tahun 2024 akan dilakukan beberapa proses dan tahapan Perencanaan Pembangunan. Tahapan Perencanaan Pembangunan diantaranya Forum Konsultasi Publik, Forum Renja Perangkat Daerah, Rapat Koordinasi Bidang dan Musrenbang, tahapan ini merupakan akumulasi dari tahapan perencanaan, melalui pendekatan partisipatif, teknokratis, politis, *top down* dan *bottom up*. Pada beberapa pelaksanaan melibatkan pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Banten. Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Daerah.

6.2 Pendanaan Daerah

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, serta sumber pendanaan lainnya.

6.2.1 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Sumber Dana APBN Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk memastikan dukungan masing-

masing dalam pencapaian target pembangunan nasional, melalui koordinasi teknis pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah, sebagaimana amanat Pasal 258 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Koordinasi teknis merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi untuk mencapai target pembangunan nasional yang hanya bisa dicapai jika dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah ini dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Pemerintah Provinsi Banten menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBN dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah. Rencana kegiatan tersebut akan diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibahas melalui Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (RAKORTEKRENBANG), Rapat Koordinasi Gubernur (RAKORGUB) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS).

6.2.2 Rencana Program Kegiatan Pembangunan Sumber Dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Tingginya potensi ekonomi daerah disertai adanya pengembangan kawasan strategis di Provinsi Banten tentunya dapat meningkatkan target kinerja perekonomian terutama di sektor infrastruktur dengan banyaknya proyek pembangunan berskala besar dengan besarnya anggaran yang dibelanjakan. Dampak positif dari pembangunan tersebut haruslah bersifat effect multiplier (efek pengganda).

Bentuk pelibatan dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Program Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSKBL / Corporate Social Responsibility (CSR). Sejauh ini, sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema tersebut hanya belum dapat diklaim mengingat belum tertuang di dalam RPJMD. Namun demikian,

sinergi antara kegiatan TJSKBL dengan program pembangunan dan kesesuaian dengan kebutuhan riil di masyarakat perlu dioptimalisasi baik dari sisi korporate maupun Pemerintah Provinsi Banten di dalam pengelolaannya.

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana TJSKBL Perusahaan meliputi :

- a. Sosial, yang di fokuskan pada pelayanan dan rehabilitasi serta pemberdayaan sosial;
- b. Pendidikan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan sarana dan prasarana, beasiswa, dan pelatihan kemitraan dengan perusahaan;
- c. Kebudayaan, yang difokuskan pada perkembangan seni dan budaya serta pariwisata;
- d. Kesehatan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- e. Keagamaan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah;
- f. Pemberdayaan Masyarakat, yang difokuskan pemberdayaan UMKM/IKM;
- g. Infrastruktur, yang difokuskan pada pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan jembatan gantung, pembangunan jalan, sarana dan prasarana sanitasi serta air bersih;
- h. Lingkungan, yang difokuskan pada bantuan bibit pohon, pembangunan tempat pembuangan sampah.

6.2.3 Rencana Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD Provinsi Banten Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan sumber dana APBD Provinsi Banten Tahun 2024 ditujukan untuk melaksanakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka Pemenuhan standar pelayanan minimal, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi Penunjang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2024

untuk mendukung terwujudnya sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan prioritas nasional. Rencana pendanaan indikatif dalam rangka pelaksanaan Program merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 ke dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2024. Pendanaan Program Kegiatan dalam rangka pencapaian target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pagu Indikatif pada masing masing Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan dan program Tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 6. 1
Pagu Indikatif berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	PAGU INDIKATIF
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.919.282.452.500
2	Dinas Kesehatan	1.226.000.143.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	938.833.509.389
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	325.066.304.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	44.525.156.900
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.974.789.000
7	Dinas Sosial	100.217.407.200
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	97.078.976.200
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	31.713.701.000
10	Dinas Ketahanan Pangan	29.661.899.000
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58.855.953.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28.222.357.000
13	Dinas Perhubungan	68.565.279.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	70.953.042.500
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26.478.205.000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.604.407.000
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	92.225.275.000
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29.474.858.000
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	70.109.243.000
20	Dinas Pariwisata	33.682.836.200
21	Dinas Pertanian	96.266.256.000
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	48.015.667.000
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	54.187.052.000
24	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	21.123.000.000
25	Biro Hukum	3.683.723.000
26	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	3.523.564.000
27	Biro Umum dan Perlengkapan	215.562.783.400
28	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4.573.112.200
29	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	5.341.337.000
30	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	13.364.502.000
31	Sekretariat DPRD	364.786.516.520
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	62.794.498.000
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.282.665.709.344
34	Badan Pendapatan Daerah	325.374.217.000
35	Badan Kepegawaian Daerah	63.173.991.000
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.000.649.600

NO	URAIAN	PAGU INDIKATIF
37	Badan Penghubung	10.990.139.300
38	Inspektorat	71.800.870.000
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	665.446.180.786
JUMLAH		11.611.199.562.039

Sumber: Bappeda Provinsi Banten, 2023.

Perangkat Daerah melaksanakan Bidang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pagu indikatif pada Perangkat Daerah didalamnya terdapat beberapa Belanja yang cukup besar diantaranya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, Belanja Tidak Terduga, dan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat belanja dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, selain itu alokasi belanja wajib mengikat dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.

Bidang Urusan Pemerintah Daerah dijabarkan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2024 sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2020 dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat disajikan pada tabel sebagaimana terlampir (Buku III).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Banten Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah direncanakan. Berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi

daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

7.1 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung Perangkat Daerah, merupakan target RPD Provinsi Banten tahun 2023 – 2026, target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Banten

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	KONDISI AKHIR RKPD TAHUN 2026
1	2	3	4	5
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	71	81
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	18	20
3	Indeks Williamson	Nilai	0,62	0,618
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,33	5,27-5,41
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,02	74,1
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,77	8,2
7	Indeks Gini	Nilai	0,349	0,339
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,98	5,37
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,54	76,04
10	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,54	70,83
11	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	23,00	22,00
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	93,35	93,91
13	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,93	14,3
14	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	9,20	9,40
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	56,23	58,63
16	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Nilai	50,17	51,67
17	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	63,46	71,06
18	Proporsi Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Sosial	Persen	7,75	7,79
19	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,675	0,695
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	63,04	63,14
21	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	145,31	140,02
22	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang disesuaikan	Ribu Rupiah	12.303	12.573
23	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Level	Tinggi	Sangat Tinggi
24	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	4,92	6,82
25	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	4,48	4,66
26	LPE Sektor Industri	Persen	5,06	5,69
27	LPE Sektor Perdagangan	Persen	3,04	4,24
28	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan	Persen	0,80	1,04
29	Indeks Persepsi Anti-Korupsi (IPAK)	Nilai	2-3	2-3
30	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	3,49	3,53
31	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	Nilai	73,16	80
32	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	84,30	87,60

33	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten	Level	Cukup Tangguh	Tangguh

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

7.2 Indikator Kinerja Kunci

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Provinsi Banten

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	KONDISI AKHIR RKPD TAHUN 2026
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,02	74,1
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,98	5,37
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,33	5,27 - 5,41
4	Indeks Gini	Nilai	0,375	0,339
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,77	8,2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
BIDANG PENDIDIKAN				
6	Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	100	100
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	72,54	74
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	64	66
9	Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	12,2	10,7
BIDANG KESEHATAN				
10	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	50	70
11	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	92,31	100
12	Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	80	78
13	Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	4,6	4,4
14	Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100	100
BIDANG KEBUDAYAAN				
15	Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	3,25	3,5
16	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	5	5
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
17	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	94,48	100
18	Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	60,85	100
19	Luas Permukiman Kumuh	Ha	182,51	0

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	KONDISI AKHIR RKPD TAHUN 2026
1	2	3	4	5
	BIDANG SOSIAL			
20	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	5,42	5,51
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
21	Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	68,54	100
22	Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	6,1	100
23	Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	6,47	10,1
24	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	43	75
25	Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	63,85	69,67
26	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	46,09	53,21
27	Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	96	100
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
28	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,57	0,61
29	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100	100
30	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Persen	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
31	a. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	74,22	74,3
	b. b. Indeks Kualitas Air (IKA)		54,46	54,5
	c. c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		80,2	80,4
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
32	Angka Kelahiran Tota TFR (<i>Total Fertility Rate</i>) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	2,09	2,17
	BIDANG PENANAMAN MODAL			
33	Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliyun Rupiah	62	65
34	Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	86,47	86,97
	BIDANG KEARSIPAN			
35	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	BB	A
	BIDANG PERSANDIAN			
36	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	450	583
	BIDANG PANGAN			
37	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	71,23	72,23
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
38	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	91,9	93,05
39	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,35	3,55
	BIDANG TENAGA KERJA			
40	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	71,85	76,04
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
41	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0,53	0,58
42	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	53	55
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
43	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	70,76	71,76
44	Indek Perlindungan Anak	Nilai	76,02	79,31
	BIDANG PERPUSTAKAAN			
45	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	14	16
46	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	69,3	75,3
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
47	Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	100	100
	BIDANG STATISTIK			
48	Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	100	100
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
49	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	25	25

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	KONDISI AKHIR RKPD TAHUN 2026
1	2	3	4	5
50	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klaster	Persen	5	5
	BIDANG PERHUBUNGAN			
51	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	20	19,1
52	Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,73	0,75
53	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	83	85
	BIDANG PERTANAHAN			
54	Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100	100
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
55	Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	9,45	0
56	Persentas Desa Kategori Maju	Persen	14,3	15,91
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
57	Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	70,01	96,02
58	Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	15	40
59	Rasio Elektrifikasi	Persen	98,56	99
	BIDANG KEHUTANAN			
60	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	35,2	35,4
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
61	NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	POIN	104	108
62	Tingkat Produksi Sektor Perikanan	Ton	246.654	246.942
	BIDANG PARIWISATA			
63	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	21.063.968	23.223.025
	BIDANG PERDAGANGAN			
64	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,53	13,64
	BIDANG PERINDUSTRIAN			
65	Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	6,44	6,46
	BIDANG PERTANIAN			
66	Produksi Peternakan	Ton	237.255	261.855
67	Produksi Hortikultura	Ton	25.213	28.508
68	Produksi Tanaman Pangan	Ton	2154192	2.374.997
69	Produksi Perkebunan	Ton	52.146	54.835
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH			
70	Indeks Kelembagaan	Nilai	41 - 60	41 - 60
71	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	71	81
72	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	86,55	100
73	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	82,87	85
74	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	11,17	12
75	Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100	100
76	Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100	100
77	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	100
78	Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	100
79	Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100	100
80	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	4,29	4,39
	SEKRETARIAT DPRD			
81	Tingkat Dukungan dan Fasilitasi DPRD	Persen	100	100
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	INSPEKTORAT DAERAH			
82	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1	1
83	Maturitas SPIP	Nilai	3,24	3,44

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	KONDISI AKHIR RKPD TAHUN 2026
1	2	3	4	5
84	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	14,99	17
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
KEUANGAN				
85	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
86	Kemandirian Keuangan	Persen	64,84	65,44
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
87	Indeks Inovasi Daerah	Level	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
KEPEGAWAIAN				
88	Indeks Merit Sistem	Nilai	332,5	357
89	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	27,98	35
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
90	Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	Persen	11,23	13,23
PERENCANAAN				
91	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran	Kategori/ Nilai	45	51
PENGHUBUNG				
92	Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	4	4
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
93	Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	78,96	81,05
94	Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	100	100
NON URUSAN				
95	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80	70-80

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Banten sebagai wujud pelaksanaan Tahun Kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 Provinsi Banten, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Banten. Dokumen ini sebagai instrumen dalam mengejawantahkan muatan-muatan yang terkandung pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, selain itu untuk dapat menjamin konsistensi dan menjaga kesinambungan perencanaan yang termuat dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 telah dipadukan juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, penelaahan terhadap prioritas RPJPD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan program strategis nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, maka dalam rangka mencapai target kinerja pada Tahap ke-5 RPJPD sebagai tahun kedua pelaksanaan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, mengusung tema pembangunan Tahun 2024 berupa “Pemantapan Daya Saing Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi sebagai Kerangka Tahap Modernisasi”.

Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2024 diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing SDM, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dan demokrasi daerah. Prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas untuk Tahun 2024 dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan *money follow program* yang dibuat dengan lebih

implementatif melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 ini menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah dalam perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada. Sementara itu dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah provinsi dan antar daerah kabupaten/kota, rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten agar dapat menyelaraskan dengan sasaran, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan provinsi pada Tahun 2024.

Akhir kata, implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan pelaksanaan arah kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen ini agar dapat mencapai Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR